



LAPORAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA TAHUN 2024 BAGI PARTAI POLITIK ANGKATAN II

BOGOR, 30 SEPTEMBER S.D. 3 OKTOBER 2024

**PUSAT PENDIDIKAN
PANCASILA DAN KONSTITUSI**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Partai Politik Angkatan II ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Tujuan pelaksanaan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para tim hukum Partai Politik mengenai konstitusi dan hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Kegiatan ini dibuka oleh YM Hakim Konstitusi, serta dihadiri oleh perwakilan pimpinan Partai Politik, Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, serta seluruh peserta kegiatan.

Selain hal yang disebutkan di atas, keluaran (*output*) yang diharapkan adalah para peserta kegiatan memahami hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Akhir kata, demikian laporan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Partai Politik Angkatan II ini kami susun sebagai bentuk akuntabilitas, transparansi, dan integritas kami terhadap penggunaan keuangan negara dalam kegiatan ini. Karena kegiatan ini dibiayai sepenuhnya oleh APBN yang notabene uang rakyat sehingga laporan ini adalah bentuk pertanggungjawaban kami kepada rakyat dan negara. Selain itu sebagai bahan evaluasi dan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan serupa. Semoga laporan ini juga membawa manfaat bagi para pemangku kepentingan Pusdik Pancasila dan Konstitusi pada khususnya dan Mahkamah Konstitusi pada umumnya.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iii
A. PENDAHULUAN	1
A.1. Umum.....	1
A.2. Tujuan.....	4
B. PELAKSANAAN KEGIATAN	5
B.1. Nama Kegiatan.....	5
B.2. Waktu dan Tempat	5
B.3. Peserta Kegiatan	5
B.4. Akomodasi Peserta	7
B.5. Bahan/Materi Pembelajaran dan Serifikat	7
B.6. Uraian Kegiatan	7
B.6.1. Pendaftaran/Registrasi Peserta.....	7
B.6.2. Penjelasan Teknis dan <i>Pre Test</i>.....	7
B.6.3. Acara Pembukaan	8
B.6.4. Penyampaian Materi	8
B.6.5. Acara Penutupan	10
C. HASIL EVALUASI KEGIATAN.....	11
C.1. Hasil <i>Pre Test</i> dan <i>Post Test</i>	11
C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner	11
D. HAMBATAN.....	20
E. PENUTUP.....	20
F. LAMPIRAN.....	21



DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Dokumentasi Kegiatan**
- 2. Jadwal Kegiatan**
- 3. Booklet Penyelenggaraan Kegiatan**
- 4. Bahan Penjelasan Teknis**
- 5. Panduan Penggunaan SIMULTAN**
- 6. Panduan Moderator**
- 7. Panduan Narasumber**
- 8. Rekap Kuesioner Evaluasi oleh Peserta**
- 9. Kumpulan Materi Narasumber**
- 10. Kumpulan Surat Undangan/Surat Dinas**
- 11. Surat Tugas Narasumber**
- 12. Surat Tugas Peserta**
- 13. Daftar Hadir Peserta**
- 14. Informasi dan ketentuan Tugas Praktek**
- 15. Penilaian Hasil Praktek Peserta**
- 16. Rekap Lembar Evaluasi oleh Narasumber**
- 17. Tata Tertib Peserta**
- 18. Data Peserta Registrasi**
- 19. Laporan Keuangan**



PENDAHULUAN



PELAKSANAAN KEGIATAN

**BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA TAHUN 2024
BAGI PARTAI POLITIK ANGGARAN II
Senin s.d. Kamis, 30 September s.d. 3 Oktober 2024**

A. PENDAHULUAN

A.1. Umum

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan perubahan tahap ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 24 ayat 2, pasal 24 C dan pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. memutus pembubaran partai politik, dan;
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sementara kewajiban Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:

1. telah melakukan pelanggaran hukum berupa
 - a) pengkhianatan terhadap negara;
 - b) korupsi;
 - c) penyuapan;
 - d) tindak pidana lainnya;
2. atau perbuatan tercela, dan/atau;



3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, maka Mahkamah Konstitusi dapat disebut sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan demokrasi.

Terkait dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 yang akan dilakukan secara serentak untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, MK memiliki tanggungjawab terhadap suksesnya keseluruhan proses pemilihan dimaksud. Upaya menjaga dan mengawal proses demokrasi tersebut tidak terlepas dari kewenangan MK yaitu menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum.

Sesuai amanat Pasal 167 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Pasal 201 ayat (8) UU Nomor 10 Tahun 2016 bahwa Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah serentak diselenggarakan di tahun 2024. Di pemilihan Kepala Daerah tahun ini akan diselenggarakan di 545 daerah yang meliputi 37 Provinsi, 415 Kabupaten, dan 93 Kota diseluruh wilayah Indonesia.

Melihat kondisi obyektif tersebut, berbagai pemangku kepentingan yang terkait dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2024 ini (KPU, Bawaslu, Aparatur Penegak Hukum baik MA dan lembaga peradilan di bawahnya, Kepolisian, termasuk para kontestan dan para Advokat/Pengacara) harus mempersiapkan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2024 ini dengan lebih matang dibandingkan dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah sebelumnya.

Sebagai lembaga peradilan terkait politik, MK dengan kewenangan yang dimilikinya tentu tidak dapat menyelesaikan seluruh pelanggaran Pilkada, terutama yang berupa tindak pidana maupun pelanggaran administratif lainnya, karena pelanggaran ini berada dalam wilayah kewenangan badan peradilan lain. Oleh karenanya, peran MK dalam mewujudkan Pilkada yang demokratis dan berkeadilan sangat berkaitan dengan fungsi-fungsi lembaga ataupun dukungan berbagai pihak, khususnya para *stakeholder*, seperti lembaga penyelenggara Pilkada (KPU), lembaga pengawas Pilkada (Bawaslu), aparat penegak hukum, dan partai politik sebagai peserta Pilkada.

Dalam praktiknya, pengetahuan dan kemampuan para *stakeholder* kelak akan sangat mempengaruhi kualitas dan efektifitas jalannya persidangan. Sebab, seringkali para pihak yang berperkara di MK masih kurang mengetahui, memahami, dan menguasai seluk beluk berperkara di MK. Mulai dari yang bersifat mendasar atau teknis hingga yang sangat berkaitan dengan hal-hal prinsip, seperti kemampuan menyusun dan merumuskan



substansi pokok permohonan beserta argumentasinya agar mudah dimengerti dan langsung pada inti persoalan atau sengketa. Hal ini dapat dimaklumi karena memang hukum acara di MK tidak sama persis dengan persidangan pada umumnya, seperti yang berlaku di Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya.

Beberapa hal yang perlu diketahui para pihak adalah berkenaan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan penyelenggaraan Pilkada, khususnya hukum acara MK. Jika para *stakeholder* belum memiliki gambaran ataupun pengetahuan mendasar dalam menangani perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, akibatnya bisa saja berdampak terhambatnya persidangan yang seharusnya digelar secara cepat (*speedy trial*). Di samping itu, para *stakeholder* juga sangat perlu untuk mengetahui perkembangan putusan-putusan MK yang beberapa di antaranya menjadi rujukan dalam mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan. Hal ini diperlukan agar proses peradilan cepat benar-benar dapat dilaksanakan oleh MK dengan tetap menjaga nilai-nilai keadilan substantif bagi para pencari keadilan.

Dengan demikian, kebutuhan akan informasi dan pengetahuan akan seluk beluk berperkara di MK, khususnya dalam perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah bagi *stakeholder*, menjadi penting untuk diselenggarakan. Selain demi terwujudnya peradilan yang cepat, juga harapannya akan membuat persidangan di MK akan berjalan lebih efektif dan efisien sehingga tercipta pilkada yang demokratis dan berkeadilan dengan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Atas dasar pemikiran ini, Mahkamah Konstitusi melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Partai Politik Angkatan II. Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan bagi tim hukum Partai Politik sebagai pihak yang kemungkinan menjadi pemohon atau pihak terkait pada sengketa Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Para peserta kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi sahabat MK, *friends of court*, *amicus curiae*, yang dapat mempermudah akses masyarakat terhadap peradilan (*Access to Court*) dan meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan keadilan (*Access to Justice*). Kondisi ini tentu saja diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap terwujudnya cita negara hukum yang demokratis atau negara demokrasi yang berdasarkan hukum (*constitutional democratic state*).



A.2 Tujuan

- a. Meningkatkan pemahaman, kesadaran dan ketaatan berkonstitusi;
- b. Meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi mengenai Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi serta isu-isu ketatanegaraan;
- c. Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;
- d. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- e. Meningkatkan keterampilan beracara di Mahkamah Konstitusi mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.



PELAKSANAAN KEGIATAN



B. PELAKSANAAN KEGIATAN

B.1. Nama Kegiatan

“Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Partai Politik Angkatan II”.

B.2. Waktu dan Tempat

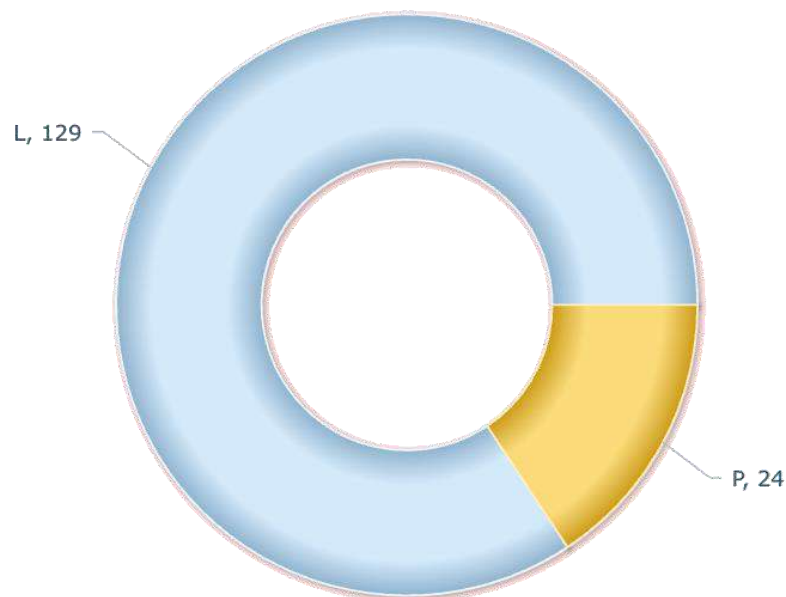
Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Senin s.d. Kamis, 30 September s.d. 3 Oktober 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM 83 Cisarua, Bogor.

B.3. Peserta Kegiatan

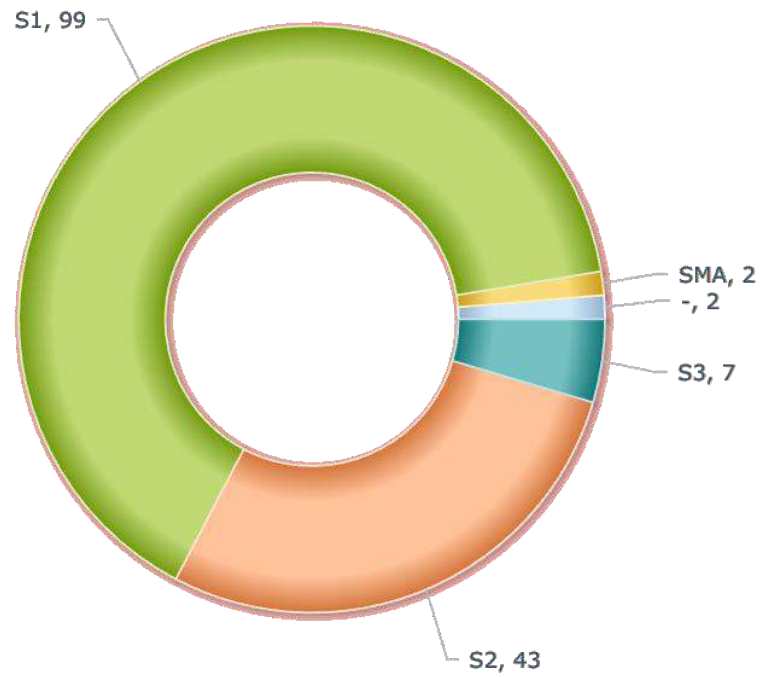
Peserta kegiatan sebanyak 161 orang tim hukum Partai Politik yang terdiri dari 4 (empat) partai politik nasional meliputi Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Demokrat serta 2 (dua) partai politik lokal Aceh meliputi Partai Darul Aceh dan Partai Aceh. Seluruh peserta mengikuti kegiatan luring di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Berikut adalah grafik sebaran peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Partai Politik Angkatan II:

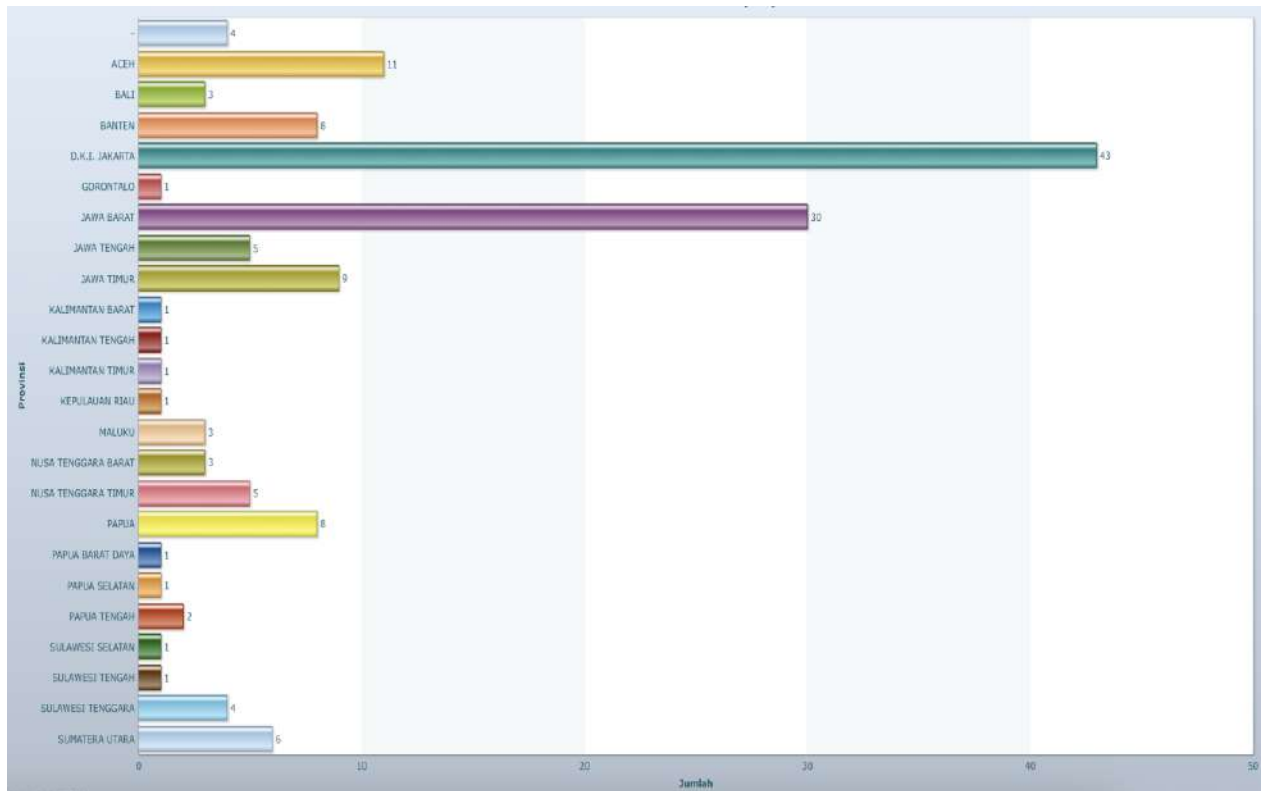
Grafik 1. Peserta berdasarkan Jenis Kelamin



Grafik 2. Peserta berdasarkan Pendidikan



Grafik 3. Peserta berdasarkan Asal Daerah



B.4. Akomodasi Peserta

- a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:
 - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut)
 - Sandal kamar
 - Gula, kopi, teh, dan air mineral.

B.5. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

- a. Peserta akan mendapatkan mendapatkan *seminar kits*, yang meliputi:
 - 1) Tas;
 - 2) *Id card*;
 - 3) Buku saku UUD Tahun 1945/UU Mahkamah Konstitusi (*soft file*);
 - 4) *Booklet* panduan kegiatan (*soft file*);
 - 5) *Block Note* dan pulpen;
 - 6) Modul/makalah/*hand out* materi dari narasumber (*soft file*);
 - 7) Baju/kaos.
- b. E- Sertifikat
 - 1) Peserta diberikan e-Sertifikat keikutsertaan kegiatan;
 - 2) Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh panitia.

B.6. Uraian Kegiatan

B.6.1. Pendaftaran/Registrasi Peserta

Kegiatan pendaftaran/registrasi peserta dilaksanakan pada Senin, 30 September 2024 pukul 10.00 – 16.30 WIB. Ketika para peserta melakukan registrasi, peserta juga akan langsung diberikan seminar kits oleh panitia.

B.6.2. Penjelasan Teknis dan *Pre Test*

Penjelasan teknis disampaikan oleh Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bapak Nanang Subekti pada hari Senin, 30 September 2024 pukul



14.30 s.d. 15.30 WIB. Setelah sesi Penjelasan teknis, peserta dipandu oleh panitia untuk melaksanakan *Pre Test* melalui akun SIMULTAN masing-masing peserta.

B.6.3. Acara Pembukaan

Kegiatan dibuka oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi, Bapak Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. pada Senin, 30 September 2024 pukul 16.30 WIB di aula Grha Konstitusi 3 Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Sebelum acara resmi dibuka, Plt. Kapala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bapak Nanang Subekti, menyampaikan laporan terkait penyelenggaraan kegiatan. Susunan acara yaitu terlebih dahulu dibuka dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya, pembacaan Naskah Pancasila, Hymne Mahkamah Konstitusi, Laporan Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Hakim Konstitusi, menyanyikan Mars Mahkamah Konstitusi, dan ditutup dengan pembacaan doa oleh petugas yang telah ditunjuk.

B.6.4. Penyampaian Materi

1) Materi dan Narasumber

Kegiatan ini diisi oleh narasumber yang terdiri atas Hakim Konstitusi, Panitera Muda MK, Panitera Pengganti MK, Asisten Ahli Hakim Konstitusi, serta Tim IT MK dengan rincian materi dan narasumber sebagai berikut:

Tabel 1. Materi, Narasumber, dan Moderator

NO.	MATERI	NARASUMBER	MODERATOR
1.	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024	1. YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. 2. YM Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H.	Budi Hari Wibowo
2.	Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024	Dr. Fajar Laksono, S.Sos., M.H.	Ardiansyah Salim
3.	Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik	1. Nanda Adytiansyah, S.Kom., M.T.I. 2. Hafidz Ikhsan Baihaki, S.Kom.	



NO.	MATERI	NARASUMBER	MODERATOR
4.	Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024	Dr. Muhidin, S.H., M.Hum.	Santhy Kustrihardiani
5.	Teknik Penyusunan Jawaban Termohon dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024	Saiful Anwar, S.H., M.H.	Bambang Sukmadi
6.	Praktik Penyusunan Jawaban Termohon dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hani Adhani, S.H., M.H. 2. Dr. Oly Viana Agustine, S.H., M.H. 3. Luthfi Widagdo Eddyono, S.H., M.H. 4. Dr. Syamsudin Noer, S.H., M.H. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chafid Sugianto 2. Angga Putri Gardina 3. Edwin Aditya Irawan 4. Edwin Rivano
7.	Evaluasi Hasil Penyusunan Jawaban Termohon dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hani Adhani, S.H., M.H. 2. Dr. Oly Viana Agustine, S.H., M.H. 3. Luthfi Widagdo Eddyono, S.H., M.H. 4. Dr. Syamsudin Noer, S.H., M.H. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chafid Sugianto 2. Angga Putri Gardina 3. Edwin Aditya Irawan 4. Edwin Rivano

2) Metode Penyampaian Materi

Penyampaian materi dilaksanakan dengan metode ceramah/kuliah oleh narasumber, kemudian dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab antara peserta dengan narasumber. Sesi diskusi atau tanya jawab ini akan dipimpin oleh moderator yang mengatur lalu lintas sesi diskusi. Untuk mendukung kelancaran sesi penyampaian materi dan diskusi, materi yang telah disiapkan oleh narasumber berupa *slide powerpoint*, diupload oleh panitia ke laman *microsite pusdik.mkri.id* sehingga dapat diakses oleh seluruh peserta.

Selain itu, peserta juga difasilitasi untuk melaksanakan praktik penyusunan jawaban termohon dalam perkara PHP Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi dengan bantuan narasumber praktik dan moderator. Tujuan dari praktik ini adalah agar peserta dapat terlibat secara aktif dan konstruktif dalam pembelajaran. Praktik ini juga bertujuan melatih peserta dalam menyusun jawaban termohon. Dalam mengerjakan praktek ini, peserta didampingi oleh



narasumber dari Panitia Pengganti dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi yang berpengalaman di bidangnya.

Praktik ini menghasilkan dokumen jawaban termohon dari peserta. Setelah itu panitia akan memfasilitasi forum untuk presentasi dan diskusi khusus dimana peserta terpilih membacakan hasil kerjanya di hadapan semua peserta. Di dalam forum ini, peserta dapat bertanya, menyampaikan pemikiran, memberi kritik, saran, maupun tanggapan atas hasil kerja yang dibacakan peserta lain. Di akhir sesi, narasumber akan memberikan evaluasi terhadap keseluruhan hasil pelaksanaan praktik oleh peserta.

B.6.5. Acara Penutupan

Kegiatan ini ditutup pada pukul 11.00 WIB pada hari Kamis, 3 Oktober 2024 oleh Kepala Bagian Umum Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi serta dihadiri oleh seluruh peserta kegiatan.



HASIL EVALUASI KEGIATAN



C. HASIL EVALUASI KEGIATAN

Bagian ini akan memaparkan hasil evaluasi kegiatan. Evaluasi tersebut dibuat berdasarkan hasil rekapitulasi beberapa instrumen evaluasi yang digunakan selama kegiatan. Berikut adalah rinciannya:

C.1. Hasil *Pre Test* dan *Post Test*

Dalam upaya mengetahui peningkatan pemahaman peserta sebelum dan setelah kegiatan, penyelenggara menggunakan *pre test* dan *post test* sebagai salah satu pengukuran. Soal yang diberikan kepada peserta sebanyak 10 (sepuluh) *item*. Peserta diminta mengerjakan soal yang telah disiapkan oleh panitia dengan memilih 1 (satu) jawaban yang dirasa benar dari 5 (lima) alternatif jawaban yang disediakan. Pada dasarnya soal *pre test* dan *post test* yang diberikan sama, namun susunan jawaban diacak. Hal ini bertujuan untuk menghindari efek *learning* dari soal sebelumnya.

Tingkat pemahaman peserta dihitung dengan menggunakan Uji T. Hasil Analisis T hitung menunjukkan nilai sebesar 5,59 sedangkan T tabel dengan taraf kepercayaan (*confidence level*) 95% pada df 127 menunjukkan nilai sebesar 1,65694. T-hitung lebih besar dari T-tabel, sehingga analisis hasil *pre test* dan *post test* menunjukkan hasil yang signifikan. Kemudian hasil penghitungan Gap nilai (*post test* – *pre test*) diperoleh skor **0,88**. Adapun skala likert yang digunakan dalam tingkat pemahaman ini menggunakan *range* sebagai berikut (0-0,24: kurang); (0,25-0,74: cukup); (0,75-1,24: baik); dan (1,25-2: sangat baik). Hasil perhitungan nilai gap di atas menunjukkan tingkat pemahaman peserta termasuk dalam kategori **baik**. Hasil tersebut menuju kepada kesimpulan bahwa kegiatan ini bisa dikatakan **sudah berhasil dalam meningkatkan pemahaman peserta**.

C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner

Pusdik Pancasila dan Konstitusi melakukan upaya yang optimal dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada para peserta. Upaya ini dilakukan dengan melakukan evaluasi dalam setiap penyelenggaraan kegiatan pendidikan baik pada aspek substansi maupun aspek teknis pelayanan pendidikan. Dalam hal aspek substansi Pusdik telah melakukan pengukuran dengan soal *pre test* dan *post test*, sedangkan untuk aspek pelayanan pendidikan ada beberapa variabel yang dijadikan basis untuk mengukur kualitas pelayanan pendidikan yang dilakukan oleh Pusdik. Variabel itu meliputi dari kualitas materi, narasumber dan moderator, metode penyelenggaraan, petugas penyelenggara, akomodasi, konsumsi, sarana pendidikan, keamanan, sistem informasi, dan layanan



keuangan. Dari beberapa variabel maka disusunlah instrumen yang akan menghasilkan tingkat kepuasan pelayanan pendidikan di Pusdik. Validitas pengukuran dilakukan dengan prinsip bebas, anonim, dan objektif. Adapun responden dalam evaluasi kegiatan ini adalah peserta kegiatan yang dengan sukarela memberikan satu respons jawaban dari alternatif jawaban yang tersedia.

Metode evaluasi yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan kuesioner. Untuk menilai tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan, Pusdik Pancasila dan Konstitusi menyusun 2 instrumen penilaian yaitu kuesioner evaluasi narasumber dan kuesioner evaluasi kegiatan. Adapun penilaian akan terbagi ke dalam empat kategori, yaitu tidak baik (skala 0,0 – 1,99), kurang baik (2,0 – 2,99), baik (3,0 – 3,75) dan sangat baik (3,76 – 4,0).

Pertama, peserta diminta dengan sukarela memberikan penilaian terhadap kualitas narasumber yang dihadirkan di setiap sesi dengan cara mengisi kuesioner evaluasi narasumber setelah suatu sesi materi berakhir. Kualitas setiap narasumber diukur dari tiga indikator utama, yaitu peran narasumber dalam proses pelaksanaan kegiatan, bahan ajar dan media pembelajaran, serta materi yang diberikan.

Kedua, nilai evaluasi kegiatan yang dilakukan peserta terhadap penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan. Hasil kuesioner evaluasi kegiatan ini yang nantinya akan memunculkan nilai tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Ada dua kategori yang dijadikan basis untuk mengukur tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi yaitu tingkat kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan dan tingkat kualitas layanan sarana dan prasarana pendidikan serta layanan keuangan.

C.2.1. Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan

Nilai tingkat kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan didapatkan dari penilaian beberapa variabel yang terdiri dari:

1) Nilai Persepsi atas Kualitas Materi/Bahan Ajar

Variabel ini menilai kemudahan memahami materi yang diberikan, manfaat informasi yang ada dalam materi, dan kualitas bahan ajar yang disajikan. **Nilai persepsi atas kualitas materi/bahan ajar mendapatkan nilai 3,59 yang tergolong kategori Baik.**



2) Nilai Persepsi atas Kualitas Narasumber dan Moderator

Menilai kualitas penyampaian materi oleh narasumber dan kualitas moderator dalam memandu jalannya sesi materi. Peserta menilai penguasaan narasumber terhadap materi pembelajaran dan penyampaian materi secara komunikatif, serta kemampuan moderator dalam memandu setiap sesi. Pada variabel ini peserta juga memilih narasumber dan moderator yang paling menarik. Penilaian ini digunakan sebagai salah satu dasar evaluasi kualitas narasumber. **Nilai persepsi atas kualitas narasumber dan moderator mendapatkan nilai 3,56 yang tergolong kategori Baik.**

3) Nilai Persepsi atas Kualitas Metode Penyelenggaraan

Menilai kualitas metode penyelenggaraan pendidikan di Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Peserta menilai terkait menariknya penyelenggaraan kegiatan dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan kegiatan. **Nilai persepsi atas kualitas metode penyelenggaraan mendapatkan nilai 3,53 yang tergolong kategori Baik.**

4) Nilai Persepsi atas Kualitas Petugas Penyelenggara

Variabel ini menilai performa petugas penyelenggara selama kegiatan pendidikan berlangsung. Peserta menilai terkait sikap petugas dalam memberikan pelayanan apakah petugas informatif dan komunikatif, cepat dan tepat, serta ramah dan rapi penampilannya. **Nilai persepsi atas kualitas petugas penyelenggara mendapatkan nilai 3,70 yang tergolong kategori Baik.**

Hasil penilaian dari 4 variabel di atas, maka diperoleh **Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dengan nilai 3,60 dengan kategori Baik.** Hal ini berarti bahwa mayoritas peserta setuju bahwa kualitas materi yang disampaikan, narasumber dan moderator yang dihadirkan, menariknya metode penyelenggaraan, dan sikap petugas penyelenggara telah memberikan pelayanan penyelenggaraan dengan baik sehingga pembelajaran yang diberikan dapat dipahami oleh para peserta.

C.2.2. Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan

Nilai tingkat kualitas layanan sarana dan prasarana pendidikan diperoleh dari penilaian beberapa variabel yang terdiri dari:



- 1) Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Akomodasi
Pada variabel ini peserta menilai kualitas kebersihan kamar dan kelengkapan fasilitas kamar yang tersedia. **Nilai persepsi atas kualitas layanan akomodasi mendapatkan nilai 3,61 yang tergolong kategori Baik.**
- 2) Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Konsumsi
Peserta pendidikan juga menilai terkait kualitas layanan konsumsi selama mengikuti pendidikan di Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Peserta menilai variasi rasa pada makanan yang dihidangkan dan ketepatan waktu dalam menghadirkan makanan dan *snack*. **Nilai persepsi atas kualitas layanan konsumsi mendapatkan nilai 3,35 yang tergolong kategori Baik.**
- 3) Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Sarana Pendidikan
Peserta menilai kebersihan ruang aula dan kelas serta sarana penunjang proses pembelajaran. Sarana penunjang tersebut juga termasuk videotron yang digunakan di aula Pusdik Pancasila dan Konstitusi. **Nilai persepsi atas kualitas layanan sarana pendidikan mendapatkan nilai 3,69 yang tergolong kategori Baik.**
- 4) Nilai Persepsi atas Layanan Keamanan
Pusdik Pancasila dan Konstitusi selalu berupaya untuk menjaga lingkungan agar selalu aman. Pada variabel ini peserta menilai kualitas keamanan selama berada di Pusdik Pancasila dan Konstitusi, serta sikap dan perilaku petugas keamanan. **Nilai persepsi atas layanan keamanan mendapatkan nilai 3,73 yang tergolong kategori Baik.**
- 5) Nilai Persepsi atas Sistem Informasi Pendidikan
Variabel ini menilai kemudahan akses layanan sistem informasi pendidikan dan kecepatan akses jaringan Pusdik Pancasila dan Konstitusi. **Nilai persepsi atas sistem informasi pendidikan mendapatkan nilai yaitu 3,69 yang tergolong kategori Baik.**
- 6) Nilai Persepsi atas Layanan Keuangan
Pada variabel ini peserta memberikan penilaian administrasi terkait layanan keuangan yang diberikan oleh penyelenggara. **Nilai persepsi atas Layanan Keuangan mendapatkan nilai tertinggi yaitu 3,91 yang tergolong kategori Sangat Baik.**



Hasil penilaian dari 6 variabel di atas, maka diperoleh **Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan dengan nilai 3,66 dengan kategori Baik**. Ini berarti mayoritas peserta setuju bahwa layanan akomodasi, konsumsi, sarana pendidikan, keamanan, sistem informasi, dan layanan keuangan telah mampu diberikan dengan baik kepada peserta.

Hasil dari seluruh pengukuran Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dengan Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan, digabungkan menjadi **nilai Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dengan skor 3,63 yang tergolong kategori Baik**.

Berikut adalah rincian hasil evaluasi kegiatan terhadap beberapa aspek yang disurvei:

Tabel 2. Hasil Penilaian Peserta terhadap Penyelenggaraan Kegiatan

No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
Kualitas Materi/Bahan Ajar			
1	Materi yang diberikan mudah dipahami	3,53	Baik
2	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi yang bermanfaat	3,63	Baik
3	Kualitas bahan ajar yang disajikan menggunakan bahasa yang komunikatif dan lengkap	3,61	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Materi/Bahan Ajar		3,59	Baik
Kualitas Narasumber dan Moderator			
4	Narasumber menguasai materi pembelajaran	3,59	Baik
5	Narasumber menyampaikan materi secara komunikatif	3,55	Baik
6	Moderator mampu memandu setiap sesinya	3,53	Baik
	Narasumber yang paling menarik	1. YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. 2. Dr. Muhidin, S.H, M.Hum.	



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
	Moderator yang paling menarik	1. Ardiansyah Salim 2. Hadian Taofik Rochman	
Nilai Persepsi atas Kualitas Narasumber dan Moderator		3,56	Baik
Kualitas Metode Penyelenggaraan			
7	Penyelenggaraan kegiatan bimtek menarik	3,58	Baik
8	Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan tepat waktu	3,48	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Metode Penyelenggaraan		3,53	Baik
Kualitas Petugas Penyelenggara			
9	Penyelenggara informatif dan komunikatif	3,63	Baik
10	Penyelenggara memberikan pelayanan dengan yang cepat dan tepat	3,68	Baik
11	Penyelenggara ramah dan berpenampilan rapi	3,77	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Petugas Penyelenggara		3,70	Baik
Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan		3,60	Baik
Kualitas Layanan Akomodasi			
12	Kebersihan kamar terjaga	3,63	Baik
13	Kelengkapan fasilitas kamar tersedia	3,58	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Akomodasi		3,61	Baik



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
Kualitas Layanan Konsumsi			
14	Hidangan makanan memiliki variasi rasa yang beragam dan enak	3,28	Baik
15	Hidangan makanan dan <i>snack</i> tersedia tepat waktu	3,43	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Konsumsi		3,35	Baik
Kualitas Layanan Sarana Pendidikan			
16	Ruang aula dan kelas terjaga kebersihannya	3,71	Baik
17	Sarana penunjang proses pembelajaran (termasuk videotron)	3,67	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Sarana Pendidikan		3,69	Baik
Layanan Keamanan			
18	Sistem keamanan Pusdik membuat peserta merasa aman	3,72	Sangat Baik
19	Petugas keamanan ramah dan responsif	3,74	Baik
Nilai Persepsi atas Layanan Keamanan		3,73	Sangat Baik
Sistem Informasi Pendidikan			
20	Layanan sistem informasi pendidikan dapat diakses dengan mudah	3,74	Baik
21	Jaringan internet Pusdik memiliki kecepatan yang baik	3,63	Baik
Nilai Persepsi atas Sistem Informasi Pendidikan		3,69	Baik



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
Layanan Keuangan			
	Nilai Persepsi atas Layanan Keuangan	3,91	Sangat Baik
	Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan	3,66	Baik
	Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi	3,63	Baik

Dari hasil kedua penilaian di atas, maka didapatkan nilai Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Partai Politik Angkatan II. Indeks ini diukur dengan menggunakan “*Kirckpatrick four levels evaluation model*” yaitu level pertama *Reaction*, level kedua - *Learning*, level ketiga - *Behaviour*, level keempat - *Result*.

Dari **keempat** level pengukuran di atas level evaluasi yang bisa dilakukan untuk saat ini hanya sampai pada level 2 yaitu *Reaction* dan *Learning*. Level pertama *Reaction* (reaksi) yaitu dengan mengukur tingkat kepuasan peserta terhadap program yang diikuti, sedangkan level kedua *learning* (pembelajaran) yaitu dengan mengukur tingkat pemahaman pembelajaran peserta. Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$\frac{(\text{Tingkat Kepuasan Pelayanan Pendidikan} + \text{Tingkat Pemahaman})}{n}$$

Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran dengan nilai 0,88 untuk skala 2 jika dikonversi ke skala 4 maka tingkat pemahaman peserta pembelajaran menjadi 1,76. Selanjutnya untuk Tingkat Kepuasan Pelayanan Pendidikan memiliki nilai sebesar 3,63 sehingga Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran yaitu $(3,63+1,76)/2 = 2,69$.

Hasil dari penghitungan **Indeks Peningkatan Peserta Pembelajaran diperoleh skor sebesar 2,69**; dengan skala likert penilaian yaitu tidak baik (skala 0,0 – 1,99), kurang baik (2,0 – 2,99), baik (3,0 – 3,75) dan sangat baik (3,76 – 4,0); artinya bahwa penyelenggaraan kegiatan ini belum berhasil dalam memberikan pemahaman kepada para peserta kegiatan dengan kategori **Baik**.



Evaluasi keseluruhan kegiatan dilakukan sebagai upaya untuk terus menerus memperbaiki kinerja penyelenggaraan kegiatan. Dapat dikatakan bahwa mayoritas peserta setuju materi yang diberikan, narasumber dan moderator, metode penyelenggaraan, petugas penyelenggara, akomodasi, konsumsi, sarana pendidikan, keamanan, dan sistem informasi tergolong baik. Meskipun begitu, terdapat beberapa saran dan kritik dari peserta yang dapat dipertimbangkan sebagai bahan evaluasi kegiatan yang akan datang, yaitu:

- **Terkait Kurikulum, Materi dan Pengacaraan**

- a) Apabila terlambat absensi namun dapat membuktikan kehadirannya, mohon dapat dipertimbangkan;
- b) Pemateri harus lebih interaktif;
- c) Perlu ada sesi kunjungan ke Mahkamah Konstitusi untuk memberikan Gambaran tentang persidangan;
- d) Mohon untuk target grup mengirimkan praktisi hukum agar tidak bingung pada saat sesi praktik;
- e) Berikan waktu diskusi yang lebih banyak.

- **Terkait Sarana dan Pelayanan**

- a) Beberapa kamar tidak memiliki gelas, cangkir, dan sendok;
- b) Sweater hoodie nya all size nya untuk yang badan besar belum ada;
- c) Perlu ada TV di kamar biar tidak sepi;
- d) Perlu ada ruang baca/perpustakaan;
- e) Perlu ada ruang dan alat olahraga;
- f) Jaringan wifi diperluas sampai kamar peserta;
- g) Merenovasi fasilitas yang sudah lama;
- h) Hidangan makanan cepat habis;
- i) snack dan kopi saya rasa perlu selalu sedia setiap saat;
- j) Makanan lebih bervariasi, perlu ada yang berkuah;
- k) Perlu ganti catering;
- l) Peserta dari DPP agar dapat dipertimbangkan diganti transport dari tempat tinggal;
- m) Peserta dapat diberikan uang saku.



Selain dari hasil evaluasi penyelenggaraan yang menilai dari berbagai aspek, tingkat kelulusan peserta juga menjadi salah satu penentu keberhasilan kegiatan. E-sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan, yaitu sebanyak 154 orang dari 161 orang peserta yang melakukan registrasi pada Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).

Setelah melihat berbagai hasil evaluasi kegiatan di atas, disadari bahwa masih ada yang harus ditingkatkan dari pelaksanaan kegiatan, baik dari sisi substantif maupun teknis operasional. Meskipun begitu, dapat disimpulkan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan baik.

D. HAMBATAN

Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat hambatan yang ditemui panitia sebagai berikut:

- a) Peserta belum sepenuhnya tertib mengikuti kegiatan sesuai waktu yang tertera di jadwal kegiatan;
- b) Terdapat beberapa peserta yang lupa mengisi daftar hadir di setiap sesi;
- c) Soal pretest yang mudah sehingga nilai pretest sudah tinggi.

E. PENUTUP

Demikian laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan ini.

Bogor, 28 Oktober 2024
Kepala Pusat Pendidikan
Pancasila dan Konstitusi

Mundiri
NIP. 19690808 199012 1 001



LAMPIRAN



DOKUMENTASI KEGIATAN



Penjelasan teknis yang disampaikan oleh Plt. Kepala Pusdik Pancasila dan Konstitusi.



Kegiatan dibuka secara resmi oleh YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. dan dihadiri Perwakilan Pimpinan Partai Politik, Plt. Kapusdik Pancasila dan Konstitusi, serta seluruh peserta kegiatan.



Foto bersama setelah acara pembukaan.



Materi Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah disampaikan oleh YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. dan YM Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H.



Penyampaian materi Dinamika Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah oleh Bapak Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.



Penyampaian materi Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik oleh tim IT Mahkamah Konstitusi.



Penyampaian materi Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah oleh Bapak Dr. Muhidin, S.H., M.Hum.



Penyampaian materi Teknik Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam PHP Kepala Daerah oleh Bapak Saiful Anwar, S.H., M.Hum.



Materi Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHP Kepala Daerah dan Evaluasi Hasil Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam PHP Kepala Daerah disampaikan oleh 4 narasumber yang dibagi dalam 4 kelas kecil.



Kegiatan ditutup secara resmi oleh Kepala Bagian Umum serta dihadiri oleh seluruh peserta kegiatan.



Peserta melakukan senam pagi.

JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA TAHUN 2024
BAGI PARTAI POLITIK ANGKATAN II

Hari, Tanggal : **Senin s.d. Kamis, 30 September s.d. 3 Oktober 2024**

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

Peserta : Partai Politik

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Senin, 30 September 2024	10.00 – 12.00 WIB	Registrasi Peserta dan <i>Check in</i>	Mahkamah Konstitusi	Lobby Grha Konstitusi 2
	12.00 – 14.30 WIB	ISHOMA		Grha Konstitusi 7
	14.30 – 15.30 WIB	Penjelasan Teknis	Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3
	15.30 – 16.00 WIB	<i>Pre-Test</i>	Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3
	16.00 – 16.30 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	16.30 – 18.00 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Hymne Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Mars Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa	Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3
	18.00 – 19.00 WIB	ISHOMA		Grha Konstitusi 7

	19.00 – 21.00 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024	Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3
	21.00 WIB	Istirahat		
KEDUA				
Selasa, 1 Oktober 2024	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi		Grha Konstitusi 7
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024	Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik	Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		Grha Konstitusi 7
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi IV: Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024	Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3
	15.00 – 17.30 WIB	ISHOMA		
	17.30 – 19.00 WIB	Makan Malam		Grha Konstitusi 7
	21.00 WIB	Istirahat		
KETIGA				
	06.00 – 07.30 WIB	Senam Pagi	Panitia	
	07.30 – 08.30 WIB	Makan Pagi		Grha Konstitusi 7

Rabu, 2 Oktober 2024	08.30 – 10.00 WIB	Sesi V: Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024	Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VI: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024	Mahkamah Konstitusi	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		Grha Konstitusi 7
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VII: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024	Mahkamah Konstitusi	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3
	15.00 – 18.00 WIB	ISHOMA		
	18.00 – 19.00 WIB	Makan Malam		Grha Konstitusi 7
	19.00 – 21.00 WIB	Hiburan		Grha Konstitusi 7
	21.00 WIB	Istirahat		
KEEMPAT				
Kamis, 3 Oktober 2024	06.30 – 08.00 WIB	Makan Pagi		Grha Konstitusi 7
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi VII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024	Mahkamah Konstitusi	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3
	10.00 – 10.30 WIB	Post-Test dan Evaluasi Kegiatan		Ruang Kelas Grha Konstitusi 3

	10.30 – 12.00 WIB	Penutupan 1. Kesan dan Pesan Peserta 2. Laporan Kapusdik 3. Sambutan Penutupan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 4. Pembacaan Doa	Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3
	12.00 WIB	Kegiatan Selesai		



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

PANDUAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, & WALI KOTA TAHUN 2024 BAGI PARTAI POLITIK ANGKATAN II

Bogor, 30 September s.d. 3 Oktober 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenan-Nya kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Partai Politik Angkatan II dapat diselenggarakan.

Panduan Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Politik Angkatan II ini memuat informasi tentang latar belakang, tujuan, jadwal kegiatan, kurikulum, pembiayaan, ketentuan penyelenggaraan, sistem informasi peserta serta hal-hal lain yang menyangkut teknis penyelenggaraan kegiatan.

Kegiatan ini diselenggarakan bagi tim hukum 4 (empat) partai politik nasional dan 2 (dua) partai politik lokal Aceh yang masing-masing terdiri dari 38 orang partai politik nasional & 5 orang untuk partai politik lokal Aceh.

Panduan ini berfungsi sebagai acuan bagi peserta, panitia, dan pihak lain yang berkepentingan. Semoga kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Partai Politik Angkatan II ini dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar serta dapat mewujudkan misi Mahkamah Konstitusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak konstitusional warga negara.

Bogor, September 2024

Pt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Nanang Subekti



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	1
I SEKILAS TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI	2
1. Sejarah Singkat Pembentukan Mahkamah Konstitusi.....	2
2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	3
3. Visi dan Misi	3
4. Profil Hakim Konstitusi	4
5. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal	9
II PANDUAN KEGIATAN.....	10
1. Latar Belakang	10
2. Tujuan Kegiatan	11
3. Nama Kegiatan	11
4. Waktu, Tempat, dan Jadwal Kegiatan	11
5. Peserta Kegiatan	13
6. Materi dan Garis Besar Kurikulum	13
7. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat	15
8. Akomodasi	15
9. Konsumsi	15
10. Pembiayaan	15
11. Lain-lain	16
12. Kontak	16
III TATA TERTIB, SISTEM INFORMASI, DAN ZONA INTEGRITAS	17
IV HYMNE DAN MARS MAHKAMAH KONSTITUSI	27
V INFORMASI MENGENAI PUSDIK.....	29
1. Profil Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.....	29
2. Sarana dan Prasarana.....	31
3. Fasilitas Ramah Disabilitas.....	35

BAB I

SEKILAS TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Sejarah Singkat Pembentukan Mahkamah Konstitusi

Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan ketatanegaraan modern yang muncul pada abad ke-20 yang diadopsi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) tahap ketiga, yang disahkan pada 9 November 2001, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 24C UUD 1945. Berdasarkan Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945, yang merupakan hasil perubahan tahap keempat UUD 1945, Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum Mahkamah Konstitusi terbentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Pada tanggal 13 Agustus 2003, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan disahkan oleh Presiden pada hari itu juga (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Tanggal 13 Agustus 2003 selanjutnya ditetapkan sebagai hari lahirnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Presiden, melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M tanggal 15 Agustus 2003, menetapkan sembilan Hakim Konstitusi untuk pertama kalinya, yang terdiri dari Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. dan Maruarar Siahaan, S.H. serta Sudharsono, S.H. (yang diajukan oleh Mahkamah Agung), Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dan I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H. serta Letjen TNI (Purn) Achmad Rustandi, S.H. (yang diajukan oleh DPR), Prof. H. A.S. Natabaya, S.H. dan Dr. Harjono, S.H., M.CL. serta Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. (yang diajukan oleh Presiden). Pada 16 Agustus 2003, sembilan Hakim Konstitusi periode pertama tersebut mengucapkan sumpah/janji di hadapan Presiden bertempat di Istana Negara Jakarta. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H dan Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. terpilih sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi pertama.

Lembaran perjalanan Mahkamah Konstitusi selanjutnya adalah pelimpahan perkara konstitusi dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai berlangsungnya pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan menurut ketentuan UUD 1945.

2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - 1) Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
 - 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
 - 3) Memutus pembubaran partai politik;
 - 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
- b. Berdasarkan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
- c. Berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU, Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

3. Visi dan Misi

Sebagai salah satu lembaga tinggi negara di Indonesia, Mahkamah Konstitusi mengemban visi “Menegakkan Konstitusi melalui Peradilan yang Modern dan Terpercaya”. Adapun misi Mahkamah Konstitusi adalah:

- a. Memperkuat Integritas Peradilan Konstitusi.
- b. Meningkatkan Kesadaran Berkonstitusi Warga Negara dan Penyelenggara Negara.
- c. Meningkatkan Kualitas Putusan.

4. Profil Hakim Konstitusi

Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) orang hakim konstitusi yang terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota dan 8 (delapan) orang anggota hakim konstitusi. Berikut adalah profil singkat Hakim Konstitusi pada periode ini:

a. Dr. Suhartoyo S.H., M.H.



- Jabatan : Ketua Mahkamah Konstitusi
- Kelahiran : Sleman, 15 November 1959
- Pendidikan : S1 – Universitas Islam Indonesia
S2 – Universitas Tarumanegara
S3 – Universitas Jayabaya
- Karir :
 - Hakim Pengadilan Negeri Bekasi
 - Ketua Pengadilan Negeri Pontianak
 - Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
 - Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar

b. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA.



- Jabatan : Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi
- Kelahiran : Paninggahan, 20 Agustus 1968
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Andalas
S2 – Institute of Postgraduate Studies and Research
Universitas Malaya, Malaysia
S3 – Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
- Karir :
 - Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas
 - Ketua Pusat Studi Konstitusi, Fakultas Hukum Universitas Andalas
 - Komisaris Utama PT Semen Padang

c. Prof. Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H.

Jabatan : Hakim Konstitusi
Kelahiran : Bima, 31 Desember 1956
Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta
S2 – Program Studi Hukum STIH IBLAM
S3 – Studi Kebijakan Universitas Gadjah Mada
Karir :

- Kepala Badan Litbangdiklat Kumdil MA
- Kepala Biro Kepegawaian MA
- Hakim Pengadilan Negeri Lumajang (1991)

d. Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.

Jabatan : Hakim Konstitusi
Kelahiran : Semarang, 3 Februari 1956
Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
S2 – Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum
Universitas Airlangga
S3 – Program Doktor Ilmu Hukum
Universitas Diponegoro
Karir :

- Anggota Tim Assesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi – Kemdikbud RI
- Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- Ketua Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

e. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Pangkal Pinang, 27 Juni 1962
- Pendidikan :
 - S-1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (1981)
 - S-2 Hukum Tata Negara Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung (1995)
 - S-3 Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (2005)
- Karir :
 - Guru Besar Bidang Hukum Universitas Gadjah Mada
 - Kepala Badan Pembinaan Hukum, Kementerian Hukum dan HAM.

f. Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Kupang, 15 Desember 1964
- Pendidikan :
 - S1 – Ilmu HTN UNDANA Kupang (1990)
 - S2 – Ilmu HTN Universitas Indonesia (1995)
 - S3 – Ilmu HTN Universitas Indonesia (2005)
- Karir :
 - Dosen Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
 - Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

g. Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Makassar, 8 Januari 1965
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
S2 – Program Studi Hukum Tata Negara
Universitas Padjadjaran
S3 – Ilmu Hukum Universitas Airlangga
- Karir :
 - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
 - Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
 - Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pusat P4TIK).
 - Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi

h. Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Lahat, 11 November 1959
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
S2 – Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum
Universitas Sriwijaya
S3 – Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran
- Karir :
 - Panitera Mahkamah Agung RI
 - Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang
 - Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Tanjungkarang

i. Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M.



- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Pekalongan, 8 Januari 1964
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Indonesia
S2 – Ilmu Komunikasi The London School of
Public Relations
S3 - Collegium Humanum Warsaw Management
University
- Karir :
 - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI
 - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat
 - Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara

5. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal

Di Mahkamah Konstitusi dibentuk sebuah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Kepaniteraan menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi, sedangkan Sekretariat Jenderal menjalankan tugas teknis administrasi Mahkamah Konstitusi.

Berikut profil singkat Sekretaris Jenderal dan Panitera Mahkamah Konstitusi:

a. Dr. Heru Setiawan, S.E., M.Si.



Jabatan : Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Kelahiran : 9 Juni 1969
Karir :

- Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
- Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

b. Dr. Muhidin, S.H., M.Hum.



Jabatan : Panitera Mahkamah Konstitusi
Kelahiran : Sukabumi, 18 Agustus 1961
Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum
Universitas Jakarta
S2 – Program Pasca Sarjana Hukum
Bisnis
S3 – Program Doktor Ilmu Hukum Universitas
Padjadjaran
Karir :

- Kementerian Hukum dan HAM
- Dosen Sekolah Tinggi Litigasi
- Panitera Muda I Mahkamah Konstitusi

BAB II

PANDUAN KEGIATAN

1. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan MK diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan lebih lanjut diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang salah satu kewenangannya adalah menyelesaikan perkara perselisihan hasil pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 merupakan suatu perhelatan pesta demokrasi yang akan dilaksanakan secara serentak di 545 wilayah, baik itu provinsi, kota dan kabupaten. Dalam perhelatan ini tentu diperlukan suatu perencanaan yang baik, terukur dan sistematis. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal demokrasi ikut memiliki tanggung jawab terhadap suksesnya proses pemilihan tersebut. Upaya menjaga dan mengawal proses demokrasi tersebut tidak terlepas dari fungsi Mahkamah Konstitusi yaitu menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah dimaksud.

Dalam rangka pelaksanaan tugas menyelesaikan perselisihan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah tahun 2024 diperlukan dukungan konkret dari berbagai kalangan kepada Mahkamah Konstitusi, pemahaman terhadap hukum acara secara utuh sangat diperlukan bagi pemangku kepentingan. Hal tersebut diperlukan agar proses peradilan cepat (*speedy trial*) benar-benar dapat dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi dengan tetap menjaga nilai-nilai keadilan substantif bagi para pencari keadilan.

Salah satu *target group* Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tahun 2023 adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta mengenai Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Wali Kota/Wakil Wali Kota Serentak Tahun 2024, khususnya proses penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan tersebut. *Output* dari kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai hukum acara Mahkamah Konstitusi dan juga membantu para pihak dalam menyusun permohonan, jawaban termohon, keterangan pihak terkait hingga keterangan Bawaslu. Dengan adanya permohonan, jawaban termohon, keterangan pihak terkait hingga keterangan Bawaslu yang baik, secara tidak langsung berpengaruh terhadap kualitas putusan Mahkamah Konstitusi.

2. Tujuan Kegiatan

- Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Konstitusi, sistem penyelenggaraan negara, hak konstitusional, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi;
- Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut UUD NRI Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;
- Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024;
- Meningkatkan kemampuan penyusunan permohonan pemohon dan keterangan pihak terkait tim hukum partai politik dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024.

3. Nama Kegiatan

“Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Partai Politik Angkatan II”.

4. Waktu, Tempat, dan Jadwal Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan pada hari Senin s.d. Kamis, 30 September s.d. 3 Oktober 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat. Adapun jadwal kegiatan sebagai berikut:

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI
Senin, 30 September 2024	10.00 – 14.30 WIB	Registrasi Peserta dan <i>Check in</i>
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	14.30 – 15.30 WIB	Penjelasan Teknis
	15.30 – 16.00 WIB	Penjelasan Simultan dan <i>Pre-Test</i>
	16.00 – 16.30 WIB	<i>Coffee Break</i>
	16.30 – 18.00 WIB	Pembukaan: <ol style="list-style-type: none"> Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya Pembacaan Naskah Pancasila Hymne Mahkamah Konstitusi Laporan Sekretaris Jenderal Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi Mars Mahkamah Konstitusi Pembacaan Doa
	18.00 – 19.00 WIB	ISHOMA

	19.00 – 21.00 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024
	21.00 WIB	Istirahat
Selasa, 1 Oktober 2024	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.30 – 15.30 WIB	Sesi IV: Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024
	15.30 – 17.30 WIB	ISHOMA
	17.30 – 19.00 WIB	Makan Malam
Rabu, 2 Oktober 2024	06.00 – 07.30 WIB	Senam Pagi
	07.30 – 08.30 WIB	Makan Pagi
	08.30 – 10.00 WIB	Sesi V: Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VI: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VII: Lanjutan Praktik Penyusunan Permohonan, Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam

		Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024
	15.00 – 18.00 WIB	ISHOMA
	18.00 – 19.00 WIB	Makan Malam
	19.00 – 21.00 WIB	Hiburan
	21.00 WIB	Istirahat
Kamis, 3 Oktober 2024	06.30 – 08.00 WIB	Makan Pagi
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi VIII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024
	10.00 – 10.30 WIB	Post-Test dan Evaluasi Kegiatan
	10.30 – 12.00 WIB	Penutupan 1. Kesan dan Pesan Peserta 2. Sambutan Penutupan Plt Kapusdik 3. Pembacaan Doa
	12.00 WIB	Kegiatan Selesai

5. Peserta Kegiatan

Peserta sejumlah 162 (seratus enam puluh dua) orang meliputi 4 partai politik nasional (masing-masing 38 orang) dan 2 partai politik lokal Aceh (masing-masing 5 orang).

6. Materi dan Garis Besar Kurikulum

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menyusun kurikulum yang digunakan sebagai dasar bagi narasumber untuk menyampaikan materi pembelajaran. Berikut adalah kurikulum pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Partai Politik Angkatan II:

No.	Materi	Sub Materi	Durasi
1.	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024	a. Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota b. Para Pihak c. Objek Permohonan d. Pengajuan Permohonan e. Permohonan Pemohon f. Alur Penarikan Kembali Permohonan g. Jawaban Termohon h. Keterangan Pihak Terkait	120 menit

No.	Materi	Sub Materi	Durasi
		<ul style="list-style-type: none"> i. Keterangan Bawaslu j. Jenis Alat Bukti k. Manajemen Penanganan Perkara dan Persidangan l. Putusan a. Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi 	
2.	Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di Mahkamah Konstitusi	<ul style="list-style-type: none"> a. Fungsi dan Kewenangan MK b. Struktur dan Mekanisme Kerja MK c. Asas-Asas Hukum Acara MK d. Perkembangan dan Dinamika Penanganan PPHU di MK 	120 menit
3.	Mekanisme dan Tahapan dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024	<ul style="list-style-type: none"> a. Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 b. Mekanisme Pengajuan Permohonan, Jawaban Termohon Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Pihak Lainnya secara Langsung dan daring c. Mekanisme Penanganan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Pihak Lainnya, termasuk Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan d. Registrasi Saksi dan Ahli Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait e. Penjadwalan Sidang dan Persidangan Jarak Jauh f. Pengucapan Putusan dan Tindaklanjut Pasca Putusan 	120 menit
4.	Sistem Informasi Perkara Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> a. Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik b. <i>Case Tracking</i> (Penelusuran Perkara) c. Persidangan Jarak Jauh, Streaming, dan <i>Video Conference</i> g. Fitur-Fitur lainnya (<i>Website, Click MK, Media Sosial, dll</i>) 	120 menit
5.	Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait	<ul style="list-style-type: none"> a. Dasar Hukum; b. Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024; c. Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Pemberi Keterangan; d. Objek Perkara; e. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu; f. Sistematika Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait; g. Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait. 	90 menit
6.	Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait	Peserta Melakukan Praktek Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.	240 menit
7.	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait	Perwakilan Peserta Memaparkan Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait untuk Mendapat Tanggapan dan Koreksi dari Narasumber/Fasilitator.	120 menit

Proses Pembelajaran

1. Tahap Pencairan

Sebelum pelatihan dimulai, perlu dilakukan proses pencairan. Proses pencairan dilakukan melalui kegiatan penjelasan teknis penyelenggaraan kegiatan pelatihan. Tujuannya untuk: membangun komitmen belajar agar peserta siap mengikuti pelatihan, membuat kesepakatan tentang norma yang akan dipakai selama pelatihan dan membuat kontrak belajar.

2. Tahap Pembekalan Materi

Pada tahap ini peserta didik dibekali pengetahuan selama masa pendidikan. Materi yang diberikan lebih dititikberatkan pada peningkatan pemahaman, kemampuan mempraktekkan, dan mengaplikasikan. Teknik penyampaian dalam pembekalan materi menggunakan metode ceramah diikuti tanya jawab, diskusi kelompok, games, studi kasus, *sharing*, dll.

3. Tahap Konsolidasi

Merupakan tahap internalisasi komprehensif dari pengetahuan yang diterima pada tahap pembekalan. Pada tahap ini peserta didik diberikan tugas untuk memecahkan suatu kasus/permasalahan yang diangkat berdasarkan hasil pendidikan yang telah didapat.

7. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

- a. Peserta akan mendapatkan materi pembelajaran dan e-sertifikat yang dapat diunduh melalui Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (Simultan).
- b. Ketentuan e-sertifikat:
Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan mengumpulkan seluruh tugas yang diberikan.

8. Akomodasi

- a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:
 - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut).
 - Sandal kamar.
 - Gula, kopi, teh, dan air mineral.

9. Konsumsi

- a. Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam, serta *snack* selama kegiatan berlangsung.

- b. Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan penutupan.

10. Pembiayaan

- a. Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan serta biaya bahan/materi kegiatan menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.
- b. Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Peserta tidak mendapatkan uang saku selama pelaksanaan kegiatan.
- d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

11. Lain-lain

- a. Peserta dihimbau membawa BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya.
- b. Peserta diwajibkan mematuhi protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung.

12. Kontak

- a. Nomor telepon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.

BAB III

TATA TERTIB, SISTEM INFORMASI PESERTA, DAN ZONA INTEGRITAS

1. Tata Tertib

- a. Peserta wajib melapor pada petugas keamanan di pos keamanan Pusdik.
- b. Peserta wajib melakukan registrasi di ruang registrasi peserta.
- c. Peserta wajib menjaga kebersihan dan kerapihan seluruh lingkungan Pusdik.
- d. Peserta wajib menjaga semua fasilitas yang ada di lingkungan Pusdik.
- e. Apabila peserta akan meninggalkan lingkungan Pusdik, diharapkan melapor ke bagian keamanan.
- f. Menghilangkan kunci kamar akan dikenakan denda penggandaan kunci sebesar Rp. 150.000.
- g. Peserta dilarang membawa tamu ke kamar asrama, menerima tamu hanya diperbolehkan di ruang tamu setiap loby asrama.
- h. Jam kunjungan tamu maksimal pukul 22.00 WIB.
- i. Peserta dilarang keluar lingkungan Pusdik di atas pukul 22.00 WIB.
- j. Peserta dilarang merusak dan/atau membawa fasilitas yang ada di lingkungan Pusdik.
- k. Peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian acara di lingkungan Pusdik.
- l. Peserta wajib melapor pada petugas pada waktu *check out*.

2. Sistem Informasi

a. Fungsi Sistem Informasi Manajemen Peserta langsung dan transparan (SIMULTAN)

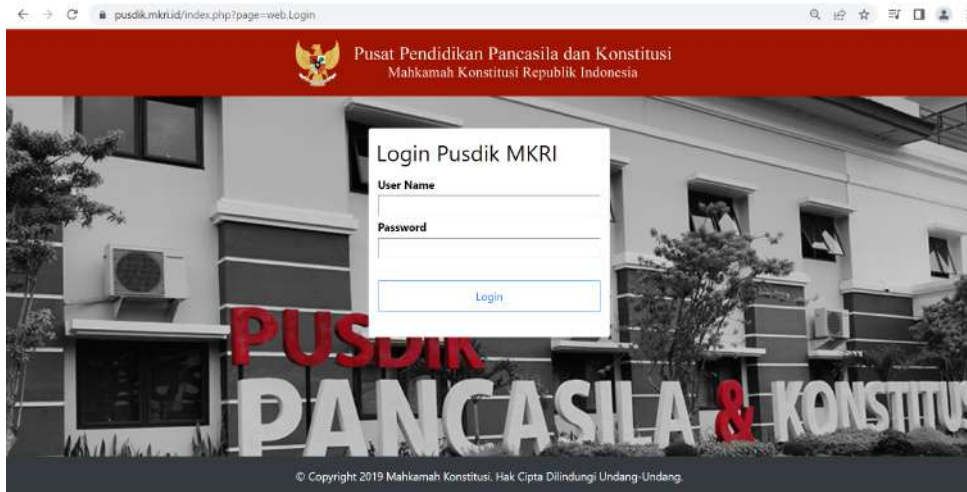
- 1) Pengisian daftar hadir (presensi) peserta dalam bentuk digital;
- 2) *Pre-test* dan *Post-test* secara *online*;
- 3) Kuesioner evaluasi narasumber setiap materi dan evaluasi kegiatan (di akhir kegiatan) secara *online*;
- 4) Panduan kegiatan (*Booklet*) dan Materi (Bahan Paparan) dalam bentuk *softfile*;
- 5) Mengunduh e-sertifikat setelah kegiatan berakhir.

b. Pedoman Penggunaan

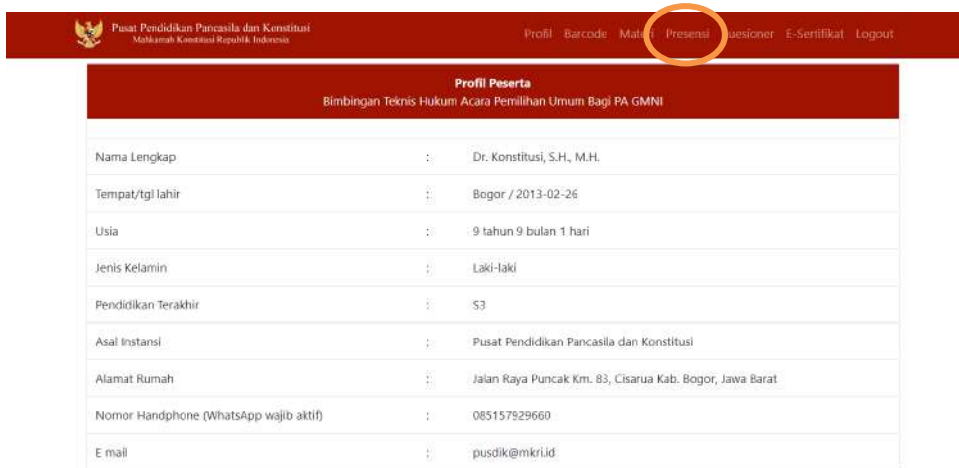
1. Akses laman *pusdik.mkri.id*. Pada halaman beranda, klik *Login* Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).



2. *Login* menggunakan *Username* dan *Password* yang telah diberikan oleh panitia.



3. Pada halaman profil peserta, klik menu Presensi untuk mengisi daftar hadir setiap sesi.



4. Klik Presensi pada sesi materi berjalan (sesuai jadwal) untuk mengisi daftar pada setiap sesi materi kegiatan.

#	Judul	Waktu	Absen
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 09:30 WIB	27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 10:00 WIB
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:00 WIB	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:30 WIB
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	29-11-2022 13:00 WIB s/d	29-11-2022 13:00 WIB s/d

5. Klik menu *Kuesioner* untuk mengisi *Pre-test*, *Post-test*, dan Evaluasi Kegiatan.

6. Pada halaman *Pre-test* dan *Post-test*, pilih jawaban yang menurut anda paling tepat. Soal *Pre-test* dan *Post-test* masing-masing sebanyak 15 nomor. Waktu mengerjakan *Pre-test* dan *Post-test* maksimal 20 menit.

 Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Komisi Pemilihan Umum, Mahkamah Konstitusi, and Pemantau Pemilu. At the bottom, there is a copyright notice: '© Copyright 2019 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.'"/>

7. Setelah mengisi *Pre-test* dan *Post-test*, klik *Simpan* untuk menyimpan hasilnya.

 Putusan, Putusan Sela, Akses terhadap berkas permohonan Pemohon melalui laman (website), Pengajuan permohonan secara daring (online), Persidangan jarak jauh (video conference), Siaran langsung proses persidangan melalui media internet (live streaming), and Semua benar. At the bottom, there is a blue button labeled 'Simpan' circled in black."/>

8. Mengisi evaluasi kegiatan

NO	A. Materi	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1.	Kesesuaian antara materi yang diberikan dengan mata ajar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi dan bermanfaat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Materi yang diberikan mudah dipahami	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

9. Klik *Isi Kuesioner* yang berada di samping kanan halaman untuk mengisi kuesioner evaluasi narasumber setiap sesi atau materi.

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
1	Penutupan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)		13-03-2020 14:00 s/d 13-03-2020 15:30	Isi Kuesioner
2	Tanda Terima Sertifikat dan Pin Alumni Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)		13-03-2020 15:30 s/d 13-03-2020 16:00	Isi Kuesioner
3	Wawasan Kebangsaan		11-09-2020 00:00 s/d 11-09-2020 23:00	Isi Kuesioner

10. Klik menu *Materi* untuk mengunduh panduan kegiatan (*booklet*) dan materi (bahan paparan)

#	Judul	Pemateri	File
1	Penanganan Perkara PUU berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Mahkamah Konstitusi	File
2	Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Mahkamah Konstitusi	File
3	Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Mahkamah Konstitusi	File
4	Teknik dan Diskusi Penyusunan Permohonan PUU	Mahkamah Konstitusi	File
5	Pembagian Kelas - Bimtek PUU bagi PERADI	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	File

3. Zona Integritas

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menjadi salah satu unit kerja yang diusulkan sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Dalam mendukung upaya Pembangunan Zona Integritas, Pusat Pendidikan Pancasila menyediakan berbagai jenis layanan pengaduan untuk meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi, diantaranya sebagai berikut:

- **Media Offline:**
 1. Meja pengaduan
 2. Pohon saran
 3. Kotak saran dan pengaduan
- **Media Online (*pusdik.mkri.id*)**
 1. Pengaduan masyarakat
 2. Benturan kepentingan
 3. Gratifikasi
 4. *Whistle Blowing System*
 5. Saran/masukan

4. Standar Pelayanan

Dalam mendukung upaya Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menyusun Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi untuk meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi. Pedoman standar pelayanan publik di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi merupakan panduan bagi pejabat dan pegawai dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih profesional, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif.

Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah sebagai berikut:

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

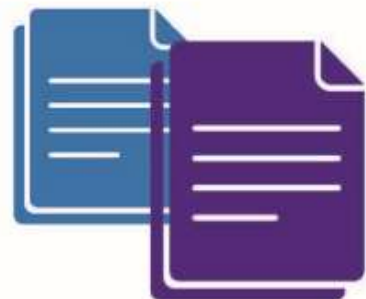
1 Persyaratan Pelayanan

Persyaratan Teknis Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Calon peserta sesuai nama yang terdapat pada surat tugas dari instansi/organisasi;
2. Calon peserta hanya dapat digantikan jika mendapatkan surat rekomendasi dan ditugaskan oleh instansi/organisasi dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
3. Calon peserta belum pernah mengikuti kegiatan pendidikan pancasila dan konstitusi sebelumnya yang sejenis;
4. Tidak diperkenankan membawa anak/keluarga;
5. Khusus bagi calon peserta wanita yang sedang hamil menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter serta surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti kegiatan dan bertanggung jawab atas kesehatan dan kehamilannya selama mengikuti kegiatan Pendidikan Pancasila dan konstitusi.

Persyaratan Administratif Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Mengisi dan menyerahkan biodata peserta sesuai formulir yang disiapkan panitia (dilakukan secara kolektif oleh instansi/organisasi);
2. Membawa dan atau bersedia menandatangani Surat Pernyataan Sehat;
3. Membawa laptop yang memiliki fasilitas wifi;
4. Membawa gawai dengan sistem operasi *android/ios/ windows phone*;
5. Membawa surat tugas dari instansi/ organisasi;
6. Membawa kartu Askes/BPJS/ asuransi lain (bagi yang memiliki), yang akan digunakan oleh peserta untuk pemeriksaan dan/atau pengobatan di klinik atau rumah sakit terdekat;



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

A. Persiapan:

1. Kalender Pendidikan;
2. Rancangan Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Kurikulum Pendidikan;
4. Jadwal Kegiatan;
5. Panduan Kegiatan;
6. Daftar Peserta Pendidikan;
7. Surat jawaban atas surat permohonan sebagai peserta kegiatan.

B. Pelaksanaan Pendidikan:

1. Registrasi Peserta;
2. Pelaksanaan Pendidikan:
 - Metode ceramah umum (aula);
 - Diskusi dan praktek (kelas khusus);
 - Outbound (untuk kegiatan tertentu).
3. Evaluasi Diklat:
 - Evaluasi Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Evaluasi Pemahaman Peserta Pendidikan.

C. Pelaporan:

1. Sertifikat;
Sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Memenuhi target minimum kehadiran;
 - Mengikuti dan memenuhi target minimum nilai praktek.
2. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka disusun laporan kegiatan sebagai salah satu laporan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban keuangan.

3 Jangka Penyelesaian

Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan jadwal kegiatan dari masing-masing kegiatan Pendidikan.

4 Biaya Tarif

Tanpa dikenakan biaya/tarif.

5 Produk Layanan

1. Tingkat pemahaman peserta pembelajaran hak konstitusional warga negara;
2. Tingkat kualitas layanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

6 Sarana dan Prasarana/Fasilitas

1. Ruangan dilengkapi dengan *air conditioner (AC)* dan akses internet;
2. Alat bantu pengajaran berbasis komputer *LCD* dan audio visual;
3. Kelengkapan kelas (papan tulis, spidol, penghapus, *flip chart*, *sound system*, *proyektor*, *LCD*);
4. Kelengkapan peserta:
 - a. Seminar kit;
 - b. Dokumentasi kegiatan dalam bentuk *link google drive*;
 - c. Buku panduan kegiatan dalam bentuk PDF;
 - d. Bahan ajar dari Narasumber.
5. Ruang Makan;
6. Ruang Penunjang: mushola dan toilet;
7. Posko kesehatan;
8. Sarana parkir kendaraan;
9. Akomodasi dan konsumsi;
10. Sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti *step lobby/ramp* bagi pengguna kursi roda, tempat parkir khusus, toilet khusus, *lift* khusus, kamar khusus bagi disabilitas, dan kulkas untuk menyimpan Air Susu Ibu (ASI);
11. Sarana olahraga, yaitu tenis meja dan tempat senam;
12. Pojok digital;
13. Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan).

7 Kompetensi Pelaksana

1. SDM yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan melalui analisis kebutuhan pendidikan;
2. SDM yang mampu merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. SDM yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing sesuai dengan tugasnya dalam penyelenggaraan Pendidikan;
4. Tenaga pengajar atau Narasumber yang memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktek sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
5. SDM yang memiliki perilaku santun, ramah, dan inisiatif dalam memberikan pelayanan Pendidikan.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

8 Pengawasan Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung;
2. Dilakukan pemantauan dan monitoring;
3. Dilakukan evaluasi terhadap peserta dan penyelenggaraan pendidikan;
4. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

10 Jumlah Pelaksana

Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, terdiri dari:

1. Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Narasumber;
3. Mancadaya;
4. Panitia dari instansi/organisasi;
5. Dukungan teknis pihak lainnya.

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Layanan langsung:

Meja Informasi dan Pengaduan
Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM.83, Tugu Selatan, Kec. Cisarua, Bogor, Jawa Barat 16750.

Layanan tidak langsung:

- Telepon: 021 23529000
- Whatsapp: 085157929660
- Email: pusdik@mkri.id atau office@mkri.id
- Web/Microsite: www.mkri.id atau pusdik.mkri.id
- Melalui Kotak Saran
- Melalui sistem pengaduan LAPOR pada tautan www.lapor.go.id

Jaminan Pelayanan

1. Setiap penjelasan atau pelayanan informasi sesuai dengan Maklumat Pelayanan Publik;
2. Setiap peserta mendapatkan pelayanan yang sama dengan peserta lainnya (tidak diskriminatif);
3. Rancangan kegiatan pendidikan mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan konstitusi;
4. Materi pendidikan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
5. Pengajar pendidikan memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktik sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
6. Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pancasila dan konstitusi dari peserta, narasumber dan penyelenggara.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

12 Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan

1. Perjanjian Kerjasama antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dengan Instansi/ Organisasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Pelayanan akomodasi dan konsumsi yang telah disediakan sesuai dengan standar;
3. Tersedia posko kesehatan;
4. Demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta:
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan CCTV;
 - Petugas Security berjaga 24 jam;
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan);
 - Tangga darurat dan titik kumpul.
5. Keselamatan pengguna layanan atas kelalaian petugas menjadi tanggung jawab Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama berada dilingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

13 Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal secara berkala, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2. Laporan Pengukuran Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

14 Masa Berlaku Izin Tidak ada

15 Waktu Pelayanan

1. Senin s.d. Kamis: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 12.00 WIB - 13.00 WIB);
2. Jumat: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 11.30 WIB - 13.00 WIB);
3. ATAU menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pendidikan.



BAB IV**HYMNE DAN MARS MAHKAMAH KONSTITUSI****Hymne Mahkamah Konstitusi***Syair : Taufiq Ismail**Lagu : Dwiki Dharmawan*

Dalam menunaikan tugas suci
Di Mahkamah Konstitusi
Wahai Tuhan Kami
Pencipta Agung Hukum dan Keadilan

Karuniai kami
Selalu bimbingan Mu
Menegakkan Hukum dan Keadilan

Menjaga dan Mentaati
Konstitusi.....
Untuk Bangsa Indonesia

---Music---

Dalam menunaikan tugas suci
Di Mahkamah Konstitusi
Wahai Tuhan Kami
Pencipta Agung Hukum dan Keadilan

Karuniai kami
Selalu bimbingan Mu
Menegakkan Hukum dan Keadilan

Menjaga dan Mentaati
Konstitusi.....
Untuk Bangsa Indonesia

Mars Mahkamah Konstitusi

Syair : Taufiq Ismail

Lagu : Dwiki Dharmawan

Marilah Kita Bersama
Menjaga Konstitusi Negara
Dengan Sebaik baiknya
Marilah kita Bersama
Tegakkan Konstitusi Negara

Pancasila Ideologi Bangsa
Konstitusi Supremasi Hukum
Memancarkan Keadilan
Sesuai Harapan Bangsa

Jayalah Mahkamah Konstitusi

---Music---

Marilah Kita Bersama
Menjaga Konstitusi Negara
Dengan Sebaik baiknya
Marilah kita Bersama
Tegakkan Konstitusi Negara

Pancasila Ideologi Bangsa
Konstitusi Supremasi Hukum
Memancarkan Keadilan
Sesuai Harapan Bangsa

Jayalah Mahkamah Konstitusi

BAB V

INFORMASI MENGENAI PUSDIK

1. Profil Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki 16 (enam belas) pegawai dimana terdiri dari 6 (enam) pejabat struktural, 1 (satu) pejabat fungsional, dan 10 (sepuluh) pelaksana. Berikut adalah biodata singkat mengenai pejabat struktural di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:



Nanang Subekti, S.E., M.S.E

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan
Konstitusi



Nanang Subekti, S.E., M.S.E

Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan



Budi Hari Wibowo, S.A.P., M.A.

Kepala Bagian Umum



Santhy Kustrihardiani, S.Psi.

Kepala Sub Bidang Program dan Evaluasi



Hadian Taofik Rachman, S.Sos., M.A.

Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan



Ardiansyah Salim, S.Sos., M.Si.

Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana



Bambang Sukmadi, S.E., M.A.B.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

*Contact Center Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi: **085157929660**

2. Sarana dan Prasarana di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki 7 unit gedung yang masing-masing dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Adapun ketujuh gedung tersebut adalah sebagai berikut:



a. Grha Konstitusi 1



Grha Konstitusi 1 dimanfaatkan sebagai rumah istirahat bagi para hakim dan narasumber. Terdiri dari 12 rumah dimana di dalamnya terdapat masing-masing 2 (dua) kamar, 1 (satu) kamar mandi, ruang tamu, ruang makan dan dapur. Selain untuk narasumber dan hakim, gedung ini juga dipergunakan sebagai rumah istirahat bagi Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

b. Grha Konstitusi 2



Gedung ini memiliki 2 lantai dimana lantai 2 adalah ruangan kantor untuk pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Di lantai 1 terdapat ruang poliklinik.

c. Grha Konstitusi 3



Merupakan gedung utama yang dipergunakan untuk kegiatan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Terdiri dari 2 lantai yang masing-masing dapat difungsikan sebagai ruang pendidikan. Pada lantai 1 terdapat 8 (delapan) kelas kecil yang dapat menampung peserta sebanyak 24 orang.

Kelas-kelas kecil tersebut dapat dialihkan menjadi 4 kelas besar yang dapat menampung sebanyak 48 peserta. Di lantai 2 adalah aula utama gedung yang bisa menampung peserta hingga 160 orang.

d. Grha Konstitusi 4 dan Grha Konstitusi 5



Dua gedung di atas dimanfaatkan sebagai kamar bagi para peserta selama kegiatan berlangsung. Masing-masing gedung terdiri dari 2 (dua) lantai. Tiap gedung terdiri dari 48 (empat puluh delapan) kamar. Setiap kamar dapat ditempati oleh 2 (dua) orang peserta.

e. Grha Konstitusi 6



Gedung yang dipergunakan untuk rumah jabatan eselon 3 hingga eselon 4 ini terdiri dari 2 (dua) lantai. Terdiri dari 2 (dua) rumah untuk eselon 3 dan 4 (empat) rumah untuk eselon 4.

f. Grha Konstitusi 7 dan Musholla



Gedung ini memiliki 1 (satu) ruang besar yang digunakan sebagai ruang makan bagi peserta. Terdapat pula musholla di bagian belakang gedung ini.

g. Fasilitas Wifi

Semua area Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan fasilitas *free wifi*. Adapun pemanfaatan fasilitas *wifi* dengan menggunakan *username* dan *password* sebagai berikut:

1. *Username*: **Pusdik_MK**, *password*: **pusdikmkri9**, untuk digunakan keperluan pendukung pendidikan di Gedung Grha 3;
2. *Username*: **GK3_PUSDIKLAT**, *password*: **pusdikmkri**, untuk digunakan keperluan pendukung pendidikan di Gedung Grha 3;

3. Fasilitas Ramah Disabilitas

Pusat Pendidikan Pancasila juga meningkatkan fasilitas pendukung yang ramah dengan kaum disabilitas sebagai berikut:

1. Parkir Prioritas Disabilitas;
2. *Elevator (Lift)*;
3. Kamar Prioritas Disabilitas; dan
4. Jalur Ramah Disabilitas.



PENJELASAN TEKNIS

Bimbingan Teknis Hukum Acara
Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur,
Bupati dan Wali Kota Tahun 2024 Bagi
Partai Politik Angkatan II

Senin, 30 September 2024





SELAMAT DATANG DI

ZONA INTEGRITAS

Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

PUSAT PENDIDIKAN
PANCASILA & KONSTITUSI

**MENUJU WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI
(WBBM)**

“ MEWUJUDKAN PERUBAHAN
UNTUK PELAYANAN YANG
PROFESIONAL DAN BERINTEGRITAS ”



www.mkri.id



[mahkamahkonstitusi](https://www.instagram.com/mahkamahkonstitusi)



[officialMKRI](https://www.facebook.com/officialMKRI)



[Mahkamah Konstitusi RI](https://www.youtube.com/MahkamahKonstitusiRI)



[officialMKRI](https://www.facebook.com/officialMKRI)



[@officialMKRI](https://twitter.com/officialMKRI)



[@mahkamahkonstitusi](https://www.instagram.com/mahkamahkonstitusi)



[Mahkamah Konstitusi RI](https://www.youtube.com/MahkamahKonstitusiRI)

www.mkri.id



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Terima Kasih,
Bantu Kami
Menjaga Integritas
dengan
tidak memberi Uang
atau
pemberian apapun



**Integritas Kami
Tak akan Anda Bisa Beli.**

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
MAHKAMAH KONSTITUSI RI
upg@mkri.id



UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI

NO
Gratifikasi



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id



MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL, TANPA BIAYA, MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS, BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 13 APRIL 2024
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
HERU SETIAWAN



Sekretaris Jenderal
Heru Setiawan - NIP. 19690609 199303 1001
Digital Signature
mk841709954240413112703






MAKLUMAT PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

KAMI MENYATAKAN SIAP DAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN SEBAIK-BAIKNYA SESUAI DENGAN AMANAT UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

JAKARTA, 13 APRIL 2024
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
HERU SETIAWAN



PAKTA INTEGRITAS

-  **Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:**
 - ❖ Menyelenggarakan kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan.
 - ❖ Menyediakan tempat kegiatan, bahan ajar, dan narasumber.
 - ❖ Menerbitkan Sertifikat Keikutsertaan kepada peserta yang memenuhi syarat.
-  **Peserta:**
 - ❖ Hadir tepat waktu di ruang pembelajaran.
 - ❖ Tidak memberikan tip dalam bentuk apapun kepada pegawai Pusat Pendidikan Pancasila & Konstitusi.
 - ❖ Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.
-  **Narasumber:**
 - ❖ Menyampaikan materi sesuai jadwal yang ditetapkan.
 - ❖ Tidak menerima tip dalam bentuk apapun.
 - ❖ Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

PANCASILA

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

1 Persyaratan Pelayanan

Persyaratan Teknis Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Calon peserta sesuai nama yang terdapat pada surat tugas dari instansi/organisasi;
2. Calon peserta hanya dapat digantikan jika mendapatkan surat rekomendasi dan ditugaskan oleh instansi/organisasi dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
3. Calon peserta belum pernah mengikuti kegiatan pendidikan pancasila dan konstitusi sebelumnya yang sejenis;
4. Tidak diperkenankan membawa anak/keluarga;
5. Khusus bagi calon peserta wanita yang sedang hamil menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter serta surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti kegiatan dan bertanggung jawab atas kesehatan dan kehamilannya selama mengikuti kegiatan Pendidikan Pancasila dan konstitusi.

Persyaratan Administratif Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Mengisi dan menyerahkan biodata peserta sesuai formulir yang disiapkan panitia (dilakukan secara kolektif oleh instansi/organisasi);
2. Membawa dan atau bersedia menandatangani Surat Pernyataan Sehat;
3. Membawa laptop yang memiliki fasilitas wifi;
4. Membawa gawai dengan sistem operasi *android/ios/ windows phone*;
5. Membawa surat tugas dari instansi/ organisasi;
6. Membawa kartu Askes/BPJS/ asuransi lain (bagi yang memiliki), yang akan digunakan oleh peserta untuk pemeriksaan dan/atau pengobatan di klinik atau rumah sakit terdekat;



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

A. Persiapan:

1. Kalender Pendidikan;
2. Rancangan Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Kurikulum Pendidikan;
4. Jadwal Kegiatan;
5. Panduan Kegiatan;
6. Daftar Peserta Pendidikan;
7. Surat jawaban atas surat permohonan sebagai peserta kegiatan.

B. Pelaksanaan Pendidikan:

1. Registrasi Peserta;
2. Pelaksanaan Pendidikan:
 - Metode ceramah umum (aula);
 - Diskusi dan praktek (kelas khusus);
 - Outbound (untuk kegiatan tertentu).
3. Evaluasi Diklat:
 - Evaluasi Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Evaluasi Pemahaman Peserta Pendidikan.

C. Pelaporan:

1. Sertifikat;
Sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Memenuhi target minimum kehadiran;
 - Mengikuti dan memenuhi target minimum nilai praktek.
2. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka disusun laporan kegiatan sebagai salah satu laporan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban keuangan.

3 Jangka Penyelesaian

Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan jadwal kegiatan dari masing-masing kegiatan Pendidikan.

4 Biaya Tarif Tanpa dikenakan biaya/tarif.



5 Produk Layanan

1. Tingkat pemahaman peserta pembelajaran hak konstitusional warga negara;
2. Tingkat kualitas layanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

6 Sarana dan Prasarana/Fasilitas

1. Ruangan dilengkapi dengan *air conditioner (AC)* dan akses internet;
2. Alat bantu pengajaran berbasis komputer *LCD* dan audio visual;
3. Kelengkapan kelas (papan tulis, spidol, penghapus, *flip chart*, *sound system*, *proyektor*, *LCD*);
4. Kelengkapan peserta:
 - a. Seminar kit;
 - b. Dokumentasi kegiatan dalam bentuk *link google drive*;
 - c. Buku panduan kegiatan dalam bentuk PDF;
 - d. Bahan ajar dari Narasumber.
5. Ruang Makan;
6. Ruang Penunjang: mushola dan toilet;
7. Posko kesehatan;
8. Sarana parkir kendaraan;
9. Akomodasi dan konsumsi;
10. Sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti *step lobby/ramp* bagi pengguna kursi roda, tempat parkir khusus, toilet khusus, *lift* khusus, kamar khusus bagi disabilitas, dan kulkas untuk menyimpan Air Susu Ibu (ASI);
11. Sarana olahraga, yaitu tenis meja dan tempat senam;
12. Pojok digital;
13. Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan).

7 Kompetensi Pelaksana

1. SDM yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan melalui analisis kebutuhan pendidikan;
2. SDM yang mampu merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. SDM yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing sesuai dengan tugasnya dalam penyelenggaraan Pendidikan;
4. Tenaga pengajar atau Narasumber yang memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktek sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
5. SDM yang memiliki perilaku santun, ramah, dan inisiatif dalam memberikan pelayanan Pendidikan.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

8 Pengawasan Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung;
2. Dilakukan pemantauan dan monitoring;
3. Dilakukan evaluasi terhadap peserta dan penyelenggaraan pendidikan;
4. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

10 Jumlah Pelaksana

Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, terdiri dari:

1. Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Narasumber;
3. Mancadaya;
4. Panitia dari instansi/organisasi;
5. Dukungan teknis pihak lainnya.

Jaminan Pelayanan

1. Setiap penjelasan atau pelayanan informasi sesuai dengan Maklumat Pelayanan Publik;
2. Setiap peserta mendapatkan pelayanan yang sama dengan peserta lainnya (tidak diskriminatif);
3. Rancangan kegiatan pendidikan mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan konstitusi;
4. Materi pendidikan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
5. Pengajar pendidikan memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktik sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
6. Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pancasila dan konstitusi dari peserta, narasumber dan penyelenggara.

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Layanan langsung:

Meja Informasi dan Pengaduan Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM.83, Tugu Selatan, Kec. Cisarua, Bogor, Jawa Barat 16750.

Layanan tidak langsung:

- Telepon: 021 23529000
- Whatsapp: 085157929660
- Email: pusdik@mkri.id atau office@mkri.id
- Web/Microsite: www.mkri.id atau pusdik.mkri.id
- Melalui Kotak Saran
- Melalui sistem pengaduan LAPOR pada tautan www.lapor.go.id

11



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

12 Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan

1. Perjanjian Kerjasama antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dengan Instansi/Organisasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Pelayanan akomodasi dan konsumsi yang telah disediakan sesuai dengan standar;
3. Tersedia posko kesehatan;
4. Demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta:
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan CCTV;
 - Petugas Security berjaga 24 jam;
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan);
 - Tangga darurat dan titik kumpul.
5. Keselamatan pengguna layanan atas kelalaian petugas menjadi tanggung jawab Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama berada di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

13 Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal secara berkala, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2. Laporan Pengukuran Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

14 Masa Berlaku Izin

Tidak ada

15 Waktu Pelayanan

1. Senin s.d. Kamis: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 12.00 WIB - 13.00 WIB);
2. Jumat: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 11.30 WIB - 13.00 WIB);
3. ATAU menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pendidikan.



Sampaikan Aspirasi dan Pengaduan Anda !



**Kuesioner
Online**



**Masukan dan Saran
di Microsite
pusdik.mkri.id**



Kotak Saran



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

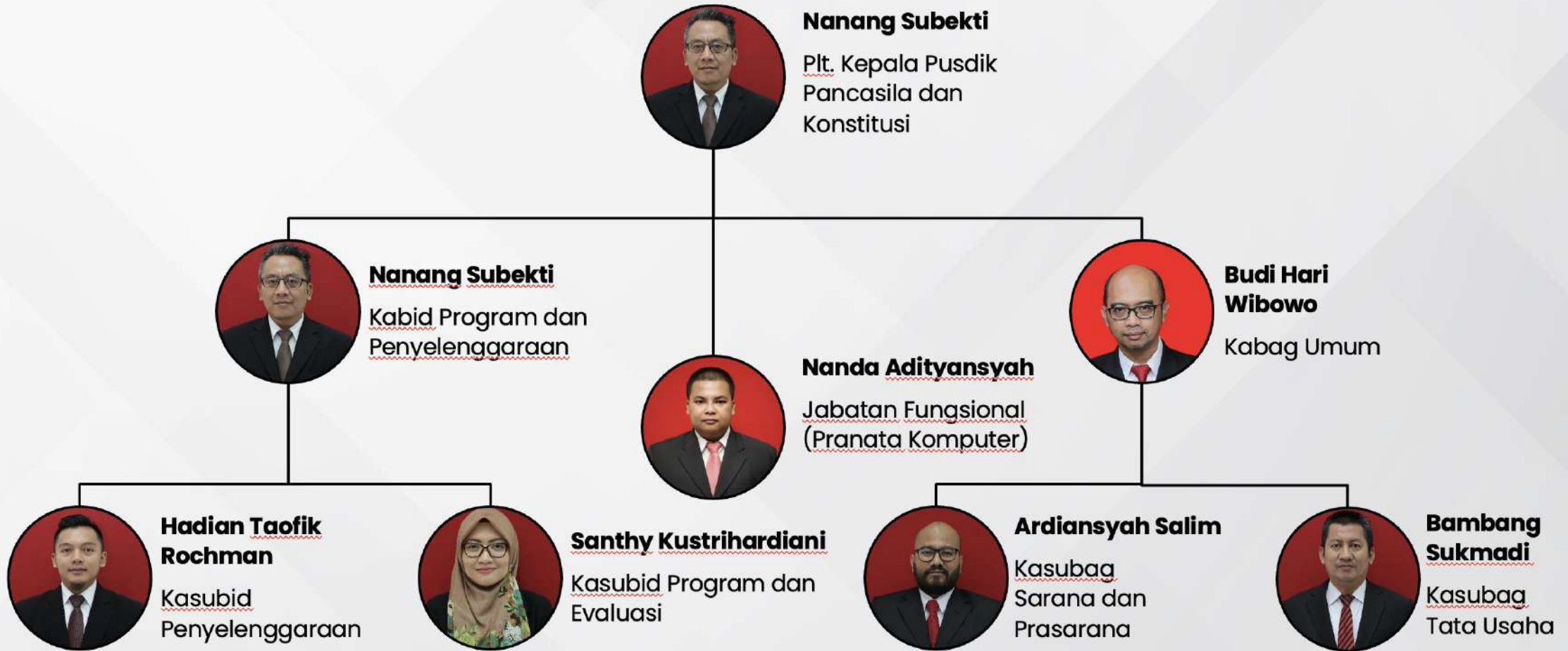
www.mkri.id

Mitigasi Bencana

“Jika terjadi bencana gempa bumi, secepatnya masuk ke kolong meja. Setelah gempa bumi selesai, secara tertib menuju titik kumpul.”



TIM PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI



TIM PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI



Chafid Sugianto



Edwin Aditya Irawan



Angga Putri Gardina



Muhlis Nova



Suhardi



Andy Fahri



Yahya Amarullah Taufik



Edwin Rivano

KURIKULUM KEGIATAN BAGI PARTAI POLITIK II

Hukum Acara
Perselisihan Hasil
Pemilihan Kepala
Daerah

Dinamika Penanganan
Perkara Perselisihan
Hasil Pemilihan Kepala
Daerah

Mekanisme, Tahapan
dan Jadwal
Penanganan Perkara
Perselisihan Hasil
Pemilihan Kepala
Daerah

Pemanfaatan
Teknologi dan
Informasi dalam
Penanganan Perkara
Perselisihan Hasil
Pemilihan Kepala
Daerah

Teknik Penyusunan
Permohonan Pemohon
dan Keterangan Pihak
Terkait dalam
Penanganan PHP
Kepala Daerah

Praktik Penyusunan
Permohonan Pemohon
dan Keterangan
PihakTerkait dalam
Penanganan Perkara
PHP Kepala Daerah

Evaluasi Hasil
Penyusunan
Permohonan
Pemohon dan
Keterangan Pihak
Terkait dalam
Penanganan Perkara
PHP Kepala Daerah

PELAKSANAAN KEGIATAN

- **Waktu** : Senin s.d. Kamis
30 September s.d. 3 Oktober 2024
- **Tempat** :
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Jalan Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor,
Jawa Barat

JADWAL KEGIATAN

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Senin, 30 September 2024	09.30 – 14.30 WIB	Registrasi Peserta dan Check In
	14.30 – 15.30 WIB	Penjelasan Teknis
	15.30 – 16.00 WIB	Penjelasan Simultan dan <i>Pre-Test</i>
	16.00 – 16.30 WIB	<i>Coffee Break</i>
	16.30 – 18.00 WIB	Pembukaan 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Hymne Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan Kegiatan oleh YM Ketua MK 6. Mars Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa
	18.00 – 19.00 WIB	ISHOMA
	19.00 – 21.00 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024 Narasumber: YM Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. & YM Hakim Konstitusi Dr. Ridwan Mansur, S.H., M.H.

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Selasa, 1 Oktober 2024	06.00 – 07.30 WIB	Makan Pagi
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024 Narasumber: Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan – Dr. Fajar Laksono, S.Sos., M.H.
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik Narasumber: Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.30 – 15.30 WIB	Sesi IV: Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Narasumber: Panitera Mahkamah Konstitusi – Dr. Muhidin, S.H., M.Hum.
	15.30 – 17.30 WIB	ISHOMA
	17.30 – 19.00 WIB	Makan Malam

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Rabu, 2 Oktober 2024	05.30 – 06.30 WIB	Senam Pagi
	06.30 – 08.30 WIB	Makan Pagi
	08.30 – 10.00 WIB	Sesi V: Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon/Keterangan Pihak Terkait dlm Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, & Wali Kota Tahun 2024 Narasumber: Panitera Konstitusi Ahli Madya
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VI: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon/Keterangan Pihak Terkait dlm Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, & Wali Kota Tahun 2024 Narasumber: Panitera Konstitusi / Asisten Ahli Hakim Konstitusi
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VII: Lanjutn Penyusunan Permohonan Pemohon/Keterangan Pihak Terkait dlm Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, & Wali Kota Tahun 2024 Narasumber: Panitera Konstitusi / Asisten Ahli Hakim Konstitusi
	15.00 – 18.00 WIB	Istirahat
	18.00 – 19.00 WIB	Makan Malam
	19.00 – 21.00 WIB	Hiburan / Pentas Seni

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Kamis, 3 Oktober 2024	06.00 – 08.00 WIB	Makan Pagi
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi VIII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon/Keterangan Pihak Terkait dlm Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, & Wali Kota 2024 Narasumber: Panitera Konstitusi / Asisten Ahli Hakim Konstitusi
	10.00 – 10.30 WIB	Evaluasi Kegiatan dan <i>Post-Test</i>
	10.30 – 12.00 WIB	Penutupan 1. Kesan dan Pesan Perwakilan Peserta 2. Laporan Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 3. Sambutan Penutupan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 4. Pembacaan Doa



PESERTA KEGIATAN

- ✓ Peserta sebanyak 162 orang meliputi peserta 4 partai politik nasional (38 orang) dan 2 partai local Aceh (5 orang)
- ✓ Membawa Surat Tugas untuk mengikuti secara penuh kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024.
- ✓ Peserta wajib membawa laptop untuk keperluan kegiatan pembelajaran selama di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
- ✓ Bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

KETENTUAN UMUM

- ❖ Acara dilaksanakan selama 4 hari 3 malam.
- ❖ Peserta wajib hadir tepat waktu di tiap sesi dan melakukan presensi.
- ❖ Daftar hadir disediakan pada tiap sesi materi dan diakses secara *online*.
- ❖ Peserta diwajibkan mengisi kuesioner evaluasi narasumber dan kuesioner evaluasi kegiatan melalui sistem informasi.
- ❖ Peserta akan melakukan *Pre-Test* dan *Post-Test* secara *online* untuk mengukur kemampuan umum peserta pada alamat **pusdik.mkri.id**
- ❖ Peserta wajib membawa laptop untuk digunakan dalam sesi praktik.
- ❖ Peserta dihimbau membawa kartu BPJS Kesehatan atau Kartu Asuransi Kesehatan lainnya.

KONSTITUSI



BAHAN MATERI DAN E-SERTIFIKAT

❖ Peserta akan mendapatkan seminar kits, yang meliputi:

- ✓ Tas
- ✓ Buku Saku UUD Tahun 1945/UU Mahkamah Konstitusi (*Soft File*)
- ✓ Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 dalam Bentuk *Soft File*.
- ✓ Block Note dan Pulpen
- ✓ Modul/Makalah/Hand out Materi dari Narasumber (*Soft File*)
- ✓ Panduan Kegiatan

❖ e-Sertifikat

- ✓ Peserta akan diberikan e-sertifikat (digital) keikutsertaan kegiatan
- ✓ Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) serta mengerjakan dan mengumpulkan tugas praktik yang diberikan
- ✓ Apabila peserta tidak bisa mengikuti kegiatan karena sakit, maka wajib ke Poliklinik untuk dicatat dan ditangani
- ✓ Apabila peserta ada kepentingan lain sehingga harus meninggalkan kegiatan sebelum acara penutupan, peserta yang bersangkutan wajib mendapat persetujuan dari panitia

AKOMODASI

- ❖ Peserta wajib tinggal di mess Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- ❖ Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- ❖ Fasilitas dalam kamar peserta, meliputi:
 - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut;
 - Sandal kamar; serta
 - Gula, kopi, teh dan air mineral.

KONSUMSI

- ❖ Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam serta *snack* selama kegiatan berlangsung.
- ❖ Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan penutupan.

PEMBIAYAAN

- ❖ Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan serta biaya bahan materi kegiatan menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi.
- ❖ Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi. Tempat kedudukan adalah alamat kantor dewan pimpinan daerah/wilayah provinsi.
- ❖ Peserta tidak mendapatkan uang saku selama kegiatan.
- ❖ Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

MEKANISME PENGGANTIAN BIAYA TRANSPORTASI

- ❖ Penggantian biaya transportasi peserta bersifat *reimbursement*. Penggantian biaya dilakukan setelah peserta berada di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
- ❖ **Beberapa kelengkapan yang harus diserahkan sebagai syarat penggantian transport peserta adalah :**
 - 1) Surat Tugas yang menunjukkan nama dan asal (DPP dan DPD/DPW);
 - 2) *Boarding pass* kedatangan;
 - 3) Tiket Datang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api);
 - 4) Tiket Pulang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api);
 - 5) Bukti Pengeluaran Riil lainnya, seperti Struk Bensin, bukti pembayaran tol bagi pengguna kendaraan pribadi serta kuitansi transportasi darat lainnya bagi pengguna kendaraan umum.

Kelima Kelengkapan tersebut harus **diserahkan saat Registrasi**.
- ❖ Tiket pesawat yang diganti adalah tiket **berangkat dari tempat kedudukan dan pulang ke tempat kedudukan** (tempat kedudukan ditunjukkan dari surat tugas). Tiket yang bukan berasal/pulang ke tempat kedudukan, *tidak diganti*.

MEKANISME PENGGANTIAN BIAYA TRANSPORTASI

❖ **Boarding pass**

Boarding pass berangkat harus asli, tidak boleh fotokopi.

❖ **Tiket Datang dan Tiket Pulang Pesawat**

- 1) Tiket Pesawat harus riil (ada fisiknya, tidak *markup*/fiktif);
- 2) Tiket pesawat adalah Tiket Ekonomi (disarankan yang harganya ekonomis);
- 3) Tanggal Tiket Datang Paling lama 3 hari sebelum kegiatan (tiket yang lebih dari 3 hari sebelum kegiatan, tidak diganti);
- 4) Tanggal Tiket Pulang Paling lama 3 hari setelah kegiatan (tiket yang melebihi 3 hari setelah kegiatan, tidak diganti);
- 5) Nama tiket harus sesuai dengan nama peserta;
- 6) Tercantum harga tiket pada tiket pesawat;
- 7) Biaya Perubahan/*Reschedulling* jadwal keberangkatan menjadi tanggung jawab peserta.
- 8) Biaya tiket yang diganti sesuai dengan harga riil tiket yang tertera dan sesuai hasil konfirmasi maskapai.



MEKANISME PENGGANTIAN BIAYA TRANSPORTASI

❖ Transportasi Darat/Laut

- 1) Transportasi Darat dari Tempat Kedudukan ke Bandara Asal/tiba (PP) dan Transportasi Darat Jakarta-Bogor (PP) diganti sesuai dengan pengeluaran riil sehingga harus dilampirkan bukti pengeluaran riil nya seperti Kuitansi. Penggantian biaya transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah.
- 2) Peserta yang menggunakan kendaraan pribadi, akan diganti transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah, meliputi biaya BBM (PP) dan Biaya tol yang dilampirkan bukti pengeluaran riil nya (Kuitansi/Struk).
- 3) Bila menggunakan **kereta/transportasi laut**, maka tiket kereta/transportasi laut **harus dilampirkan**. Tiket kereta yang diganti adalah kelas ekonomi dan eksekutif.
- 4) Standar biaya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.

❖ Penggantian transportasi akan dilaksanakan **pada hari terakhir** setelah penutupan.

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PESERTA LANGSUNG DAN TRANSPARAN (SIMULTAN)

pusdik.mkri.id

- ❖ Registrasi dan Absensi
- ❖ *Pre Test* dan *Post Test*
- ❖ Kuesioner Evaluasi Narasumber dan Evaluasi Kegiatan
- ❖ *Softcopy* materi kegiatan
- ❖ e-Sertifikat



LAYANAN WI-FI

Nama Wi-Fi : *Pusdik_MK*

Password : *pusdikmkri9*

Nama Wi-Fi : *GK3_PUSDIKLAT*

Password : *pusdikmkri*





**FASILITAS
DI PUSAT
PENDIDIKAN
PANCASILA
DAN
KONSTITUSI**



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

Grha Konstitusi 1



- Rumah Istirahat bagi para Hakim, Narasumber, dan Tamu VIP
- Terdiri dari 12 Ruangan

Grha Konstitusi 2



- Gedung Kantor Administrasi
- Poliklinik



Grha Konstitusi 3

- Gedung Penyelenggaraan Kegiatan Pembelajaran yang terdiri dari 2 Lantai
- Terdapat *Roof Top* di Atas Gedung

KONSTITUSI

Grha Konstitusi 3



- Aula Penyelenggaraan Kegiatan Pembelajaran dengan Kapasitas 160 Peserta dan Dilengkapi dengan Videotron



- 4 Ruang Kelas Besar dengan Kapasitas 40 Orang per Kelas
- Dapat Dibagi Menjadi 8 Kelas Kecil dengan Kapasitas 20 Orang



Grha Konstitusi 4

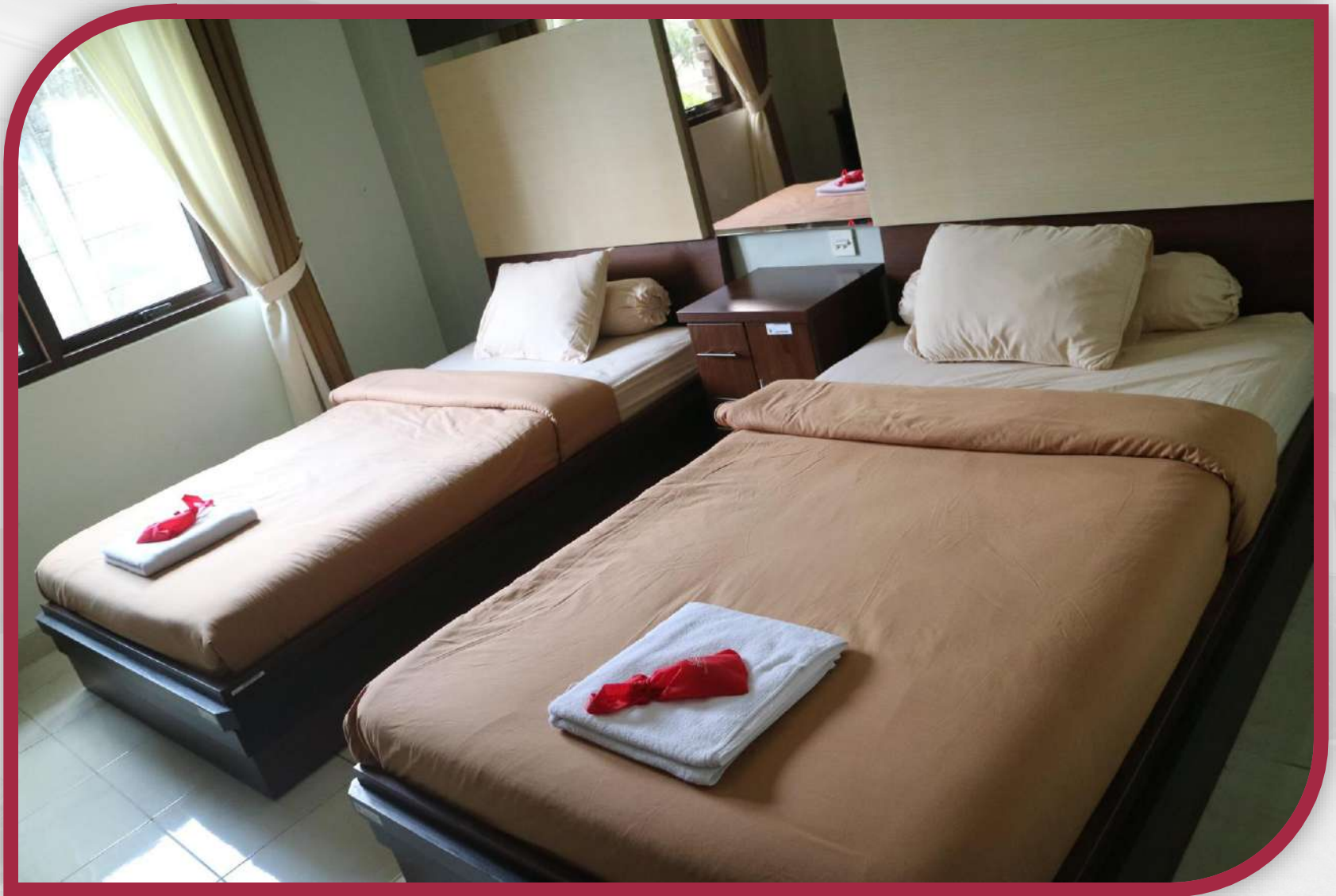


Grha Konstitusi 5



Gedung yang digunakan sebagai tempat istirahat para peserta kegiatan

Kamar Peserta di Grha Konstitusi 4 dan 5



Grha Konstitusi 7



Tempat Makan Peserta

Mushola



Di Samping Grha Konstitusi 7

Fasilitas di Dalam Grha Konstitusi 7



Fasilitas Lainnya



Ruang Registrasi dan Ruang Tunggu Peserta di Grha Konstitusi 2

Fasilitas Lainnya



Parkir Khusus Disabilitas
di Depan Grha Konstitusi 4



Lift
di Lobby Grha Konstitusi 2



Ruang Laktasi
di Grha Konstitusi 4



Fasilitas Lainnya



Poliklinik
di Grha Konstitusi 2



Pojok Digital
di Grha Konstitusi 2



**T
E
R
I
M
A**

**K
A
S
I
H**



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PEDOMAN PENGGUNAAN SIMULTAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA
TAHUN 2024

SIMULTAN
(Sistem Informasi Manajemen Peserta
Langsung dan Transparan)



LAYANAN WI-FI

Nama Wi-Fi : *Pusdik_MK*

Password : *pusdikmk9*

Nama Wi-Fi : *GK3_PUSDIKLAT*

Password : *pusdikmkri*



FUNGSI SIMULTAN



Pre & Post Test

Mengerjakan *Pre Test* dan *Post Test* secara *online* dengan login sesuai ID peserta



Evaluasi Narasumber dan Kegiatan

Mengisi *Kuesioner Evaluasi Narasumber dan Kuesioner Evaluasi Kegiatan* (di akhir kegiatan) secara *online*



Booklet & Materi

Mengunduh pedoman kegiatan dan bahan paparan narasumber



Daftar Hadir

Daftar hadir/presensi kami sediakan dalam bentuk digital



E-Sertifikat

Mengunduh e-Sertifikat setelah kegiatan berakhir

Login ke dalam Akun Sistem Informasi Peserta (SIMULTAN)



**Untuk Login ke dalam
Akun Sistem Informasi
Peserta (SIMULTAN),
Peserta Scan QR Code
yang Ada pada Tanda
Peserta (ID Card
Peserta)**

Akses laman pusdik.mkri.id pada *browser*



The screenshot shows a web browser displaying the homepage of PusdikMK. The browser's address bar shows the URL "pusdik.mkri.id". The website features a dark blue header with the PusdikMK logo on the left and a navigation menu on the right. The main content area has a blue background with a large white text block and a circular inset image of the building.

PusdikMK

[Beranda](#) [Tentang Pusdik](#) [Simultan](#) [Kegiatan](#) [Alumni](#) [Zona Integritas](#) [Informasi Publik](#) [Kontak](#)

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

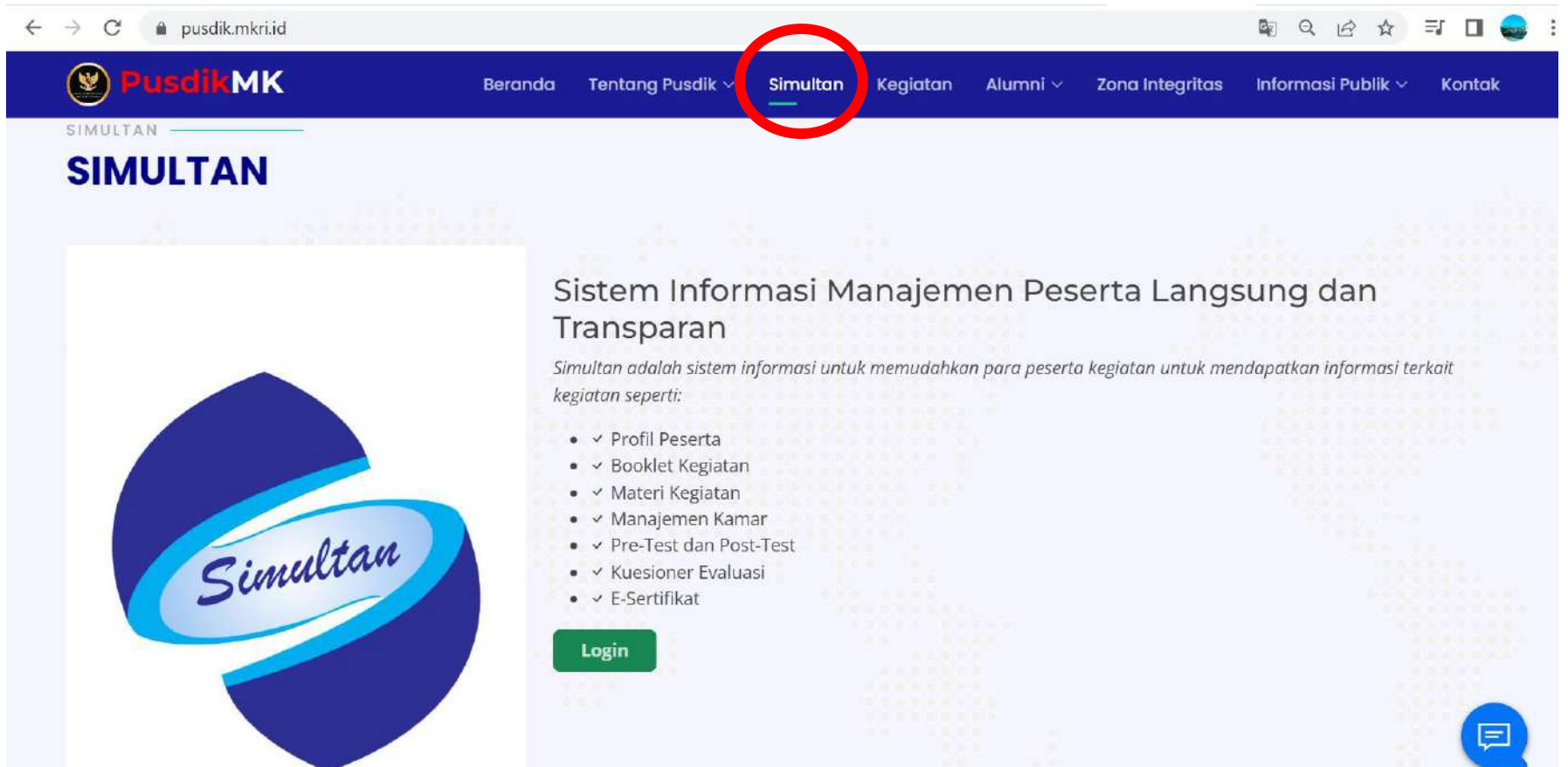
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

[Sejarah Singkat](#)

**PUSDIK
PANCASILA & KONSTITUSI**

[Chat](#)

Klik LOGIN pada bagian SIMULTAN



pusdik.mkri.id

PusdikMK Beranda Tentang Pusdik **Simultan** Kegiatan Alumni Zona Integritas Informasi Publik Kontak

SIMULTAN

SIMULTAN

Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan

Simultan adalah sistem informasi untuk memudahkan para peserta kegiatan untuk mendapatkan informasi terkait kegiatan seperti:

- ✓ Profil Peserta
- ✓ Booklet Kegiatan
- ✓ Materi Kegiatan
- ✓ Manajemen Kamar
- ✓ Pre-Test dan Post-Test
- ✓ Kuesioner Evaluasi
- ✓ E-Sertifikat

Login

Masukan Username dan Password

← → ↻ pusdik.mkri.id/index.php?page=web.Login



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Login Pusdik MKRI

User Name

Password

Login

© Copyright 2019 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.



Profil Peserta

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Nama Lengkap	:	Dr. Konstitusi, S.H., M.H.
Tempat/tgl lahir	:	Bogor / 2013-02-26
Usia	:	9 tahun 9 bulan 1 hari
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Pendidikan Terakhir	:	S3
Asal Instansi	:	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Alamat Rumah	:	Jalan Raya Puncak Km. 83, Cisarua Kab. Bogor, Jawa Barat
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	:	085157929660
E mail	:	pusdik@mkri.id

Profil Peserta

Meng-edit Profil Peserta



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

[Profil](#) [Barcode](#) [Materi](#) [Presensi](#) [Kuesioner](#) [E-Sertifikat](#) [Logout](#)



NIK	:	
Nama Lengkap	:	Safira Putri Purnama, S.Kom
Tempat/tgl lahir	:	Jakarta / 1985-09-26
Usia	:	37 tahun 4 bulan 21 hari
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Pendidikan Terakhir	:	S2
Asal Instansi	:	Mahkamah Konstitusi RI
Jabatan	:	Programmer Utama
Alamat Rumah	:	Desa Satriamekar D.K.I. JAKARTA, KOTA JAKARTA TIMUR
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	:	
E mail	:	
Kamar	No	Grha

Edit Profile

Klik “Edit Profile”

Catatan:

***Nama Lengkap dan Gelar
yg tercantum pada Profil
Akun Sistem Informasi
Peserta (SIMULTAN) yg
akan Dicetak pada e-
Sertifikat***

Edit Profil Peserta
Tes Bimtek jangan di hapus dulu ya

NIK * :

Gelar Depan :

Nama Lengkap * : Safira Putri Purnama
Usulan Perbaikan Nama :
Usulan Perbaikan Nama (Isiah Purnama) menunggu persetujuan panitia, terima kasih.

Gelar Belakang : S.Kim

Tempat/Tanggal Lahir * : Jakarta 1985-09-26

Jenis Kelamin * : Perempuan

Pendidikan * : S2

Instansi * : Mahkamah Konstitusi RI

Jabatan * : Programmer Utama

Alamat * :

Desa/Kelurahan * : Desa Satriamekar

Provinsi * : D.K.I. JAKARTA

Kabupaten/Kota * : KOTA JAKARTA TIMUR

HP * :

Email * :

[Update Data](#)

Meng-edit Profil Peserta


Peserta Dapat:

1. Revisi Nama Lengkap (Perlu Persetujuan Pusdik MK melalui Sistem);
2. Tambahkan Gelar; dan
3. Lengkapi Data yg Masih Kosong.

Selanjutnya, klik “Update Data” pada Bagian Bawah Laman.

Meng-edit Profil Peserta

Profil Peserta
Tes Bimtek jangan di hapus dulu ya



NIK	:	
Nama Lengkap	:	Safira Putri Purnama, S.Kom <small>(Usulan Perbaikan Nama (Ishak Purnama) menunggu persetujuan panitia, terima kasih)</small>
Tempat/tgl lahir	:	Jakarta / 1985-09-26
Usia	:	37 tahun 4 bulan 21 hari
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Pendidikan Terakhir	:	S2
Asal Instansi	:	Mahkamah Konstitusi RI
Jabatan	:	Programmer Utama
Alamat Rumah	:	Desa Setriamekar D.K.I. JAKARTA, KOTA JAKARTA TIMUR
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	:	
E mail	:	
Kamar	No.	Grha

[Edit Profile](#)

Setelah peserta Klik “Update Data” pada Laman sebelumnya, maka Peserta akan kembali ke Laman Profil Peserta.

Apabila peserta merevisi Nama Lengkap, akan ada notifikasi “Usulan Perbaikan Nama menunggu persetujuan panitia. Terima kasih.”



Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

#	Judul	Pemateri	File
1	Eksistensi dan Pemberdayaan Masyarakat Adat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia	Mahkamah Konstitusi	File
2	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	Mahkamah Konstitusi	File
3	Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	Mahkamah Konstitusi	File
4	Bimbingan Teknis	Mahkamah Konstitusi	File

Mendownload Materi atau Bahan Paparan Narasumber



Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

#	Judul	Waktu	Absen
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 09:30 WIB	Presensi 27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 10:00 WIB
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:00 WIB	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:30 WIB
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	29-11-2022 13:00 WIB s/d	29-11-2022 13:00 WIB s/d

Klik tombol “Presensi” yang berwarna biru

*Tombol “Presensi” berwarna biru hanya akan muncul ketika materi dimulai sesuai jadwal hingga 30 menit setelah materi selesai sesuai jadwal.

*Presensi dilakukan pada setiap sesi Materi



Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

#	Judul	Waktu	Absen
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 09:30 WIB	Sudah Absen 27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 10:00 WIB
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:00 WIB	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:30 WIB
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	29-11-2022 13:00 WIB s/d	29-11-2022 13:00 WIB s/d





Bimbingan Teknis atau PPHKWN

[E-Sertifikat](#)

Mengunduh e-Sertifikat



622ae73b0c0f7.pdf

1 / 2



54%



Klik Tanda Panah Bawah untuk Mengunduh (*Download*)

Mengisi *Pre Test* dan *Post Test*



Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

0

Nilai Post Test

:

0

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
----	-------	----------	-------	-----------



Nilai Pre Test

Nilai Post Test

14

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila		29-11-2022 07:30 s/d 29-11-2022 09:30	Isi Kuesioner
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme		29-11-2022 10:00 s/d 29-11-2022 12:00	Isi Kuesioner
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945		29-11-2022 13:00 s/d 29-11-2022 15:00	Isi Kuesioner

Mengisi Kuesioner Evaluasi Narasumber



Kuesioner Evaluasi Narasumber Oleh Peserta

Contoh Kegiatan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Konstitusi & Persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019
Bagi Karyawan Mancadaya Mahkamah Konstitusi Angkatan II

Penilaian oleh Peserta

NO	Penilaian Pelaksanaan Kegiatan	Sangat Buruk	Buruk	Baik	Sangat Baik
1.	Kemampuan Menyajikan Materi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Sistematika Penyajian Materi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Interaksi Dengan Peserta	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	Penggunaan Bahasa Lisan	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Halaman

“Kuesioner Evaluasi Narasumber”

***Mohon diisi setelah atau menjelang setiap sesi materi berakhir**



Saran dan Perbaikan

1.

2.

Simpan

Isi

Isi lembar **Kuesioner Evaluasi Narasumber** dengan memilih salah satu jawaban, **setelah selesai** klik “**simpan**”

* **Seluruh penilaian wajib diisi**, kecuali kolom saran dan perbaikan

Mengisi *Pre Test* dan *Post Test*



Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

0

Nilai Post Test

:

0

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
----	-------	----------	-------	-----------

Klik pada tulisan
“**SOAL PRE TEST**”

 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

☰

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Ikatan Arsitek Indonesia

SOAL PRE TEST

No	Judul	Pemateri
1	Penjelasan Teknis Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Ikatan Arsitek Indonesia	



SOAL PRE TEST BIMTEK PHPU 2019

Contoh Kegiatan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Konstitusi & Persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019
Bagi Karyawan Mancadaya Mahkamah Konstitusi Angkatan II

Sisa Waktu : 19 Menit 48 Detik

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan memilih salah satu jawaban yang tepat !

1. Lembaga negara di bawah ini memiliki tugas dan fungsi terkait dengan pemilihan umum kecuali...

- Badan Pengawas Pemilu
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
- Komisi Pemilihan Umum
- Mahkamah Konstitusi
- Pemantau Pemilu

Halaman

“Lembar *Pre Test* & *Post Test*”

*Waktu mengerjakan soal *Pre test* dan *Post test* : **20 menit**



- Putusan
- Putusan Sela

15. Layanan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang disediakan oleh Mahkamah Konstitusi kepada para pihak adalah..

- Akses terhadap berkas permohonan Pemohon melalui laman (website)
- Pengajuan permohonan secara daring (online)
- Persidangan jarak jauh (video conference)
- Siaran langsung proses persidangan melalui media internet (live streaming)
- Semua benar

Simpan

Isi

Isi lembar kerja **Pre Test** dan **Post Test** dengan memilih salah satu jawaban, **setelah selesai 10 soal** klik “**simpan**”

Hasil *Pre Test* dan *Post Test*



Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

11

Nilai Post Test

:

14





Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

0

Nilai Post Test

:

0

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
----	-------	----------	-------	-----------

Mengisi Evaluasi kegiatan





Kuesioner Evaluasi Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

Penilaian oleh Peserta

NO	A. Materi	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1.	Kesesuaian antara materi yang diberikan dengan mata ajar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi dan bermanfaat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Materi yang diberikan mudah dipahami	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	Alokasi waktu masing-masing materi telah sesuai	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5.	Materi yang disajikan merupakan isu yang problematis	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.	Materi meningkatkan keterampilan analisis	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Materi yang paling menarik

Pilih Materi





Secara umum berikan pendapat anda mengenai keseluruhan hasil pelayanan kami (skor 1-100)

Saran dan Perbaikan

1.

2.

3.

Simpan

TERIMA KASIH

PANDUAN MODERATOR SESI MATERI

A. Pembukaan/Greetings

- a) Mengucapkan Salam;
- b) Menyampaikan selamat datang di Pusdik Pancasila dan Konstitusi.

B. Sesi Materi

- a) Menyapa Narasumber;
- b) Meminta izin untuk memulai kegiatan (batas toleransi terlambat masuk sesi materi kurang lebih 5 s.d. 10 menit);
- c) Perkenalan diri sebagai moderator;
- d) Menjelaskan Sesi Materi secara singkat (*outcome* yang ingin dicapai peserta);
- e) Memperkenalkan narasumber, membacakan cv singkat kepada peserta;
- f) Memperkenalkan peserta dan profil singkat peserta kepada narasumber:
 - Jumlah total peserta;
 - Asal organisasi peserta;
 - Asal daerah peserta.

C. Alokasi waktu

- a) Pembagian alokasi waktu pemaparan;
- b) Pembagian alokasi waktu sesi diskusi/tanya jawab.

D. Mengingatkan untuk mengisi daftar hadir melalui akun SIMULTAN peserta, mengisi kuesioner, dan mengunduh materi

E. Mempersilakan narasumber untuk memulai paparan materi

F. Narasumber selesai memaparkan materi

- a) Menyimpulkan isi materi narasumber secara singkat;
- b) Memandu jalannya tanya jawab.

G. Penutup

- a) Menutup sesi Materi
 - Mengucapkan terima kasih kepada narasumber;
 - Mengucapkan terima kasih kepada para peserta atas partisipasi aktifnya;
 - Harapan setelah mendapatkan materi ini.
- b) Memberikan informasi untuk sesi berikutnya
 - Waktu dimulainya sesi berikutnya;
 - Materi apa dan siapa pematerinya;
 - Mengingatkan untuk *ontime* dalam sesi berikutnya.

**PANDUAN NARASUMBER SESI PRAKTEK
DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA**

1. Pra Kondisi/Pendahuluan

- a) Para peserta telah diarahkan/diminta untuk menyusun draf Permohonan Pemohon/Jawaban Termohon/Keterangan Bawaslu/Keterangan Pihak Terkait pada Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada akhir Sesi Teknik Penyusunan.
- b) Soal dan template penyusunan Permohonan Pemohon/Jawaban Termohon/Keterangan Bawaslu/Keterangan Pihak Terkait telah diunggah ke microsite, dan peserta telah diarahkan untuk mengunduhnya serta menyusun draf tugas praktek sesuai template dimaksud.

2. Mekanisme/Alur Sesi Praktek

- a) Di awal, narasumber menjelaskan secara singkat terkait struktur Permohonan Pemohon/Jawaban Termohon/Keterangan Bawaslu/Keterangan Pihak Terkait sesuai template, mulai dari identitas sampai dengan petitum; serta memberikan penegasan terhadap poin-poin yang perlu di-highlight dari template.
- b) Selanjutnya, narasumber mengajak para peserta untuk mereviu draf Permohonan Pemohon/Jawaban Termohon/Keterangan Bawaslu/Keterangan Pihak Terkait yang telah disusun oleh peserta secara bergantian.
- c) Moderator akan memberikan asistensi kepada narasumber saat mereviu dan menerima pertanyaan/konsultasi dari peserta: mengatur lalu lintas pertanyaan/konsultasi dari peserta; mengondisikan peserta yang sedang konsultasi dalam menampilkan draf tugas praktek yang disusun (*slide show*) apabila diperlukan.

**PANDUAN NARASUMBER SESI EVALUASI
DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA**

1. Pra Kondisi/Pendahuluan

- a) Melakukan revidi sekaligus memberikan nilai terhadap hasil tugas praktek para peserta pada kelas yang akan diampu, dengan mengisi *form* evaluasi dan *form* penilaian.
- b) Narasumber akan diberikan akses kepada alamat e-mail pengiriman tugas peserta beserta *password*-nya.
- c) Narasumber menentukan 2 (dua) peserta untuk mempresentasikan hasil tugas prakteknya dan 2 (dua) peserta sebagai cadangan, apabila dari 2 (dua) peserta pertama tidak bersedia untuk memaparkan hasil pengerjaan tugas praktek.
- d) Narasumber disilahkan menggunakan pertimbangan tertentu dalam menentukan peserta yang presentasi, narasumber dapat memilih tugas praktek yang paling bagus ataupun yang paling banyak catatan, sehingga dapat diberikan evaluasi.

2. Mekanisme/Alur Sesi Evaluasi & Presentasi

- a) Narasumber mempersilahkan 2 (dua) peserta yang telah dipilih sebelumnya untuk melakukan presentasi hasil tugas prakteknya secara bergantian.
- b) Masing-masing peserta diberikan waktu 15 menit untuk mempresentasikan tugas prakteknya.
- c) Moderator akan membantu dalam mengondisikan peserta yang presentasi dengan menampilkan hasil tugas praktek (slide show).
- d) Setelah presentasi selesai, narasumber memberikan catatan terhadap hasil tugas praktek kedua peserta yang presentasi, serta dilanjutkan dengan menyampaikan hasil revidi keseluruhan atas tugas praktek para peserta.
- e) Kemudian, sesi tanya jawab. Moderator akan memberikan asistensi kepada narasumber saat Tanya jawab berlangsung: mengatur lalu lintas pertanyaan dari peserta.
- f) Setelah sesi evaluasi berakhir, narasumber kami harapkan memastikan peserta yang mengirimkan tugas prakteknya ke email, serta diharapkan pada hari yang sama sudah mengirimkan *form* penilaian dan *form* evaluasi kepada Pusdik MK melalui email masing-masing, untuk kami proses sebagai dasar pemberian sertifikat bagi peserta.

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024
Bagi Partai Politik Angkatan II
Selasa s.d. Jumat, 30 September s.d. 3 Oktober 2024**

YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.
YM Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
2	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	42	3,82	Sangat Baik dan sudah sesuai
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Sudah sangat baik
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Baik Baik
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	Lanjutkan Mantap
6	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	43	3,91	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	: saran panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan BIMTEK ini sangat luar biasa karena demi Hukum dalam sengkata saat pilkada nanti kami bisa mengawal suara perkara sampai di MK sehingga semua bisa berjalan dengan aman Perbaiki Waktunya saja yang panitia memnerhaiki untuk kedepan agar waktu sudah
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
11	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	35	3,18	materi masih belum paham Materi boleh dibuat lebih menarik
12	4	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	36	3,27	sangat baik sangat baik
13	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	42	3,82	tidak ada saran, sudah sangat bagus untuk persiapan acara tidak ada saran, sudah sangat bagus untuk persiapan acara
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	Lanjutkan
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	untuk sesi ini baiknya ditambah waktunya
17	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	sebelum materi selesai tetap diberikan waktu peserta bisa langsung bertanya, agar penyampaian materi bisa berkembang dengan pertanyaan-pertanyaan. supaya menarik ada ice breaking biar tidak monoton, materi satu arah saja
18	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	35	3,18	Terlalu cepat dalam menyampaikan, saran agar lebih santai sehingga dapat divisualisasikan materi yang disampaikan. Keren
19	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	41	3,73	mantap lanjutkan
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	cocok jadi Ketua MK RI Yakin Usaha Ssmpai
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Penambahan waktu dlm peyajian materi Materi sedikit diperluas
22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	Cukup di pahami
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
24	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	42	3,82	
25	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	34	3,09	Pemateri sangat spesialis Nambah mantap
26	4	3	3	3	4	3	4	4	3	3	4	3	38	3,45	1. Kedepannya agar pemateri lebih intens komunikasi dgn peserta bimtek 2.kedepannya agar pemateri lebih banyak mengangkat contoh putusan yg sdh diputus oleh MK
27	4	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	37	3,36	Untuk lebih tepat waktu lagi mulai materinya
28	4	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	3	38	3,45	Materi yang disampaikan melebar tapi relevan, tidak ada di Materi, tp sangat bermanfaat dari Prof Enny Aver all sangat bagus dn bermanfaat
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Tidak ada saran dan tidak ada perbaikan

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	tidak ada
31	3	3	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	39	3,55	
32	3	2	3	3	3	2	3	4	3	3	3	3	32	2,91	Ketepatan waktu menyelesaikan materi Prof Enny molor..
33	2	3	3	3	4	3	3	3	2	4	4	3	34	3,09	- Penggunaan variasi media pengajaran, seperti video, studi kasus, dsb
34	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	41	3,73	sudah cukup baik semuanya sudah oke
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	- -
36	4	4	3	3	4	4	4	3	3	4	4	4	40	3,64	
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Tidak ada
38	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	Cukup Cukup
39	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	3	3	40	3,64	saran: moderator memberikan kuota masing2 partai untuk bertanya, misalnya 3 orang untuk bertanya pada masing2 partai
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Saran : " Mohon untuk Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota Tahun 2024 bagi Partai Politik lebih di perbanyak pengisian materi dari Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi " Perbaikan : " Untuk materi yang diajarkan malam hari mohon diberikan waktu yang lebih untuk dialog dua arah antara Pemberi Materi dan Penerima Materi"
41	4	3	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	40	3,64	
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
43	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
44	4	3	3	4	4	3	4	3	3	4	4	4	39	3,55	Jelas, Lugas, dan mudah dipahami Serta sangat detail dalam menyampaikan materi khususnya dalam menerangkan permohonan pemohon agar terpenuhinya syarat formil dan tidal menjadi celah bagi termohon untuk melakukan eksepsi.
45	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	Ketepatan waktu perlu diperhatikan lagi Perlu sajikan contoh dan tips untuk penanganan perkara yg efektif dan efisien
46	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	42	3,82	
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
48	4	3	4	4	3	3	4	4	3	4	3	4	39	3,55	waktu nya terlalu panjang..
49	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	39	3,55	
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	buat persidangan semu
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	luar biasa
52	4	3	3	4	4	3	3	4	3	4	4	3	39	3,55	
53	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	34	3,09	
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Sangat baik Sangat baik
55	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	43	3,91	
56	4	3	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	40	3,64	Lebih banyak lg sesi tanya jawab.. Lebih bnyk diskusi lngsng yg interaktif
57	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	42	3,82	YM dalam mengisi materi diselingi humor supaya tidak terlalu tegang dan ngantuk
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Agar waktu untuk sesi tanya jawab dan diskusi dapat diperpanjang. Apalagi bila terdapat banyak antusias para peserta Bimtek untuk bertanya.
59	4	3	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	40	3,64	
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
61	4	4	3	4	3	3	4	3	3	4	4	4	39	3,55	BIMBINGAN TEKNIS HUKUM DALAM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA SANGAT PERLU DIKETAHUI JUGA OLEH PARA CALON PESERA PILKADA

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
62	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	3	36	3,27	
63	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	43	3,91	
64	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	sudah baik, perbaikan akan menjadi sempurna
65	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	34	3,09	materi bisa di baca di diktat. mohon dijelaskan apa yg menjadi titik fokus, guna tidak intrepretasi bias.
66	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	43	3,91	
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
68	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
69	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	41	3,73	
70	3	3	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	36	3,27	
71	4	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	41	3,73	Tidak ada Tidak ada
72	4	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	38	3,45	Materi hard copy juga disiapkan u pembuatan surat permohonan
73	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
74	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	36	3,27	
75	3	4	3	4	4	3	4	3	3	3	3	3	37	3,36	
76	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	Sangat Baik
77	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
78	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Sudah bagus dan pertahankan Cukup bagus dan pertahankan
79	4	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	4	36	3,27	Top sekali <input type="checkbox"/>
80	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Untuk saat ini belum ada
81	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	40	3,64	
82	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Saran Saja kalau bisa waktu untuk interaksi Pemateri dan Peserta Bimtek bisa ditambahkan, karena masih banyak pertanyaan dari Peserta Bimtek ke Pemateri.
83	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	42	3,82	
84	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	41	3,73	
85	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	36	3,27	
86	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
87	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	34	3,09	Sebaiknya Hakim MK diberikan materi yang berbeda, sayang Dr.Ridwan Mansyur dengan keilmuan beliau dan jauh jauh dari Jakarta kesannya hanya sekedar mendampingi Prof Enny
88	3	3	4	4	4	3	4	4	4	3	3	3	39	3,55	
89	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
90	3	4	3	3	4	3	3	3	3	4	4	3	37	3,36	
91	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
92	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Utk sesi pertanyaannya lebih di perbanyak lagi
93	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	43	3,91	Pemberian materi langsung ke teknik Sidang dan landasan hukum atau dasar dari berubahnya dinamika soal ambah batas Pasal 158 sebaiknya dirincikan. Mempersiapkan beberapa direktori putusan terkait celah soal dinamika Pasal 158
94	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
95	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	ada pertanyaan tentang Kandidat yang memenuhi syarat menjadi kotak kosong. dan ada kandidat yang tidak memenuhi persyaratan Sehingga menjadi pemantau, bagaimana pandangan MK jika ternyata "pemantau memenuhi syarat" namun oleh MK tidak memenuhi syarat. Jawaban: -Mahkamah bisa menyatakan tidak sah pencalonan MK. menurut saya ada penambahan bahan jawaban terkait kandidat yang tidak memenuhi syarat dari KPU, lakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara
96	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
97	4	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	3	41	3,73	Kedepan Bintek PHPU/P tampaknya perlu memasukkan trip kunjungan ke MK. Ruang diskusi dibuka lebih lama dengan peserta
98	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	sudah baik semua tidak ada
99	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Adanya interaksi ada pendekatan dengan peserta bisa dengan turun dari podium tanpa harus selalu duduk dikursi moderator
100	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	karena sangat baik jadi tidak ada, mksh..
101	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	37	3,36	
102	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	agar pemberi materi dapat kiranya lebih interaktif dengan peserta sehingga tidak hanya duduk pas memberikan materi tetapi berjalan menyapa peserta seharusnya ada ice breaking sehingga peserta menjadi segar dalam menerima materi
103	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
104	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	43	3,91	mohon waktu tanya jawab ditambah mohon narasumber setelah selesai materi bisa foto bersama
105	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	40	3,64	secara keeluruhan sangat baik, baik waktu maupun pematери
106	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
107	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
108	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	43	3,91	
109	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
110	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
111	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	43	3,91	Bukti bukti yang memiliki nilai tertinggi dalam penilaian hakim MK, disampaikan dengan contoh dan pertimbangan hakim. Bukti bukti yang ditolak agar disampaikan biar tidak diajukan saat permohonan PHP
112	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Aman
113	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	39	3,55	WAKTU UNTUK BERTANYA HARUS DI TAMBAHKAN 2 atau 3 sesi
114	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	Saran : tetap pertahankan yang sudah baik dari Mahkamah Konstitusi
115	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
116	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	41	3,73	
117	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
118	4	3	3	4	3	3	3	4	4	3	3	4	37	3,36	kami tidak mempunya perbaikan dalam materi tersebut dengan secara umum kami sangat cukup dan kalau bole di tambah waktunya
119	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
120	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	42	3,82	Pertahankan cara mengajar yang simpatik dan penuh dengan contoh praktis yang cukup bagus ini

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
121	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	34	3,09	Pemateri dlm praktek Penyusunan Permohonan dan PT, mungkin perlu ditambah spy bisa mengcover pertanyaan semua peserta.
122	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
123	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
124	4	4	4	4	3	3	3	4	4	3	4	4	40	3,64	Semoga pendidikan ini bermanfaat Ketepatan waktu harus diperbaiki
125	2	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2	18	1,64	
126	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
127	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4	3	4	40	3,64	Pelayanan sudah bagus, tapi perlu peningkatan. Biaya Peserta perlu diberikan Uang Saku, karen dalam perjalanan dari tempat tinggal peserta ke pusdik membutuhkan uang konsumsi dan biaya lain.
128	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	36	3,27	
129	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	40	3,64	semoga makin baik lagi
129	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	ok ok
	3,64	3,48	3,55	3,56	3,62	3,55	3,64	3,60	3,47	3,64	3,62			3,58	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024
Bagi Partai Politik Angkatan II
Selasa s.d. Jumat, 30 September s.d. 3 Oktober 2024

Dr. Fajar Laksono, S.Sos., M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	42	3,82	: Saran Kegiatan Bimtek seperti ini sangat bagus untuk kedepannya lebih tingkatkan lagi agar Nilai Demokrasi itu tetap kita jaga bersama Perbaikan Waktu nemateri harus konsisten nada buat peradilan semu MK
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Smda Lebih baik lg selanjutnya Smda Lebih baik lg selanjutnya
8	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	43	3,91	Sdh baik Sdh baik
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Kalau pengumuman masuk kelas baiknya 15-20 menit sebelum materi biar peserta bisa hadir on time
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	Cukup baik dlm pe materi
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Sudah sangat bagus.Pertahankan. Bimtek oke . Disiplin. Good job.
15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	Cukup Cukup
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Penyampaian materi sangat jelas pertahankan
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
18	4	3	3	4	4	4	3	4	3	4	4	4	40	3,64	- jgn menyampaikan materi terlalu cepat - kedepan agar penyampaian materinya jgn terlalu cepat Yg lain Mantap patut dijadikan contoh oleh pemateri lainnya
19	4	3	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	40	3,64	
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Tidak ada
21	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	2	3	39	3,55	mestinya lebih banyak bercerita tentang dinamika penanganan perkara MK RI lalu melakukan komparasi penanganan Perkara di MK negara lain, seperti di Amerika Serikat. tetapi realitasnya justru terbalik. ruang AC di kamar 229 GRHA 4 tidak begitu dingin
22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	32	2,91	Terlalu banyak bercerita, in case seperti terkait menceritakan konstitusi negara lain seperti Amerika austria dan Prancis dan menurut saya hal tersebut tidak ada relevansinya dengan tujuan akhir dari perselisihan hasil pilkada. Sebaiknya pembicaraan lebih fokus kepada substansi kewenangan Mahkamah Konstitusi yang berhubungan dengan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan langsung masuk ke teknis-teknis pelaksanaan perselisihan, lebih baik lagi jika disertakan studi kasus Sebaiknya disampaikan saja bentuk-bentuk dinamika peristiwa hukum pada hasil pemilihan kepala daerah yang menjadi kewenangan dan dapat diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi
23	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	34	3,09	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
24	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	34	3,09	
25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	Mantab
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
27	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	34	3,09	Umtuk duduk peserta di bebaskan saja, biar bisa lebih banyak mengenal dan berbaur dengan peserta lain.
28	4	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	32	2,91	Agak molor sedikit dalam penyampaian materi
29	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	43	3,91	dah cocok jadi Hakim MK
30	4	4	4	3	3	4	4	3	3	3	4	4	39	3,55	
31	4	3	4	3	4	3	4	4	4	3	4	4	40	3,64	sudah sangat baik tidak ada yang perlu diperbaiki... sudah mantap
32	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	41	3,73	Mantap Lanjutkan
33	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	34	3,09	Pemateri menguasai materi materi awal sedikit melebar, mestinya lebih banyak dan fokus ke materi yg diperdalam
34	3	3	4	2	3	4	3	3	3	3	3	3	34	3,09	Mohon materinya lebih dikonkritkan sesuai nomenklatur Bimtek. Kualitas materinya mohon disesuaikan dengan keputusan peserta dalam kerangka Bimtek sehingga aplikatif nantinya
35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	Mengurangi cerita lebih fokus pada materi
36	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	35	3,18	Teruslah banyak memberikan pembelajaran hukum.
37	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	35	3,18	sudah sangat bagus tidak ada
38	2	2	3	2	3	3	2	2	2	2	2	2	25	2,27	Jagan Monoton Jgn banyak Al Kisah Perbnyak Penyampaian yg Subtansi
39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
41	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	41	3,73	Perfect
42	4	3	3	4	3	3	3	4	3	4	3	3	37	3,36	
43	3	3	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	36	3,27	
44	4	3	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	41	3,73	terus semangat dan menyajikan materi yang lebih banyak lagi
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Narasumber untuk bisa interaktif dengan peserta didik tanpa harus duduk dipodium
46	2	2	3	3	3	3	3	3	2	3	2	3	29	2,64	penyampaian materi membosankan dan membuat peserta ngantuk...perlu banyak variasi
47	4	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	36	3,27	
48	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	42	3,82	Baik dan sudah sesuai
49	4	4	3	3	4	4	3	4	3	4	4	3	40	3,64	Kalau punya banyak waktu, bisa menjawab pertanyaan lebih mendalam Usahakan lebih spesifik
50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	ditingkatkan supaya sempurna
51	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	materi kurang cukup ngomong fakta aja
52	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	35	3,18	
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	44	4,00	BAGus, karena banyak contoh putusan2 MK di PPT nya
54	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	42	3,82	
55	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	Akan lebih baik jika penjelasan materi di uraikan lebih teknis.
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
57	4	3	3	2	4	4	3	4	2	3	3	3	35	3,18	Karena ini ranah akademik, naiknya tegas menjawab pertanyaan secara akademik Moderator jangan memotong penanya, baiknya berikan waktu
58	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	karena sudah sangat baik jadi tdk perlu saran dan perbaikan..

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Saran : Diperbanyak waktu untuk diaolog antara pemateri dengan peserta Perbaikan : yang sudah baik dipertahankan, yang belum baik diperbaiki dan di sempurna kan
61	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	41	3,73	
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	sangat baik sangat baik
63	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	43	3,91	mohon waktu tanya jawab ditambah mungkin perlu foto berasama dgn narsum
64	3	3	4	3	4	4	4	3	3	4	3	3	38	3,45	
65	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
66	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	semoga Bimtek MK menjadi tolak ukur Penanganan Perkara yang Independen
67	3	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	40	3,64	
68	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Lanjutkan Pertahankan
69	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	4	37	3,36	Materi mengenai sejarah adanya mahkamah konstitusi yang dibawakan sebenarnya lebih baik jika didiskusikan.
70	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	34	3,09	
71	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
72	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
73	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	41	3,73	
74	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	32	2,91	
75	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
76	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
77	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	4	4	37	3,36	
78	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
79	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
80	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	32	2,91	penjelasan materi agar lebih teknis, jangan terlalu umum
81	2	2	3	3	3	2	2	2	2	2	1	2	24	2,18	MATERI BERSIFAT UMUM YANG SEHARUSNYA DIBERIKAN KEPADA SISWA/MAHASISWA DALAM KULIAH UMUM KONSTITUSI DAN TIDAK MENGENA PADA TEKNIK SEBAGAIMANA TUJUAN PENDIDIKAN MATERI LEBIH BERSIFAT LANGSUNG PADA TUJUAN BIMBINGAN TEKNIS TIDAK BERSIFAT UMUM
82	4	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	36	3,27	
83	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
84	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	41	3,73	
85	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	Lebih banyak membahas konstitusi negara lain, sebaiknya perbanyak contoh contoh permasalahan sengketa PHPU
86	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	Paparan kenapa gugatan ditolak atau tidak diterima diberikan contoh supaya hal seperti itu tidak diajukan kembali Bukti bukti yang menjadi perhatian hakim MK, disampaikan biar dijadikan pedoman bagi peserta bimtek saat mengajukan permohonan PHP
87	4	3	4	3	4	3	4	3	3	4	4	3	39	3,55	
88	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	Lbh bnyk lg diskusi interaktif
89	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
90	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
91	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
92	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	waktu bertyanya di tambahkan
93	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	41	3,73	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
94	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
95	3	3	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	40	3,64	interaktif dengan peserta seharusnya ditingkatkan
96	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
97	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
98	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	Saran : tetap pertahankan yang sudah baik dari Mahkamah Konstitusi
99	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	32	2,91	Penambahan wktu dlm penyajiqn materi
100	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
101	3	4	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	37	3,36	Semoga diperbanyak sesi diskusi sedangkan yang lainnya sudah baik dan mohon dipertahankan
102	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
103	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
104	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	- -
105	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
106	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
107	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
108	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	38	3,45	Semoga terus bermanfaat untuk pendidikan hukum kita Ketepatan waktu
109	1	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	2	16	1,45	
110	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
111	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
112	3	3	4	4	4	3	4	3	4	4	3	3	39	3,55	Baik Baik
113	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	3	3	41	3,73	
114	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	35	3,18	
115	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
116	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	41	3,73	perlu peningkatan SDM
117	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	ok ok
	3,44	3,32	3,52	3,39	3,49	3,39	3,44	3,44	3,36	3,45	3,39			3,42	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024
Bagi Partai Politik Angkatan II
Selasa s.d. Jumat, 30 September s.d. 3 Oktober 2024**

Nanda Adytiansyah, S.Kom., M.T.I. dan Hafidz Ihsan Baihaki, S.Kom.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	43	3,91	Sangat baik dan suda sesuai
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	: : Saran Lebih meningkatkan lagi untuk kedepan
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22	2,00	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	karena sudah sangat baik jadi tidak perlu saran dan perbaikan..
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
9	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	35	3,18	Untuk lebih banyak sesi tanya jawab
10	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	42	3,82	
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
12	3	3	4	4	3	3	4	3	3	4	4	4	38	3,45	
13	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	34	3,09	
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Materi ini Sangat dibutuhkan sesuai zaman
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	Bagus
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Pemateri good job. Sukses Mantap dan saya JD tambah ilmu. Saya senang belajar di MK
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Dah cocok jadi Kominfo RI
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
20	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	40	3,64	
21	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	40	3,64	- agar kedepan nya lebih berinteraksi dgn peserta Bimtek atau mengajak diskusi peserta Bimtek - agar kedepan nya mengedepankan diskusi dgn peserta Bimtek
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Sdh bagus Lanjutkan
23	3	3	2	2	3	2	3	2	2	2	2	3	26	2,36	Mantul..
24	4	3	4	3	4	3	3	4	3	3	3	3	37	3,36	bagus tidak ada
25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Sudah bagus
27	3	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	40	3,64	materi tehnis TIK perlu forum kusus spy optimal
28	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	Cukup Cukup
29	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	34	3,09	
30	3	4	2	3	3	3	4	3	3	3	3	3	34	3,09	
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	43	3,91	
32	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	- -
33	3	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	36	3,27	
34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	Mantaaaap pantunnya Hadiah ubi cilembu ganti pakai Baju MK saja
35	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	35	3,18	- -
36	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	35	3,18	Baik

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
37	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	42	3,82	pemateri perlu buat akun sementara (bulk) agar peserta bisa cek dari laptop masing-masing sehingga ada pengalaman tersendiri khususnya bagi yang baru pertama kali mengakses Sebelumnya pada PHPU kesulitan kirimkan permohonan sebagai pihak terkait, krn belum ada menunya. di paparan kali ini utk pilkada terlihat ada menu tersebut, namun belum bisa di coba
38	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	2	3	33	3,00	Kurang memberikan pencerahan
39	3	4	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	37	3,36	karena berkaitan degan IT, sebaiknya lebih banyak praktek dan dicek langsung.... selebihnya untuk penyampaian materi nya sudah mantap.... lebih banyak diskusi dan uji coba langsung praktek
40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Saran : Mohon lebih interaktif dalam memberikan keilmuan yang aplikatif pada penggunaan TIK Perbaikan : mohon saat aplikasi ke ilmuwan pembicara berjalan ke arah pemateri untuk memastikan peserta bimtek dapat melakukan materi yang bersifat aplikatif
42	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	35	3,18	
43	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
44	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	43	3,91	mungkin mengenai teknik pembuatan akun diperagakan dalam bentuk video2 pendek penerangan aula sebaiknya ditambah, karena agak remang apalagi saat materi diwaktu malam
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
46	4	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	40	3,64	
47	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
49	3	3	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	36	3,27	
50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Baik Baik
52	4	3	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	38	3,45	
53	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	fokus tujuan Suara Kurang Kenceng
54	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	41	3,73	Materi OK namun ,sedikit sulit perlu sesi tambahan
55	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	ditingkatkan lagi supaya bisa lbh sempurna
56	3	3	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	38	3,45	
57	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	40	3,64	
58	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
61	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	42	3,82	
62	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	42	3,82	
63	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	Narasumber sudah interaktif dengan peserta didik, untuk materi perlu waktu yg cukup agar bisa dimengerti dan dipahami
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
65	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	42	3,82	
66	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	43	3,91	
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
68	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
69	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Tidak ada

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
71	4	4	3	3	4	4	4	3	3	4	4	4	40	3,64	interaktif dengan peserta agar dapat ditingkatkan ice breaking agar diberikan untuk penyegaran peserta
72	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
73	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
74	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
75	3	4	3	3	4	3	3	4	4	3	4	3	38	3,45	
76	3	3	3	3	4	3	3	4	4	3	4	3	37	3,36	
77	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
78	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	MANTAB
79	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4	4	4	41	3,73	Bagus Lanjutkan
80	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	mantapp selalu menarik
81	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
82	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Harusnya ada tombol absen ulang di menu presensi pusdik buat yang lupa klik isi absen Perbaikan bantu kasih muncul ulang tombol absen ulang di presensi pusdik
83	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
84	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
85	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	Bahan hard copy materi supaya disiapkan u peserta
86	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
87	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
88	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	baik, pemaparannya jelas, namun di website peserta tampilannya tidak serupa dengan yang ada di materi, kolom PHPKADA tidak tersedia
89	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
90	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	43	3,91	sangat baik sangat baik
91	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
92	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
93	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	41	3,73	
94	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
95	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
96	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
97	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	- -
98	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
99	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
100	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	Semoga bisa bermanfaat Ketepatan waktu
101	2	2	1	2	1	1	1	1	2	2	1	1	16	1,45	
102	3	3	3	3	4	4	4	3	3	4	4	4	38	3,45	Terima kasih atas pembelajarannya.
103	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	Perlu sekali pendidikan Hukum Acara dan Perselisihan hasil Pilkada diketahui juga oleh Organisasi Pemantau Pemilu
104	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
105	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	37	3,36	Mohon diperbanyak sesi diskusi tentang pengalaman praktis
106	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	3	3	40	3,64	Baik Baik
107	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	35	3,18	
108	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
109	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
110	4	3	4	4	3	4	3	4	3	4	4	3	40	3,64	
111	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	ok ok
	3,45	3,45	3,42	3,41	3,50	3,46	3,50	3,47	3,48	3,49	3,46			3,46	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024
Bagi Partai Politik Angkatan II
Selasa s.d. Jumat, 30 September s.d. 3 Oktober 2024

Dr. Muhidin, S.H., M.Hum.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	<i>Materi Sangat baik atas sekali untuk kita pelajar</i>
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	karena sudah sangat baik jadi tidak perlu lagi saran dan perbaikan..
6	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	43	3,91	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
10	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	39	3,55	Baik Baik
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Sdh bagus Lanjutkan
12	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	35	3,18	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
14	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	42	3,82	- agar kedepan nya materi yg disampaikan diberikan contoh kasus - kedepan nya agar materi yg disampaikan diberikan contoh kasus
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Seharusnya ada Mic di setiap meja biar interaktif antara pengajar dgn peserta. Kl ga ada mic di meja sy males diskusi dan angkat2 tangan Pusdik MK harus membuat foto booth di depan gedung utk foto2 peserta sbg kenang2an. 3. Moderator hrs ngingetin peserta utk isi presensi sbml materi berakhir, kl memang presensi itu penting krn peserta sering lupa, fokus ke materi dan sudah cape
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Penyampaian Materi sangat Jelas dan terperinci
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Pemateri keren dan sistematis. Luar biasa Kmi JD tambah ilmu
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
19	3	4	3	3	4	3	3	4	3	4	4	3	38	3,45	kurangnya waktu untuk pertanyaan
20	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	- -
21	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	Saran : tetap pertahankan yang sudah baik dari Mahkamah Konstitusi
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Sangat menyenangkan materi ini
24	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	37	3,36	harusnya sudah pensiun, karena sudah ngk produktif
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
26	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	43	3,91	Terimakasih Menggunakan video
27	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	36	3,27	
28	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	36	3,27	
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
31	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	Nara sumber kasi materi sangat bagus, sebagai Panitera beliau sangat faham momennya tepat saat ngantuk beliau buat suasana lebih segar
32	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	42	3,82	sudah sangat baik, sangat interaktif sudah mantap sekali
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
36	3	4	3	4	4	4	4	2	3	3	4	4	38	3,45	
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
38	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	3	4	41	3,73	
39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	42	3,82	Bagus Lanjutkan
41	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	Materi hard copy supaya disiapkan u peserta
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
45	4	4	4	4	4	3	4	3	3	4	4	4	41	3,73	
46	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
48	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	41	3,73	
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	MK tetap jos mengawal konstitusi. perlu mensepahamkan lebih detail dan mendalam mengenai tenggang waktu 3 hari permohonan ke MK terhadap penyelenggara pemilu dan masyarakat umum
50	4	4	3	4	3	3	3	3	4	4	3	3	38	3,45	baik baik
51	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	3	42	3,82	
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
53	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	34	3,09	Bagus
54	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	lebih banyak waktu lagi untuk pembahasan dikarenakan materinya cukup banyak
56	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	35	3,18	
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	sempurna
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
60	2	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	Cukup Cukup
61	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	diperbaiki lagi supaya menjadi sempurna
62	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	penjelasan pemateri efektif dan komunikatif
63	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	42	3,82	Menarik, sangat berguna utk praktek case di MK
64	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	MANTABBB LANJUTKAN
65	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	42	3,82	sangat baik sangat baik
66	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	4	4	37	3,36	
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
68	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
69	2	3	3	3	3	3	2	2	3	2	3	2	29	2,64	
70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
71	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Saran : Mohon dipertahankan dan dikembangkan Perbaikan : -
72	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
73	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
74	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
75	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
76	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Bagus Pak. Lebih komunikatif . Jawab disertai bahan direktori putusan
77	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
78	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	43	3,91	
79	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	3	42	3,82	
80	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
81	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
82	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	37	3,36	
83	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
84	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
85	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	Baik dan sudah sesuai
86	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
87	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
88	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
89	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	- -
90	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
91	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
92	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
93	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
94	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	Harapannya ilmunya bisa bermanfaat Ketepatan waktu
95	1	1	1	2	2	1	2	2	2	1	1	2	16	1,45	
96	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	40	3,64	
97	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
98	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
99	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
100	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	38	3,45	Mohon diperbanyak sesi diskusi pengalaman praktis
101	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	43	3,91	
102	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	43	3,91	Baik Baik
103	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	lebih keras suaranya materi harus tegas
104	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
105	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
106	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	35	3,18	
107	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	Komunikasi Problem Syarat 2 permohonan di MK ditingkat menjadi tanya jawab yang berkualitas
108	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
109	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
110	4	3	3	4	4	3	4	4	3	4	3	4	39	3,55	
111	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	ok ok
	3,54	3,60	3,50	3,58	3,60	3,51	3,54	3,50	3,50	3,55	3,56			3,54	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024
Bagi Partai Politik Angkatan II
Selasa s.d. Jumat, 30 September s.d. 3 Oktober 2024

Saiful Anwar, S.H., M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	41	3,73	Sangat baik dan sudah sesuai
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	: : Saran Lebih mantapkan lagi kedepannya
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	Bagus
7	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	34	3,09	penyampaian tehnik pendaftaran lewat online harus di permudah dan caranya diulang -ulang agar peserta bisa dapat memahami
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	tidak ada..
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Saya sangat bersyukur dpt mengikuti bioteknologi ini terkait materi ini sangat menjd perhatian sy sbg yunior yg baru mau menjadi advokasi sukses selalu pak
15	3	3	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	36	3,27	saran kami tidak ada
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
17	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	36	3,27	
18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
19	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
20	4	3	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	40	3,64	
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	tetap semangat untuk kita semua
22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
23	4	4	3	3	4	4	3	4	4	3	4	4	40	3,64	- seharusnya ada sesi tanya jawab - kedepan harus ada sesi tan
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
27	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	35	3,18	
28	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	Lanjutkan Mantabb
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	KEREN
30	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	35	3,18	sangat baik
31	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
32	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	pemaparan terlalu cepat
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	35	3,18	
34	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	42	3,82	
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Narsum sangat bagus dan informatif. Penyampaian sangat jelas dan dimengerti.
36	4	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	37	3,36	
37	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	40	3,64	sudah baik, sudah cukup baik
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Setiap meja siapkan mic biar interaktif. Papan materi cukup 15 menit selebihnya pendalaman diskusi, baiknya metode bimtek berikutnya nerapin level advance atau intermediate
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Saran : - Perbaikan : -

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
40	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	42	3,82	- -
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
42	3	1	2	1	3	3	2	3	3	3	3	3	27	2,45	Akomodir keinginan peserta untuk memberikan sedikit masukan yang waktunya hanya 5-10 menit saja terlalu kaku dan otoriter...berusahalah fleksibel dan dengarkan sedikit masukan peserta..maaf dan terima kasih
43	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	43	3,91	
44	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	42	3,82	
45	3	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	31	2,82	
46	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
47	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	37	3,36	
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Sangat bagus Sangat bagus
49	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
50	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	4	36	3,27	Harus lbh interaktif.. Akan lbh baik jika mentor ikut samapai akhir
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
53	3	3	4	3	3	4	4	3	3	3	4	4	37	3,36	
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Baik Baik
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	MK Mantapppp
57	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	42	3,82	
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
60	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Mohon dipertahankan... sangat baik
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
63	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	42	3,82	
64	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
65	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
66	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	43	3,91	perlu dipertimbangkan penambahan waktu tanya jawab...
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
68	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
69	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
71	4	4	4	4	3	4	3	4	3	3	4	3	40	3,64	Bagus Lanjutkan
72	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	- -
73	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Terimakasih. Lain kali kasih soalnya lebih brainstorming lagi Konsep praktikum yang diajarkan ini tidak mudah bagi yang bukan Advokat, walau ada yg disertakan sarjana hukum. Maka sebaiknya pelatihan ini, pastikan bahwa yang diikuti sertakan memang profesi advokat. Kita sebagai advokat mudah tinggal ngalir mengerjakannya. Namun ketika yang diutus adalah profesi atau karir yang lain, walau latar belakang hukum, pada bingung. Kasihan.
74	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
75	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
76	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
77	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
78	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	36	3,27	- -
79	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
80	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	2	1	14	1,27	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
81	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22	2,00	Terus bisa bermanfaat Ketepatan waktu
82	4	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	4	40	3,64	
83	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	Materi dlm bentuk hard copy juga disiapkan untuk peserta
84	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
85	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
86	4	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	40	3,64	Baik Baik
87	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Lanjutkan Pertahankan
88	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
89	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
90	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
91	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
92	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
93	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	37	3,36	Tingkat kualitas dialog materi
94	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
95	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
96	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
97	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	42	3,82	
98	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Sangat Baik Sangat Baik
99	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	34	3,09	
100	4	3	3	3	4	3	4	3	4	3	3	4	37	3,36	
101	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	41	3,73	
102	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	ok ok
	3,53	3,43	3,51	3,44	3,51	3,55	3,52	3,51	3,46	3,51	3,55			3,50	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024
Bagi Partai Politik Angkatan II
Selasa s.d. Jumat, 30 September s.d. 3 Oktober 2024**

Hani Adhani, S.H., M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
1	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	42	3,82	Sangat baik dan sudah sesuai
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	<i>Panirtia sangat luar biasa telah mengadakan kegiatan Bimtek ini demi Hukum dalam pilkada</i>
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	Lebih detail kepada proses syarat formal dan pembuktian yang kuat yang dijadikan dasar oleh hakim MO Lebih banyak berdiskusi praktek akan lebih menarik
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
8	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	4	36	3,27	kami sangat puas pembawa materi dan materi yang disampaikan cukup jelas
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
10	3	2	3	2	3	3	3	4	3	3	4	3	33	3,00	
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Istimewa Istimewa
12	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	42	3,82	
13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	waktunya masih kurang untuk berdiskusi.. kerenn
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
17	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
18	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	42	3,82	
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Menyenangkan
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
21	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
22	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	43	3,91	waktu tanya jawab harus ditambah
23	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
24	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
28	4	3	4	3	3	3	4	4	4	3	3	3	38	3,45	
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Pemilihan nilai atas hasil praktikum sangat objektif. Disertai pemeriksaan yang mendetail mulai dari tanggalnya. Goodjob. Saran bikin konsep template yang lebih banyak bantu isi opsi kalimat positanya. Beri kemudahan
30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
32	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
35	4	3	4	4	3	3	3	4	3	4	4	4	39	3,55	Agar kedepan pemateri membuat klu klu terkait kondisi klien bagi pihak terkait Agar mengikut sertakan klien
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	- -

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Baik Baik
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	YAKUSA
42	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	42	3,82	Semoga bermanfaat Ketepatan waktu peserta
43	2	2	1	1	1	2	1	2	1	1	2	1	16	1,45	
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
45	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	Mantabb Lanjutkann
46	4	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	3	37	3,36	
47	4	4	3	4	4	4	3	3	3	4	4	4	40	3,64	Sebagai PP beliau sangat menguasai materi dan bisa memberikan kami pemahaman yang sangat jelas kami makin memhami cara bersidang di MK
48	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
49	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	Mantapks
50	4	4	4	4	4	3	4	3	3	4	4	4	41	3,73	sudah sangat baik, cukup interaktif dengan peserta sudah sangat baik
51	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
52	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
53	3	3	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	37	3,36	penyampaian paparan terlalu cepat cepat terimakasih MK, saya menjadi sedikit paham terkait kerja MK meskipun saya melihat kalau tidak pandai berkilah dan berkata kata akan tetap kalah di persidaangan MK, hanya karena salah sebaris kalimat bisa di gugurkan. tuntutan maaf sebelumnya mungkin disiplin ilmu saya tidak di bidang hukum..... terima kasih.....
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Pertanahkan sudah sangat baik
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Pertahankan Lanjutkan
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
58	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	3	41	3,73	
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
62	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	41	3,73	
63	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	42	3,82	
64	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
65	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	yang sudah baik tetap dipertahankan
66	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
68	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Sangat Baik Sangat Baik
69	4	3	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	40	3,64	
70	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	34	3,09	
	3,61	3,54	3,60	3,54	3,60	3,56	3,56	3,59	3,57	3,61	3,66			3,59	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024
Bagi Partai Politik Angkatan II
Selasa s.d. Jumat, 30 September s.d. 3 Oktober 2024

Dr.
Oly
Viana

Dr. Oly Viana Agustine, S.H., M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Lebih baik jika memberi kesempatan kepada peserta untuk memberi tanggapan terhadap tugas atau presentasi kelompok lain.
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	Baik Baik
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Mohon dapat diberikan contoh jawaban yg fix, yg sesuai dgn kaidah jawaban termohon yg baik dan benar
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	alhamdulillah baik baik
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	alhamdulillah baik baik
8	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	4	3	37	3,36	
	3,50	3,50	3,50	3,63	3,63	3,50	3,50	3,50	3,63	3,50	3,63			3,55	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024
Bagi Partai Politik Angkatan II
Selasa s.d. Jumat, 30 September s.d. 3 Oktober 2024

Luthfi Widagdo Eddyono, S.H., M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
3	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	3	4	41	3,73	
4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	35	3,18	
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	Mantap dalam menyampaikan materi
6	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	42	3,82	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	44	4,00	
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	44	4,00	
9	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	3	42	3,82	
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
	3,70	3,70	3,70	3,60	3,60	3,70	3,70	3,60	3,50	3,70	3,70			3,65	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024
Bagi Partai Politik Angkatan II
Selasa s.d. Jumat, 30 September s.d. 3 Oktober 2024

Dr. Syamsudin Noer, S.H., M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
4	4	3	3	3	4	4	4	3	3	4	4	4	39	3,55	
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
6	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	41	3,73	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	- -
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
9	3	4	3	3	4	3	4	3	3	3	4	4	37	3,36	Pemaparan dari pak MADE sangat jelas dan mudah dicerna. Sangat baik
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
11	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	43	3,91	
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Waktu pengerjaan agar disediakan lebih panjang agar lebih sempurnanya jawaban yg disusun
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
12	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	3	3	41	3,73	Waktu pengerjaan agar disediakan lebih panjang agar lebih sempurnanya jawaban yg disusun
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Untuk fasilitator dan moderatornya mantap, dan luar biasa
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Waktu prakteknya terlalu pendek. Saran sy dibuat dua hari. 1 hari teori, dan sehari lg prakteknya. Setiap kelompok presentasi hasil jawaban di kelas nya. Biar bisa evaluasi mana yg harus di perbaiki
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
	3,65	3,65	3,59	3,53	3,71	3,59	3,71	3,53	3,47	3,59	3,65			3,60	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024
Bagi Partai Politik Angkatan II
Selasa s.d. Jumat, 30 September s.d. 3 Oktober 2024

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
1	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Ardiansyah Salim	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
2	3	4	3	10	4	3	3	10	Dr. Muhidin, S.H., M.Hum.	Hadian Taofik Rochman	3	3	6	3	3	4	10	3	3	6	2	3	5	4	4	8	3	3	6	4	4	8	69	3,29	---
3	3	3	4	10	3	4	4	11	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Budi Hari Wibowo	3	4	7	3	4	4	11	4	4	8	4	3	7	4	3	7	4	4	8	4	4	8	77	3,67	
4	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.		4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
5	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	78	3,71	
6	4	4	4	12	3	4	3	10	YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	3	7	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	79	3,76	
7	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Bambang Sukmadi	4	3	7	3	4	4	11	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	72	3,43	
8	3	4	3	10	3	4	3	10	Dr. Muhidin, S.H., M.Hum.	Hadian Taofik Rochman	3	4	7	3	3	4	10	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	3	7	72	3,43	MERENOVASI FASILITAS YANG SUDAH LAMA SUPAYA TERLIHAT LEBIH MODERN UNTUK MENU MAKANAN DIUSAHAKAN SETIAP SESI ADA MENU YANG BERKUAH
9	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Budi Hari Wibowo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
10	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Budi Hari Wibowo	3	3	6	4	4	4	12	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	66	3,14	Fasilitas AC supaya diperhatikan Jika Kamar dibersihkan mohon sekalian kamar kecilnya juga Salam Konstitusi, MK Mantapp
11	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Muhidin, S.H., M.Hum.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	3	7	82	3,90	Baiknya jaringan wifi lebih di perluas sampai ke kamar peserta
12	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Ardiansyah Salim	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	2	2	4	3	3	6	3	4	7	4	3	7	63	3,00	Makanan lebih variatif, Ketersediaan makanan kurang banyak
13	4	4	4	12	4	3	4	11	Nanda Adytiansyah, S.Kom., M.T.I.	Bambang Sukmadi	4	3	7	3	4	4	11	4	4	8	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	80	3,81	
14	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Bambang Sukmadi	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	3	3	6	3	3	6	4	4	8	3	3	6	76	3,62	Perlu menyediakan ruang baca/ fasilitas perpustakaan yang bisa diakses peserta pendidikan Perlu ada sesi visitor trip pasca pendidikan ke Mahkamah Konstitusi untuk memberikan orientasi kepada peserta mengenai tempat persidangan
15	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Ardiansyah Salim	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
16	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Pertahankan Lanjutkan Jika msh perlu anggaran mhn di ajukan kami akan bantu
17	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Muhidin, S.H., M.Hum.	Budi Hari Wibowo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Pertahankan, lanjutkan,
18	3	4	4	11	4	3	3	10	YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.		4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	3	3	6	4	4	8	3	3	6	3	3	6	73	3,48	
19	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	2	2	4	4	4	8	4	4	8	4	4	8	80	3,81	Terbaik untuk pusdiklat MKRI MKRI panutan MK RI sebagai contoh
20	4	4	4	12	4	4	4	12	Nanda Adytiansyah, S.Kom., M.T.I.	Hadian Taofik Rochman	4	3	7	4	4	4	12	4	4	8	1	3	4	4	4	8	4	4	8	4	3	7	78	3,71	Hidangan makanan lebih cepat habis, dibandingkan dengan Bimtek Pileg dan Pilpres.
21	4	4	4	12	4	4	4	12	Nanda Adytiansyah, S.Kom., M.T.I.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
22	4	4	2	10	4	4	4	12	Nanda Adytiansyah, S.Kom., M.T.I.	Budi Hari Wibowo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3,90	

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARISUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
23	3	4	4	11	4	3	3	10	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Hadian Taofik Rochman	4	3	7	4	4	4	12	3	3	6	2	3	5	4	4	8	3	3	6	3	4	7	72	3,43	untuk snack dan kopi saya rasa perlu selalu sedia setiap saat, bukan pada saat coffe break saja. misal snack kering/cemilan. untuk Uang Saku saya rasa kedepan perlu di pertimbangkan dan di berikan kepada peserta bimtek. materi sudah bagus, namun ada yang perlu di evaluasi terkait pemateri yang bisa membangun suasana yg lebih interaktif.
24	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
25	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Hadian Taofik Rochman	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
26	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
27	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Muhidin, S.H., M.Hum.	Bambang Sukmadi	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
28	3	3	4	10	4	3	4	11	YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Budi Hari Wibowo	3	3	6	4	4	4	12	4	3	7	3	3	6	4	4	8	4	0	4	4	4	8	72	3,43	Saran jika dikamar ada televisi akan membuat lebih nyaman dan tidak sepi
29	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Syamsudin Noer, S.H., M.H.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Fokuslah dalam hal meningkatkan terus service Exelence. Terus dan teruslah meningkat layanannya. Lain kali peserta yang diundang dalam pelatihan teknik sidang ini, praktikumnya harus diseleksi lagi. Pastikan dari kelompok pengirim peserta agar betul2 menghadirkan praktisi hukum. Kalau bukan praktisi yang hadir utk bimtek.sidang MK, kasihan. Karena kalau yang dihadirkan bukan praktisi, nanti banyak kebingungan di ruang kelas praktikumnya
30	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Budi Hari Wibowo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
31	4	4	4	12	4	4	4	12	Hafidz Ikhsan Baihaki	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
32	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	78	3,71	
33	4	4	4	12	4	4	4	12	Luthfi Widagdo Eddyono, S.H., M.H.	Budi Hari Wibowo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3,90	
34	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Bambang Sukmadi	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Perlu ada ruang dan alat olah raga
35	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Ardiansyah Salim	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	makananya saja di per enak makanannya di per enak makanannya, ganti cateringnya. hehee makanannya di per enak saja
36	4	4	3	11	4	4	3	11	Dr. Muhidin, S.H., M.Hum.		4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3,90	
37	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Hadian Taofik Rochman	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
38	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Hadian Taofik Rochman	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Cukup Cukup Cukup
39	3	3	3	9	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Hadian Taofik Rochman	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	1	3	4	3	3	6	3	4	7	3	3	6	65	3,10	agar makanan lebih di improve lagi menu dan rasa mohon lebih baik lagi porsi makan mohon lebih banyak karena sempat tidak kebagian
40	3	3	3	9	3	3	3	9	Luthfi Widagdo Eddyono, S.H., M.H.	Bambang Sukmadi	3	3	6	4	4	4	12	3	4	7	4	4	8	4	4	8	3	4	7	4	4	8	74	3,52	Baik Baik Baik
41	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.		4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	83	3,95	
42	4	3	4	11	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Ardiansyah Salim	3	3	6	3	4	4	11	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	76	3,62	
43	4	4	4	12	4	4	4	12	Hafidz Ikhsan Baihaki	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
44	3	4	4	11	3	3	4	10	Hafidz Ikhsan Baihaki		4	4	8	4	4	4	12	4	3	7	4	2	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	78	3,71	trimksih Trimksih Trimksih

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARISUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
45	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Budi Hari Wibowo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Sangat baik sekali Materi nya Terus tingkatkan kegiatan BIMTEK seperti ini kedepan Terima kasih banyak atas semuannya (Wa wa wa)
46	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
47	4	4	4	12	4	4	4	12	Hafidz Ikhsan Baihaki	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	2	2	4	4	4	8	4	4	8	4	4	8	80	3,81	Trimksih Trimksih Trimksi
48	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
49	3	4	3	10	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Bambang Sukmadi	3	3	6	3	3	3	9	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	3	3	6	75	3,57	
50	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Muhidin, S.H., M.Hum.	Bambang Sukmadi	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Pertahankan tingkat
51	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Muhidin, S.H., M.Hum.	Bambang Sukmadi	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Pertahankan tingkatkan
52	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Ardiansyah Salim	4	3	7	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	3	7	82	3,90	penataan ruang kamar yang lebih baik karena terasa agak sempit untuk melaksanakan shalat di dalam kamar
53	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Hadian Taofik Rochman	3	3	6	4	4	4	12	4	3	7	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	3	7	76	3,62	sudah cukup baik
54	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Hadian Taofik Rochman	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	0	3	3	3	6	60	2,86	Untuk yg terlewat presensi dan dapat membuktikan kehadirannya mohon dapat dianggap hadir
55	3	4	3	10	3	3	3	9	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Budi Hari Wibowo	3	3	6	4	4	4	12	4	4	8	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	76	3,62	
56	4	4	4	12	3	4	3	10	YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Budi Hari Wibowo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3,90	
57	4	3	4	11	3	3	3	9	YM Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H.	Hadian Taofik Rochman	3	4	7	4	4	4	12	4	3	7	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	77	3,67	
58	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.		3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
59	3	4	4	11	4	3	3	10	YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Ardiansyah Salim	3	4	7	4	4	4	12	3	4	7	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	78	3,71	
60	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Bambang Sukmadi	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
61	3	4	3	10	4	3	3	10	YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Ardiansyah Salim	3	3	6	3	3	4	10	4	4	8	3	3	6	4	3	7	4	4	8	4	4	8	73	3,48	well done over all sangat memuaskan, dan terima kasih khusus untuk Ptt kepala Pusdik pak Nanang Subekti, karena telah membuat Pusdik memiliki atmosfer yang berbeda daripada sebelumnya, dan menjadi sangat lebih baik saat ini...selamat dan sukses selalu
62	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	2	3	5	4	4	8	4	4	8	4	4	8	81	3,86	
63	3	4	4	11	3	3	3	9	Dr. Muhidin, S.H., M.Hum.	Hadian Taofik Rochman	4	3	7	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	79	3,76	Fasilitas TV bim ada Azan tiap waktu sholat masuk
64	3	4	4	11	3	3	3	9	Dr. Muhidin, S.H., M.Hum.	Hadian Taofik Rochman	4	3	7	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	79	3,76	Fasilitas TV bim ada Azan tiap waktu sholat masuk
65	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Muhidin, S.H., M.Hum.	Hadian Taofik Rochman	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	80	3,81	Faailitas TV Azan tiap waktu sholat masuk
66	4	4	4	12	4	3	3	10	YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Bambang Sukmadi	4	3	7	4	4	4	12	4	3	7	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	79	3,76	
67	4	4	4	12	4	4	4	12	Saiful Anwar, S.H., M.H.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Lanjutkan
68	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Budi Hari Wibowo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	80	3,81	
69	3	3	4	10	4	4	3	11	Nanda Adytiansyah, S.Kom., M.T.I.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	81	3,86	
70	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Hadian Taofik Rochman	4	3	7	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	83	3,95	Baik Baik Baik
71	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Hadian Taofik Rochman	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Istimewa Istimewa Istimewa

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
72	3	3	3	9	3	3	3	9	Luthfi Widagdo Eddyono, S.H., M.H.	Ardiansyah Salim	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
73	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Oly Viana Agustine, S.H., M.H.	Ardiansyah Salim	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
74	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Muhidin, S.H., M.Hum.	Bambang Sukmadi	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Istimewa Istimewa Istimewa
75	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Oly Viana Agustine, S.H., M.H.	Hadian Taofik Rochman	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	2	6	82	3,90	
76	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Syamsudin Noer, S.H., M.H.	Bambang Sukmadi	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	2	2	4	3	3	6	3	3	6	3	3	6	61	2,90	- - -
77	3	3	4	10	3	3	3	9	Dr. Syamsudin Noer, S.H., M.H.	Bambang Sukmadi	3	2	5	3	3	4	10	4	4	8	1	2	3	3	3	6	4	4	8	4	3	7	66	3,14	KELAS 4
78	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Syamsudin Noer, S.H., M.H.	Bambang Sukmadi	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Kelas 4 : Terimakasih Terimakasih Terimakasih
79	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Ardiansyah Salim	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
80	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Ardiansyah Salim	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
81	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Ardiansyah Salim	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Mantabb Lanjutkan Okeee
82	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Pertahankan
83	3	3	4	10	3	3	3	9	YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Hadian Taofik Rochman	3	3	6	3	3	4	10	3	3	6	3	3	6	4	4	8	3	3	6	3	3	6	67	3,19	Sangat baik
84	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Budi Hari Wibowo	3	3	6	3	4	4	11	3	3	6	3	3	6	4	3	7	4	3	7	4	4	8	69	3,29	
85	3	3	4	10	4	4	4	12	Dr. Muhidin, S.H., M.Hum.	Bambang Sukmadi	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	67	3,19	
86	3	4	3	10	3	3	3	9	Dr. Syamsudin Noer, S.H., M.H.	Bambang Sukmadi	3	3	6	4	4	4	12	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	75	3,57	Fasilitas kamar tidur kurang lega.... Sempit kesannya
87	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Hadian Taofik Rochman	4	3	7	4	4	4	12	4	4	8	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3,90	untuk peserta dari dpp spy dipertimbangkan uang penggantinya dari mulai brngknya tdk dri kantor DPPnya yg ada dijakarta tdk dri jkrta bogor,tapi tempt tinggal pereserta tinggal.....
88	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Ardiansyah Salim	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
89	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Oly Viana Agustine, S.H., M.H.	Budi Hari Wibowo	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Untuk makanan sering terlihat kosong (habis) padahal masih pada jam makan/sarapan. Untuk kegiatan pelatihan seperti ini, harus dibedakan dengan acara resepsi. Resepsi banyak yang hanya icip-icip. Sementara pelatihan seperti ini, peserta laki-laki makan sebagaimana mereka makan di rumah, kantor, sehingga porsinya mungkin lebih banyak. Yang kasihan jika datang telat sedikit (setengah jam sejak dibukanya jam makan), sering kehabisan. terima kasih.
90	4	3	3	10	4	4	4	12	Dr. Muhidin, S.H., M.Hum.	Bambang Sukmadi	4	4	8	3	3	4	10	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	80	3,81	mantu pelayanannya
91	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Budi Hari Wibowo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Tingkatkan lbh baik lg
92	4	3	3	10	3	3	3	9	YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.		3	3	6	4	3	3	10	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	4	3	7	66	3,14	
93	3	4	4	11	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Budi Hari Wibowo	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	81	3,86	Peningkatan kualitas pendidikan dengan meningkatkan waktu dialog soal materi bimtek supaya diketahui secara pasti dan diketahui
94	3	3	3	9	3	3	3	9	Luthfi Widagdo Eddyono, S.H., M.H.	Ardiansyah Salim	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	2	2	4	3	3	6	4	4	8	4	4	8	65	3,10	Tingkatkan
95	3	4	3	10	3	3	3	9	Dr. Muhidin, S.H., M.Hum.	Ardiansyah Salim	3	2	5	3	4	4	11	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	75	3,57	Pemateri sebaiknya juga menghadirkan pemohon yang beberapa kali permohonannya diterima oleh MK

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
96	4	3	4	11	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Ardiansyah Salim	4	4	8	3	3	4	10	4	4	8	4	4	8	4	3	7	4	4	8	4	3	7	79	3,76	
97	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Syamsudin Noer, S.H., M.H.	Ardiansyah Salim	3	2	5	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	62	2,95	Tingkatkan lagi Di kamar kami, tidak ada gelas, yg ada cangkir, overall baik terima kasih Setiap acara baiknya ontime, klo peserta telah tetap di mulai saja
98	3	4	3	10	3	3	3	9	YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Ardiansyah Salim	3	3	6	3	3	4	10	3	3	6	2	3	5	4	4	8	4	3	7	4	3	7	68	3,24	Penyampaian materi kedepannya harus lebih inovatif dan lebih menarik Makanan harus lebih variatif jangan terlalu sering lauk ayam.
99	4	4	4	12	3	3	3	9	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Hadian Taofik Rochman	3	2	5	3	3	4	10	4	4	8	1	2	3	3	3	6	3	3	6	3	3	6	65	3,10	Secara keseluruhan perihal kegiatan, sarana dan prasarana sudah baik. Paling hanya sedikit masukkan perihal sweter hoodie nya all size nya untuk yg badan besar bim ada. Saran & perbaikan untuk bimtek kali ini terkait dengan konsumsi/catering. Rasa kurang, selain itu seringkali terjadi makanan cepat habis tp tidak di isi ulang. Pernah ada menu sop iga/daging tp dagingnya tidak baik. Perihal fasilitas kamar sudah baik, termasuk untuk peralatan mandi jg. Cm di kamar ada gelas untuk minum teh dan kopi tp knp tidak ada sendoknya.
100	4	4	4	12	4	4	4	12	Saiful Anwar, S.H., M.H.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Lanjutkan
101	4	4	4	12	4	4	4	12	Saiful Anwar, S.H., M.H.	Bambang Sukmadi	4	3	7	4	4	4	12	4	3	7	2	2	4	4	4	8	4	4	8	4	4	8	78	3,71	adakan tv di kamar pusdik makanan nya ditingkat kan rasa dan menu nya waktu diklat harus diadakan outbond
	3,53	3,63	3,61	3,59	3,59	3,55	3,53	3,56			3,58	3,48	3,53	3,63	3,68	3,77	3,70	3,63	3,58	3,61	3,28	3,43	3,35	3,71	3,67	3,69	3,72	3,74	3,73	3,74	3,63	3,69	75,76	3,61	

TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

**Oleh:
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI**

**DISAMPAIKAN DALAM “BIMBINGAN TEKNIS PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA”
TAHUN 2024**

PERSYARATAN FORMIL “AMBANG BATAS” PENGAJUAN PERMOHONAN (PASAL 158)

PROVINSI	AMBANG BATAS	KABUPATEN/KOTA
$P \leq 2.000.000$	2%	$P \leq 250.000$
$2.000.000 < P \leq 6.000.000$	1,5%	$250.000 < P \leq 500.000$
$6.000.000 < P \leq 12.000.000$	1%	$500.000 < P \leq 1.000.000$
$P > 12.000.000$	0,5%	$P > 1.000.000$



- **Pasal 158** akan diberlakukan setelah persidangan pemeriksaan atau dipertimbangkan setelah persidangan pemeriksaan lanjutan bersama-sama dengan pokok permohonan.
- Permohonan **tetap menguraikan** Pasal 158 UU 10/2016 dengan menghubungkannya pada pokok-pokok permohonan untuk menjelaskan kepada Mahkamah bahwa penerapan Pasal 158 dapat ditunda keberlakuannya sehingga harus dibuktikan dalam persidangan pemeriksaan (lanjutan).

BATAS WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- Permohonan diajukan paling lambat **3 (tiga) hari kerja** terhitung sejak **diumumkan penetapan** perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon.
- **Kapan** waktu pengumuman penetapannya? Sebab, pada PHP Kepala Daerah Tahun 2020/2021 banyak terjadi perbedaan waktu antara Penetapan dan Pengumuman oleh Termohon.

Penjelasan:

- Dalam PHP Kepala Daerah 2024/2025, penetapan perolehan suara hasil pemilihan terhitung sejak **ditetapkan** oleh Termohon. Mahkamah memaknai penetapan dimaksud sekaligus adalah **pengumuman** Termohon.
- Sementara itu, **hari kerja** dalam pengajuan permohonan diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.

Objek Permohonan dan Para Pihak



Objek permohonan adalah keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih. Jadi, bukan mengenai berita acara rapat pleno penetapan hasil rekapitulasi.



Para pihak dapat diwakili oleh kuasa hukum atau didampingi oleh pendamping.



Dalam hal pemilihan diikuti satu pasangan calon, masing-masing Pemantau Pemilihan dapat mengajukan permohonan sebagai Pemohon, seperti halnya pasangan calon yang masing-masing juga dapat menjadi Pemohon.



Pendaftaran dan sertifikat akreditasi Pemantau Pemilihan disesuaikan dengan daerah pemilihannya. Pemilihan Gubernur dari KPU Provinsi, sedangkan Pemilihan Bupati/Walikota dari KPU Kab/Kota.

Termohon dan Bawaslu

KPU Provinsi atau KPU Kab/Kota, jadi bukan KPU karena keputusan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur ditetapkan oleh KPU Provinsi, sedangkan penetapan hasil Pemilihan Bupati/Walikota ditetapkan oleh KPU Kab/Kota.

Termohon

Bawaslu

Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kab/Kota. Namun demikian dalam beracara maupun penyampaian Jawaban KPU Provinsi/KPU Kab/Kota atau Keterangan Bawaslu Provinsi/ KPU Kab/Kota harus dengan supervisi dan koordinasi KPU dan Bawaslu. Untuk itu, penyampaian salinan permohonan dan pemberitahuan hari sidang juga ditembuskan kepada KPU dan Bawaslu.

Dokumen Tertulis Para Pihak

1

Permohonan dan perbaikan permohonan hanya dapat diajukan 1 (satu) kali selama tenggang waktu pengajuan permohonan/perbaikan permohonan. Dokumen perbaikan permohonan tidak dapat diserahkan secara parsial.

2

Jawaban Termohon hanya dapat diajukan 1 (satu) kali.

3

Surat Permohonan menjadi Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait masing-masing juga hanya dapat diajukan 1 (satu) kali. Keterangan Pihak Terkait yang diajukan bersama-sama dengan surat permohonan menjadi Pihak Terkait tidak dianggap sebagai Keterangan Pihak Terkait.

4

Keterangan Bawaslu juga hanya dapat diajukan 1 (satu) kali.

5

Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu disampaikan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum persidangan pemeriksaan dan diserahkan pada jam kerja (08.00 – 16.00 WIB). Apabila melewati batas waktu maka penilaiannya diserahkan kepada Mahkamah.

Lanjutan

6

Nomor antrian pengajuan permohonan hanya berlaku untuk satu permohonan. Dalam hal telah mendapatkan nomor antrian, akan diproses sampai dengan diterbitkannya e-AP3.

7

Bea meterei dibubuhkan untuk setiap nomor alat bukti yang diajukan.

8

Hardcopy permohonan online tidak harus diserahkan, namun untuk alat bukti harus diserahkan secara langsung, dengan ketentuan untuk alat bukti berupa surat/tulisan yakni 1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar lainnya adalah penggandaannya. Sedangkan alat bukti selain surat/tulisan disimpan dalam USB yang dibubuhi meterai.

9

Ketentuan di atas juga berlaku untuk Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait/Bawaslu yang diajukan secara online.

10

Jika terdapat perbedaan permohonan/jawaban/keterangan dalam bentuk cetak dan digital maka yang digunakan dokumen cetak.

Lanjutan

11

Tenggang waktu perbaikan permohonan 3 hari kerja dimulai sejak **diterimanya** e-AP3 untuk permohonan yang diajukan secara offline atau sejak **dikirimkannya** e-AP3 untuk permohonan yang diajukan secara online.

12

Jika hardcopy permohonan online tidak diserahkan, termasuk tidak mengajukan perbaikannya, maka permohonan yang akan dicatat dalam BRPK adalah permohonan awal yang diajukan secara online.

13

Demikian juga apabila terdapat perbedaan antara permohonan online dengan permohonan hardcopy yang diserahkan tanpa ada perbaikan permohonan maka yang dicatat dalam BRPK adalah permohonan online.

14

Jika perbaikan permohonan melewati tenggang waktu, permohonan yang digunakan adalah permohonan awal.

15

Salinan permohonan disampaikan kepada Termohon dan Bawaslu Prov. atau Bawaslu Kab/Kota dan kepada KPU dan Bawaslu sebagai tembusan paling lama 2 hari kerja sejak e-BRPK.

Lanjutan

- 16 Penarikan permohonan yang dilakukan, baik sebelum maupun sesudah registrasi, akan dikonfirmasi dalam persidangan.
- 17 Karena sebagai pedoman, penyusunan permohonan, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu dapat mengacu pada lampiran PMK.
- 18 Permohonan persidangan jarak jauh diajukan paling lambat 2 hari kerja sebelum pelaksanaan sidang.

Pemberitahuan Sidang & Permohonan Pihak Terkait, dan Inzage

Pemberitahuan sidang pertama kepada Termohon dan Pemberi Keterangan paling lama 2 hari kerja sejak permohonan diregistrasi, sedangkan kepada Pihak Terkait paling lama 2 hari kerja sebelum pemeriksaan pendahuluan.

Para pihak dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk mempelajari alat bukti (inzage) dengan menyebutkan alat bukti yang hendak dipelajari. Sehingga, inzage dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan ketua panel dan dilakukan pada jam layanan.

Permohonan sebagai Pihak Terkait paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diregistrasi.

Alat Bukti & Jam Layanan

Jam layanan pengajuan permohonan dan perbaikan permohonan mulai pukul 08.00 s.d. 24.00 WIB pada hari kerja, sedangkan untuk layanan selainnya mulai pukul 08.00 s.d 16.00 WIB pada hari kerja.

Pengajuan daftar saksi dan/atau ahli beserta keterangannya disampaikan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum persidangan pemeriksaan (lanjutan) dengan agenda pembuktian. Demikian juga dengan penyampaian bukti tambahan para pihak paling lama 1 (satu) hari sebelum hari sidang untuk pengesahan alat bukti.

A person wearing a white lab coat is pouring coffee from a glass carafe into a white cup on a saucer. The scene is set on a wooden table with a stack of books on the left and a small container on the right. The background is softly blurred.

**SEKIAN
TERIMA KASIH**

DINAMIKA PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Fajar Laksono Suroso

WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI

MEMUTUS SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA YANG KEWENANGANNYA DIBERIKAN OLEH UNDANG-UNDANG DASAR

SKLN

PARPOL

MEMUTUS PEMBUBARAN PARTAI POLITIK

MENGUJI UNDANG-UNDANG TERHADAP UUD

MEMUTUS PERSELISIHAN HASIL TENTANG PEMILIHAN UMUM

PHPU

PEMAKZULAN

WAJIB MEMBERIKAN PUTUSAN ATAS PENDAPAT DPR MENGENAI DUGAAN PELANGGARAN OLEH PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN.

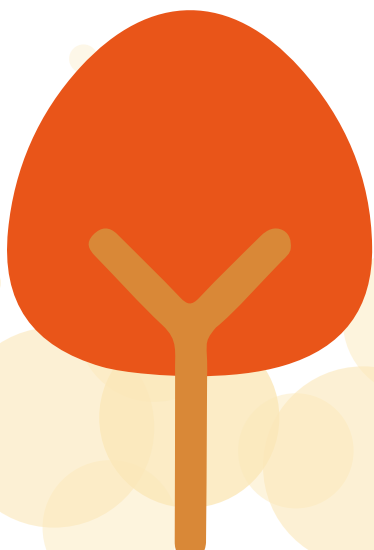
DINAMIKA PENGATURAN UU PILKADA REZIM PEMILU ATAU PEMDA?

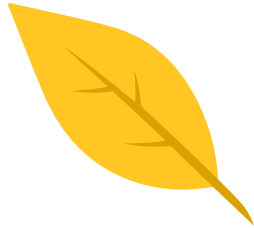
**UU NOMOR 22
TAHUN 1999**
TENTANG
PEMERINTAHAN
DAERAH

**UU NOMOR 32 TAHUN
2004**
TENTANG
PEMERINTAHAN
DAERAH

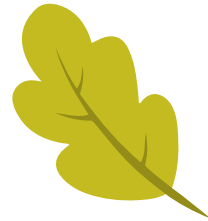
**UU NOMOR 22 TAHUN
2014**
TENTANG PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN
WALIKOTA

UU NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG PENETAPAN PERPU NOMOR
1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA
MENJADI UU





PUTUSAN NOMOR 072- 073 /PUU-II/2004
PEMBENTUK UU DAPAT MENENTUKAN
PILKADA ITU PEMILU ATAU BUKAN
PEMILU



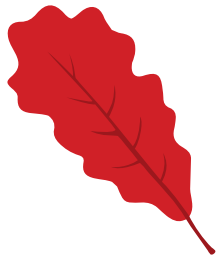
UU NOMOR 22 TAHUN 2007
TENTANG PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM



UU NOMOR 12 TAHUN 2008
TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANGUNDANG NOMOR 32
TAHUN 2004 TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH.



PUTUSAN MK NOMOR 97/PUU-XI/2013:
SENGKETA PILKADA BUKAN
WEWENANG MK



UU NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG PENETAPAN PERPU NOMOR
1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA
MENJADI UU



UU NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG PERUBAHAN UU
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG PENETAPAN PERPU
NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG
PEMILIHAN GUBERNUR,
BUPATI, DAN WALIKOTA
MENJADI UU



UU NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS UU NOMOR PENETAPAN
PERPU NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN
WALIKOTA MENJADI UU



PUTUSAN NOMOR 85/PUU-XX/2022
PERKARA PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, WALI
KOTA MERUPAKAN WEWENANG MK
UNTUK MEMUTUS

PUTUSAN NOMOR 85/PUU-XX/2022

PILKADA = REZIM PEMILU = WEWENANG MK

PHPU

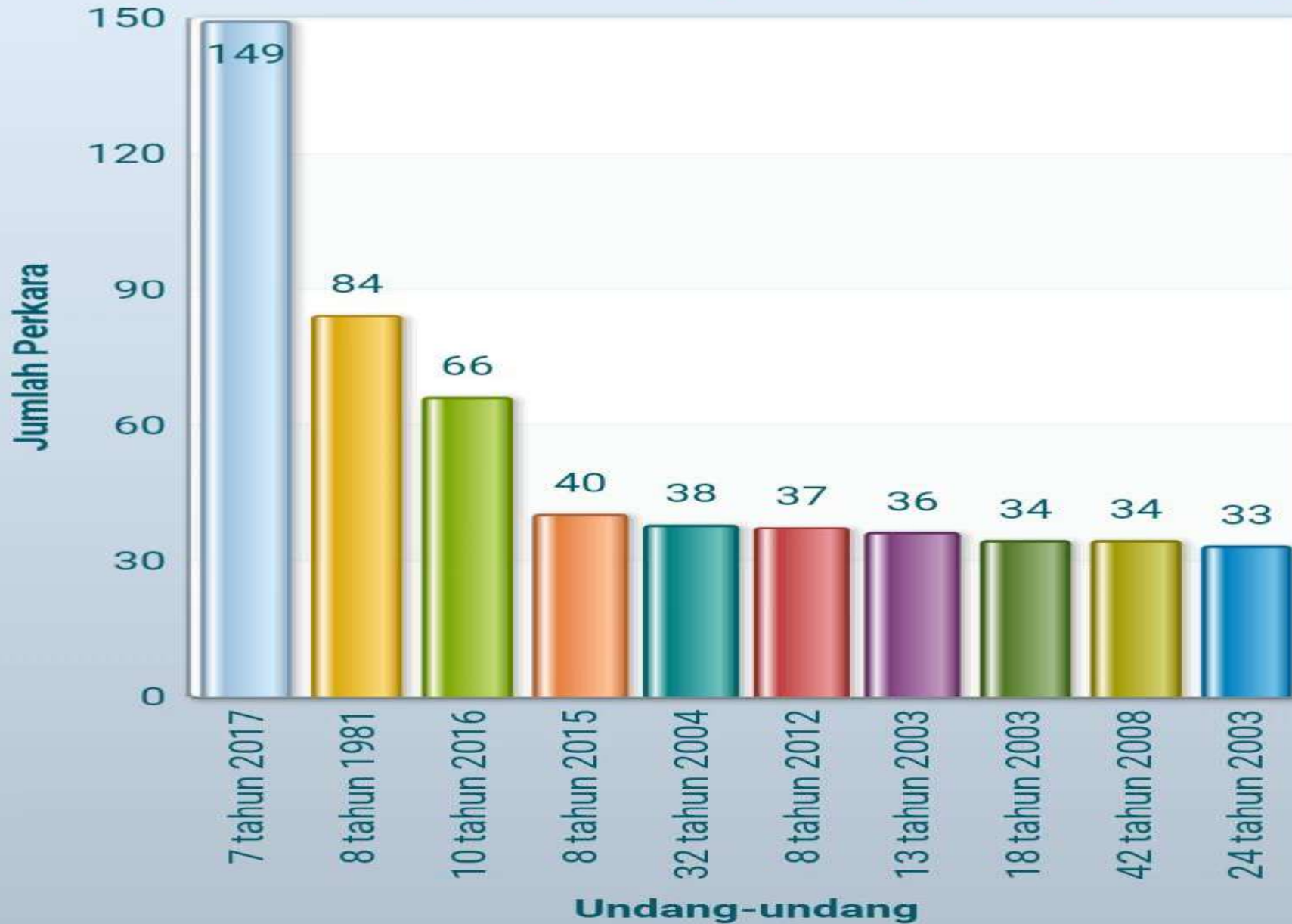
MEMUTUS PERSELISIHAN HASIL
TENTANG PEMILIHAN UMUM

PEMILIHAN UMUM

- PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
- ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
- ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
- ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

- **GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA**

10 Undang-undang Paling Sering Di Uji



DINAMIKA
PUTUSAN
MK
(PUU DAN
PHP KADA)

DINAMIKA PENANGANAN PERKARA PHP KADA

Chart Putusan PILKADA Berdasarkan Amar (1136)

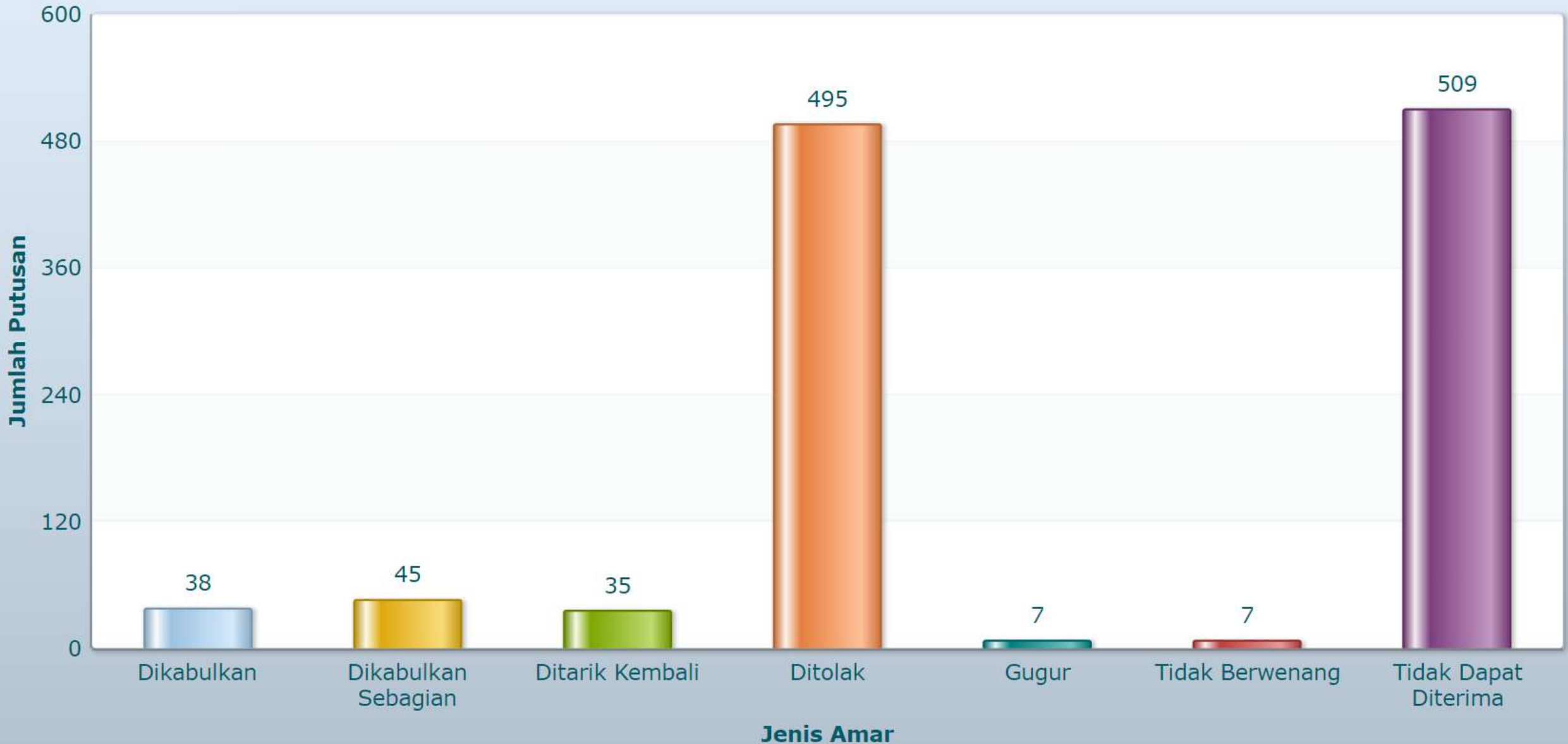
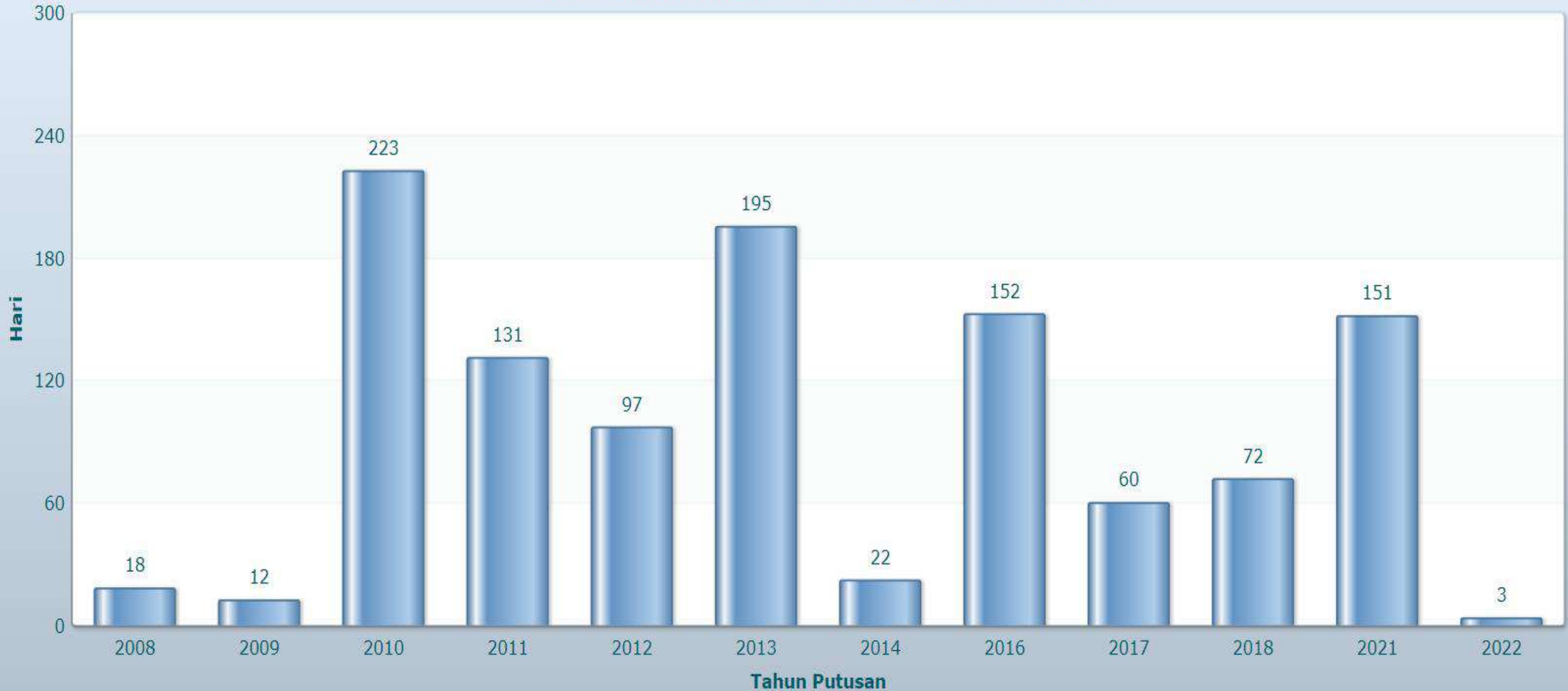


Chart Jumlah Putusan Perkara Pilkada Per Tahun



DALIL PERMOHONAN YANG SERING DIMUNCULKAN



DINAMIKA PASAL 158 UU 10/2016

MENUNDA PEMBERLAKUAN KETENTUAN “AMBANG BATAS”

1. PUTUSAN MK NOMOR 2/PHP.KOT-XVI/2018
TANGGAL 9 AGUSTUS 2018 (PARE-PARE)
2. PUTUSAN MK NOMOR 84/PHP.BUP-XIX/2021
TANGGAL 19 MARET 2021 (NABIRE)
3. PUTUSAN MK NOMOR 101/PHP.BUP-XIX/2021
TANGGAL 19 MARET 2021 (TELUK BINTUNI)
4. PUTUSAN MK NOMOR 132/PHP.BUP-XIX/2021
TANGGAL 22 MARET 2021 (BOVEN DIGOEL)
5. PUTUSAN MK NOMOR 135/PHP.BUP-XIX/2021
TANGGAL 15 APRIL 2021 (SABU RAI JUA), DAN
6. PUTUSAN MK NOMOR 145/PHP.BUP-XIX/2021
TANGGAL 15 APRIL 2021 (YALIMO)

DIPERTIMBANGKAN BERSAMA-SAMA DENGAN POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. PUTUSAN MK NOMOR 39/PHP.BUP-XIX/2021 TANGGAL 18
MARET 2021 (PESISIR BARAT)
2. PUTUSAN MK NOMOR 46/PHP.BUP-XIX/2021 TANGGAL 18
MARET 2021 (KAB. BANDUNG)
3. PUTUSAN MK NOMOR 59/PHP.BUP-XIX/2021 TANGGAL 18
MARET 2021 (NIAS SELATAN)
4. PUTUSAN MK NOMOR 100/PHP.BUP/XIX/2021 TANGGAL 18
MARET 2021 (KAB. SAMOSIR)
5. PUTUSAN MK NOMOR 97/PHP.BUP-XIX/2021 TANGGAL 19
MARET 2021 (YALIMO)
6. PUTUSAN MK NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021 TANGGAL 19
MARET 2021 (KAB. TASIKMALAYA)
7. PUTUSAN MK NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021 TANGGAL 22
MARET 2021 (KOTA BANJARMASIN)



TERIMA KASIH



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PEMANFAATAN TIK DALAM PENANGANAN PERKARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

AKSES BERPERKARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI



1

Dasar Infrastruktur TIK,
Persidangan Jarak Jauh dan
Streaming Persidangan Mahkamah
Konstitusi

2

Sistem Informasi Penanganan
Perkara Elektronik
(simpler.mkri.id)

3

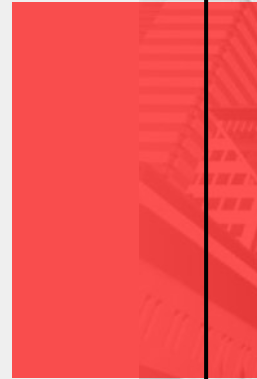
Website Mahkamah Konstitusi,
Case Tracking dan Case Retrieval

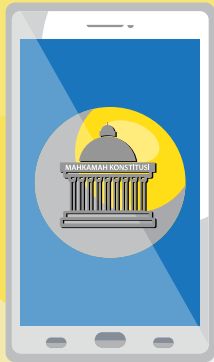
4

Click MK

PENDAHULUAN

“Pemanfaatan Teknologi Informasi & Komunikasi di Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu upaya nyata untuk mewujudkan Kemudahan Akses Para Pihak Dalam Berperkara di MK melalui administrasi lembaga peradilan yang **modern** dan **tepercaya**”.

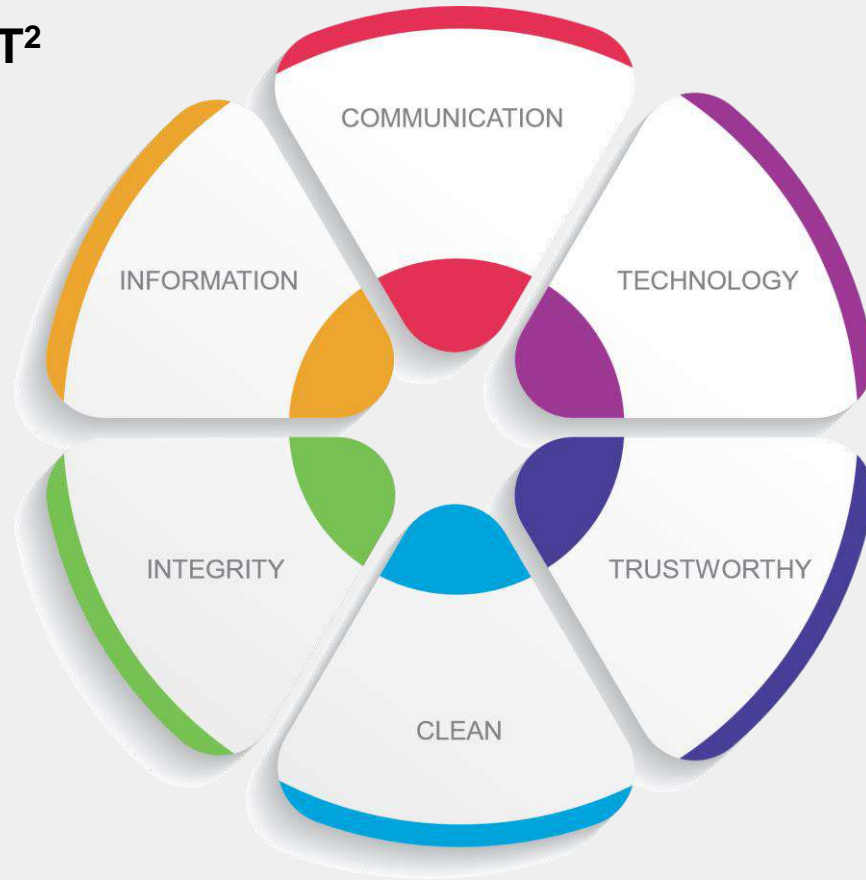




Peradilan modern adalah peradilan dengan sistem kerja berbasis **ICT (*information, communication, and technology*)**, memiliki *mindset* dan *cultureset* yang maju termasuk di dalamnya *committed* pada **ICT (*integrity, clean, and trustworthy*)**:

1. Peradilan dengan sistem kerja berbasis ICT;
2. Peradilan dengan *mindset* maju; dan
3. Peradilan dengan *cultureset* yang memajukan.

PENGERTIAN ICT²



SISTEM SECURITY DI MAHKAMAH KONSTITUSI



PALOALTO (FIREWALL)

Sebagai pintu pertama pencegahan serangan ke dalam sistem jaringan



ANTI DDOS

Perangkat pencegah serangan DDOS yang menyebabkan *high traffic* pada Bandwidth



IRON PORT (EMAIL SECURITY)

Alat pengecekan dan *filtering email* MK Terhadap Malware, Virus, Spam dll

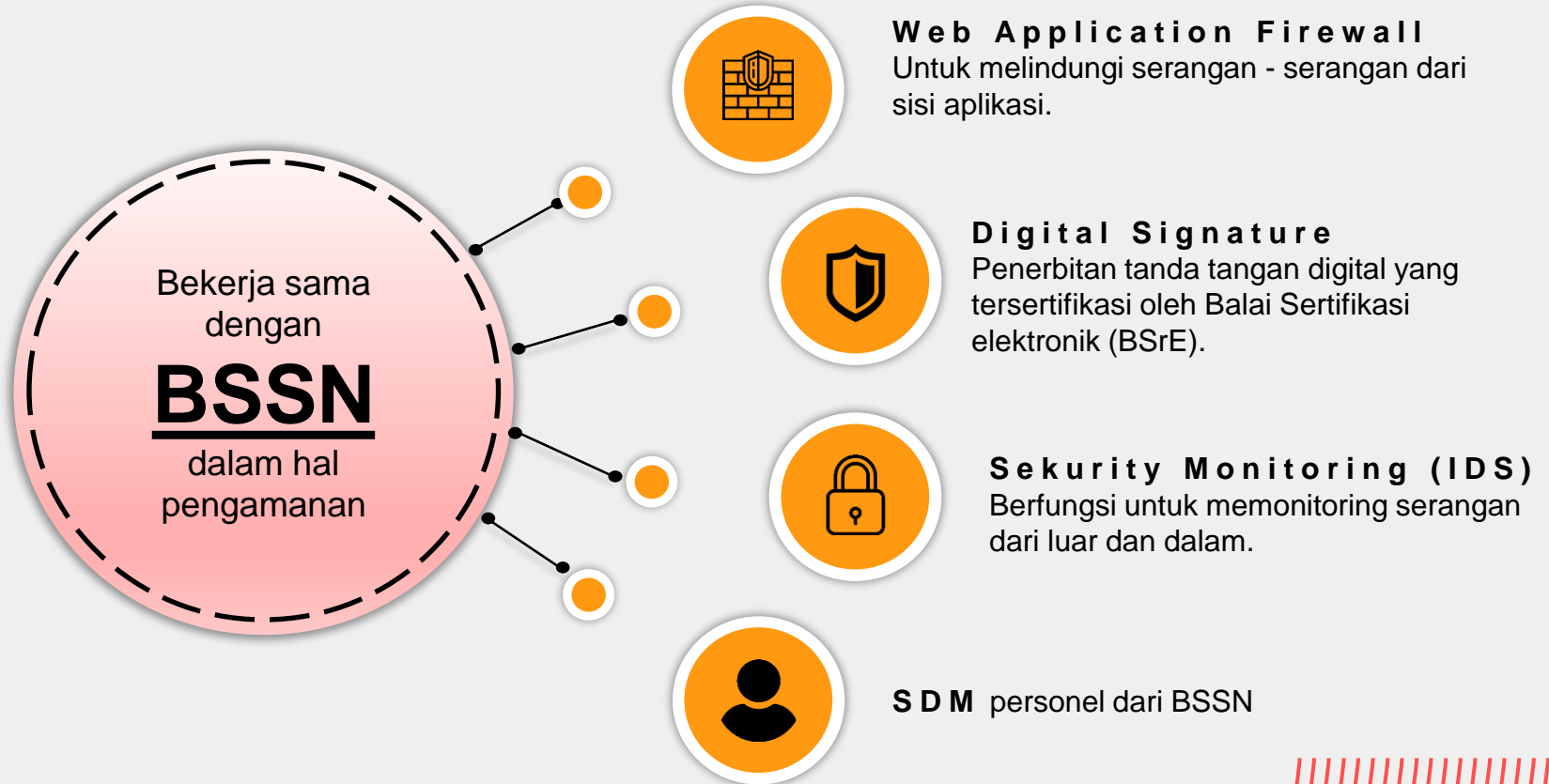


MIRRORING SERVER

Sistem back up server, untukantisipasi apabila Server utama *down* dapat segera digantikan Fungsinya oleh server backup



SISTEM SECURITY DI MAHKAMAH KONSTITUSI



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

MODEL PERSIDANGAN:

Persidangan MK dapat dilakukan secara luring (*offline*) atau secara daring (*online*). Dalam hal persidangan secara luring tidak dapat dilaksanakan karena adanya suatu peristiwa atau keadaan yang tidak memungkinkan, MK menetapkan persidangan diselenggarakan secara daring (*online*).

RUANG LINGKUP:

Persidangan Jarak Jauh adalah sidang yang dilakukan oleh MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi yang diajukan kepada MK dalam sidang panel atau sidang pleno dengan menggunakan aplikasi konferensi video (*video conference*) atau media elektronik lainnya yang memungkinkan para pihak dapat saling melihat, mendengar, dan berkomunikasi dalam jaringan persidangan



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

TUJUAN:

- Kelancaran proses persidangan melalui sidang secara daring (*online*).
- Efisiensi biaya dan waktu bagi para pihak.
- Memenuhi ketentuan pelaksanaan persidangan secara daring (*online*), disebabkan persidangan secara luring (*offline*) tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan.
- Memudahkan akses pencari keadilan pada pengadilan dan keadilan.

KEHADIRAN:

Persidangan jarak jauh dilaksanakan secara terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim secara luring (*offline*) dan para pihak secara daring (*online*) dan/atau secara luring (*offline*)



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

KEWAJIBAN PARA PIHAK:

- 1) Memastikan kelancaran koneksi jaringan internet dan intranet
- 2) Menyesuaikan pencahayaan ruangan dan/atau media elektronik yang digunakan
- 3) Memastikan berada di dalam ruangan, dan perangkat elektronik berada dalam mode sunyi atau tanpa gangguan suara, kecuali perangkat elektronik yang digunakan untuk kepentingan Persidangan Jarak Jauh
- 4) Menggunakan latar belakang yang sepiantasnya.

SAKSI DAN AHLI:

Saksi dan/atau ahli yang akan didengar keterangannya di Persidangan Jarak Jauh diambil sumpah atau janji yang dipandu oleh Hakim dari Ruang Sidang Mahkamah.



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

ALAT BUKTI:

Dalam hal terdapat keterangan tambahan dan/atau dokumen atau data lainnya yang disampaikan pada saat pelaksanaan Persidangan Jarak Jauh, keterangan dimaksud harus diperlihatkan atau ditayangkan yang selanjutnya dikirimkan secara daring (*online*) atau media media elektronik lainnya ke MK paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah sidang.

PERKEMBANGAN ICT:

Penerapan penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh disesuaikan dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi.

LAIN-LAIN:

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim.



PERSIDANGAN VIRTUAL



You Tube
Diakses melalui
Youtube Mahkamah
Konstitusi

PERSIDANGAN
YANG
DITAYANGKAN
LIVE STREAMING
DI KANAL
YOUTUBE DAN
WEBSITE MK

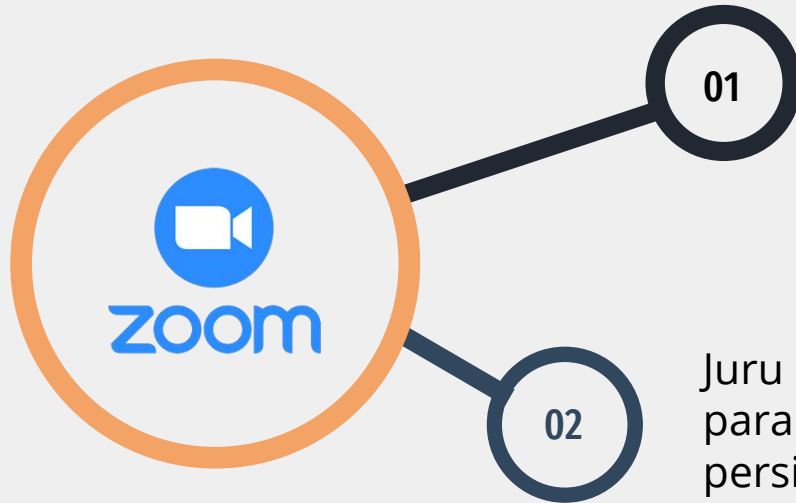
MKRI.ID
Live Streaming
Diakses melalui
Website Mahkamah
Konstitusi



PELAYANAN PERSIDANGAN DARING



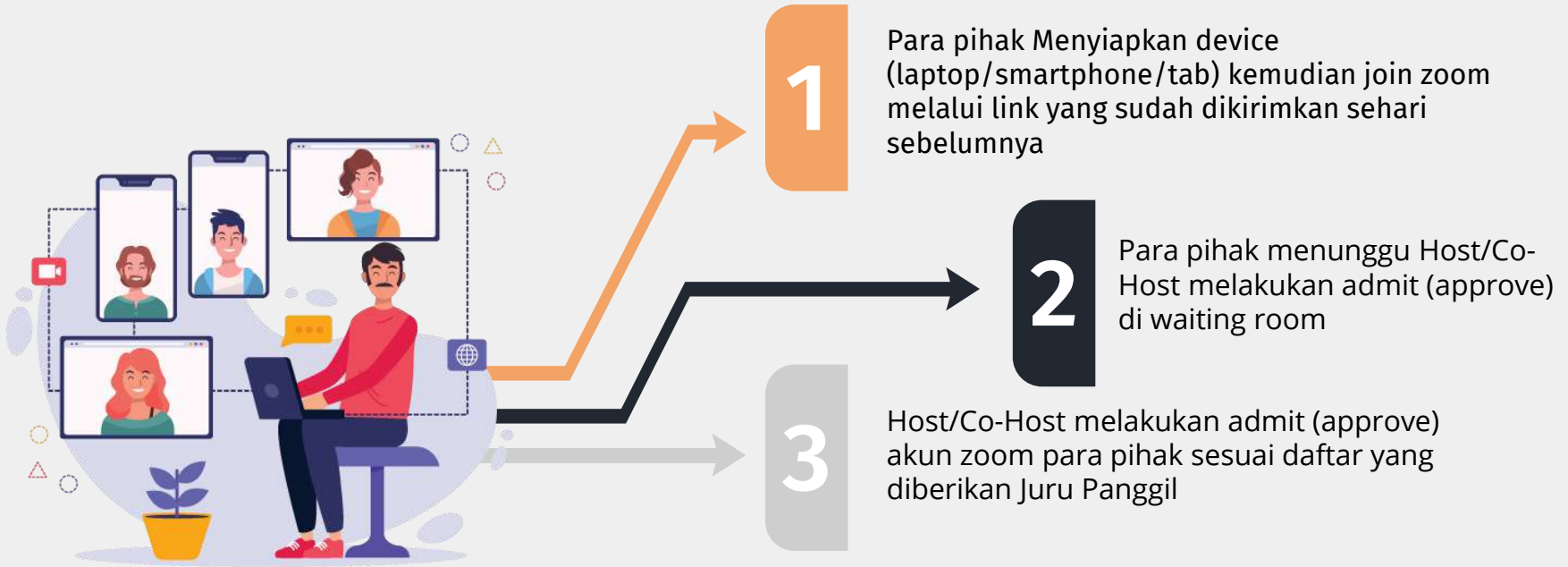
TAHAP PERSIAPAN



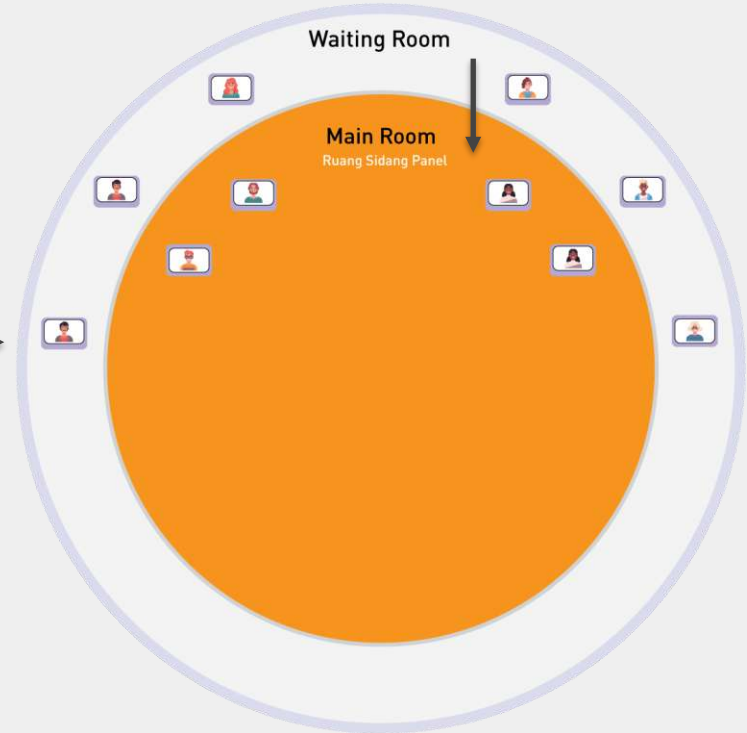
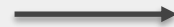
01 IT membuat link zoom sesuai jadwal persidangan dari Kepaniteraan

02 Juru Panggil mengirimkan link zoom kepada para pihak minimal satu hari sebelum persidangan

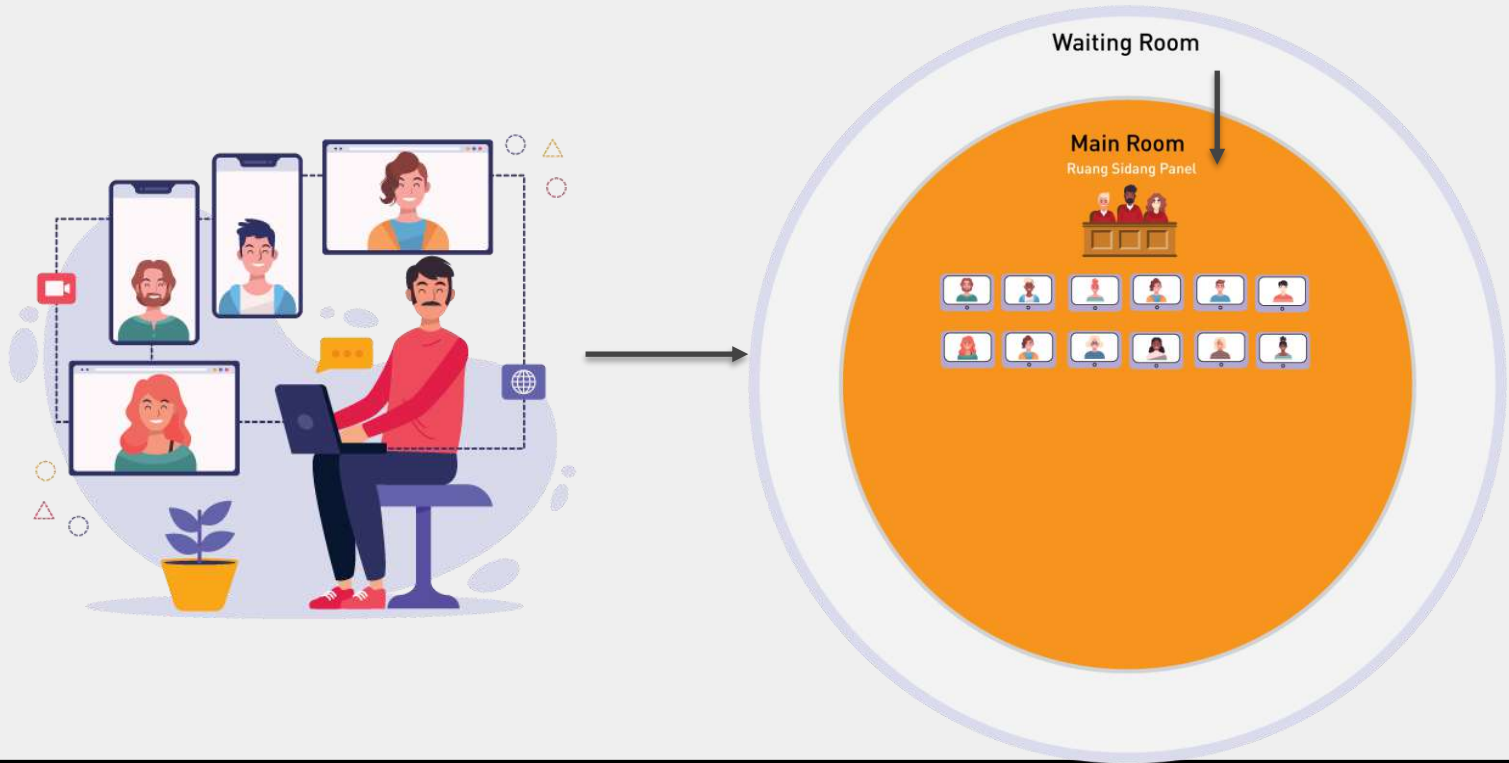
ALUR PERSIDANGAN DARING



- Setelah di admit (approve) para pihak berada pada **Main Room (Ruang Sidang)**
- Kemudian akan dilakukan test **Audio** dan **Video** kepada seluruh para pihak, serta diperiksa kelengkapan para pihak baik itu **Format Nama, Pakaian, dll.**



Selanjutnya di dalam **Main Room (Ruang Sidang) Majelis Hakim** melakukan proses persidangan



SMARTBOARD DI 68 LOKASI MINI COUTROOM



VIEWSONIC - IFP6550-3



VPC15-WP-3
Windows Slot-in PC for
ViewBoard®

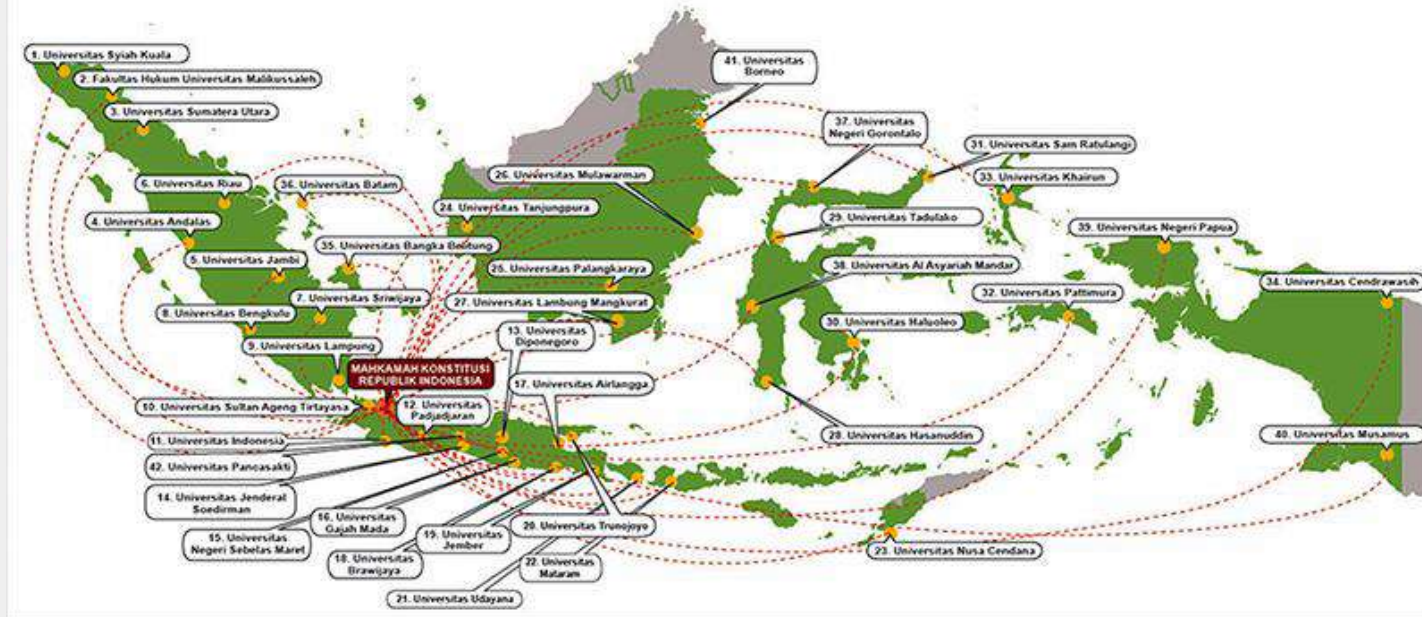


VB-STND-001
Rolling Trolley Cart Stand for
ViewSonic ViewBoard®



PELAYANAN PERSIDANGAN DARING PADA MINI COUTROOM DI 68 LOKASI

LOKASI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI DI PERGURUAN TINGGI SELURUH INDONESIA



NO	UNIVERSITAS	ALAMAT
1	Fakultas Hukum Universitas Airlangga	Kampus B Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286 Jawa Timur
2	Fakultas Hukum Universitas Andalas	Kampus Universitas Andalas Limau Manis, Padang 25163 Sumatera Barat
3	Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung	Kampus Terpadu, Balunjuk, Merawang-Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4	Fakultas Hukum Universitas Batam	Jl. Abulyatama no 5 Batam Center
5	Fakultas Hukum Universitas Bengkulu	Jalan W.R. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371 A
6	Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan	Jl. Amal Lama Nomor 1, Kelurahan Pantai Amal, Kota Tarakan Kalimantan Utara 77123
7	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Jl. Mayjen M.T Haryono No.169, Malang 65145 Jawa Timur
8	Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih	JL. Pendidikan II - Gedung Fakultas Hukum, Kampus Uncen Abepura
9	Fakultas Hukum Universitas Diponegoro	Jl. Prof. H. Soedarto, S.H. Kampus Universitas Diponegoro Tembalang, Semarang 50214 Jawa Tengah
10	Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada	Kampus UGM, Jl. Sosio Yustitia, Bulaksumur 55281 Yogyakarta
11	Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo	Kampus Hijau Bumi Tridharma Jl. H.E.A Mokodompit Anduonohu Kendari, Sulawesi Tenggara 93232
12	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin	Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Kampus Universitas Hasanuddin Tamalanrea
13	Fakultas Hukum Universitas Indonesia	Kampus Baru UI, Depok 16424 Jawa Barat
14	Fakultas Hukum Universitas Jambi	Kampus Pinang Masak Jl. Raya Jambi-Muara Bulian KM 15 Mendalo Darat-Jambi, 36361
15	Fakultas Hukum Universitas Jember	Jl. Kalimantan 37, Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121 Jawa Timur
16	Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman	Jalan Prof.Dr.HR. Boenjamin 708, Grendeng - Purwokerto 53122
17	Fakultas Hukum Universitas Khairun	Jl. Jusuf Abdurahman Kampus II Gambesi Kota Ternate Selatan. Kotak Pos 53 Ternate 97719
18	Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat	Jl. Brigjend H. Hasan Basry (Kayu Tangi) Banjarmasin, 70123 Kalimantan Selatan
19	Fakultas Hukum Universitas Lampung	Jalan Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro No.1, Gedung Meneng, Bandar Lampung 35145
20	Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh	Komplek Kampus Bukit Indah, Jl. Jawa - Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe P.O.BOX 141 - Provinsi Aceh
21	Fakultas Hukum Universitas Mataram	Jalan Majapahit No.62, Mataram 83125 Nusa Tenggara Barat
22	Fakultas Hukum Universitas Mulawarman	Jl. Sambaliung Kampus Gunung Kelua, Samarinda Kalimantan Timur 75119
23	Fakultas Hukum Universitas Musamus	Jalan Kamizaun Mopah Lama Merauke Papua 99611
24	Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo	Jl. Jend. Sudirman No.6 Kota Gorontalo
25	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana	Jl. Adisucipto Penfui Kupang Nusa Tenggara Timur



25	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana	Jl. Adisucipto Penfui Kupang Nusa Tenggara Timur
26	Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran	Jl. Raya Bandung Sumedang KM. 21 Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363
27	Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya	Kampus UNPAR Tunjung Nyaho Jl. H. Timang Kotak Pos 2/PLKUP Palangkaraya Kalimantan Tengah
28	Fakultas Hukum Universitas Pancasakti	Jl. Halmahera KM.1 - Kota Tegal
29	Fakultas Hukum Universitas Pattimura	Jln. Ir. M. Putuhena Kampus Unpatti Poka - Ambon
30	Fakultas Hukum Universitas Riau	Jalan Pattimura No. 9 Gobah Pekanbaru Riau
31	Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi	Kampus UNSRAT Bahu, Manado Sulawesi Utara 95115
32	Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret	Jl. Ir. Sutami N0.36 A, Ketingan, Surakarta, Jawa Tengah 57126
33	Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya	FH UNSRI Palembang, Jl. Srijaya Negara, Bukit Besar Palembang
34	Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Jl. Tirtayasa, Sindangsari, Kec. Pabuaran, Kab. Serang Prov. Banten (42163)
35	Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara	Medan Universitas No.4 Padang Bulan Medan, Kampus USU, Medan Sumatera Utara 20155
36	Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala	Jl.T. Putroe Phang No.1 Kopelma Darussalam Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam
37	Fakultas Hukum Universitas Tadulako	Kampus Bumi Tadulako, Jl. Soekarno Hatta KM.9 Kel. Tondo, Palu Sulawesi Tengah - 94118
38	Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura	Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi (Jenderal Achmad Yani) 78124, Kalimantan Barat (Pontianak)
39	Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo	Jl. Raya Telang P.O.Box 2 Kamal, Bangkalan-Madura
40	Fakultas Hukum Universitas Udayana	Jl. Pulau Bali No.1, Denpasar 80114 Bali
41	Universitas Al Asyariah Mandar	Jl. Budi Utomo No.2 Manding, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, 91315
42	Universitas Papua	Jl. Gunung Salju Manokwari, Papua Barat 98314
43	Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung	Jl. Zainal Abidin. Pagar Alam No.29, Labuhan Ratu, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung 35142
44	Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo	Jl. Semolowaru No.84, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Kota SBY, Jawa Timur 60118
45	Fakultas Hukum Universitas Gorontalo	Jl. Abdul Wahab (Eks. Jln. Jend. Sudirman) No.247, Kayubulan, Limboto, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo 96211
46	Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia	Jl. Kaliurang No.Km. 14,5, Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55584
47	Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana	Jl. Diponegoro No.52-60, Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah 50711
48	Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia	Jl. Urip Sumoharjo No.5, Panaikang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231
49	Univ. Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng	Jalan Ahmad Yani 10 Manggarai NTT Tenda, Watu, Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Tim. 86511
50	Univ. Islam Negeri Maulana Malik	Jl. Gajayana No.50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144
51	Nagari Pasie Laweh	Jl.Raya Bukittinggi-Medan KM 26 Palimbangan Nagari Pasia Laweh Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, Kode Pos : 26151
52	Desa Balla' Barakkaka ri Galesong	Baruga Appaka Sulapa' di Komplek Kampung Adat & Budaya Balla'Barakkaka Ri Galesong (BBrG) Desa Galesong Kabupaten Takalar
53	Desa Bangbang	Banjar Bangbang, Desa Bangbang, KecamatanTembuku, Kabupaten Bangli, Bali



No	FAKULTAS HUKUM	ALAMAT
54	Universitas Islam Sultan Agung Semarang	Jl. Kaligawe Raya Km.4, Terbuyo Kulon, Genuk, Semarang Jawa Tengah.
55	Universitas Muhammadiyah Bima	Jl. Anggrek No.6 Kel. Nae, Kec. Rasanae Barat, Kota Bima-NTB
56	Universitas Teuku Umar Meulaboh	Jl. Alue Peunyareng, Ujong Tanoh Darat, Meurebeo, Kab. Aceh Barat, Aceh
57	Universitas Islam Kediri	Jl. Sersan Sumarhaji No. 38, Manisrenggo, Kec. Kota, Kota Kediri Jawa Timur
58	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	Jl. Kpt. Mukhtar Basri No.3 Medan, 20238 Sumatera Utara
59	Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD Yogyakarta	Jalan, Timoho 317 Yogyakarta 55225
60	Universitas Balikpapan	Jl. Pupuk Raya Gn. Bahagia Balikpapan
61	Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar	Jl. Sultan Alauddin No. 63 Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan
62	Kampung Wasur	Kampung Wasur, Kab. Merauke Provinsi Papua
63	Desa Mekar Sari	Desa Mekar Sari, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya
64	Universitas Negeri Padang	Jl. Prof.Dr.Hamka, Air Tawar Padang, Sumatera Barat
65	Universitas Nusa Lontar Rote	Kompleks UNSTAR Mokdale BA'A-Rote Ndao (85914) Nusa Tenggara Timur
66	Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta	Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Tangerang Selatan
67	Fakulta Hukum Universitas Ahmad Dahlan	598M+M7V, Kragilan, Tamanan, Kec. Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55191
68	Yayasan Kepustakaan Bung Karno	Jl. Pegangsaan timur 56 No.1, Denpasar-Bali



PELAYANAN PERSIDANGAN DARING PADA MINI COUTROOM YANG AKAN BEKERJASAMA TAHUN 2024

NO	TANGGAL	NO PERKARA	POKOK PERKARA	ACARA SIDANG	TEMPAT
1	16-01-2024	148/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Pengucapan Putusan	Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
2	23-04-2024	06/MMK/L/04/2024	Laporan Pelanggaran Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi	Sidang Pemeriksaan Lanjutan (mendengarkan keterangan pelapor dan/atau memeriksa alat bukti)	Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo
3	25-04-2024	06/MMK/L/04/2024 07/MMK/L/04/2024	Laporan Pelanggaran Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi	Pengucapan Putusan	Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo
4	28-05-2024	258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Maluku Dapil MALUKU TENGAH 1 Tahun 2024	Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli, Memeriksa dan Mengesahkan Alat Bukti Tambahan	Fakultas Hukum Universitas Pattimura
5	29-07-2024	88-89/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-	Pemeriksaan Pendahuluan (I)	Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
6	12-08-2024	88-89-90/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-	Perbaikan Permohonan (II)	Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
7	20-08-2024	88-89-90/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-	Pengucapan Putusan	Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret



PELAYANAN PERSIDANGAN DARING



Persidangan Daring Pengujian UU Cipta Kerja



PEMANFAATAN LAIN DARI FASILITAS *VIDEO CONFERENCE* PADA MINI COUTROOM DI 68 LOKASI



Kuliah Umum / General Lecture dan
Symposium Nasional / International



PERSIDANGAN LIVE YOUTUBE CHANNEL MAHKAMAH KONSTITUSI RI

youtube.com/user/mahkamahkonstitusi

YouTube

Home Explore Shorts Subscriptions Library History Your videos Watch later 03 MARET 2022 Show more

SUBSCRIPTIONS Music Sports Gaming Movies

MORE FROM YOUTUBE YouTube Premium Movies Gaming Live Sports Settings

76TH INDONESIA TANGGUH INDONESIA TUMBUH

BERSAMA #MengawalKonstitusi NEGERI

Mahkamah Konstitusi RI 94.5K subscribers

CUSTOMIZE CHANNEL MANAGE VIDEOS

HOME VIDEOS PLAYLISTS COMMUNITY CHANNELS ABOUT

Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi RI

Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi RI

43,920 views · 7 years ago

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dibentuk pada 13 Agustus 2014 sebagai amanat dari Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Uploads PLAY ALL

Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor

1:25:45 3:08:10 14:15 19:16 19:15 1:41:05

https://studio.youtube.com/channel/UCX-BUmN87lAvqk5LFgxxw/editing/images/nurm : Dr. Suhartoyo, Sidang Pengucapan Putusan Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor

PERMOHONAN ELEKTRONIK

“Permohonan dapat disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi melalui media elektronik (**Permohonan Elektronik / *Electronic Filing***), dan permohonan elektronik tersebut dianggap diterima setelah permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi”.

PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (2)

“Permohonan elektronik (***electronic filing***), selanjutnya disebut permohonan, adalah permohonan melalui media elektronik yang memungkinkan pemohon untuk mengirim dan menyampaikan permohonannya secara elektronik kepada Mahkamah”

PMK 18/2009 Pasal 9 ayat (3)

“Permohonan dianggap diterima setelah permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.”



PERMOHONAN ELEKTRONIK

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang
"TATA BERACARA DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG"

Pasal 9 Ayat (1):

Pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah:

- a. Secara Luring (offline) atau;
- b. Secara Daring (Online) atau melalui media elektronik lainnya.

Pasal 11 Ayat (1):

Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tanpa kuasa hukum dapat diajukan secara luring (offline) atau daring (online)

Pasal 12 Ayat (1):

Dalam hal pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dikuasakan kepada kuasa hukum, Permohonan wajib diajukan secara daring (online).



SIMPEL.MKRI.ID (SISTEM INFORMASI PENANGANAN PERKARA ELEKTRONIK)



SIMPEL merupakan media elektronik berupa sebuah Sistem Informasi Manajemen untuk penerimaan permohonan secara elektronik.

SIMPEL memberikan akses langsung kepada para pihak terhadap perkara konstitusi, termasuk untuk mengajukan permohonan elektronik secara online (permohonan online).

PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (14)

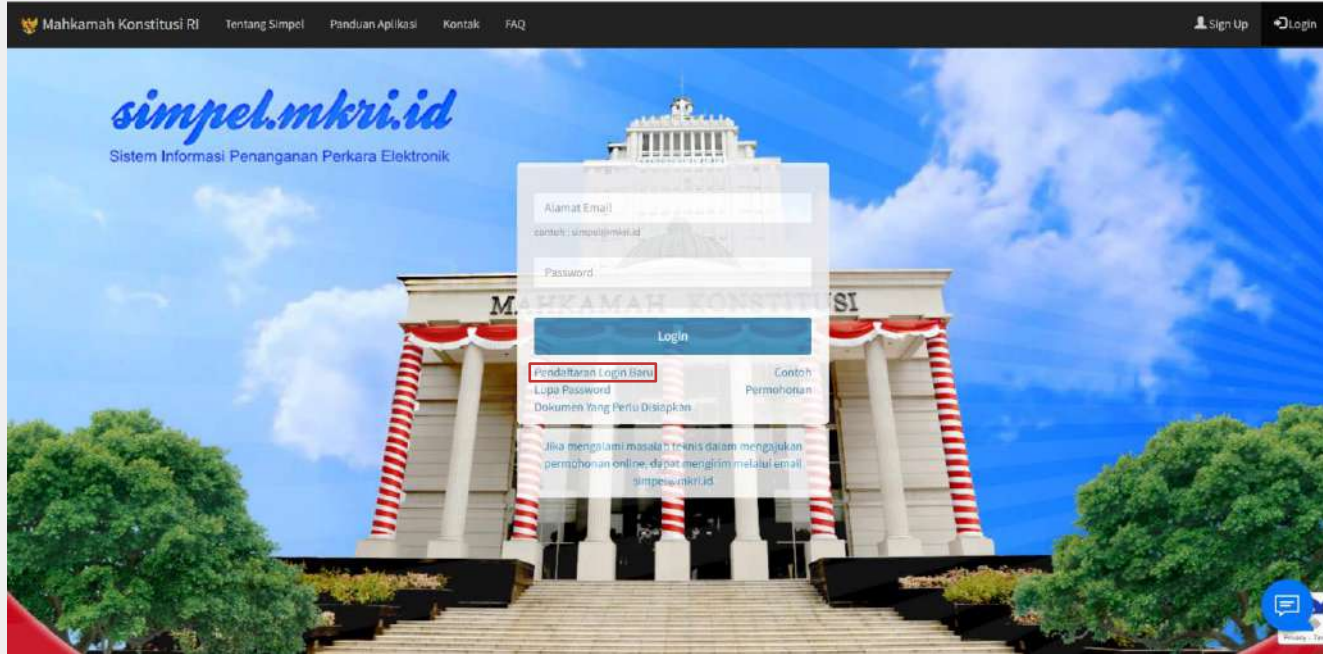
"Sistem Informasi Manajemen Permohonan Elektronik, selanjutnya disebut SIMPEL, adalah sistem informasi manajemen penerimaan permohonan perkara secara elektronik"

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



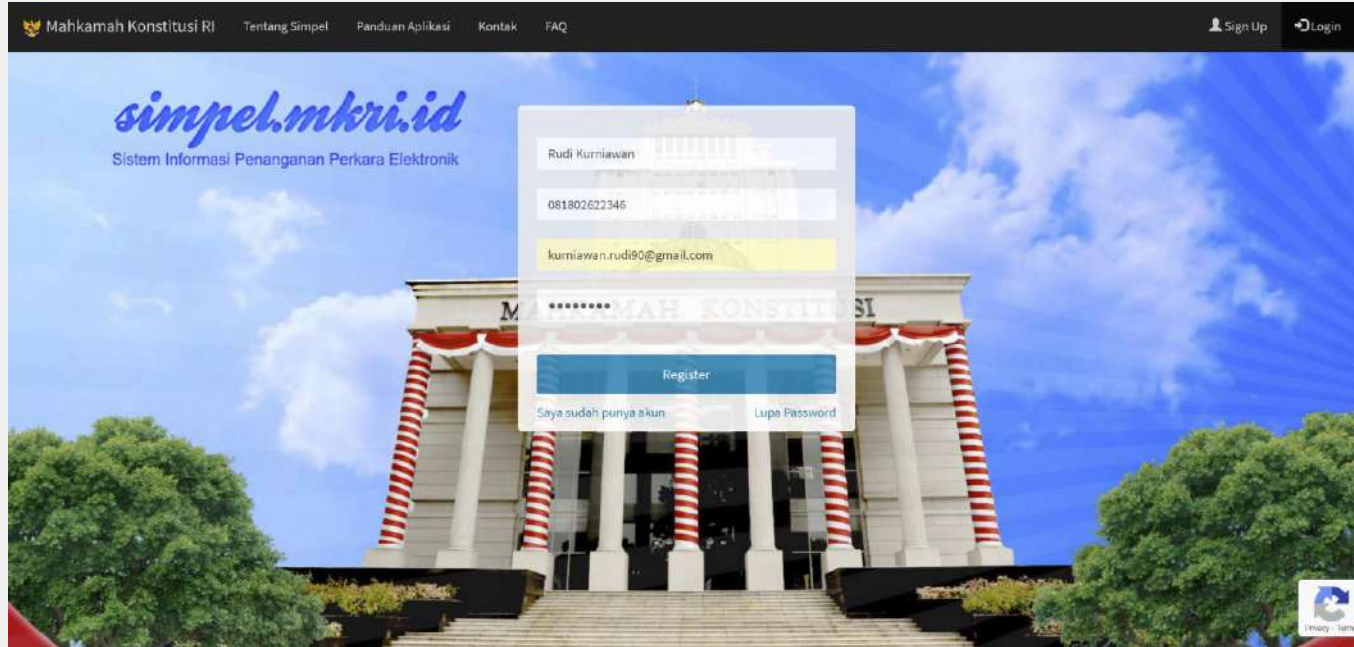
Permohonan Online (simpel.mkri.id) Mahkamah Konstitusi adalah aplikasi berbasis web untuk menerima permohonan elektronik secara online dan real-time (seketika), sehingga saat permohonan elektronik sudah diajukan melalui laman simpel.mkri.id, maka pada saat itu juga permohonan elektronik telah masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



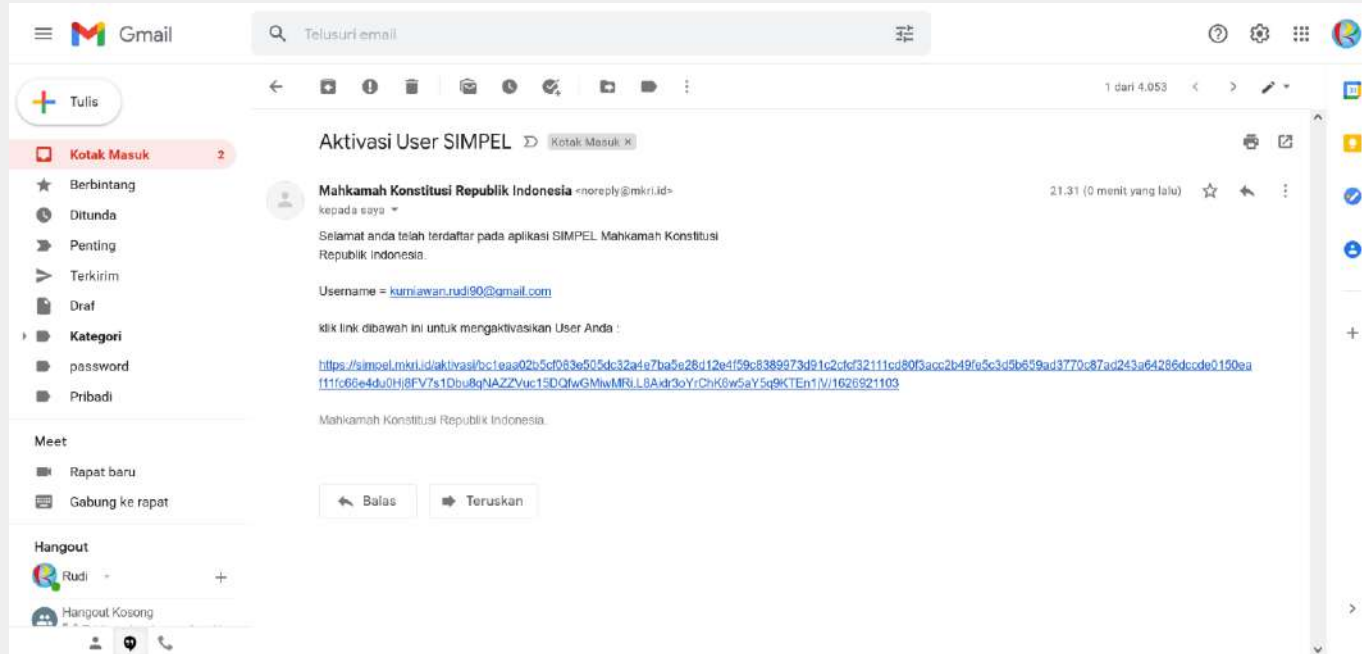
Untuk mengajukan permohonan melalui aplikasi SIMPEL, terlebih dahulu membuat akun dengan meng-klik “Pendaftaran Login Baru”

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Isi data sesuai form pendaftaran akun kemudian klik tombol "Register"
Kemudian cek email untuk mengaktifkan akun yang telah dibuat.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Klik link yang diberikan oleh system untuk aktifasi akun yang telah dibuat.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



The screenshot displays the SIMPEL user profile page. The interface includes a dark sidebar on the left with navigation options like 'Dashboard', 'PUU', 'SKN', 'PHU', 'PHP Kepala Daerah', 'Kartuungin Sibang', 'Bantuan', and 'Kantunaa'. The main content area is titled 'Profile Edit' and 'Profile User'. It features a user profile card for 'Rudi Kumiawan' with a placeholder profile picture. Below the card is a form with the following fields:

- Nama ***: Rudi Kumiawan
- Email**: rudiawan.rudi90@gmail.com
- Nomor Telepon/HP ***: 091902622346
- Nomor KTP ***: 1204507891011121
- File KTP ***: Includes a 'Browse...' button, a file type specification 'File type harus jpg, gif atau png', and a note 'Belum ada file KTP'.
- Alamat**: A text area containing the address 'Depok'.

At the bottom of the form are two buttons: a green 'Simpan' (Save) button and an orange 'Hapus' (Delete) button. The footer of the page contains the text 'Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved.' and 'Version 2.1'.

Setelah login untuk pertama kali user akan diarahkan ke halaman profil untuk melengkapi data akun.

Setelah data akun sudah lengkap maka langkah selanjutnya untuk pengajuan permohonan baru dapat diakses

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



The screenshot displays the SIMPEL MKRI.ID dashboard. The top navigation bar includes the SIMPEL logo, a user profile for 'Rudi Kurniawan', and a 'Dashboard' link. The main content area is titled 'Permohonan' and features four application categories, each with a large number and a 'Selengkapnya' link:

- 1** Pengajuan Undang-Undang (PUU) - Selengkapnya
- 0** Segera Kewarganegaraan Lajangr Negara (SKLN) - Selengkapnya
- 0** Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pradatar/Prasidangan - Selengkapnya
- 0** Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif (DPR/DPRD/DPD) - Selengkapnya

Below this, there is a section for 'Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah' with a sub-item 'PHP Gubernur, Bupati, dan Walikota' and a 'Selengkapnya' link.

At the bottom, a 'Kalender Sidang' (Meeting Calendar) for July 2021 is shown, with a legend for 'Sidang' (Meeting), 'Putusan' (Decision), and 'Kedua' (Second).

Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved. Version 2.1

Setelah data akun atau profil selesai maka akan diarahkan ke halaman dashboard.

Kemudian klik menu PUU atau SKLN atau PHPU atau PHP Kepala Daerah untuk pengajuan permohonan sesuai jenis permohonan yang hendak diajukan.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



The screenshot shows the SIMPEL (Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Elektronik) interface. The user is logged in as Rudi Kurniawan. The main heading is "Permohonan Online" with a sub-heading "PUU(Pengujian Undang-Undang)". The interface is divided into three tabs: "Proses Pengisian Pokok Permohonan" (selected), "Proses Pengisian Data Pemohon dan Kuasa", and "Proses Upload Dokumen".

Under the "Proses Pengisian Pokok Permohonan" tab, there is a section titled "Permohonan" with a text area for the "Urutan Pokok Permohonan". An example text is provided: "Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap UUD 1945".

Below the text area is a list of required documents: "Dokumen yg harus disiapkan:"

- KTP Pemohon (dalam format .jpg)
- Email Pemohon
- KTP Kuasa (dalam format .jpg) **
- Email Kuasa **
- Surat Kuasa (dalam format .pdf) **
- File KTA/BAS (bagi advokat) **
- Permohonan (dalam format .pdf)
- Permohonan (dalam format .doc/.docx)
- Daftar alat bukti (dalam format .doc)
- Alat/dokumen bukti

There is a "Keterangan:" section below the list: "** Jika menggunakan kuasa pemohon". At the bottom of the form, there are two buttons: "Batal" (Cancel) and "Simpan" (Save).

At the bottom of the page, there is a copyright notice: "Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved." and the version number "Version 2.1".

Step 1 : Mengisi Pokok Permohonan

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Permohonan Online PUU(Pengujian Undang-Undang)

Dashboard - Permohonan Online -> Permohonan PUU

SIMPTEL

Rudi Kurniawan
Online

Dashboard

PENGAJUAN PERMOHONAN

- PUU
- Info Permohonan
- Permohonan PUU
- SKLN
- PHPU
- PHP Kepala Daerah

INFORMASI

- Kunjungan Sidang
- Bantuan
- Konsultasi

Kamis, 22 Juli 2021

Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved.

Version 2.1

Proses Pengisian Pokok Permohonan | Proses Pengisian Data Pemohon dan Kuasa | Proses Upload Dokumen

Permohonan PUU(Pengujian Undang-Undang)

Edit Pokok permohonan :
Contoh Pengujian Materil Undang-undang No ... Tentang

Data Pemohon [+ Tambah Pemohon](#)

No	Nama	Alamat	NIK	Email	Nomor Telepon	Nomor HP	#
1	Rudi Kurniawan	Depok	1234567891011121	kurniawan.rudi90@gmail.com		081802622346	

Data Kuasa [+ Tambah Kuasa](#)

No	Nama	Alamat	NIK	Email	Nomor Telepon	Nomor HP	Nama Organisasi	Nomor KTA	#
1	Kuasa Hukum 1	Jakarta	1231231231231231	pengacara@mkr1.id	1	081818181818	-	-	

Batal (Hapus Permohonan) | Simpan Sementara | Lanjutkan Upload Dokumen

Step 2 : Melengkapi identitas Pemohon dan Kuasa Hukum

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



The screenshot shows the SIMPEL (Sistem Informasi Manajemen Permohonan Elektronik) interface. The user is logged in as Rudi Kurniawan. The main section is titled "Permohonan Online" and "PUU(Pengujian Undang-Undang)". Below this, there are three tabs: "Proses Pengisian Pokok Permohonan", "Proses Pengisian Data Permohonan dan Kuasa", and "Proses Upload Dokumen". The "Berkas Permohonan" section contains a table with the following data:

NO	KELENGKAPAN	ADA / TIDAK ADA	AKSI
1	Permohonan (pdf)	File Permohonan (pdf) Belum di Upload	Browse... No file selected.
2	Permohonan (doc/docx)	File Permohonan (doc/docx) Belum di Upload	Browse... No file selected.
3	Surat Kuasa	File Surat Kuasa Belum di Upload	Browse... No file selected.
4	Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx)	File Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx) Belum di Upload	Browse... No file selected.
5	Alat Bukti	File Alat Bukti Belum di Upload	Browse... No file selected.

At the bottom of the table, there is a "Tambah Berkas" button. Below the table, there are four action buttons: "Kembali (Edit Permohonan)", "Batal (Hapus Permohonan)", "Simpan Sementara", and "Kirim Permohonan". The footer of the page includes the copyright notice "Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved." and the version number "Version 2.1".

Step 3 : Melengkapi Dokumen Terkait

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110-Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mkri.id

TANDA TERIMA PENGAJUAN PERMOHONAN *ONLINE*

Nomor Online : /PAN.ONLINE/2020

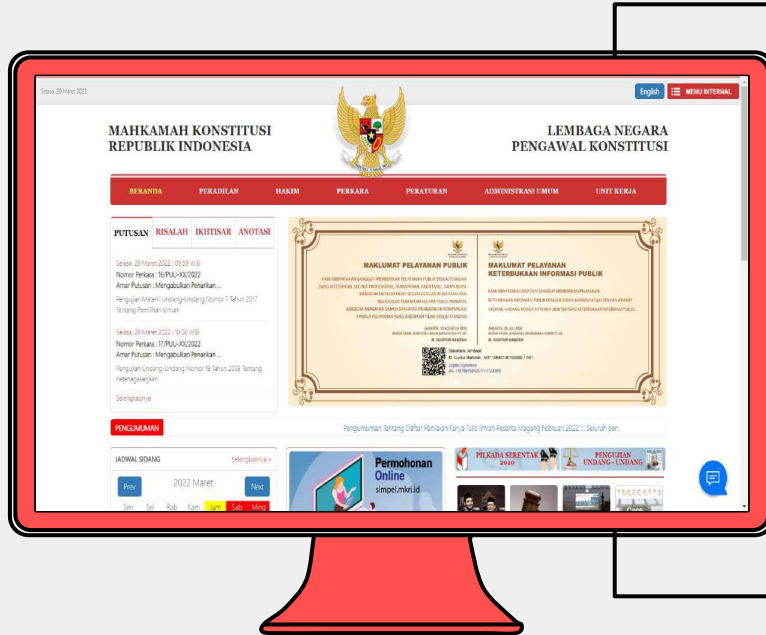
Pokok Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur JAWA BARAT Tahun 2020
Pemohon : H. Mochamad Ridwan Kamil, S.T., M.U.D. dan H. UU Ruzhanul Ulum, S.E.
Kuasa Pemohon : -
Tanggal : 01 Oktober 2020, Pkl 13:54



NO	KELENGKAPAN	ADA / TIDAK ADA
1	Permohonan	ADA
2	Daftar Alat / Dokumen Bukti	ADA
3	Alat Bukti	ADA
4	SK KPU	ADA

TTPO (Tanda Terima Pengajuan Permohonan Online)

WEBSITE MK (MKRI.ID)



MENU WEBSITE

Selasa, 29 Maret 2022

English

MENU INTERNAL

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



LEMBAGA NEGARA PENGAWAL KONSTITUSI

BERANDA

PERADILAN

HAKIM

PERKARA

PERATURAN

ADMINISTRASI UMUM

UNIT KERJA

PUTUSAN RISALAH IKHTISAR ANOTASI

Selasa, 29 Maret 2022 | 09:59 WIB

Nomor Perkara : 16/PUU-XX/2022

Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...

Pengujian Materilil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum

Selasa, 29 Maret 2022 | 10:06 WIB

Nomor Perkara : 17/PUU-XX/2022

Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...

Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan

Selengkapnya

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
KAMI MENYADAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TERBUKA, AMAN, TABEL, TERBUKA, MELAKUKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN NILAI LUKAS PERSAMAAN SAKARA TERUS-MENERUS, BERSEKATA MENEMBAH SAKARA DAN LUKAS PEMBERIBAN KOMPERGASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 13 AGUSTUS 2018
BERKAS DAN BERKAS MAHKAMAH KONSTITUSI
M. GUNTUR HAZZAH



Sekretariat Jenderal
Rd. Guntur Hazzah - NPT 10987108 101002 1 001
Cipta Digital
021-119778878402774703355

**MAKLUMAT PELAYANAN
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

KAMI MENYADAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN SEMUA BAHASA, SESUAI DENGAN ANAMAT UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

JAKARTA, 19 JULI 2008
DEKRETORANG-LEMBAGA MAHKAMAH KONSTITUSI
M. GUNTUR HAZZAH

PENGUMUMAN

Pengumuman Tentang Daftar Penilaian Karya Tulis Ilmiah Peserta Magang Februari 2022 :: Seluruh per:

JADWAL SIDANG

Selengkapnya >

Prev

2022 Maret

Next

Sen Sel Rab Kam Jum Sab Ming

Pemohonan
Online
simpel.mkri.id

PILKADA SERENTAK
2020

PENGUJIAN
UNDANG-UNDANG



PUTUSAN, RISALAH, IKHTSAR, ANOTASI



Selasa, 29 Maret 2022

English

MENU INTERNAL

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA



LEMBAGA NEGARA
PENGAWAL KONSTITUSI

BERANDA

PERADILAN

HAKIM

PERKARA

PERATURAN

ADMINISTRASI UMUM

UNIT KERJA

PUTUSAN RISALAH IKHTISAR ANOTASI

Selasa, 29 Maret 2022 | 09:59 WIB

Nomor Perkara : 16/PUU-XX/2022

Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...

Pengujian Misteril Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum

Selasa, 29 Maret 2022 | 10:06 WIB

Nomor Perkara : 17/PUU-XX/2022

Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...

Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan

Selengkapnya

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

KAMI MENYADAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TERBUKA, AMAN, TERSEDIA, TERKAPAL, MELAKUKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN NILA EKUIVA PERSAMAAN SACARA TERUS-MENERUS, BERSEKATA MENYERIKA SAMPAI DAPATKAH PERSEKUTUKAN KOMPARASAD APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 13 AGUSTUS 2016
BERKES DAN/ATAU JEMBATAN MAHKAMAH KONSTITUSI
M. GUNTUR HANAZAH



Sekretariat Jenderal
Rd. Guntur Hanazah - NPT 10987108 101002 1 001
Ciptaka Digital
021-11071081004021714103355

MAKLUMAT PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

KAMI MENYADAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN SEMUA BAHASA, SESUAI DENGAN ANAMAT UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

JAKARTA, 13 AGUSTUS 2016
BERKES DAN/ATAU JEMBATAN MAHKAMAH KONSTITUSI
M. GUNTUR HANAZAH

PENGUMUMAN

Pengumuman Tentang Daftar Penilaian Karya Tulis Ilmiah Peserta Magang Februari 2022 :: Seluruh per:

JADWAL SIDANG

Selengkapnya >

Prev

2022 Maret

Next

Sen Sel Rab Kam Jum Sab Ming

Pemohonan Online
simpel.mkri.id

PILKADA SERENTAK 2020

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG



JADWAL SIDANG

JADWAL SIDANG [Selengkapnya >](#)

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

■ Sidang ■ Putusan ■ Kedua ■ Tunda 🕒 Libur



Agenda Sidang



Siaran Pers



Berlanggaban



ILM



Konsultasi



Dewan Etik

Permohonan Online
simpler.mkr.id

BERITA

INFO PUBLIK

PUBLIKASI

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas Mikri - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelelhan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:35 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partal Ummat
Jakarta, Humas Mikri Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas Mikri Mahkamah Konstitusi (Mk) Menegaskan Pendiriannya Bahwa Dewan Kehormatan

PILKADA SERENTAK 2020

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG



Hakim Konstitusi



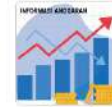
Putusan



Streaming dan Video Conference



Penelusuran Perkara



Informasi Anggaran



AACC



LPSE MKRI



JDIH



Pusdik MKRI



Perpustakaan



Pusat Sigran Konstitusi



Gedung MK



Majalah Konstitusi



Jurnal Konstitusi



Jurnal Consrev



SP4N-LAPOR

Mahkamah Konstitusi

[Selengkapnya >>](#)



BERITA, INFO PUBLIK, PUBLIKASI

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Legend: Sidang (Green), Putusan (Blue), Kedua (Purple), Tunda (Red), Libur (Clock)



simpel.mki.id

BERITA | **INFO PUBLIK** | **PUBLIKASI**

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas Mki - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelelhan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:35 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partal Ummat
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mki) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mki) Menegaskan Pendiriannya Bahwa Dewan Kehormatan



PILKADA SERENTAK 2020 | **PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**



PORTAL PUU DAN PILKADA 2020

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Legend: Sidang (Green), Putusan (Blue), Kedua (Purple), Tunda (Red), Libur (Clock)



Permohonan Online
simpler.mkr.id

BERITA INFO PUBLIK PUBLIKASI

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas Mki - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelelhan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:35 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partal Ummat
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mki) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mki) Menegaskan Pendidianinya Bahwa Dewan Kehormatan



Agenda Sidang



Siaran Pers



Berlangganan



ILM



Konsultasi



Dewan Etik

Mahkamah Konstitusi

Selengkapnya >>

PILKADA SERENTAK 2020

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG



Hakim Konstitusi



Putusan



Streaming dan Video Conference



Case Tracking



Informasi Anggaran



AACC



LPSE MKRI



JDIH



Pusdik MKRI



Perpustakaan



Pusat Sigran Konstitusi



Gedung MK



Majalah Konstitusi



Jurnal Konstitusi



Jurnal Consrev



SP4N-LAPOR



MENU DAN PORTAL PILIHAN

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Legend: Sidang (Green), Putusan (Blue), Kedua (Purple), Tunda (Red), Libur (Clock)

Permohonan Online
simpler.mkr.id

BERITA | **INFO PUBLIK** | **PUBLIKASI**

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas Mki - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelelhan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:35 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partal Ummat
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mki) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mki) Menegaskan Pendiannya Bahwa Dewan Kehormatan

Agenda Sidang | Siaran Pts | Berlangganan

ILM | Konsultasi | Dewan Etik

PILKADA SERENTAK 2020 | **PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**

Hakim Konstitusi | Putusan | Streaming dan Video Conference | Penelusuran Perkara

Informasi Anggaran | AACC | LPSE MKRI | JDIH

Pusdik MKRI | Perpustakaan | Pusat Sjarah Konstitusi | Gedung MK

Mejalah Konstitusi | Jurnal Konstitusi | Jurnal Consrev | SP4N-LAPOR!



LIVE STREAMING PERSIDANGAN



Selasa, 29 Maret 2022 | 19:35 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas Miri Mahkamah Konstitusi (MK) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas Miri Mahkamah Konstitusi (MK) Meneqaskan Pendidirannya Bahwa Dewan Kehormatan



Mahkamah Konstitusi

Selengkapnya >>



Sidang Pengucapan Putusan / Ketetapan. Sela...



Sidang Perkara Nomor 21/PUU-XX/2022. Selasa...



Sidang Perkara Nomor 23/PUU-XX/2022. Senin...



Sidang Perkara Nomor 20/PUU-XX/2022. Senin...



Sidang Perkara Nomor 47/PUU-XX/2021. Senin...



Stadium General Fakultas Syariah IAIN Pekal...

 **2352-9000**

Jl. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat,10110
Fax: 021-3520177. Email: office@mkri.id

KIRIM SURAT



TANYA JAWAB



WHISTLEBLOWING



HUBUNGI MK



MEDIA SOSIAL



PENGUNJUNG



CASE TRACKING



JADWAL SIDANG

Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Legend: Sidang (Green), Putusan (Blue), Kedua (Purple), Tunda (Red), Libur (Clock)

Permohonan Online

simpel.mkri.id

BERITA

Selesa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas Mikri - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelelhan

Selesa, 29 Maret 2022 | 15:35 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partal Ummat
Jakarta, Humas Mikri Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selesa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas Mikri Mahkamah Konstitusi (Mk) Menegaskan Pendidannya Bahwa Dewan Kehormatan

INFO PUBLIK

PUBLIKASI

PILKADA SERENTAK 2020

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Hakim Konstitusi

Putusan

Streaming dan Video Conference

Case Tracking

Informasi Anggaran

AACC

LPSE MKRI

JDIH

Pusdik MKRI

Perpustakaan

Pusat Sigran Konstitusi

Gedung MK

Majalah Konstitusi

Jurnal Konstitusi

Jurnal Consvrev

LAPOR!


SR4N-LAPOR

Mahkamah Konstitusi

Selengkapnya >>

CASE TRACKING



Q Cari**CASE TRACKING**

MKRI PUU SKLN PHPU PHPKADA

Jenis dokumen

- Putusan
- Anotasi
- Ikhtisar Putusan
- Risalah Persidangan

Jenis perkara

- Semua jenis perkara
- PUU
- SKLN
- PHPU
- PHPU.A
- PHPU.C
- PHPU.D
- PHPGUB


Amar putusan

- Semua amar putusan
- Tidak dapat diterima
- Dikabulkan
- Dikabulkan sebagian
- Ditolak
- Ketidaksi...

12/PUU-XX/2022 Putusan

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan


Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.
Tanggal diucapkan: 29 Maret 2022

 Case tracking

11/PUU-XX/2022 Putusan

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.
Tanggal diucapkan: 29 Maret 2022

 Case tracking

10/PUU-XX/2022 Putusan

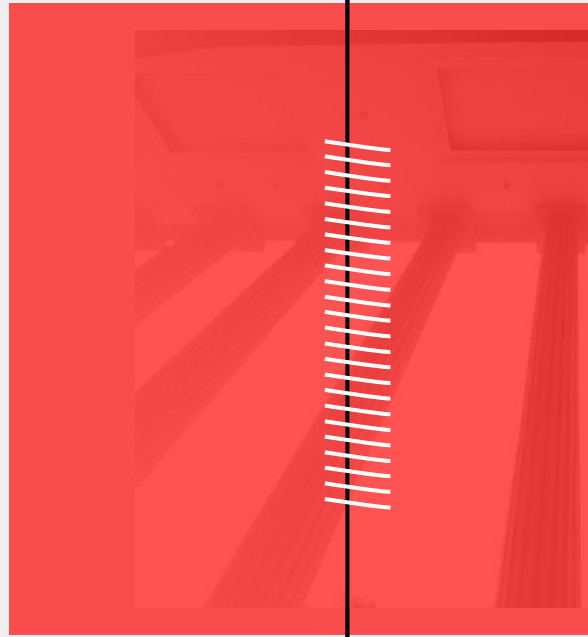
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945

Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PARA PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.
Tanggal diucapkan: 29 Maret 2022

CLICK MK



TERIMA KASIH





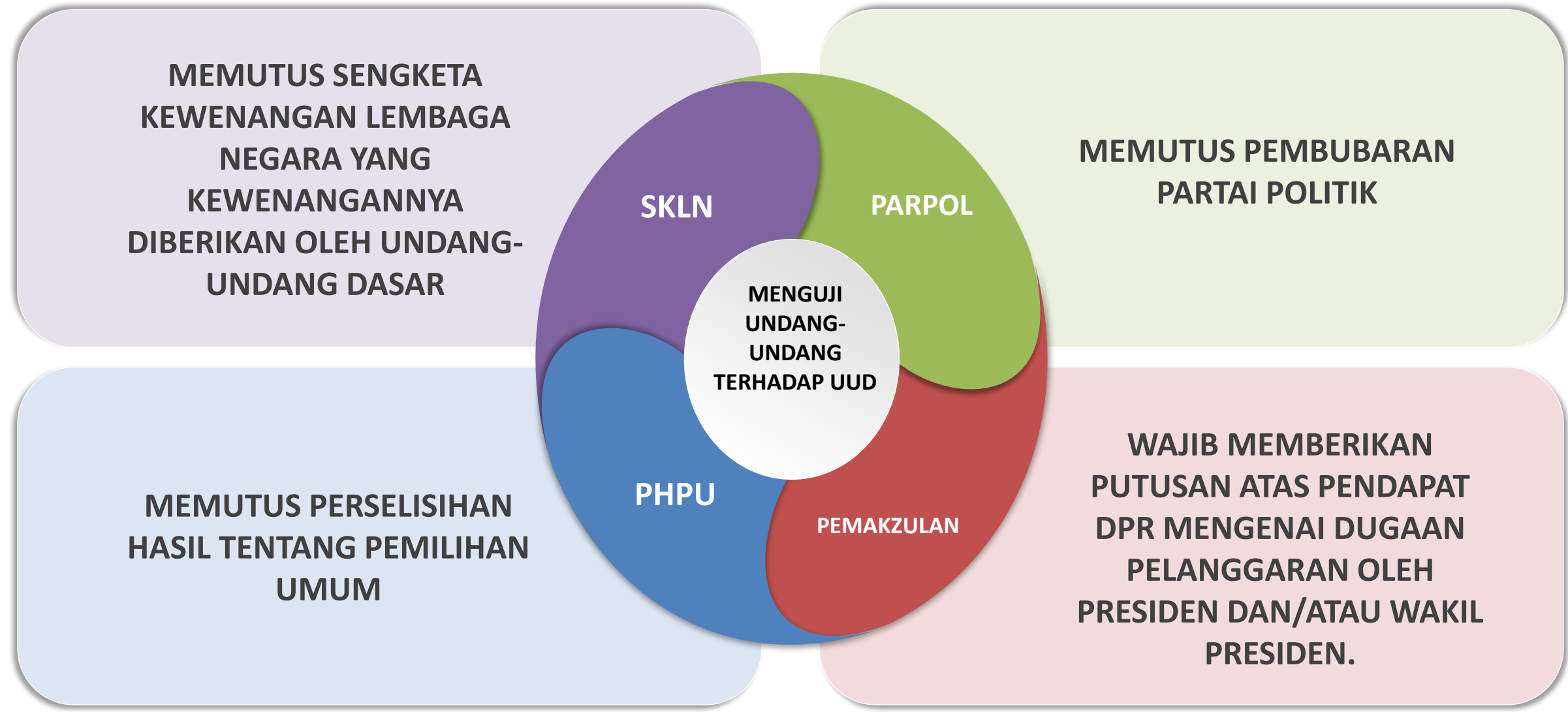
MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

MEKANISME, TAHAPAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA TAHUN 2024

**Oleh:
Muhidin
Panitera Mahkamah Konstitusi**

**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN 2024**

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI



DINAMIKA PENGATURAN DALAM UU PILKADA REZIM PEMILU ATAU PEMDA?

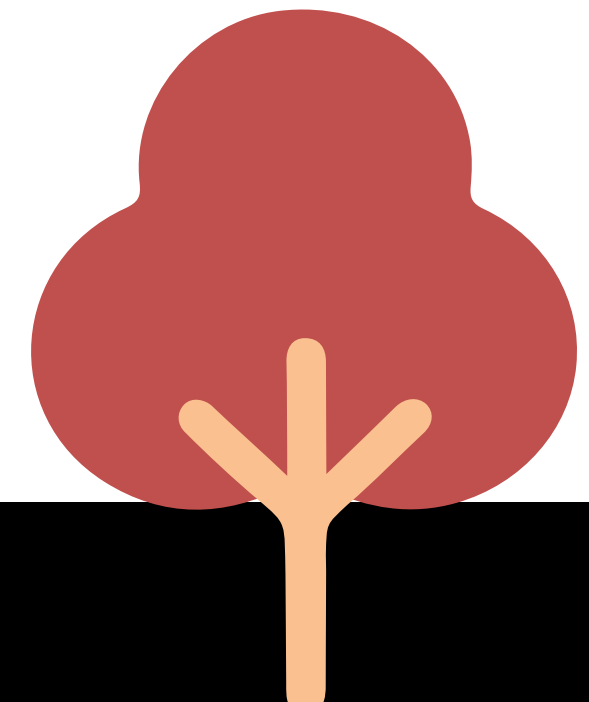
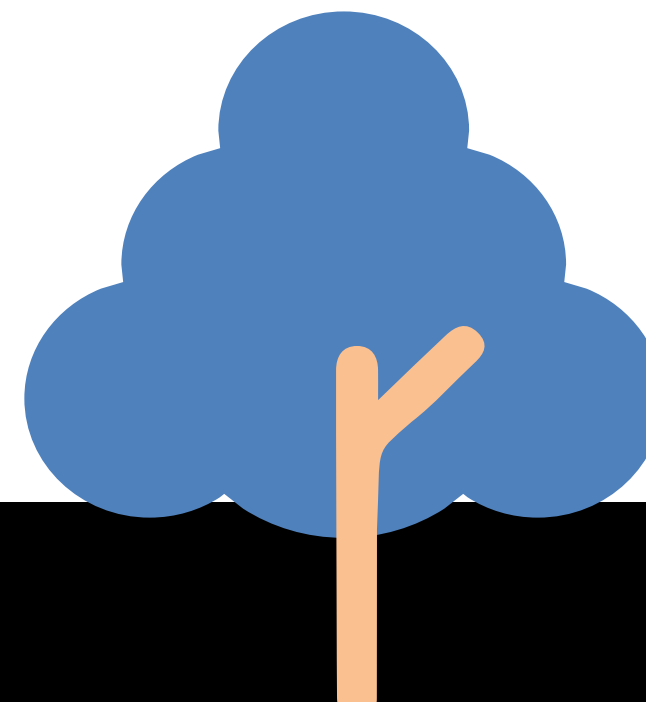
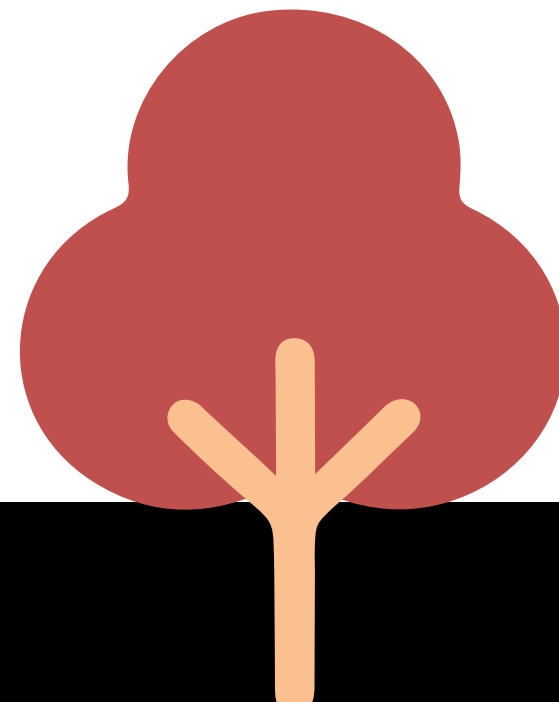
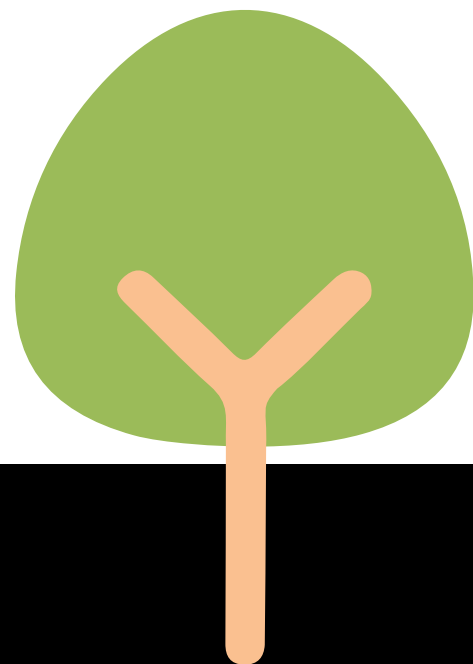
02

UU NOMOR 22 TAHUN 1999
TENTANG PEMERINTAHAN
DAERAH

UU NOMOR 32 TAHUN 2004
TENTANG PEMERINTAHAN
DAERAH

UU NOMOR 22 TAHUN 2014
TENTANG PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN
WALIKOTA

UU NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG PENETAPAN PERPU
NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI,
DAN WALIKOTA MENJADI UU



LANJUTAN...

02

PUTUSAN NOMOR 072-073 /PUU-II/2004
PEMBENTUK UU DAPAT MENENTUKAN PILKADA ITU PEMILU ATAU BUKAN PEMILU



UU NOMOR 22 TAHUN 2007
TENTANG PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM

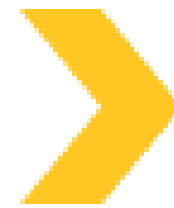


UU NOMOR 12 TAHUN 2008
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.



PUTUSAN MK NOMOR 97/PUU-XI/2013:
SENGKETA PILKADA BUKAN WEWENANG MK

UU NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG PENETAPAN PERPU NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UU



UU NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG PERUBAHAN UU NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERPU NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UU



UU NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NOMOR PENETAPAN PERPU NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UU



PUTUSAN NOMOR 85/PUU-XX/2022
PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, WALI KOTA MERUPAKAN WEWENANG MK UNTUK MEMUTUS

PILKADA = REZIM PEMILU = KEWENANGAN MK

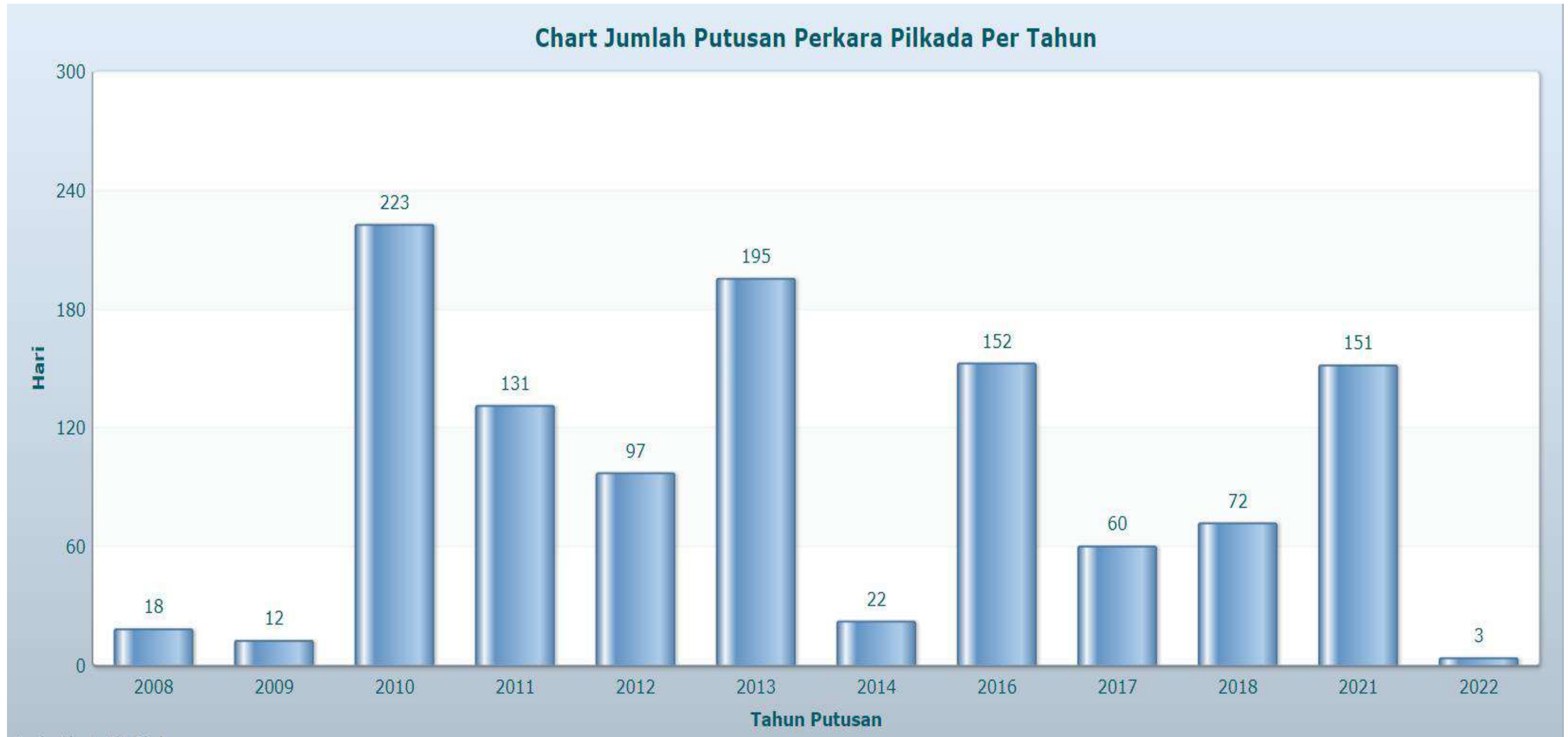
PEMILIHAN UMUM

- PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
- ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
- ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
- ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
- **GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA**

PHPU

MEMUTUS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM

DINAMIKA PUTUSAN TENTANG PENANGANAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA



DALIL YANG SERING MUNCUL DALAM PERMOHONAN



DINAMIKA PASAL 158 UU 10/2016

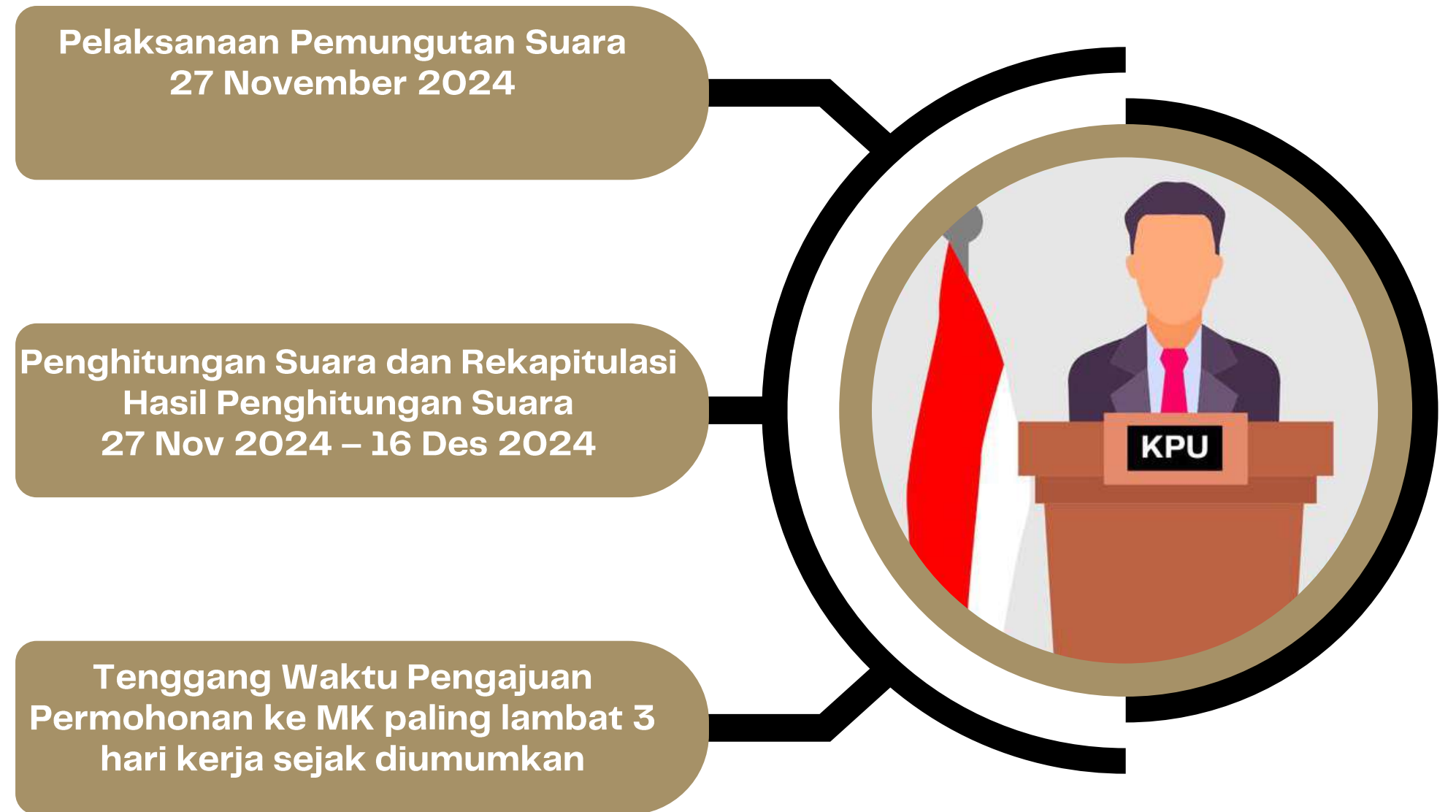
MENUNDA PEMBERLAKUAN KETENTUAN “AMBANG BATAS”

1. PUTUSAN MK NOMOR 2/PHP.KOT-XVI/2018
TANGGAL 9 AGUSTUS 2018 (PARE-PARE)
2. PUTUSAN MK NOMOR 84/PHP.BUP-XIX/2021
TANGGAL 19 MARET 2021 (NABIRE)
3. PUTUSAN MK NOMOR 101/PHP.BUP-XIX/2021
TANGGAL 19 MARET 2021 (TELUK BINTUNI)
4. PUTUSAN MK NOMOR 132/PHP.BUP-XIX/2021
TANGGAL 22 MARET 2021 (BOVEN DIGOEL)
5. PUTUSAN MK NOMOR 135/PHP.BUP-XIX/2021
TANGGAL 15 APRIL 2021 (SABU RAI JUA), DAN
6. PUTUSAN MK NOMOR 145/PHP.BUP-XIX/2021
TANGGAL 15 APRIL 2021 (YALIMO)

DIPERTIMBANGKAN BERSAMA-SAMA DENGAN POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. PUTUSAN MK NOMOR 39/PHP.BUP-XIX/2021 TANGGAL 18 MARET 2021
(PESISIR BARAT)
2. PUTUSAN MK NOMOR 46/PHP.BUP-XIX/2021 TANGGAL 18 MARET 2021
(KAB. BANDUNG)
3. PUTUSAN MK NOMOR 59/PHP.BUP-XIX/2021 TANGGAL 18 MARET 2021
(NIAS SELATAN)
4. PUTUSAN MK NOMOR 100/PHP.BUP/XIX/2021 TANGGAL 18 MARET
2021 (KAB. SAMOSIR)
5. PUTUSAN MK NOMOR 97/PHP.BUP-XIX/2021 TANGGAL 19 MARET 2021
(YALIMO)
6. PUTUSAN MK NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021 TANGGAL 19 MARET 2021
(KAB. TASIKMALAYA)
7. PUTUSAN MK NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021 TANGGAL 22 MARET 2021
(KOTA BANJARMASIN)

PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA TAHUN 2024



Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Tahun 2024 dilaksanakan secara serentak (37 provinsi) di Indonesia, hanya DIY yang tidak ikut dalam gelaran pemilihan kepala daerah, serta 508 kabupaten/kota.

DASAR HUKUM

**PERATURAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 3
TAHUN 2024**

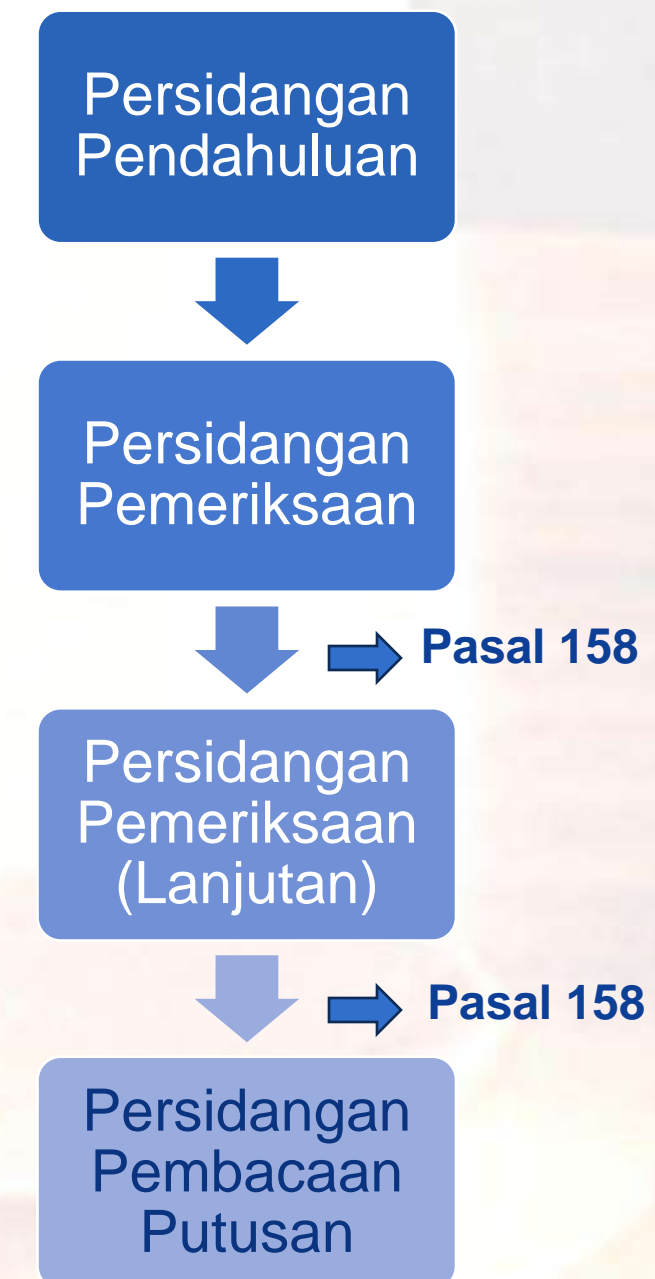
**tentang
TATA BERACARA DALAM
PERKARA PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN GUBERNUR,
BUPATI, DAN WALIKOTA**

**PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 4 TAHUN 2024**

**tentang
TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL
PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI,
DAN WALIKOTA**

PERSYARATAN FORMIL “AMBANG BATAS” PENGAJUAN PERMOHONAN (PASAL 158)

PROVINSI	AMBANG BATAS	KABUPATEN/KOTA
$P \leq 2.000.000$	2%	$P \leq 250.000$
$2.000.000 < P \leq 6.000.000$	1,5%	$250.000 < P \leq 500.000$
$6.000.000 < P \leq 12.000.000$	1%	$500.000 < P \leq 1.000.000$
$P > 12.000.000$	0,5%	$P > 1.000.000$



- **Pasal 158** akan diberlakukan setelah persidangan pemeriksaan atau dipertimbangkan setelah persidangan pemeriksaan lanjutan bersama-sama dengan pokok permohonan.
- Permohonan **tetap menguraikan** Pasal 158 UU 10/2016 dengan menghubungkannya pada pokok-pokok permohonan untuk menjelaskan kepada Mahkamah bahwa penerapan Pasal 158 dapat ditunda keberlakuannya sehingga harus dibuktikan dalam persidangan pemeriksaan (lanjutan).

BATAS WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- Permohonan diajukan paling lambat **3 (tiga) hari kerja** terhitung sejak **diumumkan penetapan** perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon.
- **Kapan** waktu pengumuman penetapannya? Sebab, pada PHP Kepala Daerah Tahun 2020/2021 banyak terjadi perbedaan waktu antara Penetapan dan Pengumuman oleh Termohon.

Penjelasan:

- Dalam PHP Kepala Daerah 2024/2025, penetapan perolehan suara hasil pemilihan terhitung sejak **ditetapkan** oleh Termohon. Mahkamah memaknai penetapan dimaksud sekaligus adalah **pengumuman** Termohon.
- Sementara itu, **hari kerja** dalam pengajuan permohonan diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.

Objek Permohonan dan Para Pihak



Objek permohonan adalah keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih. Jadi, bukan mengenai berita acara rapat pleno penetapan hasil rekapitulasi.



Para pihak dapat diwakili oleh kuasa hukum atau didampingi oleh pendamping.



Dalam hal pemilihan diikuti satu pasangan calon, masing-masing Pemantau Pemilihan dapat mengajukan permohonan sebagai Pemohon, seperti halnya pasangan calon yang masing-masing juga dapat menjadi Pemohon.



Pendaftaran dan sertifikat akreditasi Pemantau Pemilihan disesuaikan dengan daerah pemilihannya. Pemilihan Gubernur dari KPU Provinsi, sedangkan Pemilihan Bupati/Walikota dari KPU Kab/Kota.

Termohon dan Bawaslu

KPU Provinsi atau KPU Kab/Kota, jadi bukan KPU karena keputusan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur ditetapkan oleh KPU Provinsi, sedangkan penetapan hasil Pemilihan Bupati/Walikota ditetapkan oleh KPU Kab/Kota.

Termohon

Bawaslu

Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kab/Kota. Namun demikian dalam beracara maupun penyampaian Jawaban KPU Provinsi/KPU Kab/Kota atau Keterangan Bawaslu Provinsi/ KPU Kab/Kota harus dengan supervisi dan koordinasi KPU dan Bawaslu. Untuk itu, penyampaian salinan permohonan dan pemberitahuan hari sidang juga ditembuskan kepada KPU dan Bawaslu.

Dokumen Tertulis Para Pihak

1

Permohonan dan perbaikan permohonan hanya dapat diajukan 1 (satu) kali selama tenggang waktu pengajuan permohonan/perbaikan permohonan. Dokumen perbaikan permohonan tidak dapat diserahkan secara parsial.

2

Jawaban Termohon hanya dapat diajukan 1 (satu) kali.

3

Surat Permohonan menjadi Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait masing-masing juga hanya dapat diajukan 1 (satu) kali. Keterangan Pihak Terkait yang diajukan bersama-sama dengan surat permohonan menjadi Pihak Terkait tidak dianggap sebagai Keterangan Pihak Terkait.

4

Keterangan Bawaslu juga hanya dapat diajukan 1 (satu) kali.

5

Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu disampaikan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum persidangan pemeriksaan dan diserahkan pada jam kerja (08.00 – 16.00 WIB). Apabila melewati batas waktu maka penilaiannya diserahkan kepada Mahkamah.

Lanjutan

6

Nomor antrian pengajuan permohonan hanya berlaku untuk satu permohonan. Dalam hal telah mendapatkan nomor antrian, akan diproses sampai dengan diterbitkannya e-AP3.

7

Bea meterei dibubuhkan untuk setiap nomor alat bukti yang diajukan.

8

Hardcopy permohonan online tidak harus diserahkan, namun untuk alat bukti harus diserahkan secara langsung, dengan ketentuan untuk alat bukti berupa surat/tulisan yakni 1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar lainnya adalah penggandaannya. Sedangkan alat bukti selain surat/tulisan disimpan dalam USB yang dibubuhi meterai.

9

Ketentuan di atas juga berlaku untuk Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait/Bawaslu yang diajukan secara online.

10

Jika terdapat perbedaan permohonan/jawaban/keterangan dalam bentuk cetak dan digital maka yang digunakan dokumen cetak.

Lanjutan

11

Tenggang waktu perbaikan permohonan 3 hari kerja dimulai sejak **diterimanya** e-AP3 untuk permohonan yang diajukan secara offline atau sejak **dikirimkannya** e-AP3 untuk permohonan yang diajukan secara online.

12

Jika hardcopy permohonan online tidak diserahkan, termasuk tidak mengajukan perbaikannya, maka permohonan yang akan dicatat dalam BRPK adalah permohonan awal yang diajukan secara online.

13

Demikian juga apabila terdapat perbedaan antara permohonan online dengan permohonan hardcopy yang diserahkan tanpa ada perbaikan permohonan maka yang dicatat dalam BRPK adalah permohonan online.

14

Jika perbaikan permohonan melewati tenggang waktu, permohonan yang digunakan adalah permohonan awal.

15

Salinan permohonan disampaikan kepada Termohon dan Bawaslu Prov. atau Bawaslu Kab/Kota dan kepada KPU dan Bawaslu sebagai tembusan paling lama 2 hari kerja sejak e-BRPK.

Lanjutan

16

Penarikan permohonan yang dilakukan, baik sebelum maupun sesudah registrasi, akan dikonfirmasi dalam persidangan.

17

Karena sebagai pedoman, penyusunan permohonan, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu dapat mengacu pada lampiran PMK.

18

Permohonan persidangan jarak jauh diajukan paling lambat 2 hari kerja sebelum pelaksanaan sidang.

Pemberitahuan Sidang & Permohonan Pihak Terkait, dan Inzage

Pemberitahuan sidang pertama kepada Termohon dan Pemberi Keterangan paling lama 2 hari kerja sejak permohonan diregistrasi, sedangkan kepada Pihak Terkait paling lama 2 hari kerja sebelum pemeriksaan pendahuluan.

Para pihak dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk mempelajari alat bukti (inzage) dengan menyebutkan alat bukti yang hendak dipelajari. Sehingga, inzage dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan ketua panel dan dilakukan pada jam layanan.

Permohonan sebagai Pihak Terkait paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diregistrasi.

Alat Bukti & Jam Layanan

Jam layanan pengajuan permohonan dan perbaikan permohonan mulai pukul 08.00 s.d. 24.00 WIB pada hari kerja, sedangkan untuk layanan selainnya mulai pukul 08.00 s.d 16.00 WIB pada hari kerja.

Pengajuan daftar saksi dan/atau ahli beserta keterangannya disampaikan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum persidangan pemeriksaan (lanjutan) dengan agenda pembuktian. Demikian juga dengan penyampaian bukti tambahan para pihak paling lama 1 (satu) hari sebelum hari sidang untuk pengesahan alat bukti.

KEGIATAN DAN TAHAPAN PENANGANAN PERKARA

Kegiatan dan tahapan penanganan perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan Permohonan Pemohon;
2. Pemenuhan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon;
3. Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon;
4. Penerbitan e-HPKP3;
5. Pencatatan Permohonan Pemohon dalam e-BRPK;
6. Penyampaian Salinan Permohonan kepada Termohon dan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
7. Pengajuan Permohonan sebagai Pihak Terkait;
8. Penetapan dan Penyampaian Ketetapan Sebagai Pihak Terkait;
9. Pemberitahuan Hari Sidang Pertama kepada para pihak dan pemberi keterangan;
10. Pemeriksaan Pendahuluan;
11. Penyerahan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
12. Pemeriksaan Persidangan;
13. Pelaksanaan Rapat Permusyawaratan Hakim (tahap/fase I);
14. Pengucapan Putusan/Ketetapan (tahap/fase I);
15. Penyampaian Salinan Putusan/Ketetapan (tahap/fase I);
16. Pemeriksaan Persidangan (pembuktian);
17. Pelaksanaan Rapat Permusyawaratan Hakim (tahap/fase II);
18. Pengucapan Putusan/Ketetapan (tahap/fase II); dan
19. Penyerahan atau Penyampaian Salinan Putusan/Ketetapan (tahap/fase II).`

KALENDER PENANGANAN PERKARA PHPU KADA

Desember 2024

MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMI	JUMAT	SABTU
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Januari 2025

MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMI	JUMAT	SAB31TU
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1

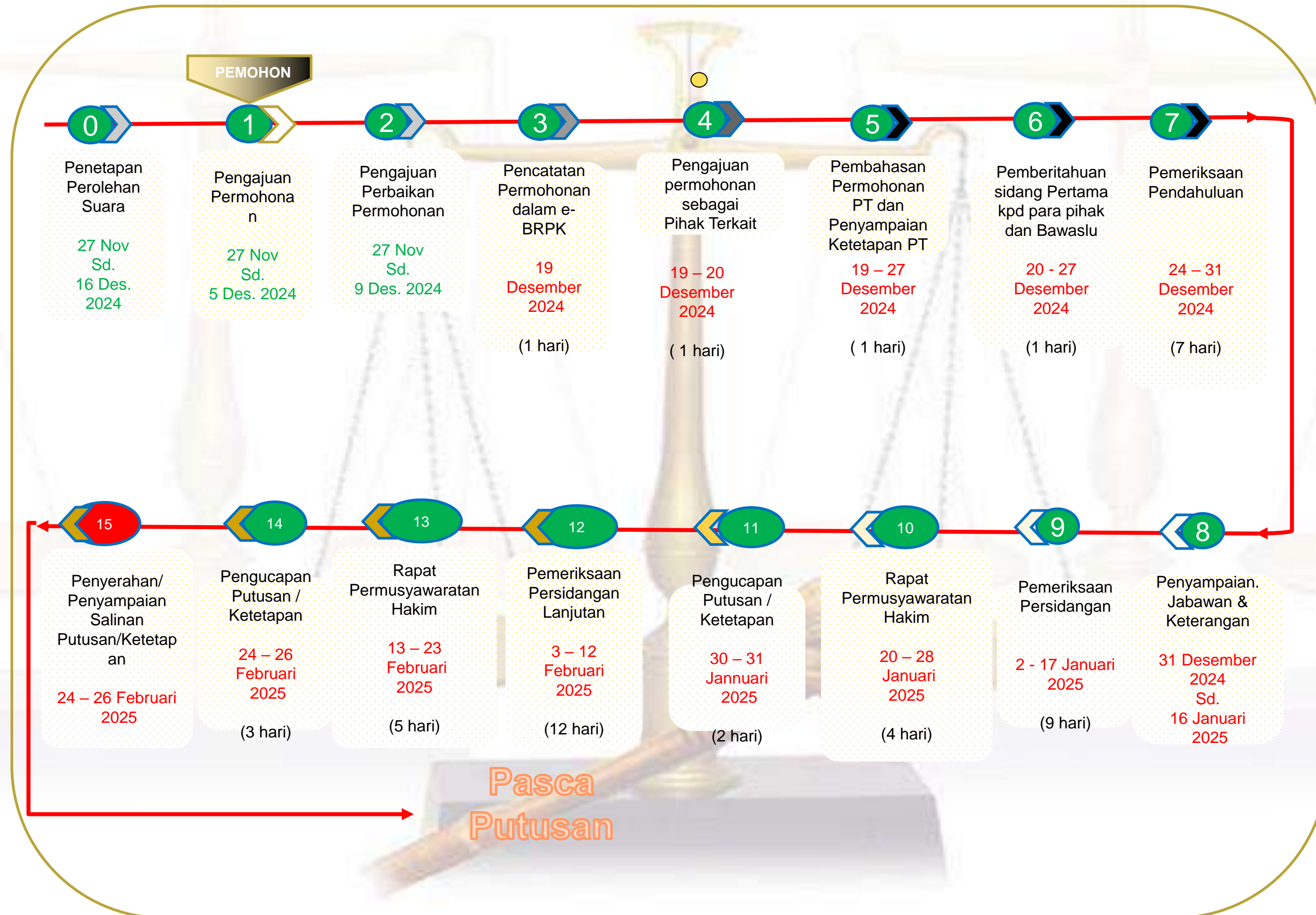
Februari 2025

MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMI	JUMAT	SABTU
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	1

Maret 2025

MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMI	JUMAT	SABTU
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

PROSES PENYELESAIAN PERKARA PHPU PILKADA 2024 (PASE I)



KALENDER PENANGANAN PERKARA PHPU KADA

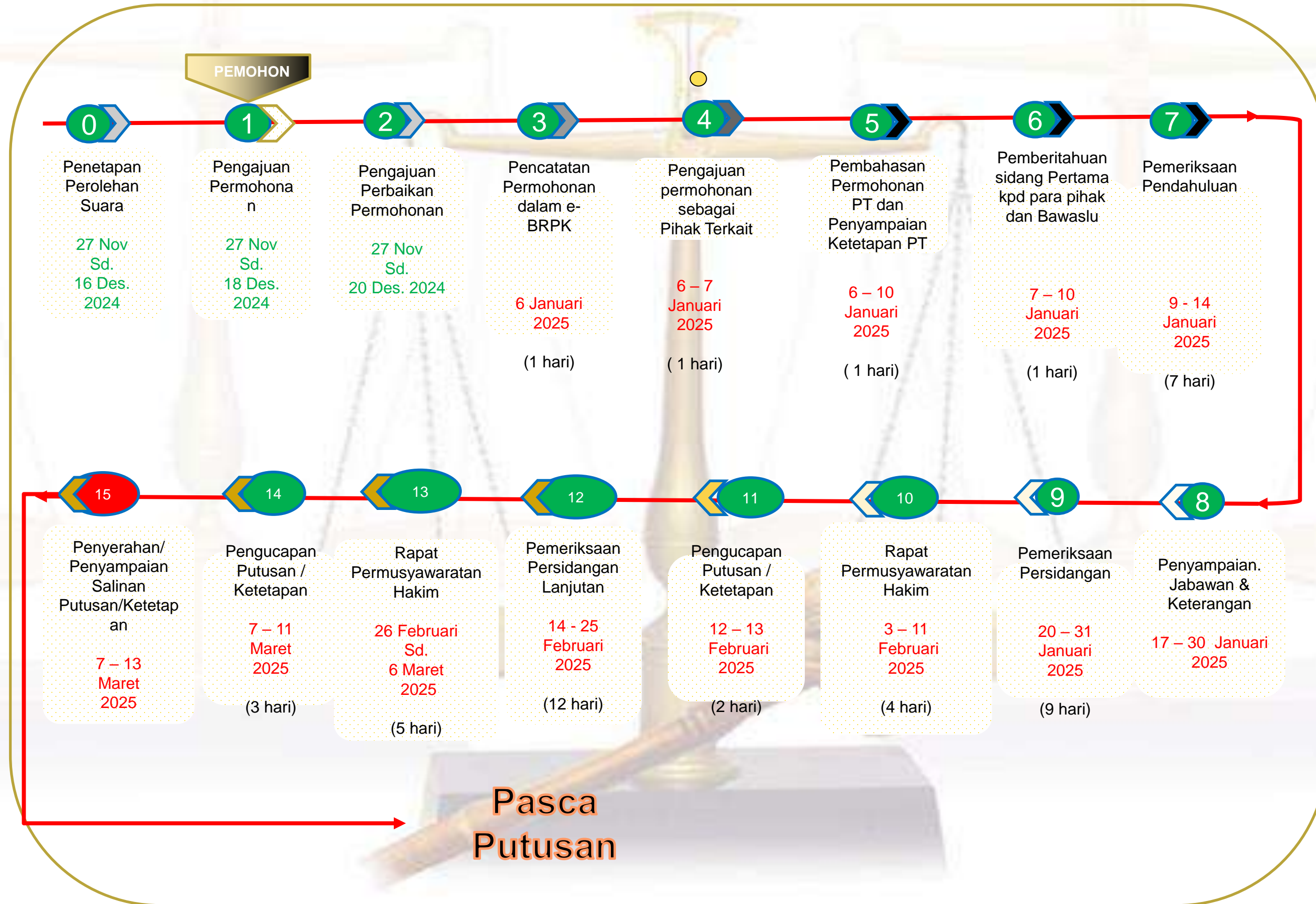
	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMI	JUMAT	SABTU
Desember 2024	1	2	3	4	5	6	7
	8	9	10	11	12	13	14
	15	16	17	18	19	20	21
	22	23	24	25	26	27	28
	29	30	31				

	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMI	JUMAT	SAB31TU
Januari 2025				1	2	3	4
	5	6	7	8	9	10	11
	12	13	14	15	16	17	18
	19	20	21	22	23	24	25
	26	27	28	29	30	31	1

	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMI	JUMAT	SABTU
Februari 2025	2	3	4	5	6	7	8
	9	10	11	12	13	14	15
	16	17	18	19	20	21	22
	23	24	25	26	27	28	1

	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMI	JUMAT	SABTU
Maret 2025	2	3	4	5	6	7	8
	9	10	11	12	13	14	15
	16	17	18	19	20	21	22
	23	24	25	26	27	28	29
	30	31					

PROSES PENYELESAIAN PERKARA PPHU PILKADA 2024 (PASE II)

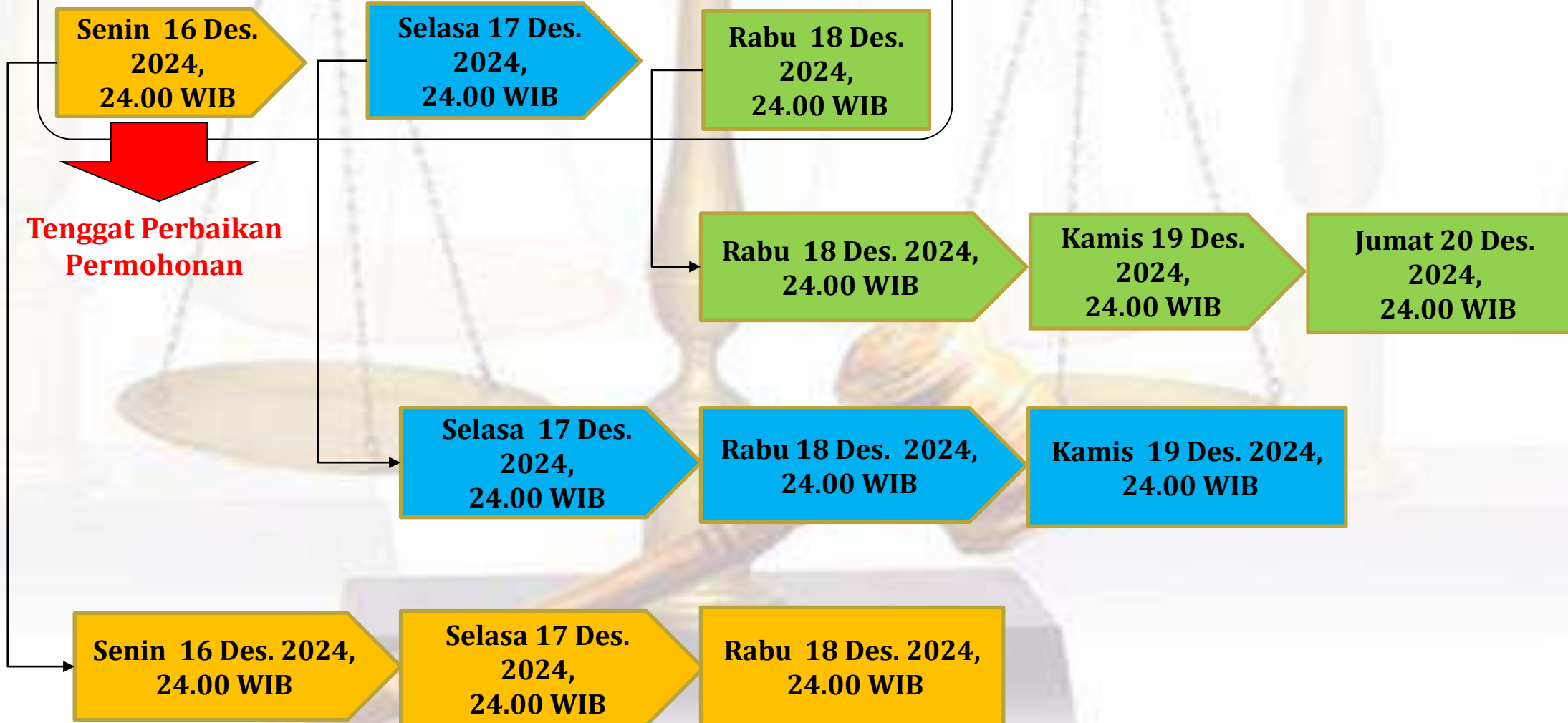


TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PERBAIKAN

Tenggang waktu pengajuan permohonan ke MK paling lama **3 hari kerja** sejak pengumuman KPU Provinsi/KPU Kab./Kota

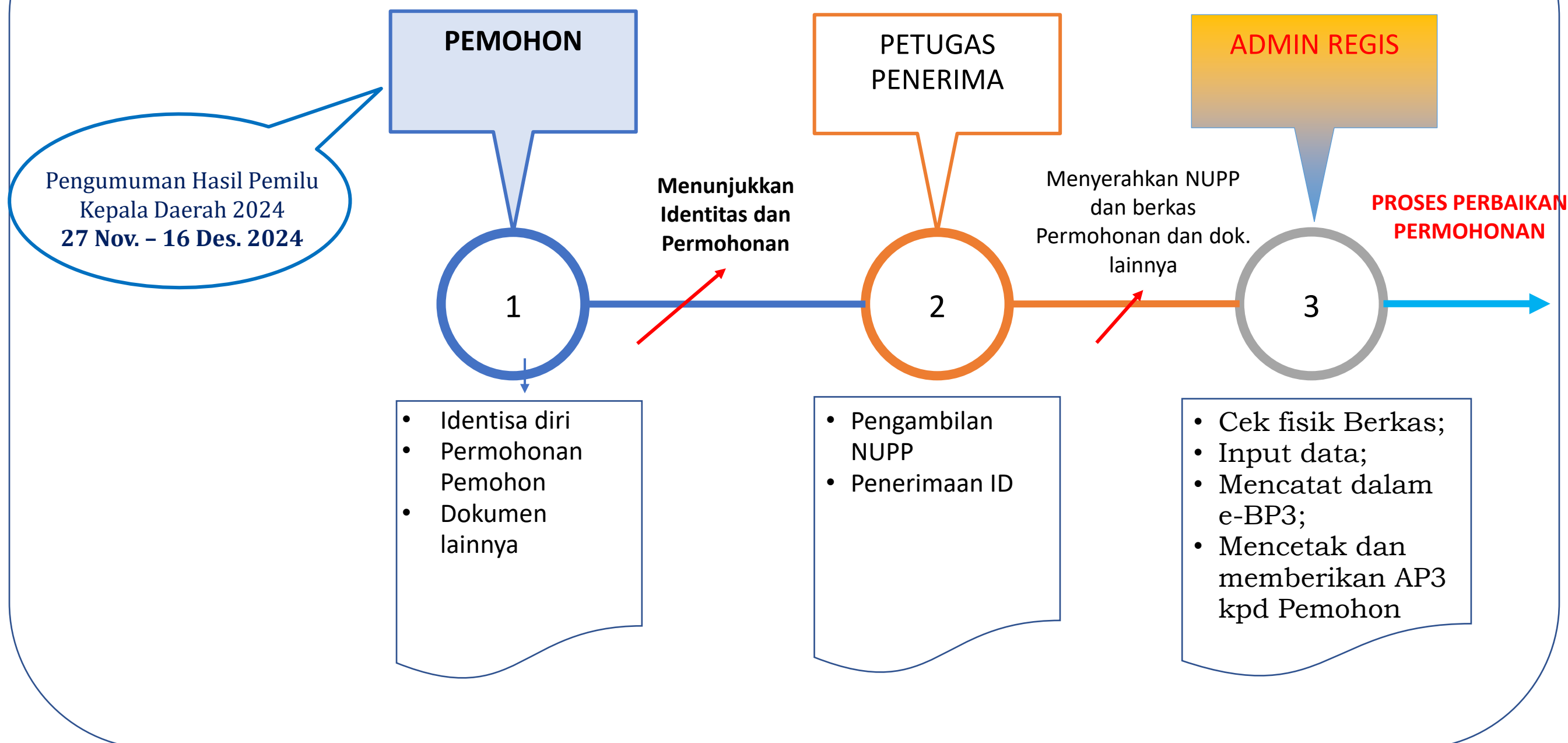
KPU
Pengumuman Hasil
PHPU Pilkada Tahun
2024
**27 Nov. - 16 Des.
2024**

Waktu Pengajuan Permohonan



PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON

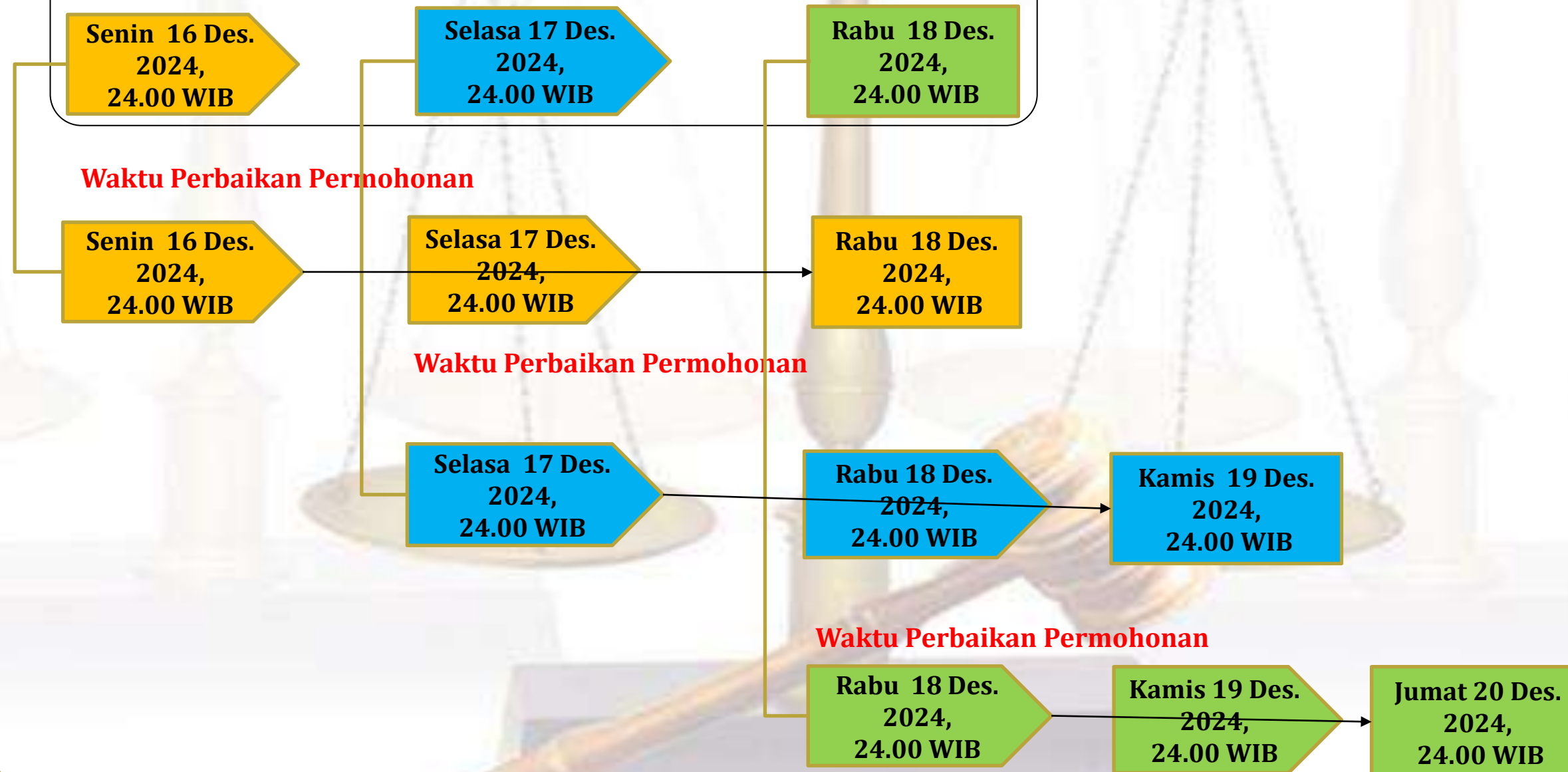
(TENGANG WAKTU 3 HARI KERJA SEJAK PENGUMUMAN OLEH KPU) PROV./KAB/KOTA



TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERBAIKAN PERMOHONAN

Tenggang waktu pengajuan Perbaikan permohonan paling lama 3 hari kerja sejak dikirimkannya e-AP3 kepada Pemohon/Kuasa Hukum

Waktu Pengajuan Permohonan



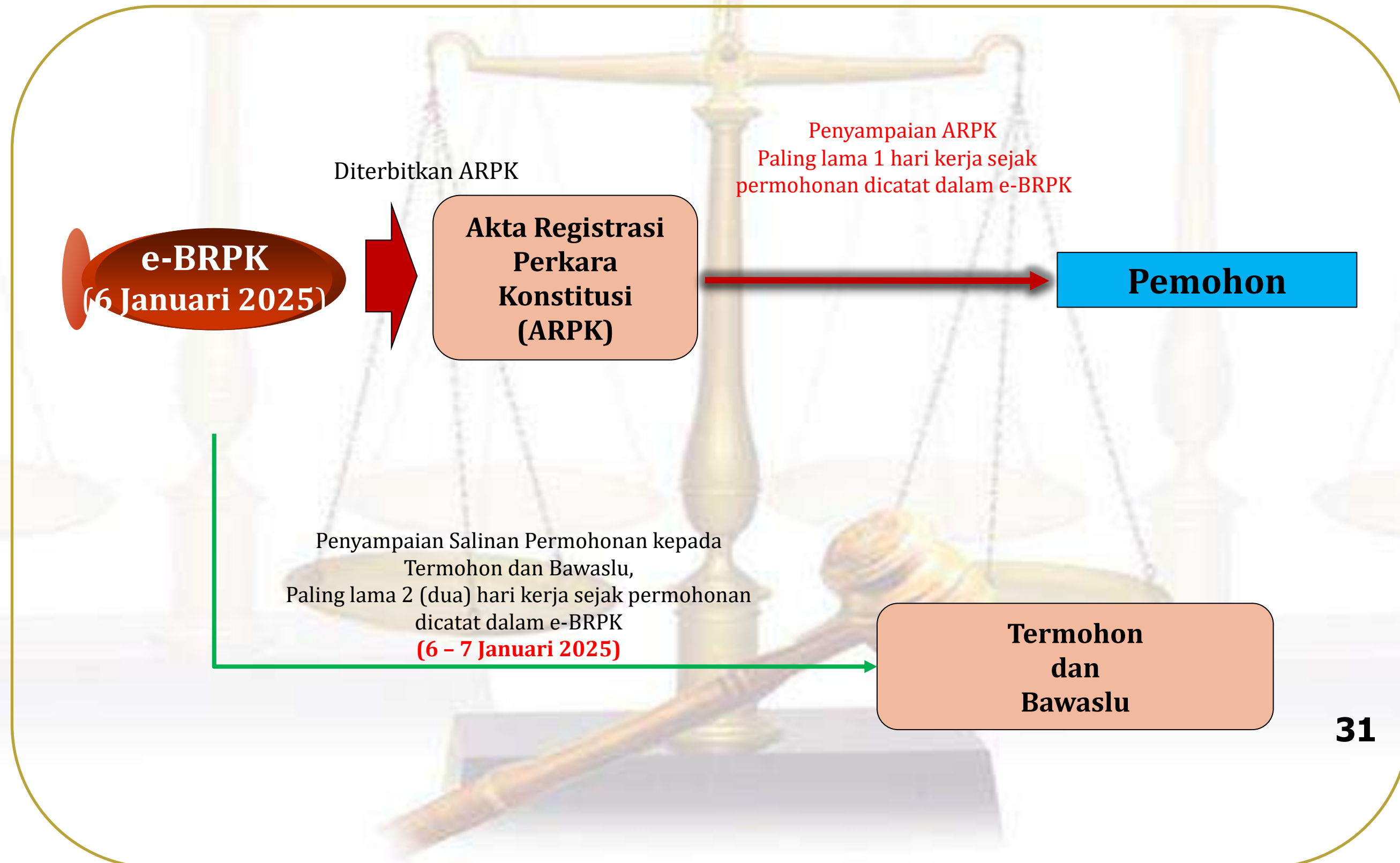
PENGAJUAN PERBAIKAN PERMOHONAN PEMOHON
(TENGGANG WAKTU 3 HARI KERJA SEJAK AP3 dikirimkan/diterima)



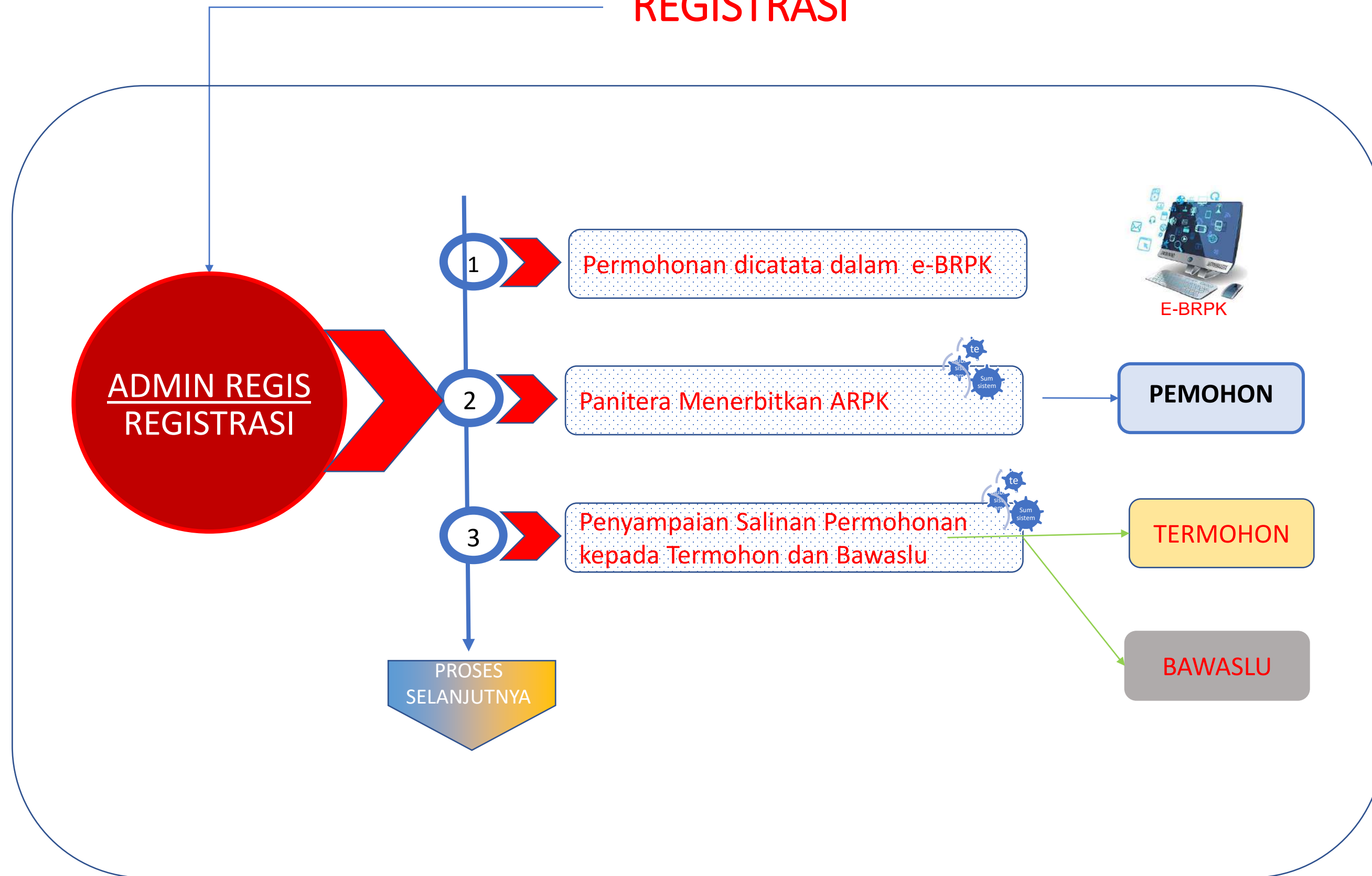
TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERBAIKAN PERMOHONAN



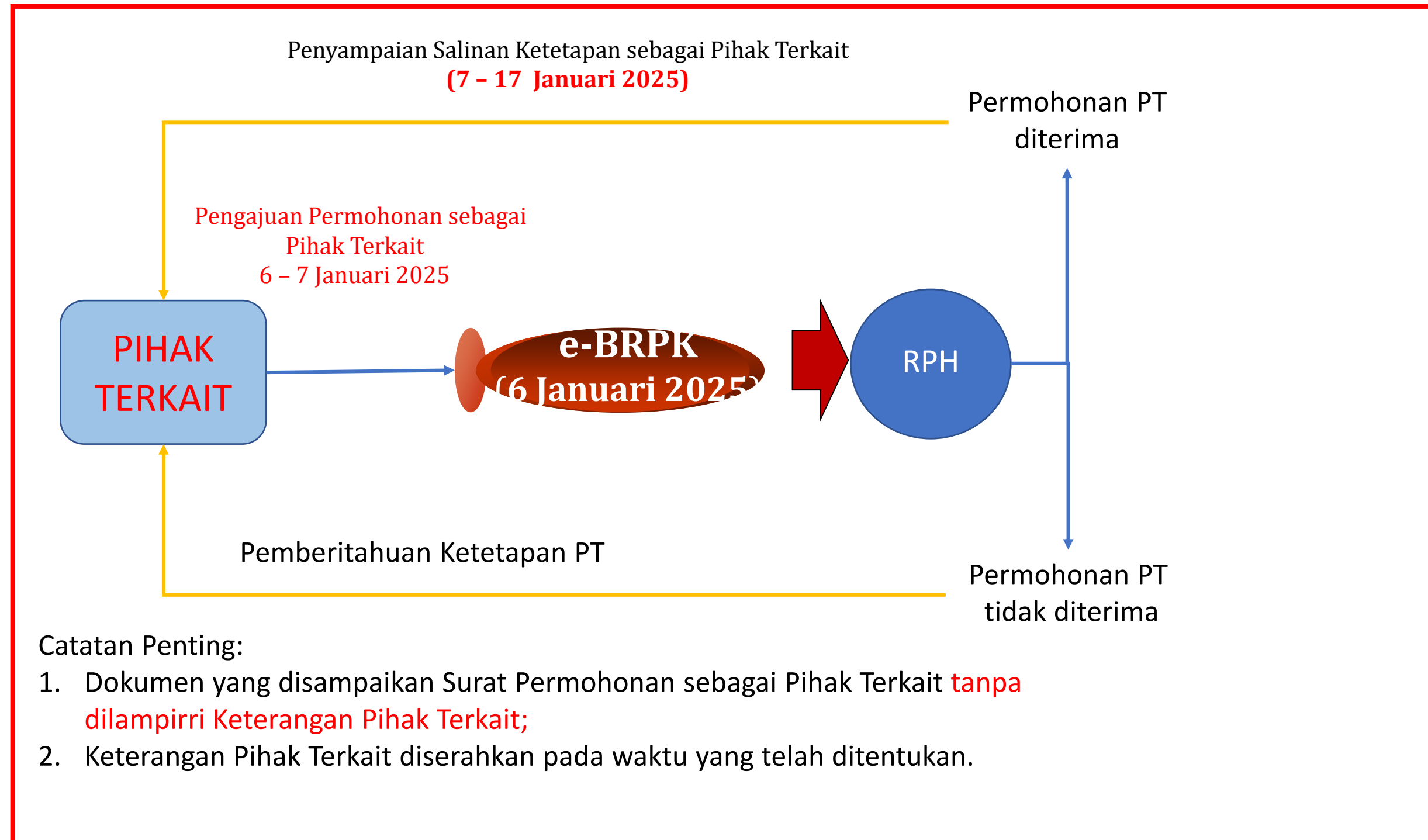
**PENCATATAN PERMOHONAN DALAM e-BRPK (REGISTRASI PERKARA)
dan
PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN**



REGISTRASI



PERMOHONAN SEBAGAI PIHAK TERKAIT, PEMBAHASAN PERMOHONAN PT (RPH)
DAN PENYAMPAIAN KETETAPAN PT



MEKANISME PEMBERITAHUAN HARI SIDANG PERTAMA KEPADA PARA PIHAK DAN BAWASLU

Pemberitahuan Hari Sidang Pertama kepada Para Pihak dan Bawaslu, Paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK
(6 – 7 Januari 2025)

e-BRPK
(6 Januari 2025)

Jurupanggil

Pemohon

Termohon

Pihak Terkait

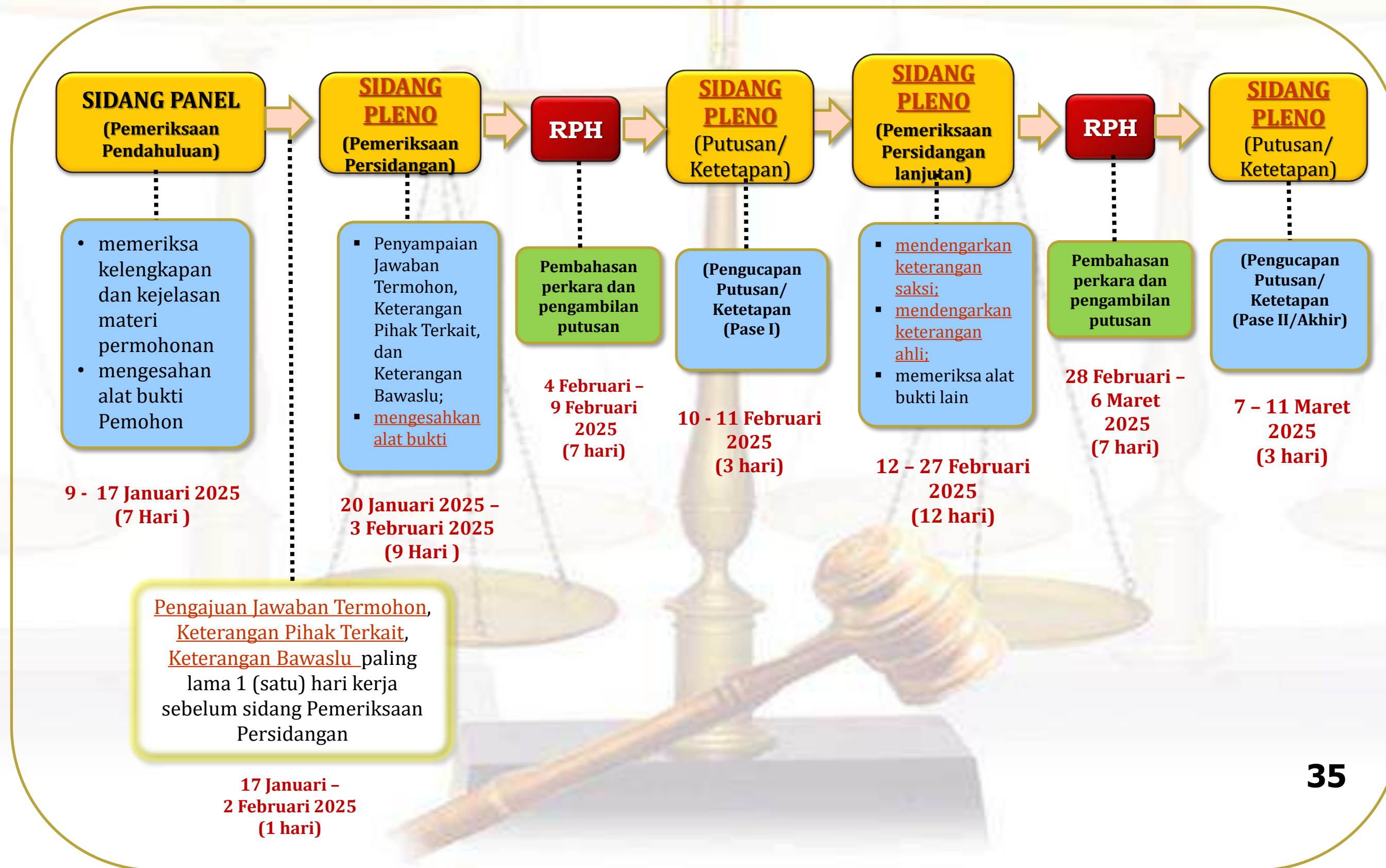
Bawaslu

**SIDANG
PERTAMA**

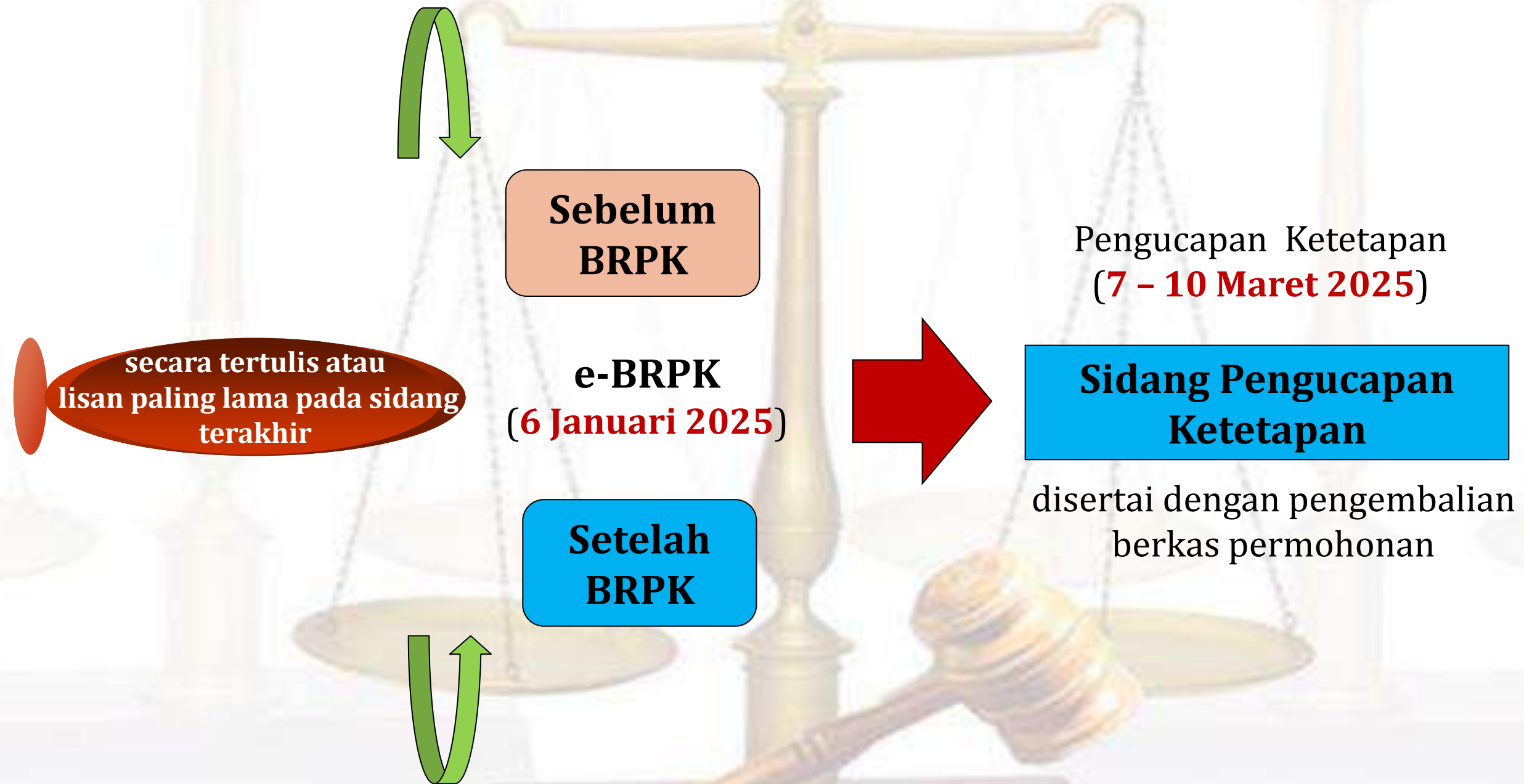
9 – 17 Januari 2025

Pemeriksaan Pendahuluan
Paling lama 4 hari kerja setelah Permohonan Pemohon dicatat dalam e-BRPK

MEKANISME PERSIDANGAN PHPU KADA



MEKANISME PENARIKAN KEMBALI





**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

KEPANITERAAN DAN
SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN 2024

**SEKIAN
TERIMA KASIH**

A close-up photograph of a hand in a dark suit sleeve holding a wooden gavel. The gavel is positioned over a wooden desk. In the background, there are several books stacked on the desk. The lighting is warm and focused on the hand and gavel.

PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON DAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT

**Oleh:
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI**

**DISAMPAIKAN DALAM "BIMBINGAN TEKNIS PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA"
TAHUN 2024**

PARA PIHAK DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

1. Pemohon:

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota
- b. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh akreditasi (untuk satu pasangan calon, masing-masing Pemantau Pemilihan dapat mengajukan permohonan sebagai Pemohon)

2. Termohon

KPU/KIP Provinsi Aceh atau KPU/KIP kabupaten/kota

3. Pihak Terkait

Pihak yang berkepentingan terhadap permohonan:

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota
- b. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh akreditasi (untuk satu pasangan calon)



OBJEK PERMOHONAN

Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih:

- **pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur**
- **pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati**
- **pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota**

**TENGGANG WAKTU
PENGAJUAN
PERMOHONAN &
PERBAIKAN
PERMOHONAN
PEMOHON**

Permohonan diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan.

Perbaikan permohonan diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya e-AP3 (untuk permohonan offline) atau sejak dikirimkannya e-AP3 (untuk permohonan online)

**TENGGANG
WAKTU PENGAJUAN
PERMOHONAN
SEBAGAI PIHAK
TERKAIT**

Permohonan diajukan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK

**TENGGANG
WAKTU PENGAJUAN
JAWABAN DAN
KETERANGAN**

Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu disampaikan kepada Mahkamah paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Pemeriksaan Persidangan

SIMULASI PENGAJUAN PERMOHONAN PHPU

Tenggang waktu pengajuan permohonan ke MK paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak penetapan



Penetapan Hasil Pemilihan
27 Nov - 16 Des 2024

Penetapan: Kamis, 5 Desember 2024, Pukul 10.00 WIB

Kamis, 5 Des 2024
s.d. 24.00 WIB

Jumat, 6 Des 2024
08.00-24.00 WIB

Senin, 9 Des 2024
08-00- 24.00 WIB

Penetapan: Senin, 16 Desember 2024, pukul 16.00 WIB

Senin, 16 Des 2024
s.d. 24.00 WIB

Selasa, 17 Des 2024
08.00-24.00 WIB

Rabu, 18 Des 2024
08-00- 24.00 WIB

SIMULASI PENGAJUAN PERBAIKAN PERMOHONAN PHPU

Tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan ke MK paling paling lam 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima/dikirimkannya e-AP3

e-AP3 diterima/dikirim: Jumat, 6 Desember 2024 pukul 13.00 WIB

**Jumat, 6 Des 2024
s.d. 24.00 WIB**

**Senin, 9 Des 2024
08.00-24.00 WIB**

**Selasa, 10 Des 2024
08-00- 24.00 WIB**

e-AP3 diterima/dikirim: Selasa, 17 Desember 2024 pukul 10.00 WIB

**Selasa, 17 Des 2024
s.d. 24.00 WIB**

**Rabu, 18 Des 2024
08.00-24.00 WIB**

**Kamis, 19 Des 2024
08-00- 24.00 WIB**

SISTEMATIKA PERMOHONAN PEMOHON

Antara lain memuat:

- A. Identitas lengkap Pemohon;
- B. Uraian yang jelas mengenai:
 1. Kewenangan Mahkamah
 2. Kedudukan hukum Pemohon
 3. Tenggang waktu pengajuan Permohonan
 4. Alasan-alasan Permohonan (posita)
 5. Hal-hal yang dimohonkan (Petitum)

Identitas lengkap Pemohon, paling kurang memuat:

- a. Nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum,
- b. Alamat surat elektronik (*e-mail*)
- c. Nomor kartu tanda advokat bagi kuasa hukum yang berprofesi sebagai advokat.

Selain itu, Permohonan Pemohon juga memuat identitas Termohon:

- a) nama Termohon
- b) alamat Termohon

Lanjutan ...

Uraian yang jelas mengenai, antara lain:

1. Kewenangan Mahkamah, memuat:

Penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagai objek perselisihan

2. Tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat:

Penjelasan mengenai tenggang waktu pengajuan Permohonan kepada Mahkamah

3. Kedudukan hukum Pemohon, memuat:

Penjelasan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan dalam hal Pemilihan hanya diikuti oleh satu pasangan calon

Lanjutan ...

4. Alasan-alasan Permohonan, antara lain memuat:

- a. Penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon
- b. Penjelasan mengenai penghitungan suara yang benar menurut Pemohon

5. Petitum, memuat antara lain:

- a. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon
- b. Permintaan untuk menetapkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon

PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON

IDENTITAS

Pemohon:

- nama dan alamat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur/pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan
- Email
- Identitas kuasa hukum (jika ada) memuat nama dan nomor kartu tanda advokat, nomor dan tanggal surat kuasa, dan alamat kuasa hukum.

Termohon:

nama dan alamat KPU/KIP Provinsi .. KPU/KIP Kabupaten/Kota ...

Lanjutan ...

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Pemohon menjelaskan kewenangan MK untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yang sejak Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 tidak lagi mengandung sifat kesementaraan.
- b. Pemohon menjelaskan mengenai objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan (Keputusan Termohon mengenai Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota) yang memengaruhi penetapan calon terpilih.
- c. Pernyataan bahwa Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.

Lanjutan ...

2. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Menjelaskan tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 2024 [permohonan diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon]
- b. Menjelaskan mengenai waktu (hari dan tanggal) pengumuman Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan dikaitkan dengan waktu pengajuan permohonan ke MK
- c. Pernyataan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan

Lanjutan ...

3. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Pemohon menjelaskan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan berdasarkan Keputusan Termohon
atau Pemohon adalah Pemantau Pemilihan (satu pasangan calon) yang terdaftar dan memperoleh akreditasi;
- b. Pemohon menjelaskan ketentuan pengajuan permohonan berdasarkan Pasal 158 UU 10/2016, yaitu:
 - 1) jumlah penduduk di Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pemohon sebagai pasangan calon
 - 2) maksimal persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon
- c. Pernyataan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan

Lanjutan ...

4. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

- a. Pemohon menjelaskan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon
- b. Pemohon menjelaskan mengenai hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon
- c. Pemohon dapat menguraikan dalil kualitatif yang dihubungkan dengan kesalahan penghitungan suara.

5. PETITUM

- a. Menyatakan Permohonan Pemohon dikabulkan
- b. Membatalkan Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota
- c. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota yang benar menurut Pemohon

Selain petitum di atas, Pemohon juga dapat meminta petitum alternatif berupa pemungutan suara ulang dan penghitungan ulang surat suara.

SISTEMATIKA KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Antara lain memuat:

- a. Nama dan alamat Pihak Terkait
- b. Uraian yang jelas mengenai tanggapan Pihak Terkait
- c. Petitum

Nama dan alamat Pihak Terkait, memuat:

- 1) Nama dan alamat Pihak Terkait sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota **atau** Pemantau Pemilihan dalam pemilihan satu pasangan calon dan/atau kuasa hukum,
- 2) Alamat surat elektronik (*e-mail*)
- 3) Nomor kartu tanda advokat bagi kuasa hukum yang berprofesi sebagai advokat

Lanjutan ...

Uraian yang jelas mengenai tanggapan Pihak Terkait, memuat:

Tanggapan Pihak Terkait terhadap permohonan Pemohon yang meliputi kewenangan Mahkamah, tenggang waktu pengajuan Permohonan, kedudukan hukum Pemohon, posita Pemohon, petitum Permohonan, dan hal-hal lain mengenai Permohonan Pemohon

Petitum Pihak Terkait, memuat:

Mengabulkan eksepsi (jika mengajukan eksepsi)

Menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah benar dan tetap berlaku serta meminta penetapan suara yang benar (dalam pokok perkara)

PENYUSUNAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT

IDENTITAS PIHAK TERKAIT

- a) nama dan alamat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur/pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan
- b) Email
- c) Identitas kuasa hukum (jika ada) memuat nama dan nomor kartu tanda advokat, nomor dan tanggal surat kuasa, dan alamat kuasa hukum.

Lanjutan ...

1. KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Dalam Eksepsi

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- 1) Kewenangan MK untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yang sejak Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 tidak lagi mengandung sifat kesementaraan.
- 2) Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan Pasal 2 PMK 2024.
- 3) Pernyataan Pihak Terkait bahwa Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota .

Lanjutan ...

B. Tenggang waktu pengajuan permohonan

- 1) Tenggang waktu pengajuan permohonan berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 2024 [permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon].
- 2) Waktu (hari dan tanggal) pengumuman Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan dikaitkan dengan waktu pengajuan permohonan ke MK berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon.
- 3) Pernyataan Pihak Terkait bahwa Pemohon mengajukan Permohonan telah melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan.

Lanjutan ...

C. Kedudukan Hukum Pemohon

1. Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/ Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan berdasarkan Keputusan Termohon
atau Pemohon adalah Pemantau Pemilihan (satu pasangan calon) yang terdaftar dan memperoleh akreditasi berdasarkan Pasal 4 ayat (1) PMK 2024;
2. Ketentuan pengajuan permohonan berdasarkan Pasal 158 UU 10/2016, yaitu:
 - jumlah penduduk di Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pemohon sebagai pasangan calon
 - maksimal persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon
3. Pernyataan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan

D. Eksepsi lainnya

Pihak Terkait dapat mengajukan eksepsi lain, misalnya terkait dengan Permohonan Pemohon kabur atau surat kuasa

Lanjutan ...

Dalam Pokok Permohonan

Pihak Terkait menanggapi dalil Pemohon mengenai:

- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon
- b. Penghitungan suara yang benar menurut Pemohon
- c. Dalil-dalil lainnya.

2. PETITUM PIHAK TERKAIT

Dalam Eksepsi (jika mengajukan eksepsi):

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait

Dalam Pokok Permohonan:

- 1) Menolak Permohonan Pemohon;
- 2) Menyatakan Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ... tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota tetap sah dan benar.

A person wearing a white lab coat is pouring coffee from a glass pitcher into a white cup on a saucer. The scene is set on a wooden table with a stack of books on the left and a small wooden box on the right. The background is a plain wall.

**SEKIAN
TERIMA KASIH**



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1628/DK.06.00/09/2024
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

24 September 2024

Kepada,
YM. Hakim Konstitusi
Ibu Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H.,M.Hum.
di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Partai Politik Angkatan II** yang akan diselenggarakan pada tanggal 30 September s.d. 3 Oktober 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Yang Mulia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Senin, 30 September 2024
Waktu : 19.00 s.d. 21.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati
dan Walikota Tahun 2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan Yth:

1. YM. Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. Plt. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Sekretaris Jenderal
Heru Setiawan - NIP:196906091993031001

Digital Signature
[mk-218761285240924084602](#)

Jln. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23329000 Fax: 021-3520177

Email: Office@mkri.id

Lampiran I

Nomor : 1628/DK.06.00/09/2024

Tanggal : 24 September 2024

**JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA TAHUN 2024 BAGI PARTAI POLITIK
ANGKATAN II**

Hari, Tanggal : Senin, 30 September 2024
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

HARI	WAKTU	MATERI	FASILITATOR
Senin, 30 September 2024	19.00 – 21.00	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024	Narasumber: - YM. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H.,M.Hum. - YM. Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H.



Lampiran II

Nomor : 1628/DK.06.00/09/2024

Tanggal : 24 September 2024

**SATUAN ACARA PEMBELAJARAN
MATERI HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN KEPALA DAERAH**

POKOK BAHASAN	WAKTU
<p>a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Mengadili Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota</p> <p>b. Objek Perkara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota</p> <p>c. Para Pihak dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota</p> <p>d. Ketentuan Permohonan Pemohon :</p> <ul style="list-style-type: none">1) <i>Legal Standing</i> Pemohon2) Tenggat Waktu Pengajuan Permohonan3) Pokok Permohonan4) <i>Petitum</i> <p>e. Mekanisme Pemeriksaan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD.</p> <ul style="list-style-type: none">1) Pemeriksaan Pendahuluan2) Pemeriksaan Persidangan3) Alat Bukti, Saksi, dan Ahli4) Putusan Sela <p>e. Putusan Mahkamah Konstitusi</p> <ul style="list-style-type: none">1) Pengambilan Putusan2) Sistematisa Putusan <p>f. Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi</p>	<p style="text-align: center;">2 x 60 menit</p>





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 967/DK.06.00/07/2024

17 Juli 2024

Lampiran : -

Hal : Undangan Rapat Persiapan Bimbingan
Teknis Hukum Acara Penyelesaian
Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala
Daerah

Kepada Yth.

Ketua Umum DPP Partai Nasdem

Dr. (HC)., Drs. H. Surya Dharma Paloh

di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Sehubungan dengan persiapan kegiatan yang dimaksud kami mengundang Bapak atau pengurus yang lain untuk dapat menghadiri koordinasi persiapan kegiatan tersebut pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 23 Juli 2024

Waktu : 13.30 WIB

Tempat : Di kantor/di kediaman masing-masing melalui *platform aplikasi meeting online* (link rapat akan diberitahukan lebih lanjut)

Kami telah menugaskan Sdr. Chafid Sugianto yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085726320093**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Nanang Subekti

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Nanang Subekti - NIP:19741118 200604 1 002

Digital Signature
[mk236678613240717100447](#)

Jln. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23329000 Fax: 021-3520177

Email: Office@mkri.id



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1627/DK.06.00/09/2024
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

24 September 2024

Kepada,
YM. Hakim Konstitusi
Bapak Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H.
di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Partai Politik Angkatan II** yang akan diselenggarakan pada tanggal 30 September s.d. 3 Oktober 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Yang Mulia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Senin, 30 September 2024
Waktu : 19.00 s.d. 21.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati
dan Walikota Tahun 2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan Yth:

1. YM. Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. Plt. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Sekretaris Jenderal
Heru Setiawan - NIP:196906091993031001

Digital Signature
[mk-218761285240924084640](#)

Jln. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23329000 Fax: 021-3520177

Email: Office@mkri.id

Lampiran I

Nomor : 1627/DK.06.00/09/2024

Tanggal : 24 September 2024

**JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA TAHUN 2024 BAGI PARTAI POLITIK
ANGKATAN II**

Hari, Tanggal : Senin, 30 September 2024
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

HARI	WAKTU	MATERI	FASILITATOR
Senin, 30 September 2024	19.00 – 21.00	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024	Narasumber: - YM. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H.,M.Hum. - YM. Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H.



Lampiran II

Nomor : 1627/DK.06.00/09/2024

Tanggal : 24 September 2024

**SATUAN ACARA PEMBELAJARAN
MATERI HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN KEPALA DAERAH**

POKOK BAHASAN	WAKTU
<p>a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Mengadili Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota</p> <p>b. Objek Perkara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota</p> <p>c. Para Pihak dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota</p> <p>d. Ketentuan Permohonan Pemohon :</p> <ul style="list-style-type: none">1) <i>Legal Standing</i> Pemohon2) Tenggat Waktu Pengajuan Permohonan3) Pokok Permohonan4) <i>Petitum</i> <p>e. Mekanisme Pemeriksaan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD.</p> <ul style="list-style-type: none">1) Pemeriksaan Pendahuluan2) Pemeriksaan Persidangan3) Alat Bukti, Saksi, dan Ahli4) Putusan Sela <p>e. Putusan Mahkamah Konstitusi</p> <ul style="list-style-type: none">1) Pengambilan Putusan2) Sistematisa Putusan <p>f. Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi</p>	<p style="text-align: center;">2 x 60 menit</p>





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1207/DK.06.00/08/2024
Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Pemanggilan Peserta Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian
Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah

15 Agustus 2024

Kepada Yth.

Ketua Umum DPP Partai Nasdem

Bapak Dr. (HC)., Drs. H. Surya Dharma Paloh
di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024** bagi **Tim Hukum Partai Politik Angkatan II** yang akan diselenggarakan pada tanggal 30 September s.d. 3 Oktober 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk mengirimkan daftar nama sejumlah **38 (tiga puluh delapan)** orang pengurus dan/atau anggota Partai Nasdem yang membidangi Hukum/Advokasi sebagai peserta kegiatan dimaksud, yang terdiri dari 20 orang dari Dewan Pimpinan Pusat dan 18 orang dari Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi. Kami juga mohon perkenan Bapak untuk menunjuk **2 (dua)** orang dari Dewan Pimpinan Pusat untuk menjadi panitia dan merangkap peserta pada kegiatan tersebut. Kami mengharapkan daftar peserta sudah dapat kami terima paling lambat **tanggal 17 September 2024**. (Ketentuan kepesertaan, jadwal kegiatan, dan form daftar peserta terlampir).

Seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Nanang Subekti

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Nanang Subekti - NIP:19741118 200604 1 002

Digital Signature
[mk-1910101352240731114104](#)

Jln. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23329000 Fax: 021-3520177

Email: Office@mkri.id

Lampiran I

Nomor : 1207/DK.06.00/08/2024

Tanggal : 15 Agustus 2024

KETENTUAN KEPESERTAAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

1. Kualifikasi Calon Peserta

- a. Peserta kegiatan sebanyak **38 (tiga puluh delapan)** orang pengurus dan/atau anggota Partai Nasdem yang terdiri dari:
 - 20 orang dari Dewan Pimpinan Pusat
 - 18 orang dari Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi
- b. Membawa Surat Tugas dari DPP Partai yang ditandatangani oleh Ketua Umum atau Sekjen untuk mengikuti secara penuh kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- c. DPP Partai Nasdem memberikan daftar nama peserta sebanyak **38 (tiga puluh delapan)** orang paling lambat pada tanggal **17 September 2024**.
- d. Peserta wajib membawa laptop/ipad/tab untuk keperluan kegiatan praktik selama di Pusdik MK.
- e. Peserta bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK).

2. Pembiayaan

- a. Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan Bimtek serta biaya bahan/materi Bimtek menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.
- b. Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Tempat kedudukan adalah alamat kantor dewan pimpinan daerah/wilayah provinsi.
- c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

3. Akomodasi

- a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:



- Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut)
- Sandal kamar
- Gula, kopi, teh, dan air mineral.

4. Konsumsi

- a. Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam, serta snack pagi, snack sore, dan snack malam.
- b. Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan Penutupan.

5. Biaya Transportasi

- a. Penggantian biaya transportasi peserta bersifat *reimbursement*. Penggantian biaya, dilakukan setelah peserta berada di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
- b. **Beberapa kelengkapan yang harus diserahkan sebagai syarat penggantian transport peserta adalah :**
 - 1) Surat Tugas yang menunjukkan nama dan asal (DPP dan DPD/DPW);
 - 2) *Boarding Pass* kedatangan;
 - 3) Tiket Datang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api) ;
 - 4) Tiket Pulang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api);
 - 5) Bukti Pengeluaran Riil lainnya, seperti Struk Bensin dan bukti pembayaran tol bagi pengguna kendaraan pribadi serta kuitansi transport darat lainnya bagi pengguna kendaraan umum.

Kelima Kelengkapan tersebut harus **diserahkan saat Registrasi**.

- c. Tiket pesawat yang diganti adalah tiket **berangkat dari tempat kedudukan dan pulang ke tempat kedudukan** (tempat kedudukan ditunjukkan dari surat tugas). Tiket yang bukan berasal/pulang ke tempat kedudukan, *tidak diganti*.
- d. ***Boarding pass***
Boarding pass berangkat harus asli, tidak boleh fotokopi.
- e. **Tiket datang dan Tiket Pulang Pesawat:**
 - 1) Tiket Pesawat harus riil (ada fisiknya, tidak *mark up*/fiktif);
 - 2) Tiket pesawat adalah Tiket Ekonomi (disarankan yang harganya ekonomis);
 - 3) Tanggal Tiket Datang Paling lama 3 hari sebelum kegiatan (tiket yang kurang dari 3 hari sebelum kegiatan, tidak diganti);
 - 4) Tanggal Tiket Pulang Paling lama 3 hari setelah kegiatan (tiket yang melebihi 3 hari setelah kegiatan, tidak diganti);
 - 5) Nama tiket harus sesuai dengan nama peserta;
 - 6) Tercantum harga tiket pada tiket pesawat;
 - 7) Biaya Perubahan/*Reschedulling* jadwal keberangkatan menjadi tanggung jawab peserta.
 - 8) Biaya tiket yang diganti sesuai dengan harga riil tiket yang tertera dan sesuai hasil konfirmasi maskapai.



f. **Transport Darat/Laut**

- 1) Transport Darat dari Tempat Kedudukan ke Bandara Asal/tiba (PP) dan Transport Darat Jakarta-Bogor (PP) diganti sesuai dengan pengeluaran riil sehingga harus **dilampirkan bukti pengeluaran riil nya seperti Kuitansi**. Penggantian biaya transport sesuai dengan standar biaya pemerintah.
- 2) Peserta yang menggunakan kendaraan pribadi, akan diganti transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah, meliputi biaya BBM (PP) dan Biaya tol yang dilampirkan bukti pengeluaran riil nya (Kuitansi/Struk)
- 3) Bila menggunakan **kereta/transportasi laut**, maka tiket kereta/transportasi laut **harus dilampirkan**. Tiket kereta yang diganti adalah kelas ekonomi dan eksekutif.
- 4) Standar biaya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.

g. Penggantian transport akan dilaksanakan **pada hari terakhir** setelah penutupan kegiatan.

6. **Lain-lain**

- a. Peserta dihimbau membawa BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya.
- b. Peserta diwajibkan mematuhi protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung.

7. **Kontak**

- a. Nomor telepon calon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.



Lampiran II

Nomor : 1207/DK.06.00/08/2024

Tanggal : 15 Agustus 2024

Jadwal Kegiatan

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Tim Hukum Partai Politik Angkatan II

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis, 30 September s.d. 3 Oktober 2024

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

Peserta : Tim Hukum Partai Politik

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Senin, 30 September 2024	10.00 – 12.00 WIB	Registrasi Peserta dan <i>Check in</i>	Panitia	Pusdik
	12.00 – 13.30 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	13.30 – 14.30 WIB	Penjelasan Teknis	Panitia	Pusdik
	14.30 – 15.00 WIB	<i>Pre-Test</i>	Panitia	Pusdik
	15.00 – 15.30 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	15.30 – 17.30 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya	YM Ketua MK Sekjen MK	Pusdik



		2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal MK 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa		
	17.30 – 19.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	19.00 – 21.00 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	21.00 WIB	Istirahat	Panitia	Pusdik
KEDUA				
Selasa, 1 Oktober 2024	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Dinamika Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	12.00 – 13.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik



	13.00 – 15.00 WIB	Sesi IV: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	15.00 WIB	Istrahat	Panitia	Pusdik
KETIGA				
Rabu, 2 Oktober 2024	05.30 – 06.30 WIB	Senam Pagi	Panitia	Pusdik
	06.30 – 08.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	08.30 – 10.00 WIB	Sesi V: Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHP Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VI: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHP Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	12.00 – 13.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VII: Lanjutan Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHP Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	15.00 – 19.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	19.00 – 21.00 WIB	Pentas Seni	Panitia	Pusdik



	21.00 WIB	Istirahat	Panitia	Pusdik
KEEMPAT				
Kamis, 3 Oktober 2024	06.30 – 08.00 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi VIII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHP Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	10.00 – 10.15 WIB	Post-Test dan Evaluasi Kegiatan	Panitia	Pusdik
	10.15 – 12.15 WIB	Penutupan 1. Kesan dan Pesan Peserta 2. Laporan Plt. Kapusdik 3. Sambutan Penutupan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 4. Pembacaan Doa	Sekjen MK Plt. Kapusdik	Pusdik
	12.15 WIB	Kegiatan Selesai	Panitia	Pusdik



Lampiran III

Nomor : 1207/DK.06.00/08/2024

Tanggal : 15 Agustus 2024

REKAPITULASI DAFTAR PESERTA

**BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

No	Nama + Gelar	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan Terakhir (SMA/S1/S2/S3)	Asal DPP/DPW Prov.	Jabatan	Alamat Domisili	Nomor Handphone (WA wajib aktif)	Email
1	Dr. Konstitusi	Bogor	13 Agustus 2003	Laki-laki	S3	DPW Provinsi Jawa Barat	Ketua	Jl. Konstitusi, Bogor, Jawa Barat	08123456	konstitusi@gmail.com
2										
3										
4										
5										
...										
38										



Lampiran IV

Nomor : 1207/DK.06.00/08/2024

Tanggal : 15 Agustus 2024

FORMAT SURAT TUGAS

SURAT TUGAS

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Umum/Sekretaris Jenderal Partai Nasdem menugaskan kepada yang tersebut di bawah ini untuk menjadi peserta pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Tim Hukum Partai Politik Angkatan II sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Asal DPP/DPW (Alamat Lengkap DPP/DPW)
1.			
2.			
3.			
...			
38.			

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis
30 September s.d. 3 Oktober 2024

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Hormat kami,
DPP Partai Nasdem
ttd
Ketua Umum/Sekretaris Jenderal





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1651/DK.06.00/09/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan Menghadiri Pembukaan**

25 September 2024

Kepada Yth.

Ketua Umum DPP Partai Nasdem

Bapak Dr. (HC)., Drs. H. Surya Dharma Paloh

di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024** bagi **Tim Hukum Partai Politik Angkatan II** yang akan diselenggarakan pada tanggal 30 September s.d. 3 Oktober 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mengundang Bapak untuk menghadiri acara pembukaan kegiatan pada:

Hari, tanggal : Senin, 30 September 2024

Waktu : 16.30 – 18.00 WIB

Tempat : Aula Grha Konstitusi 3, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan:

YM. Ketua Mahkamah Konstitusi.



Sekretaris Jenderal
Heru Setiawan - NIP:196906091993031001

Digital Signature
[mk349841347240820120657](#)

Jln. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23329000 Fax: 021-3520177

Email: Office@mkri.id

Lampiran I

Nomor : 1651/DK.06.00/09/2024

Tanggal : 25 September 2024

Jadwal Kegiatan

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Tim Hukum Partai Politik Angkatan II

Hari, Tanggal : **Senin, 30 September 2024**

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

Peserta : Tim Hukum Partai Politik

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
Senin, 30 September 2024	16.30 – 18.00 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal MK 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa	YM Ketua MK Sekjen MK	Pusdik
	18.00 WIB	Istrahat	Panitia	





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1630/DK.06.00/09/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

24 September 2024

Kepada Yth,
Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
Bapak Dr. Fajar Laksono, S.Sos., M.H.
di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Partai Politik Angkatan II** yang akan diselenggarakan pada tanggal 30 September s.d. 3 Oktober 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Selasa, 1 Oktober 2024
Waktu : 07.30 s.d. 09.30 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
Tahun 2024

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Nanang Subekti

Tembusan Yth.:
Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Nanang Subekti - NIP:19741118 200604 1 002

Digital Signature
[mk312630361240924110644](#)

Jln. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23329000 Fax: 021-3520177

Email: Office@mkri.id

Lampiran I

Nomor : 1630/DK.06.00/09/2024

Tanggal : 24 September 2024

**SATUAN ACARA PEMBELAJARAN
MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI DAN DINAMIKA PENANGANAN
PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN
WALIKOTA TAHUN 2024**

POKOK BAHASAN	WAKTU
a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Mengadili; b. Pembentukan Mahkamah Konstitusi; c. Kewenangan dan Fungsi Mahkamah Konstitusi; d. Struktur dan Mekanisme Kerja; e. Asas-asas Hukum Acara MK; f. Dinamika Penanganan PPHU dari tahun 2005 s.d. 2020; e. Landmark Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah.	2 x 60 menit





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 966/DK.06.00/07/2024

17 Juli 2024

Lampiran : -

Hal : Undangan Rapat Persiapan Bimbingan
Teknis Hukum Acara Penyelesaian
Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala
Daerah

Kepada Yth.

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Bapak H. Ahmad Syaikhu, S.AP.

di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Sehubungan dengan persiapan kegiatan yang dimaksud kami mengundang Bapak atau pengurus yang lain untuk dapat menghadiri koordinasi persiapan kegiatan tersebut pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 23 Juli 2024

Waktu : 13.30 WIB

Tempat : Di kantor/di kediaman masing-masing melalui *platform aplikasi meeting online* (link rapat akan diberitahukan lebih lanjut)

Kami telah menugaskan Sdr. Chafid Sugianto yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085726320093**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Nanang Subekti

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1206/DK.06.00/08/2024
Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Pemanggilan Peserta Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian
Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah

15 Agustus 2024

Kepada Yth.

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Bapak H. Ahmad Syaikh, S.AP.

di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024** bagi **Tim Hukum Partai Politik Angkatan II** yang akan diselenggarakan pada tanggal 30 September s.d. 3 Oktober 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk mengirimkan daftar nama sejumlah **38 (tiga puluh delapan)** orang pengurus dan/atau anggota Partai Keadilan Sejahtera yang membidangi Hukum/Advokasi sebagai peserta kegiatan dimaksud, yang terdiri dari 20 orang dari Dewan Pimpinan Pusat dan 18 orang dari Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi. Kami juga mohon perkenan Bapak untuk menunjuk **2 (dua)** orang dari Dewan Pimpinan Pusat untuk menjadi panitia dan merangkap peserta pada kegiatan tersebut. Kami mengharapkan daftar peserta sudah dapat kami terima paling lambat **tanggal 17 September 2024**. (Ketentuan kepesertaan, jadwal kegiatan, dan form daftar peserta terlampir).

Seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Nanang Subekti

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Nanang Subekti - NIP:19741118 200604 1 002

Digital Signature
mk-1910101352240731114147

Jln. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23329000 Fax: 021-3520177

Email: Office@mkri.id

Lampiran I

Nomor : 1206/DK.06.00/08/2024

Tanggal : 15 Agustus 2024

KETENTUAN KEPESERTAAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

1. Kualifikasi Calon Peserta

- a. Peserta kegiatan sebanyak **38 (tiga puluh delapan)** orang pengurus dan/atau anggota Partai Keadilan Sejahtera yang terdiri dari:
 - 20 orang dari Dewan Pimpinan Pusat
 - 18 orang dari Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi
- b. Membawa Surat Tugas dari DPP Partai yang ditandatangani oleh Ketua Umum atau Sekjen untuk mengikuti secara penuh kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- c. DPP Partai Keadilan Sejahtera memberikan daftar nama peserta sebanyak **38 (tiga puluh delapan)** orang paling lambat pada tanggal **17 September 2024**.
- d. Peserta wajib membawa laptop/ipad/tab untuk keperluan kegiatan praktik selama di Pusdik MK.
- e. Peserta bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK).

2. Pembiayaan

- a. Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan Bimtek serta biaya bahan/materi Bimtek menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.
- b. Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Tempat kedudukan adalah alamat kantor dewan pimpinan daerah/wilayah provinsi.
- c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

3. Akomodasi

- a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:



- Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut)
- Sandal kamar
- Gula, kopi, teh, dan air mineral.

4. Konsumsi

- a. Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam, serta snack pagi, snack sore, dan snack malam.
- b. Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan Penutupan.

5. Biaya Transportasi

- a. Penggantian biaya transportasi peserta bersifat *reimbursement*. Penggantian biaya, dilakukan setelah peserta berada di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
- b. **Beberapa kelengkapan yang harus diserahkan sebagai syarat penggantian transport peserta adalah :**
 - 1) Surat Tugas yang menunjukkan nama dan asal (DPP dan DPD/DPW);
 - 2) *Boarding Pass* kedatangan;
 - 3) Tiket Datang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api) ;
 - 4) Tiket Pulang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api);
 - 5) Bukti Pengeluaran Riil lainnya, seperti Struk Bensin dan bukti pembayaran tol bagi pengguna kendaraan pribadi serta kuitansi transport darat lainnya bagi pengguna kendaraan umum.

Kelima Kelengkapan tersebut harus **diserahkan saat Registrasi**.

- c. Tiket pesawat yang diganti adalah tiket **berangkat dari tempat kedudukan dan pulang ke tempat kedudukan** (tempat kedudukan ditunjukkan dari surat tugas). Tiket yang bukan berasal/pulang ke tempat kedudukan, *tidak diganti*.
- d. ***Boarding pass***
Boarding pass berangkat harus asli, tidak boleh fotokopi.
- e. **Tiket datang dan Tiket Pulang Pesawat:**
 - 1) Tiket Pesawat harus riil (ada fisiknya, tidak *mark up*/fiktif);
 - 2) Tiket pesawat adalah Tiket Ekonomi (disarankan yang harganya ekonomis);
 - 3) Tanggal Tiket Datang Paling lama 3 hari sebelum kegiatan (tiket yang kurang dari 3 hari sebelum kegiatan, tidak diganti);
 - 4) Tanggal Tiket Pulang Paling lama 3 hari setelah kegiatan (tiket yang melebihi 3 hari setelah kegiatan, tidak diganti);
 - 5) Nama tiket harus sesuai dengan nama peserta;
 - 6) Tercantum harga tiket pada tiket pesawat;
 - 7) Biaya Perubahan/*Reschedulling* jadwal keberangkatan menjadi tanggung jawab peserta.
 - 8) Biaya tiket yang diganti sesuai dengan harga riil tiket yang tertera dan sesuai hasil konfirmasi maskapai.



f. Transport Darat/Laut

- 1) Transport Darat dari Tempat Kedudukan ke Bandara Asal/tiba (PP) dan Transport Darat Jakarta-Bogor (PP) diganti sesuai dengan pengeluaran riil sehingga harus **dilampirkan bukti pengeluaran riil nya seperti Kuitansi**. Penggantian biaya transport sesuai dengan standar biaya pemerintah.
- 2) Peserta yang menggunakan kendaraan pribadi, akan diganti transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah, meliputi biaya BBM (PP) dan Biaya tol yang dilampirkan bukti pengeluaran riil nya (Kuitansi/Struk)
- 3) Bila menggunakan **kereta/transportasi laut**, maka tiket kereta/transportasi laut **harus dilampirkan**. Tiket kereta yang diganti adalah kelas ekonomi dan eksekutif.
- 4) Standar biaya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.

g. Penggantian transport akan dilaksanakan **pada hari terakhir** setelah penutupan kegiatan.

6. Lain-lain

- a. Peserta dihimbau membawa BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya.
- b. Peserta diwajibkan mematuhi protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung.

7. Kontak

- a. Nomor telepon calon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.



Lampiran II

Nomor : 1206/DK.06.00/08/2024

Tanggal : 15 Agustus 2024

Jadwal Kegiatan

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Tim Hukum Partai Politik Angkatan II

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis, 30 September s.d. 3 Oktober 2024

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

Peserta : Tim Hukum Partai Politik

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Senin, 30 September 2024	10.00 – 12.00 WIB	Registrasi Peserta dan <i>Check in</i>	Panitia	Pusdik
	12.00 – 13.30 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	13.30 – 14.30 WIB	Penjelasan Teknis	Panitia	Pusdik
	14.30 – 15.00 WIB	<i>Pre-Test</i>	Panitia	Pusdik
	15.00 – 15.30 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	15.30 – 17.30 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya	YM Ketua MK Sekjen MK	Pusdik



		2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal MK 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa		
	17.30 – 19.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	19.00 – 21.00 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	21.00 WIB	Istirahat	Panitia	Pusdik
KEDUA				
Selasa, 1 Oktober 2024	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Dinamika Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	12.00 – 13.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik



	13.00 – 15.00 WIB	Sesi IV: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	15.00 WIB	Istrahat	Panitia	Pusdik
KETIGA				
Rabu, 2 Oktober 2024	05.30 – 06.30 WIB	Senam Pagi	Panitia	Pusdik
	06.30 – 08.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	08.30 – 10.00 WIB	Sesi V: Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHP Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VI: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHP Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	12.00 – 13.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VII: Lanjutan Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHP Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	15.00 – 19.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	19.00 – 21.00 WIB	Pentas Seni	Panitia	Pusdik



	21.00 WIB	Istirahat	Panitia	Pusdik
KEEMPAT				
Kamis, 3 Oktober 2024	06.30 – 08.00 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi VIII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHP Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	10.00 – 10.15 WIB	Post-Test dan Evaluasi Kegiatan	Panitia	Pusdik
	10.15 – 12.15 WIB	Penutupan 1. Kesan dan Pesan Peserta 2. Laporan Plt. Kapusdik 3. Sambutan Penutupan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 4. Pembacaan Doa	Sekjen MK Plt. Kapusdik	Pusdik
	12.15 WIB	Kegiatan Selesai	Panitia	Pusdik



Lampiran III

Nomor : 1206/DK.06.00/08/2024

Tanggal : 15 Agustus 2024

REKAPITULASI DAFTAR PESERTA
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

No	Nama + Gelar	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan Terakhir (SMA/S1/S2/S3)	Asal DPP/DPW Prov.	Jabatan	Alamat Domisili	Nomor Handphone (WA wajib aktif)	Email
1	Dr. Konstitusi	Bogor	13 Agustus 2003	Laki-laki	S3	DPW Provinsi Jawa Barat	Ketua	Jl. Konstitusi, Bogor, Jawa Barat	08123456	konstitusi@gmail.com
2										
3										
4										
5										
...										
38										



Lampiran IV

Nomor : 1206/DK.06.00/08/2024

Tanggal : 15 Agustus 2024

FORMAT SURAT TUGAS

SURAT TUGAS

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Umum/Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera menugaskan kepada yang tersebut di bawah ini untuk menjadi peserta pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Tim Hukum Partai Politik Angkatan II sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Asal DPP/DPW (Alamat Lengkap DPP/DPW)
1.			
2.			
3.			
...			
38.			

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis
30 September s.d. 3 Oktober 2024

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Hormat kami,
DPP Partai Keadilan Sejahtera
ttd
Ketua Umum/Sekretaris Jenderal





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1652/DK.06.00/09/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan Menghadiri Pembukaan**

25 September 2024

Kepada Yth.

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Bapak H. Ahmad Syaikhu, S.AP.

di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024** bagi **Tim Hukum Partai Politik Angkatan II** yang akan diselenggarakan pada tanggal 30 September s.d. 3 Oktober 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mengundang Bapak untuk menghadiri acara pembukaan kegiatan pada:

Hari, tanggal : Senin, 30 September 2024

Waktu : 16.30 – 18.00 WIB

Tempat : Aula Grha Konstitusi 3, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan:

YM. Ketua Mahkamah Konstitusi.



Sekretaris Jenderal

Heru Setiawan - NIP:196906091993031001

Digital Signature

mk1726788233240820120707

Jln. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23329000 Fax: 021-3520177

Email: Office@mkri.id

Lampiran I

Nomor : 1652/DK.06.00/09/2024

Tanggal : 25 September 2024

Jadwal Kegiatan

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Tim Hukum Partai Politik Angkatan II

Hari, Tanggal : **Senin, 30 September 2024**

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

Peserta : Tim Hukum Partai Politik

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
Senin, 30 September 2024	16.30 – 18.00 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal MK 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa	YM Ketua MK Sekjen MK	Pusdik
	18.00 WIB	Istrahat	Panitia	





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1606/DK.06.00/09/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

24 September 2024

Kepada Yth.,
Plt. Panitera Mahkamah Konstitusi
Bapak Dr. Muhidin, S.H., M.Hum.
di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Partai Politik Angkatan II** yang akan diselenggarakan pada tanggal 30 September s.d. 3 Oktober 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Selasa, 1 Oktober 2024
Waktu : 10.00 s.d. 12.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
Tahun 2024

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Nanang Subekti

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Muda I, II, dan III.



Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Nanang Subekti - NIP:19741118 200604 1 002

Digital Signature
[mk-1975021465240924084855](#)

Jln. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23329000 Fax: 021-3520177

Email: Office@mkri.id

Lampiran I

Nomor : 1606/DK.06.00/09/2024

Tanggal : 24 September 2024

**SATUAN ACARA PEMBELAJARAN
MATERI MEKANISME, TAHAPAN DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA
TAHUN 2024**

POKOK BAHASAN	WAKTU
<p>a. Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024</p> <p>b. Mekanisme Pengajuan Permohonan, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Pihak Lainnya.</p> <p>1) Secara Langsung</p> <p>2) Secara Online</p> <p>c. Mekanisme Penanganan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Pihak Lainnya, termasuk Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan</p> <p>d. Registrasi Saksi dan Ahli Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait</p> <p>e. Penjadwalan Sidang dan Persidangan Jarak Jauh</p> <p>f. Pengucapan Putusan dan Tindaklanjut Pasca Putusan</p>	2 x 60 menit





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 965/DK.06.00/07/2024

17 Juli 2024

Lampiran : -

Hal : Undangan Rapat Persiapan Bimbingan
Teknis Hukum Acara Penyelesaian
Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala
Daerah

Kepada Yth.

Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN)

Bapak Dr. H. Zulkifli Hasan, S.E., M.M.

di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Sehubungan dengan persiapan kegiatan yang dimaksud kami mengundang Bapak atau pengurus yang lain untuk dapat menghadiri koordinasi persiapan kegiatan tersebut pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 23 Juli 2024

Waktu : 13.30 WIB

Tempat : Di kantor/di kediaman masing-masing melalui *platform aplikasi meeting online* (link rapat akan diberitahukan lebih lanjut)

Kami telah menugaskan Sdr. Chafid Sugianto yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085726320093**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Nanang Subekti

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Nanang Subekti - NIP:19741118 200604 1 002

Digital Signature
[mk236678613240717100648](#)

Jln. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23329000 Fax: 021-3520177

Email: Office@mkri.id



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1205/DK.06.00/08/2024
Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Pemanggilan Peserta Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian
Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah

15 Agustus 2024

Kepada Yth.

Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN)

Bapak Dr. H. Zulkifli Hasan, S.E., M.M.

di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024** bagi **Tim Hukum Partai Politik Angkatan II** yang akan diselenggarakan pada tanggal 30 September s.d. 3 Oktober 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk mengirimkan daftar nama sejumlah **38 (tiga puluh delapan)** orang pengurus dan/atau anggota Partai Amanat Nasional yang membidangi Hukum/Advokasi sebagai peserta kegiatan dimaksud, yang terdiri dari 20 orang dari Dewan Pimpinan Pusat dan 18 orang dari Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi. Kami juga mohon perkenan Bapak untuk menunjuk **2 (dua)** orang dari Dewan Pimpinan Pusat untuk menjadi panitia dan merangkap peserta pada kegiatan tersebut. Kami mengharapkan daftar peserta sudah dapat kami terima paling lambat **tanggal 17 September 2024**. (Ketentuan kepesertaan, jadwal kegiatan, dan form daftar peserta terlampir).

Seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Nanang Subekti

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Nanang Subekti - NIP:19741118 200604 1 002

Digital Signature
mk-1910101352240731114231

Jln. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23329000 Fax: 021-3520177

Email: Office@mkri.id

Lampiran I

Nomor : 1205/DK.06.00/08/2024

Tanggal : 15 Agustus 2024

KETENTUAN KEPESERTAAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

1. Kualifikasi Calon Peserta

- a. Peserta kegiatan sebanyak **38 (tiga puluh delapan)** orang pengurus dan/atau anggota Partai Amanat Nasional yang terdiri dari:
 - 20 orang dari Dewan Pimpinan Pusat
 - 18 orang dari Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi
- b. Membawa Surat Tugas dari DPP Partai yang ditandatangani oleh Ketua Umum atau Sekjen untuk mengikuti secara penuh kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- c. DPP Partai Amanat Nasional memberikan daftar nama peserta sebanyak **38 (tiga puluh delapan)** orang paling lambat pada tanggal **17 September 2024**.
- d. Peserta wajib membawa laptop/ipad/tab untuk keperluan kegiatan praktik selama di Pusdik MK.
- e. Peserta bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK).

2. Pembiayaan

- a. Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan Bimtek serta biaya bahan/materi Bimtek menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.
- b. Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Tempat kedudukan adalah alamat kantor dewan pimpinan daerah/wilayah provinsi.
- c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

3. Akomodasi

- a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:



- Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut)
- Sandal kamar
- Gula, kopi, teh, dan air mineral.

4. Konsumsi

- a. Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam, serta snack pagi, snack sore, dan snack malam.
- b. Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan Penutupan.

5. Biaya Transportasi

- a. Penggantian biaya transportasi peserta bersifat *reimbursement*. Penggantian biaya, dilakukan setelah peserta berada di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
- b. **Beberapa kelengkapan yang harus diserahkan sebagai syarat penggantian transport peserta adalah :**
 - 1) Surat Tugas yang menunjukkan nama dan asal (DPP dan DPD/DPW);
 - 2) *Boarding Pass* kedatangan;
 - 3) Tiket Datang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api) ;
 - 4) Tiket Pulang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api);
 - 5) Bukti Pengeluaran Riil lainnya, seperti Struk Bensin dan bukti pembayaran tol bagi pengguna kendaraan pribadi serta kuitansi transport darat lainnya bagi pengguna kendaraan umum.

Kelima Kelengkapan tersebut harus **diserahkan saat Registrasi**.
- c. Tiket pesawat yang diganti adalah tiket **berangkat dari tempat kedudukan dan pulang ke tempat kedudukan** (tempat kedudukan ditunjukkan dari surat tugas). Tiket yang bukan berasal/pulang ke tempat kedudukan, *tidak diganti*.
- d. ***Boarding pass***
Boarding pass berangkat harus asli, tidak boleh fotokopi.
- e. **Tiket datang dan Tiket Pulang Pesawat:**
 - 1) Tiket Pesawat harus riil (ada fisiknya, tidak *mark up*/fiktif);
 - 2) Tiket pesawat adalah Tiket Ekonomi (disarankan yang harganya ekonomis);
 - 3) Tanggal Tiket Datang Paling lama 3 hari sebelum kegiatan (tiket yang kurang dari 3 hari sebelum kegiatan, tidak diganti);
 - 4) Tanggal Tiket Pulang Paling lama 3 hari setelah kegiatan (tiket yang melebihi 3 hari setelah kegiatan, tidak diganti);
 - 5) Nama tiket harus sesuai dengan nama peserta;
 - 6) Tercantum harga tiket pada tiket pesawat;
 - 7) Biaya Perubahan/*Reschedulling* jadwal keberangkatan menjadi tanggung jawab peserta.
 - 8) Biaya tiket yang diganti sesuai dengan harga riil tiket yang tertera dan sesuai hasil konfirmasi maskapai.



f. **Transport Darat/Laut**

- 1) Transport Darat dari Tempat Kedudukan ke Bandara Asal/tiba (PP) dan Transport Darat Jakarta-Bogor (PP) diganti sesuai dengan pengeluaran riil sehingga harus **dilampirkan bukti pengeluaran riil nya seperti Kuitansi**. Penggantian biaya transport sesuai dengan standar biaya pemerintah.
- 2) Peserta yang menggunakan kendaraan pribadi, akan diganti transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah, meliputi biaya BBM (PP) dan Biaya tol yang dilampirkan bukti pengeluaran riil nya (Kuitansi/Struk)
- 3) Bila menggunakan **kereta/transportasi laut**, maka tiket kereta/transportasi laut **harus dilampirkan**. Tiket kereta yang diganti adalah kelas ekonomi dan eksekutif.
- 4) Standar biaya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.

g. Penggantian transport akan dilaksanakan **pada hari terakhir** setelah penutupan kegiatan.

6. **Lain-lain**

- a. Peserta dihimbau membawa BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya.
- b. Peserta diwajibkan mematuhi protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung.

7. **Kontak**

- a. Nomor telepon calon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.



Lampiran II

Nomor : 1205/DK.06.00/08/2024

Tanggal : 15 Agustus 2024

Jadwal Kegiatan

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Tim Hukum Partai Politik Angkatan II

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis, 30 September s.d. 3 Oktober 2024

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

Peserta : Tim Hukum Partai Politik

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Senin, 30 September 2024	10.00 – 12.00 WIB	Registrasi Peserta dan <i>Check in</i>	Panitia	Pusdik
	12.00 – 13.30 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	13.30 – 14.30 WIB	Penjelasan Teknis	Panitia	Pusdik
	14.30 – 15.00 WIB	<i>Pre-Test</i>	Panitia	Pusdik
	15.00 – 15.30 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	15.30 – 17.30 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya	YM Ketua MK Sekjen MK	Pusdik



		2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal MK 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa		
	17.30 – 19.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	19.00 – 21.00 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	21.00 WIB	Istirahat	Panitia	Pusdik
KEDUA				
Selasa, 1 Oktober 2024	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Dinamika Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	12.00 – 13.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik



	13.00 – 15.00 WIB	Sesi IV: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	15.00 WIB	Istrahat	Panitia	Pusdik
KETIGA				
Rabu, 2 Oktober 2024	05.30 – 06.30 WIB	Senam Pagi	Panitia	Pusdik
	06.30 – 08.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	08.30 – 10.00 WIB	Sesi V: Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHP Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VI: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHP Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	12.00 – 13.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VII: Lanjutan Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHP Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	15.00 – 19.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	19.00 – 21.00 WIB	Pentas Seni	Panitia	Pusdik



	21.00 WIB	Istirahat	Panitia	Pusdik
KEEMPAT				
Kamis, 3 Oktober 2024	06.30 – 08.00 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi VIII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHP Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	10.00 – 10.15 WIB	Post-Test dan Evaluasi Kegiatan	Panitia	Pusdik
	10.15 – 12.15 WIB	Penutupan 1. Kesan dan Pesan Peserta 2. Laporan Plt. Kapusdik 3. Sambutan Penutupan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 4. Pembacaan Doa	Sekjen MK Plt. Kapusdik	Pusdik
	12.15 WIB	Kegiatan Selesai	Panitia	Pusdik



Lampiran III

Nomor : 1205/DK.06.00/08/2024

Tanggal : 15 Agustus 2024

REKAPITULASI DAFTAR PESERTA

**BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

No	Nama + Gelar	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan Terakhir (SMA/S1/S2/S3)	Asal DPP/DPW Prov.	Jabatan	Alamat Domisili	Nomor Handphone (WA wajib aktif)	Email
1	Dr. Konstitusi	Bogor	13 Agustus 2003	Laki-laki	S3	DPW Provinsi Jawa Barat	Ketua	Jl. Konstitusi, Bogor, Jawa Barat	08123456	konstitusi@gmail.com
2										
3										
4										
5										
...										
38										



Lampiran IV

Nomor : 1205/DK.06.00/08/2024

Tanggal : 15 Agustus 2024

FORMAT SURAT TUGAS

SURAT TUGAS

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Umum/Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional menugaskan kepada yang tersebut di bawah ini untuk menjadi peserta pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Tim Hukum Partai Politik Angkatan II sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Asal DPP/DPW (Alamat Lengkap DPP/DPW)
1.			
2.			
3.			
...			
38.			

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis
30 September s.d. 3 Oktober 2024

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Hormat kami,
DPP Partai Amanat Nasional
ttd
Ketua Umum/Sekretaris Jenderal





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1653/DK.06.00/09/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan Menghadiri Pembukaan**

25 September 2024

Kepada Yth.

Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN)

Bapak Dr. H. Zulkifli Hasan, S.E., M.M.

di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024** bagi **Tim Hukum Partai Politik Angkatan II** yang akan diselenggarakan pada tanggal 30 September s.d. 3 Oktober 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mengundang Bapak untuk menghadiri acara pembukaan kegiatan pada:

Hari, tanggal : Senin, 30 September 2024

Waktu : 16.30 – 18.00 WIB

Tempat : Aula Grha Konstitusi 3, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan:

YM. Ketua Mahkamah Konstitusi.



Sekretaris Jenderal

Heru Setiawan - NIP:196906091993031001

Digital Signature

mk-876181339240820120718

Jln. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23329000 Fax: 021-3520177

Email: Office@mkri.id

Lampiran I

Nomor : 1653/DK.06.00/09/2024

Tanggal : 25 September 2024

Jadwal Kegiatan

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Tim Hukum Partai Politik Angkatan II

Hari, Tanggal : **Senin, 30 September 2024**

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

Peserta : Tim Hukum Partai Politik

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
Senin, 30 September 2024	16.30 – 18.00 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal MK 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa	YM Ketua MK Sekjen MK	Pusdik
	18.00 WIB	Istrahat	Panitia	





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1620/DK.06.00/09/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

24 September 2024

Kepada Ykh. Saudara:

1. Nanda Adytiansyah, S.Kom., M.T.I.

2. Hafidz Ikhsan Baihaki

di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Partai Politik Angkatan II** yang akan diselenggarakan pada tanggal 30 September s.d. 3 Oktober 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Selasa, 1 Oktober 2024
Waktu : 13.00 s.d. 15.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : **Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik**

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Nanang Subekti

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi.



Lampiran I

Nomor : 1620/DK.06.00/09/2024

Tanggal : 24 September 2024

SATUAN ACARA PEMBELAJARAN
MATERI SISTEM INFORMASI PENANGANAN PERKARA ELEKTRONIK

POKOK BAHASAN	WAKTU
a. Dasar Infrastruktur TIK, Persidangan jarak jauh dan streaming persidangan MK; b. Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik; c. Website MK; d. Click MK.	2 x 60 menit





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 964/DK.06.00/07/2024

17 Juli 2024

Lampiran : -

Hal : Undangan Rapat Persiapan Bimbingan
Teknis Hukum Acara Penyelesaian
Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala
Daerah

Kepada Yth.

Ketua Umum DPP Partai Demokrat

Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, M.Sc., M.P.A., M.A.

di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Sehubungan dengan persiapan kegiatan yang dimaksud kami mengundang Bapak atau pengurus yang lain untuk dapat menghadiri koordinasi persiapan kegiatan tersebut pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 23 Juli 2024

Waktu : 13.30 WIB

Tempat : Di kantor/di kediaman masing-masing melalui *platform aplikasi meeting online* (*link* rapat akan diberitahukan lebih lanjut)

Kami telah menugaskan Sdr. Chafid Sugianto yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085726320093**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Nanang Subekti

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Nanang Subekti - NIP:19741118 200604 1 002

Digital Signature
[mk236678613240717100736](#)

Jln. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23329000 Fax: 021-3520177

Email: Office@mkri.id



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1204/DK.06.00/08/2024
Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Pemanggilan Peserta Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian
Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah

15 Agustus 2024

Kepada Yth.

Ketua Umum DPP Partai Demokrat

Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, M.Sc., M.P.A., M.A.
di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024** bagi **Tim Hukum Partai Politik Angkatan II** yang akan diselenggarakan pada tanggal 30 September s.d. 3 Oktober 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk mengirimkan daftar nama sejumlah **38 (tiga puluh delapan)** orang pengurus dan/atau anggota Partai Demokrat yang membidangi Hukum/Advokasi sebagai peserta kegiatan dimaksud, yang terdiri dari 20 orang dari Dewan Pimpinan Pusat dan 18 orang dari Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi. Kami juga mohon perkenan Bapak untuk menunjuk **2 (dua)** orang dari Dewan Pimpinan Pusat untuk menjadi panitia dan merangkap peserta pada kegiatan tersebut. Kami mengharapkan daftar peserta sudah dapat kami terima paling lambat **tanggal 17 September 2024**. (Ketentuan kepesertaan, jadwal kegiatan, dan form daftar peserta terlampir).

Seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Nanang Subekti

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Lampiran I

Nomor : 1204/DK.06.00/08/2024

Tanggal : 15 Agustus 2024

KETENTUAN KEPESERTAAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

1. Kualifikasi Calon Peserta

- a. Peserta kegiatan sebanyak **38 (tiga puluh delapan)** orang pengurus dan/atau anggota Partai Demokrat yang terdiri dari:
 - 20 orang dari Dewan Pimpinan Pusat
 - 18 orang dari Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi
- b. Membawa Surat Tugas dari DPP Partai yang ditandatangani oleh Ketua Umum atau Sekjen untuk mengikuti secara penuh kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- c. DPP Partai Demokrat memberikan daftar nama peserta sebanyak **38 (tiga puluh delapan)** orang paling lambat pada tanggal **17 September 2024**.
- d. Peserta wajib membawa laptop/ipad/tab untuk keperluan kegiatan praktik selama di Pusdik MK.
- e. Peserta bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK).

2. Pembiayaan

- a. Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan Bimtek serta biaya bahan/materi Bimtek menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.
- b. Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Tempat kedudukan adalah alamat kantor dewan pimpinan daerah/wilayah provinsi.
- c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

3. Akomodasi

- a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:



- Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut)
- Sandal kamar
- Gula, kopi, teh, dan air mineral.

4. Konsumsi

- a. Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam, serta snack pagi, snack sore, dan snack malam.
- b. Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan Penutupan.

5. Biaya Transportasi

- a. Penggantian biaya transportasi peserta bersifat *reimbursement*. Penggantian biaya, dilakukan setelah peserta berada di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
- b. **Beberapa kelengkapan yang harus diserahkan sebagai syarat penggantian transport peserta adalah :**
 - 1) Surat Tugas yang menunjukkan nama dan asal (DPP dan DPD/DPW);
 - 2) *Boarding Pass* kedatangan;
 - 3) Tiket Datang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api) ;
 - 4) Tiket Pulang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api);
 - 5) Bukti Pengeluaran Riil lainnya, seperti Struk Bensin dan bukti pembayaran tol bagi pengguna kendaraan pribadi serta kuitansi transport darat lainnya bagi pengguna kendaraan umum.

Kelima Kelengkapan tersebut harus **diserahkan saat Registrasi**.
- c. Tiket pesawat yang diganti adalah tiket **berangkat dari tempat kedudukan dan pulang ke tempat kedudukan** (tempat kedudukan ditunjukkan dari surat tugas). Tiket yang bukan berasal/pulang ke tempat kedudukan, *tidak diganti*.
- d. ***Boarding pass***
Boarding pass berangkat harus asli, tidak boleh fotokopi.
- e. **Tiket datang dan Tiket Pulang Pesawat:**
 - 1) Tiket Pesawat harus riil (ada fisiknya, tidak *mark up*/fiktif);
 - 2) Tiket pesawat adalah Tiket Ekonomi (disarankan yang harganya ekonomis);
 - 3) Tanggal Tiket Datang Paling lama 3 hari sebelum kegiatan (tiket yang kurang dari 3 hari sebelum kegiatan, tidak diganti);
 - 4) Tanggal Tiket Pulang Paling lama 3 hari setelah kegiatan (tiket yang melebihi 3 hari setelah kegiatan, tidak diganti);
 - 5) Nama tiket harus sesuai dengan nama peserta;
 - 6) Tercantum harga tiket pada tiket pesawat;
 - 7) Biaya Perubahan/*Reschedulling* jadwal keberangkatan menjadi tanggung jawab peserta.
 - 8) Biaya tiket yang diganti sesuai dengan harga riil tiket yang tertera dan sesuai hasil konfirmasi maskapai.



f. **Transport Darat/Laut**

- 1) Transport Darat dari Tempat Kedudukan ke Bandara Asal/tiba (PP) dan Transport Darat Jakarta-Bogor (PP) diganti sesuai dengan pengeluaran riil sehingga harus **dilampirkan bukti pengeluaran riil nya seperti Kuitansi**. Penggantian biaya transport sesuai dengan standar biaya pemerintah.
- 2) Peserta yang menggunakan kendaraan pribadi, akan diganti transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah, meliputi biaya BBM (PP) dan Biaya tol yang dilampirkan bukti pengeluaran riil nya (Kuitansi/Struk)
- 3) Bila menggunakan **kereta/transportasi laut**, maka tiket kereta/transportasi laut **harus dilampirkan**. Tiket kereta yang diganti adalah kelas ekonomi dan eksekutif.
- 4) Standar biaya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.

g. Penggantian transport akan dilaksanakan **pada hari terakhir** setelah penutupan kegiatan.

6. **Lain-lain**

- a. Peserta dihimbau membawa BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya.
- b. Peserta diwajibkan mematuhi protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung.

7. **Kontak**

- a. Nomor telepon calon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.



Lampiran II

Nomor : 1204/DK.06.00/08/2024

Tanggal : 15 Agustus 2024

Jadwal Kegiatan

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Tim Hukum Partai Politik Angkatan II

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis, 30 September s.d. 3 Oktober 2024

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

Peserta : Tim Hukum Partai Politik

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Senin, 30 September 2024	10.00 – 12.00 WIB	Registrasi Peserta dan <i>Check in</i>	Panitia	Pusdik
	12.00 – 13.30 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	13.30 – 14.30 WIB	Penjelasan Teknis	Panitia	Pusdik
	14.30 – 15.00 WIB	<i>Pre-Test</i>	Panitia	Pusdik
	15.00 – 15.30 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	15.30 – 17.30 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya	YM Ketua MK Sekjen MK	Pusdik



		<ul style="list-style-type: none"> 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal MK 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa 		
	17.30 – 19.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	19.00 – 21.00 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	21.00 WIB	Istirahat	Panitia	Pusdik
KEDUA				
Selasa, 1 Oktober 2024	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Dinamika Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	12.00 – 13.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik



	13.00 – 15.00 WIB	Sesi IV: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	15.00 WIB	Istrahat	Panitia	Pusdik
KETIGA				
Rabu, 2 Oktober 2024	05.30 – 06.30 WIB	Senam Pagi	Panitia	Pusdik
	06.30 – 08.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	08.30 – 10.00 WIB	Sesi V: Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHP Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VI: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHP Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	12.00 – 13.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VII: Lanjutan Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHP Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	15.00 – 19.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	19.00 – 21.00 WIB	Pentas Seni	Panitia	Pusdik



	21.00 WIB	Istirahat	Panitia	Pusdik
KEEMPAT				
Kamis, 3 Oktober 2024	06.30 – 08.00 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi VIII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHP Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	10.00 – 10.15 WIB	Post-Test dan Evaluasi Kegiatan	Panitia	Pusdik
	10.15 – 12.15 WIB	Penutupan 1. Kesan dan Pesan Peserta 2. Laporan Plt. Kapusdik 3. Sambutan Penutupan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 4. Pembacaan Doa	Sekjen MK Plt. Kapusdik	Pusdik
	12.15 WIB	Kegiatan Selesai	Panitia	Pusdik



Lampiran III

Nomor : 1204/DK.06.00/08/2024

Tanggal : 15 Agustus 2024

REKAPITULASI DAFTAR PESERTA
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

No	Nama + Gelar	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan Terakhir (SMA/S1/S2/S3)	Asal DPP/DPW Prov.	Jabatan	Alamat Domisili	Nomor Handphone (WA wajib aktif)	Email
1	Dr. Konstitusi	Bogor	13 Agustus 2003	Laki-laki	S3	DPW Provinsi Jawa Barat	Ketua	Jl. Konstitusi, Bogor, Jawa Barat	08123456	konstitusi@gmail.com
2										
3										
4										
5										
...										
38										



Lampiran IV

Nomor : 1204/DK.06.00/08/2024

Tanggal : 15 Agustus 2024

FORMAT SURAT TUGAS

SURAT TUGAS

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Umum/Sekretaris Jenderal Partai Demokrat menugaskan kepada yang tersebut di bawah ini untuk menjadi peserta pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Tim Hukum Partai Politik Angkatan II sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Asal DPP/DPW (Alamat Lengkap DPP/DPW)
1.			
2.			
3.			
...			
38.			

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis
30 September s.d. 3 Oktober 2024

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Hormat kami,
DPP Partai Demokrat
ttd
Ketua Umum/Sekretaris Jenderal





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1654/DK.06.00/09/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan Menghadiri Pembukaan**

25 September 2024

Kepada Yth.

Ketua Umum DPP Partai Demokrat

Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, M.Sc., M.P.A., M.A.

di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024** bagi **Tim Hukum Partai Politik Angkatan II** yang akan diselenggarakan pada tanggal 30 September s.d. 3 Oktober 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mengundang Bapak untuk menghadiri acara pembukaan kegiatan pada:

Hari, tanggal : Senin, 30 September 2024

Waktu : 16.30 – 18.00 WIB

Tempat : Aula Grha Konstitusi 3, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan:

YM. Ketua Mahkamah Konstitusi.



Sekretaris Jenderal
Heru Setiawan - NIP:196906091993031001

Digital Signature
[mk778781782240820120731](#)

Jln. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23329000 Fax: 021-3520177

Email: Office@mkri.id

Lampiran I

Nomor : 1654/DK.06.00/09/2024

Tanggal : 25 September 2024

Jadwal Kegiatan

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Tim Hukum Partai Politik Angkatan II

Hari, Tanggal : **Senin, 30 September 2024**

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

Peserta : Tim Hukum Partai Politik

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
Senin, 30 September 2024	16.30 – 18.00 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal MK 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa	YM Ketua MK Sekjen MK	Pusdik
	18.00 WIB	Istrahat	Panitia	





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1611/DK.06.00/09/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

24 September 2024

Kepada Yth,
Saudara Saiful Anwar, S.H., M.H.
di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Partai Politik Angkatan II** yang akan diselenggarakan pada tanggal 30 September s.d. 3 Oktober 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi narasumber dan koordinator sesi praktik dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Rabu, 2 Oktober 2024
Waktu : 08.30 s.d. 15.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : - Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024
- Koordinator sesi Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Nanang Subekti

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Plt. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I, II, dan III.



Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Nanang Subekti - NIP:19741118 200604 1 002

Digital Signature
mk-862965042240924085051

Jln. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23329000 Fax: 021-3520177

Email: Office@mkri.id

Lampiran I

Nomor : 1611/DK.06.00/09/2024

Tanggal : 24 September 2024

SATUAN ACARA PEMBELAJARAN
MATERI TEKNIK PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON DAN
KETERANGAN PIHAK TERKAIT DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
KEPALA DAERAH TAHUN 2024

POKOK BAHASAN	WAKTU
<p>Penyusunan Permohonan Pemohon</p> <ul style="list-style-type: none">a. Sistematika Penyusunan Permohonan Pemohonb. Identitas Lengkap Pemohonc. Uraian yang Jelas Mengenai :<ul style="list-style-type: none">1) Kewenangan Mahkamah2) Kedudukan Hukum (<i>legal standing</i>) Pemohon3) Tenggat Waktu Pengajuan Permohonan4) Pokok Permohonan Pemohon5) Permintaan (<i>Petitum</i>) Pemohond. Contoh Penyusunan Permohonan Pemohon <p>Penyusunan Keterangan Pihak Terkait</p> <ul style="list-style-type: none">a. Sistematika Penyusunan Keterangan Pihak Terkait<ul style="list-style-type: none">1) Nama dan Alamat Pihak Terkait2) Uraian yang Jelas mengenai Keterangan Pihak Terkait terhadap Permohonan Pemohon :<ul style="list-style-type: none">a) Permohonan Pemohonb) Kedudukan Hukum (<i>legal standing</i>) Pemohonc) Tenggat Waktu Pengajuan Permohonand) Pokok Permohonan Pemohon3) Permintaan (<i>Petitum</i>) Pihak Terkaitb. Contoh Penyusunan Keterangan Pihak Terkait	90 menit





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 963/DK.06.00/07/2024

17 Juli 2024

Lampiran : -

Hal : Undangan Rapat Persiapan Bimbingan
Teknis Hukum Acara Penyelesaian
Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala
Daerah

Kepada Yth.

Ketua Umum Partai Darul Aceh

di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Sehubungan dengan persiapan kegiatan yang dimaksud kami mengundang Bapak atau pengurus yang lain untuk dapat menghadiri koordinasi persiapan kegiatan tersebut pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 23 Juli 2024

Waktu : 13.30 WIB

Tempat : Di kantor/di kediaman masing-masing melalui *platform aplikasi meeting online* (link rapat akan diberitahukan lebih lanjut)

Kami telah menugaskan Sdr. Chafid Sugianto yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085726320093**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Nanang Subekti

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1203/DK.06.00/08/2024
Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Pemanggilan Peserta Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian
Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah

15 Agustus 2024

Kepada Yth.

Ketua Umum Partai Darul Aceh
di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Tim Hukum Partai Politik Angkatan II** yang akan diselenggarakan pada tanggal 30 September s.d. 3 Oktober 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk mengirimkan daftar nama sejumlah **5 (lima)** orang pengurus dan/atau anggota Partai Darul Aceh yang membidangi Hukum/Advokasi sebagai peserta kegiatan dimaksud. Kami mengharapkan daftar peserta sudah dapat kami terima paling lambat **tanggal 17 September 2024**. (Ketentuan kepesertaan, jadwal kegiatan, dan form daftar peserta terlampir).

Seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Nanang Subekti

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Lampiran I

Nomor : 1203/DK.06.00/08/2024

Tanggal : 15 Agustus 2024

KETENTUAN KEPESERTAAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

1. Kualifikasi Calon Peserta

- a. Peserta kegiatan sebanyak **5 (lima)** orang pengurus dan/atau anggota Partai Darul Aceh.
- b. Membawa Surat Tugas dari DPP Partai yang ditandatangani oleh Ketua Umum atau Sekjen untuk mengikuti secara penuh kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- c. DPP Partai Darul Aceh memberikan daftar nama peserta sebanyak **5 (lima)** orang paling lambat pada tanggal **17 September 2024**.
- d. Peserta wajib membawa laptop/ipad/tab untuk keperluan kegiatan praktik selama di Pusdik MK.
- e. Peserta bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK).

2. Pembiayaan

- a. Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan Bimtek serta biaya bahan/materi Bimtek menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.
- b. Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Tempat kedudukan adalah alamat kantor dewan pimpinan daerah/wilayah provinsi.
- c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

3. Akomodasi

- a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:
 - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut)
 - Sandal kamar



- Gula, kopi, teh, dan air mineral.

4. Konsumsi

- a. Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam, serta snack pagi, snack sore, dan snack malam.
- b. Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan Penutupan.

5. Biaya Transportasi

- a. Penggantian biaya transportasi peserta bersifat *reimbursement*. Penggantian biaya, dilakukan setelah peserta berada di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
- b. **Beberapa kelengkapan yang harus diserahkan sebagai syarat penggantian transport peserta adalah :**
 - 1) Surat Tugas yang menunjukkan nama dan asal (DPP dan DPD/DPW);
 - 2) *Boarding Pass* kedatangan;
 - 3) Tiket Datang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api) ;
 - 4) Tiket Pulang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api);
 - 5) Bukti Pengeluaran Riil lainnya, seperti Struk Bensin dan bukti pembayaran tol bagi pengguna kendaraan pribadi serta kuitansi transport darat lainnya bagi pengguna kendaraan umum.

Kelima Kelengkapan tersebut harus **diserahkan saat Registrasi**.

- c. Tiket pesawat yang diganti adalah tiket **berangkat dari tempat kedudukan dan pulang ke tempat kedudukan** (tempat kedudukan ditunjukkan dari surat tugas). Tiket yang bukan berasal/pulang ke tempat kedudukan, *tidak diganti*.
- d. **Boarding pass**
Boarding pass berangkat harus asli, tidak boleh fotokopi.
- e. **Tiket datang dan Tiket Pulang Pesawat:**
 - 1) Tiket Pesawat harus riil (ada fisiknya, tidak *mark up/fiktif*);
 - 2) Tiket pesawat adalah Tiket Ekonomi (disarankan yang harganya ekonomis);
 - 3) Tanggal Tiket Datang Paling lama 3 hari sebelum kegiatan (tiket yang kurang dari 3 hari sebelum kegiatan, tidak diganti);
 - 4) Tanggal Tiket Pulang Paling lama 3 hari setelah kegiatan (tiket yang melebihi 3 hari setelah kegiatan, tidak diganti);
 - 5) Nama tiket harus sesuai dengan nama peserta;
 - 6) Tercantum harga tiket pada tiket pesawat;
 - 7) Biaya Perubahan/*Reschedulling* jadwal keberangkatan menjadi tanggung jawab peserta.
 - 8) Biaya tiket yang diganti sesuai dengan harga riil tiket yang tertera dan sesuai hasil konfirmasi maskapai.

f. Transport Darat/Laut

- 1) Transport Darat dari Tempat Kedudukan ke Bandara Asal/tiba (PP) dan Transport Darat Jakarta-Bogor (PP) diganti sesuai dengan pengeluaran riil sehingga harus **dilampirkan**



bukti pengeluaran riil nya seperti Kuitansi. Penggantian biaya transport sesuai dengan standar biaya pemerintah.

- 2) Peserta yang menggunakan kendaraan pribadi, akan diganti transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah, meliputi biaya BBM (PP) dan Biaya tol yang dilampirkan bukti pengeluaran riil nya (Kuitansi/Struk)
 - 3) Bila menggunakan **kereta/transportasi laut**, maka tiket kereta/transportasi laut **harus dilampirkan**. Tiket kereta yang diganti adalah kelas ekonomi dan eksekutif.
 - 4) Standar biaya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.
- g. Penggantian transport akan dilaksanakan **pada hari terakhir** setelah penutupan kegiatan.

6. Lain-lain

- a. Peserta dihimbau membawa BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya.
- b. Peserta diwajibkan mematuhi protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung.

7. Kontak

- a. Nomor telepon calon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.



Lampiran II

Nomor : 1203/DK.06.00/08/2024

Tanggal : 15 Agustus 2024

Jadwal Kegiatan

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Tim Hukum Partai Politik Angkatan II

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis, 30 September s.d. 3 Oktober 2024

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

Peserta : Tim Hukum Partai Politik

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Senin, 30 September 2024	10.00 – 12.00 WIB	Registrasi Peserta dan <i>Check in</i>	Panitia	Pusdik
	12.00 – 13.30 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	13.30 – 14.30 WIB	Penjelasan Teknis	Panitia	Pusdik
	14.30 – 15.00 WIB	<i>Pre-Test</i>	Panitia	Pusdik
	15.00 – 15.30 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	15.30 – 17.30 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya	YM Ketua MK Sekjen MK	Pusdik



		<ul style="list-style-type: none"> 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal MK 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa 		
	17.30 – 19.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	19.00 – 21.00 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	21.00 WIB	Istirahat	Panitia	Pusdik
KEDUA				
Selasa, 1 Oktober 2024	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Dinamika Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	12.00 – 13.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik



	13.00 – 15.00 WIB	Sesi IV: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	15.00 WIB	Istrahat	Panitia	Pusdik
KETIGA				
Rabu, 2 Oktober 2024	05.30 – 06.30 WIB	Senam Pagi	Panitia	Pusdik
	06.30 – 08.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	08.30 – 10.00 WIB	Sesi V: Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHP Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VI: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHP Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	12.00 – 13.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VII: Lanjutan Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHP Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	15.00 – 19.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	19.00 – 21.00 WIB	Pentas Seni	Panitia	Pusdik



	21.00 WIB	Istirahat	Panitia	Pusdik
KEEMPAT				
Kamis, 3 Oktober 2024	06.30 – 08.00 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi VIII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHP Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	10.00 – 10.15 WIB	Post-Test dan Evaluasi Kegiatan	Panitia	Pusdik
	10.15 – 12.15 WIB	Penutupan 1. Kesan dan Pesan Peserta 2. Laporan Plt. Kapusdik 3. Sambutan Penutupan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 4. Pembacaan Doa	Sekjen MK Plt. Kapusdik	Pusdik
	12.15 WIB	Kegiatan Selesai	Panitia	Pusdik



Lampiran III

Nomor : 1203/DK.06.00/08/2024

Tanggal : 15 Agustus 2024

REKAPITULASI DAFTAR PESERTA
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

No	Nama + Gelar	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan Terakhir (SMA/S1/S2/S3)	Asal DPP/DPW Prov.	Jabatan	Alamat Domisili	Nomor Handphone (WA wajib aktif)	Email
1	Dr. Konstitusi	Bogor	13 Agustus 2003	Laki-laki	S3	DPW Provinsi Jawa Barat	Ketua	Jl. Konstitusi, Bogor, Jawa Barat	08123456	konstitusi@gmail.com
2										
3										
4										
5										



Lampiran IV

Nomor : 1203/DK.06.00/08/2024

Tanggal : 15 Agustus 2024

FORMAT SURAT TUGAS

SURAT TUGAS

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Umum/Sekretaris Jenderal Partai Darul Aceh menugaskan kepada yang tersebut di bawah ini untuk menjadi peserta pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Tim Hukum Partai Politik Angkatan II sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Asal DPP/DPW (Alamat Lengkap DPP/DPW)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis
30 September s.d. 3 Oktober 2024

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Hormat kami,
DPP Partai Darul Aceh
ttd
Ketua Umum/Sekretaris Jenderal





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1655/DK.06.00/09/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan Menghadiri Pembukaan**

25 September 2024

Kepada Yth.

Ketua Umum Partai Darul Aceh
di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Tim Hukum Partai Politik Angkatan II** yang akan diselenggarakan pada tanggal 30 September s.d. 3 Oktober 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mengundang Bapak untuk menghadiri acara pembukaan kegiatan pada:

Hari, tanggal : Senin, 30 September 2024

Waktu : 16.30 – 18.00 WIB

Tempat : Melalui Aplikasi Zoom Meeting

(Link akan diberitahukan lebih lanjut)

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan:

YM. Ketua Mahkamah Konstitusi.



Sekretaris Jenderal

Heru Setiawan - NIP:196906091993031001

Digital Signature

mk1746021574240820120745

Jln. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23329000 Fax: 021-3520177

Email: Office@mkri.id

Lampiran I

Nomor : 1655/DK.06.00/09/2024

Tanggal : 25 September 2024

Jadwal Kegiatan

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Tim Hukum Partai Politik Angkatan II

Hari, Tanggal : **Senin, 30 September 2024**

Tempat : Melalui Aplikasi Zoom Meeting

Peserta : Tim Hukum Partai Politik

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
Senin, 30 September 2024	16.30 – 18.00 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal MK 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa	YM Ketua MK Sekjen MK	Pusdik
	18.00 WIB	Istrahat	Panitia	





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1722/DK.06.00/10/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

02 Oktober 2024

Kepada Ykh. Saudara/i:

- Hani Adhani**
- Luthfi Widagdo Eddyono**
- Oly Viana Agustine**
- Syamsudin Noer**

di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Partai Politik Angkatan II** yang akan diselenggarakan pada tanggal 30 September s.d. 3 Oktober 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara/i untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal	Waktu	Materi	Tempat
Rabu, 2 Oktober 2024	10.00 s.d. 15.00 WIB	Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Kamis, 3 Oktober 2024	08.00 s.d. 10.00 WIB	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024	

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Nanang Subekti

Tembusan Yth.:

- Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- Plt. Panitera Mahkamah Konstitusi;
- Panitera Muda I, II, dan III;
- Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
- ~~Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan.~~



Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Nanang Subekti - NIP:19741118 200604 1 002

Digital Signature
mk-1072911345241002073623

Jln. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23329000 Fax: 021-3520177

Email: Office@mkri.id

Lampiran I

Nomor : 1722/DK.06.00/10/2024

Tanggal : 02 Oktober 2024

SATUAN ACARA PEMBELAJARAN

MATERI	POKOK BAHASAN	WAKTU
Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHP Kepala Daerah	Simulasi Penyusunan Permohonan a. Sistematika Penyusunan Permohonan Pemohon b. Identitas Lengkap Pemohon c. Uraian yang Jelas Mengenai: 1) Kewenangan Mahkamah 2) Kedudukan Hukum (<i>legal standing</i>) Pemohon 3) Tenggat Waktu Pengajuan Permohonan 4) Pokok Permohonan Pemohon 5) Permintaan (<i>Petitum</i>) Pemohon Simulasi Penyusunan Keterangan Pihak Terkait a. Sistematika Penyusunan Keterangan Pihak Terkait 1) Nama dan Alamat Pihak Terkait 2) Uraian yang Jelas mengenai Keterangan Pihak Terkait terhadap Permohonan Pemohon : a) Permohonan Pemohon b) Kedudukan Hukum (<i>legal standing</i>) Pemohon c) Tenggat Waktu Pengajuan Permohonan d) Pokok Permohonan Pemohon e) Permintaan (<i>Petitum</i>) Pihak Terkait	4 x 60 menit
Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHP Kepala Daerah	Evaluasi Penyusunan Permohonan a. Sistematika Penyusunan Permohonan Pemohon b. Identitas Lengkap Pemohon c. Uraian yang Jelas Mengenai: 1) Kewenangan Mahkamah 2) Kedudukan Hukum (<i>legal standing</i>) Pemohon 3) Tenggat Waktu Pengajuan Permohonan 4) Pokok Permohonan Pemohon 5) Permintaan (<i>Petitum</i>) Pemohon Evaluasi Penyusunan Keterangan Pihak Terkait a. Sistematika Penyusunan Keterangan Pihak Terkait 1) Nama dan Alamat Pihak Terkait 2) Uraian yang Jelas mengenai Keterangan Pihak Terkait terhadap Permohonan Pemohon : a) Permohonan Pemohon b) Kedudukan Hukum (<i>legal standing</i>) Pemohon c) Tenggat Waktu Pengajuan Permohonan d) Pokok Permohonan Pemohon e) Permintaan (<i>Petitum</i>) Pihak Terkait	2 x 60 menit





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 962/DK.06.00/07/2024

17 Juli 2024

Lampiran : -

Hal : Undangan Rapat Persiapan Bimbingan
Teknis Hukum Acara Penyelesaian
Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala
Daerah

Kepada Yth.

Ketua Umum Partai Aceh

di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Sehubungan dengan persiapan kegiatan yang dimaksud kami mengundang Bapak atau pengurus yang lain untuk dapat menghadiri koordinasi persiapan kegiatan tersebut pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 23 Juli 2024

Waktu : 13.30 WIB

Tempat : Di kantor/di kediaman masing-masing melalui *platform aplikasi meeting online* (*link* rapat akan diberitahukan lebih lanjut)

Kami telah menugaskan Sdr. Chafid Sugianto yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085726320093**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Nanang Subekti

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1202/DK.06.00/08/2024
Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Pemanggilan Peserta Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian
Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah

15 Agustus 2024

Kepada Yth.

Ketua Umum Partai Aceh

Bapak H. Muzakir Manaf

di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024** bagi **Tim Hukum Partai Politik Angkatan II** yang akan diselenggarakan pada tanggal 30 September s.d. 3 Oktober 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk mengirimkan daftar nama sejumlah **5 (lima)** orang pengurus dan/atau anggota Partai Aceh yang membidangi Hukum/Advokasi sebagai peserta kegiatan dimaksud. Kami mengharapkan daftar peserta sudah dapat kami terima paling lambat **tanggal 17 September 2024**. (Ketentuan kepesertaan, jadwal kegiatan, dan form daftar peserta terlampir).

Seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Nanang Subekti

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Lampiran I

Nomor : 1202/DK.06.00/08/2024

Tanggal : 15 Agustus 2024

KETENTUAN KEPESERTAAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

1. Kualifikasi Calon Peserta

- a. Peserta kegiatan sebanyak **5 (lima)** orang pengurus dan/atau anggota Partai Aceh.
- b. Membawa Surat Tugas dari DPP Partai yang ditandatangani oleh Ketua Umum atau Sekjen untuk mengikuti secara penuh kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- c. DPP Partai Aceh memberikan daftar nama peserta sebanyak **5 (lima)** orang paling lambat pada tanggal **17 September 2024**.
- d. Peserta wajib membawa laptop/ipad/tab untuk keperluan kegiatan praktik selama di Pusdik MK.
- e. Peserta bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK).

2. Pembiayaan

- a. Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan Bimtek serta biaya bahan/materi Bimtek menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.
- b. Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Tempat kedudukan adalah alamat kantor dewan pimpinan daerah/wilayah provinsi.
- c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

3. Akomodasi

- a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:
 - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut)
 - Sandal kamar



- Gula, kopi, teh, dan air mineral.

4. Konsumsi

- a. Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam, serta snack pagi, snack sore, dan snack malam.
- b. Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan Penutupan.

5. Biaya Transportasi

- a. Penggantian biaya transportasi peserta bersifat *reimbursement*. Penggantian biaya, dilakukan setelah peserta berada di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
- b. **Beberapa kelengkapan yang harus diserahkan sebagai syarat penggantian transport peserta adalah :**
 - 1) Surat Tugas yang menunjukkan nama dan asal (DPP dan DPD/DPW);
 - 2) *Boarding Pass* kedatangan;
 - 3) Tiket Datang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api) ;
 - 4) Tiket Pulang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api);
 - 5) Bukti Pengeluaran Riil lainnya, seperti Struk Bensin dan bukti pembayaran tol bagi pengguna kendaraan pribadi serta kuitansi transport darat lainnya bagi pengguna kendaraan umum.

Kelima Kelengkapan tersebut harus **diserahkan saat Registrasi**.

- c. Tiket pesawat yang diganti adalah tiket **berangkat dari tempat kedudukan dan pulang ke tempat kedudukan** (tempat kedudukan ditunjukkan dari surat tugas). Tiket yang bukan berasal/pulang ke tempat kedudukan, *tidak diganti*.
- d. **Boarding pass**
Boarding pass berangkat harus asli, tidak boleh fotokopi.
- e. **Tiket datang dan Tiket Pulang Pesawat:**
 - 1) Tiket Pesawat harus riil (ada fisiknya, tidak *mark up*/fiktif);
 - 2) Tiket pesawat adalah Tiket Ekonomi (disarankan yang harganya ekonomis);
 - 3) Tanggal Tiket Datang Paling lama 3 hari sebelum kegiatan (tiket yang kurang dari 3 hari sebelum kegiatan, tidak diganti);
 - 4) Tanggal Tiket Pulang Paling lama 3 hari setelah kegiatan (tiket yang melebihi 3 hari setelah kegiatan, tidak diganti);
 - 5) Nama tiket harus sesuai dengan nama peserta;
 - 6) Tercantum harga tiket pada tiket pesawat;
 - 7) Biaya Perubahan/*Reschedulling* jadwal keberangkatan menjadi tanggung jawab peserta.
 - 8) Biaya tiket yang diganti sesuai dengan harga riil tiket yang tertera dan sesuai hasil konfirmasi maskapai.

f. Transport Darat/Laut

- 1) Transport Darat dari Tempat Kedudukan ke Bandara Asal/tiba (PP) dan Transport Darat Jakarta-Bogor (PP) diganti sesuai dengan pengeluaran riil sehingga harus **dilampirkan**



bukti pengeluaran riil nya seperti Kuitansi. Penggantian biaya transport sesuai dengan standar biaya pemerintah.

- 2) Peserta yang menggunakan kendaraan pribadi, akan diganti transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah, meliputi biaya BBM (PP) dan Biaya tol yang dilampirkan bukti pengeluaran riil nya (Kuitansi/Struk)
 - 3) Bila menggunakan **kereta/transportasi laut**, maka tiket kereta/transportasi laut **harus dilampirkan**. Tiket kereta yang diganti adalah kelas ekonomi dan eksekutif.
 - 4) Standar biaya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.
- g. Penggantian transport akan dilaksanakan **pada hari terakhir** setelah penutupan kegiatan.

6. Lain-lain

- a. Peserta dihimbau membawa BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya.
- b. Peserta diwajibkan mematuhi protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung.

7. Kontak

- a. Nomor telepon calon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.



Lampiran II

Nomor : 1202/DK.06.00/08/2024

Tanggal : 15 Agustus 2024

Jadwal Kegiatan

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Tim Hukum Partai Politik Angkatan II

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis, 30 September s.d. 3 Oktober 2024

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

Peserta : Tim Hukum Partai Politik

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Senin, 30 September 2024	10.00 – 12.00 WIB	Registrasi Peserta dan <i>Check in</i>	Panitia	Pusdik
	12.00 – 13.30 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	13.30 – 14.30 WIB	Penjelasan Teknis	Panitia	Pusdik
	14.30 – 15.00 WIB	<i>Pre-Test</i>	Panitia	Pusdik
	15.00 – 15.30 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	15.30 – 17.30 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya	YM Ketua MK Sekjen MK	Pusdik



		2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal MK 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa		
	17.30 – 19.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	19.00 – 21.00 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	21.00 WIB	Istirahat	Panitia	Pusdik
KEDUA				
Selasa, 1 Oktober 2024	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Dinamika Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	12.00 – 13.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik



	13.00 – 15.00 WIB	Sesi IV: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	15.00 WIB	Istrahat	Panitia	Pusdik
KETIGA				
Rabu, 2 Oktober 2024	05.30 – 06.30 WIB	Senam Pagi	Panitia	Pusdik
	06.30 – 08.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	08.30 – 10.00 WIB	Sesi V: Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHP Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VI: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHP Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	12.00 – 13.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VII: Lanjutan Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHP Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	15.00 – 19.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	19.00 – 21.00 WIB	Pentas Seni	Panitia	Pusdik



	21.00 WIB	Istirahat	Panitia	Pusdik
KEEMPAT				
Kamis, 3 Oktober 2024	06.30 – 08.00 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi VIII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHP Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	10.00 – 10.15 WIB	Post-Test dan Evaluasi Kegiatan	Panitia	Pusdik
	10.15 – 12.15 WIB	Penutupan 1. Kesan dan Pesan Peserta 2. Laporan Plt. Kapusdik 3. Sambutan Penutupan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 4. Pembacaan Doa	Sekjen MK Plt. Kapusdik	Pusdik
	12.15 WIB	Kegiatan Selesai	Panitia	Pusdik



Lampiran III

Nomor : 1202/DK.06.00/08/2024

Tanggal : 15 Agustus 2024

REKAPITULASI DAFTAR PESERTA
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

No	Nama + Gelar	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan Terakhir (SMA/S1/S2/S3)	Asal DPP/DPW Prov.	Jabatan	Alamat Domisili	Nomor Handphone (WA wajib aktif)	Email
1	Dr. Konstitusi	Bogor	13 Agustus 2003	Laki-laki	S3	DPW Provinsi Jawa Barat	Ketua	Jl. Konstitusi, Bogor, Jawa Barat	08123456	konstitusi@gmail.com
2										
3										
4										
5										



Lampiran IV

Nomor : 1202/DK.06.00/08/2024

Tanggal : 15 Agustus 2024

FORMAT SURAT TUGAS

SURAT TUGAS

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Umum/Sekretaris Jenderal Partai Aceh menugaskan kepada yang tersebut di bawah ini untuk menjadi peserta pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Tim Hukum Partai Politik Angkatan II sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Asal DPP/DPW (Alamat Lengkap DPP/DPW)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis
30 September s.d. 3 Oktober 2024

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Hormat kami,
DPP Partai Aceh
ttd
Ketua Umum/Sekretaris Jenderal





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1656/DK.06.00/09/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan Menghadiri Pembukaan**

25 September 2024

Kepada Yth.

Ketua Umum Partai Aceh
Bapak H. Muzakir Manaf
di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024** bagi **Tim Hukum Partai Politik Angkatan II** yang akan diselenggarakan pada tanggal 30 September s.d. 3 Oktober 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mengundang Bapak untuk menghadiri acara pembukaan kegiatan pada:

Hari, tanggal : Senin, 30 September 2024
Waktu : 16.30 – 18.00 WIB
Tempat : Melalui Aplikasi Zoom Meeting
(Link akan diberitahukan lebih lanjut)

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan:
YM. Ketua Mahkamah Konstitusi.



Sekretaris Jenderal
Heru Setiawan - NIP:196906091993031001

Digital Signature
[mk2042696049240820120758](#)

Jln. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23329000 Fax: 021-3520177

Email: Office@mkri.id

Lampiran I

Nomor : 1656/DK.06.00/09/2024

Tanggal : 25 September 2024

Jadwal Kegiatan

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Tim Hukum Partai Politik Angkatan II

Hari, Tanggal : **Senin, 30 September 2024**

Tempat : Melalui Aplikasi Zoom Meeting

Peserta : Tim Hukum Partai Politik

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
Senin, 30 September 2024	16.30 – 18.00 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal MK 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa	YM Ketua MK Sekjen MK	Pusdik
	18.00 WIB	Istrahat	Panitia	





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1613/DK.06.00/09/2024
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Koordinator
Evaluasi**

24 September 2024

Kepada Yth.,
Panitera Muda II
Bapak Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.
di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Partai Politik Angkatan II** yang akan diselenggarakan pada tanggal 30 September s.d. 3 Oktober 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi koordinator sesi evaluasi dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Kamis, 3 Oktober 2024
Waktu : 08.00 s.d. 10.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Nanang Subekti

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Plt. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I dan III.





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1407/DK.06.00/09/2024

04 September 2024

Lampiran : -

Hal : **Permohonan Memberikan Laporan
Kegiatan dan Sambutan Acara Penutupan**

Kepada,
Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Bapak Heru Setiawan
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka pelaksanaan **Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024** yang akan dilaksanakan pada bulan Agustus s.d. November 2024 secara *offline* (luring), bersama ini kami mohon perkenan Bapak untuk memberikan laporan dalam acara pembukaan dan menyampaikan sambutan sekaligus menutup kegiatan dimaksud, dengan jadwal sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Pembukaan	Penutupan	Tempat
1.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan I	Senin, 9 September 2024 Pukul 16.30 – 18.00 WIB	Kamis, 12 September 2024 Pukul 10.15 – 12.15 WIB	Ruang Aula Grha Konstitusi 3 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
2.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan II	Selasa, 10 September 2024 Pukul 16.30 – 18.00 WIB	Kamis, 12 September 2024 Pukul 16.00 – 17.30 WIB	Hotel Royal Safari Garden, Puncak, Bogor
3.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi Komisi	Selasa, 17 September 2024 Pukul 16.30 – 18.00 WIB	Jumat, 20 September 2024 Pukul 10.15 – 11.30 WIB	Ruang Aula Grha Konstitusi 3 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi



No.	Kegiatan	Pembukaan	Penutupan	Tempat
	Pemilihan Umum Angkatan III			
4.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan IV	Rabu, 18 September 2024 Pukul 16.30 – 18.00 WIB	Jumat, 20 September 2024 Pukul 16.00 – 17.30 WIB	Hotel Royal Safari Garden, Puncak, Bogor
5.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi Tim Hukum Partai Politik Angkatan I	Senin, 23 September 2024 Pukul 16.30 – 18.00 WIB	Kamis, 26 September 2024 Pukul 10.15 – 12.15 WIB	Ruang Aula Grha Konstitusi 3 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
6.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi Tim Hukum Partai Politik Angkatan II	Senin, 30 September 2024 Pukul 16.30 – 18.00 WIB	Kamis, 3 Oktober 2024 Pukul 10.15 – 12.15 WIB	
7.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi Tim Hukum Partai Politik Angkatan III	Senin, 7 Oktober 2024 Pukul 16.30 – 18.00 WIB	Kamis, 10 Oktober 2024 Pukul 10.15 – 12.15 WIB	
8.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali	Selasa, 22 Oktober 2024	Jumat, 25 Oktober 2024	



No.	Kegiatan	Pembukaan	Penutupan	Tempat
	Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi Advokat Angkatan I	Pukul 16.30 – 18.00 WIB	Pukul 10.15 – 11.30 WIB	
9.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi Advokat Angkatan II	Senin, 28 Oktober 2024 Pukul 16.30 – 18.00 WIB	Kamis, 31 Oktober 2024 Pukul 10.15 – 12.15 WIB	
10.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi Advokat Angkatan III	Senin, 4 November 2024 Pukul 16.30 – 18.00 WIB	Kamis, 7 November 2024 Pukul 10.15 – 12.15 WIB	
11.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi Advokat Angkatan IV	Senin, 11 November 2024 Pukul 16.30 – 18.00 WIB	Kamis, 14 November 2024 Pukul 10.15 – 12.15 WIB	

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Kepala
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Nanang Subekti





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1724/DK.06.00/10/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Moderator**

02 Oktober 2024

Kepada Yth.:

Saudari Elin Asrofah Qibtiah, S.Pd, M.Pd

di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Partai Politik Angkatan II** yang akan diselenggarakan pada tanggal 30 September s.d. 3 Oktober 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudari untuk menjadi moderator dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal	Waktu	Materi	Tempat
Rabu, 2 Oktober 2024	10.00 s.d. 15.00 WIB	Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Kamis, 3 Oktober 2024	08.00 s.d. 10.00 WIB	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024	

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudari, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Nanang Subekti

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Inspektur.





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1833/DK.06.00/10/2024
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Memberikan Ceramah
Kunci dan Membuka Acara**

15 Oktober 2024

Kepada,
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
YM. Dr. Suhartoyo S.H., M.H.
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka pelaksanaan **Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024** yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober s.d. November 2024 secara *offline* (luring), bersama ini kami mohon perkenan Yang Mulia untuk memberikan ceramah kunci sekaligus membuka secara resmi kegiatan-kegiatan dimaksud, dengan jadwal sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Hari/Tanggal	Pukul	Tempat
1.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 Bagi Advokat Angkatan I	Senin, 21 Oktober 2024	16.30 – 18.00 WIB	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
2.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 Bagi Advokat Angkatan II	Senin, 28 Oktober 2024	16.30 – 18.00 WIB	
3.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 Bagi Advokat Angkatan III	Senin, 4 November 2024	16.30 – 18.00 WIB	
4.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 Bagi Advokat Angkatan IV	Senin, 11 November 2024	16.30 – 18.00 WIB	



Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan Yth:

1. YM. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
2. Plt. Panitera Mahkamah Konstitusi



Sekretaris Jenderal
Heru Setiawan - NIP:196906091993031001

Digital Signature
[mk322415482241015075830](#)

Jln. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23329000 Fax: 021-3520177

Email: Office@mkri.id



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1793/DK.06.00/10/2024

09 Oktober 2024

Lampiran : -

Hal : **Permohonan Memberikan Laporan Kegiatan
dan Sambutan Acara Penutupan**

Yth. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi

Bapak Heru Setiawan

di Jakarta

Dengan hormat, dalam rangka pelaksanaan **Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024** yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober s.d. November 2024 secara *offline* (luring), bersama ini kami mohon perkenan Bapak untuk memberikan laporan dalam acara pembukaan dan menyampaikan sambutan sekaligus menutup kegiatan dimaksud, dengan jadwal sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Pembukaan	Penutupan	Tempat
1.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi Advokat Angkatan I	Senin, 21 Oktober 2024 Pukul 16.30 – 18.00 WIB	Kamis, 24 Oktober 2024 Pukul 10.15 – 11.30 WIB	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
2.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi Advokat Angkatan II	Senin, 28 Oktober 2024 Pukul 16.30 – 18.00 WIB	Kamis, 31 Oktober 2024 Pukul 10.15 – 12.15 WIB	
3.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi Advokat Angkatan III	Senin, 4 November 2024 Pukul 16.30 – 18.00 WIB	Kamis, 7 November 2024 Pukul 10.15 – 12.15 WIB	



No.	Kegiatan	Pembukaan	Penutupan	Tempat
4.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi Advokat Angkatan IV	Senin, 11 November 2024 Pukul 16.30 – 18.00 WIB	Kamis, 14 November 2024 Pukul 10.15 – 12.15 WIB	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Mundiri





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1679/DK.06.00/09/2024
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : **Undangan Rapat**

27 September 2024

Kepada Yth.

Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

(Nama Terlampir)

di Tempat

Dalam rangka evaluasi dan persiapan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Partai Politik Angkatan II serta persiapan agenda terdekat Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri rapat koordinasi dimaksud yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Senin, 30 September 2024
Tempat : Ruang Vicon, Grha Konstitusi 2
Waktu : Pukul 08.30 WIB - selesai
Agenda : 1. Evaluasi Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Partai Politik Angkatan I
2. Persiapan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Partai Politik Angkatan II

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu/Saudara/i, kami sampaikan terima kasih.

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Nanang Subekti



Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Nanang Subekti - NIP:19741118 200604 1 002

Digital Signature
[mk-42354096240927093001](#)

Jln. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23329000 Fax: 021-3520177

Email: Office@mkri.id

Lampiran Surat

Nomor : 1679/DK.06.00/09/2024

Tanggal : 27 September 2024

Daftar Peserta Rapat

1. Nanang Subekti
2. Budi Hari Wibowo
3. Nanda Adityansyah
4. Ardiansyah Salim
5. Santhy Kustrihardiani
6. Bambang Sukmadi
7. Hadian Taofik Rochman
8. Muhlis Nova
9. Yahya Amarullah Taufik
10. Chafid Sugianto
11. Edwin Rivano
12. Suhardi
13. Angga Putri Gardina
14. Edwin Aditya Irawan
15. Andy Fahri





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 998/DK.06.00/07/2024
Lampiran : 2 (dua) lembar
Hal : **Undangan Rapat**

19 Juli 2024

Kepada Yth.

Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

(Nama Terlampir)

di Tempat

Dalam persiapan penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi mengundang Bapak/Ibu/Sdr/i untuk menghadiri rapat pembahasan rencana kegiatan dengan target grup pada:

Hari, tanggal : Hari dan tanggal pada jadwal terlampir
Waktu : Waktu pada jadwal terlampir
Tempat : Luring di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi/ Daring di kantor/di kediaman masing-masing melalui *platform aplikasi meeting online* (*link* rapat akan diberitahukan lebih lanjut)

Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu/Saudara/i, kami sampaikan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Nanang Subekti

Tembusan Yth.:

Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Lampiran I

Nomor : 998/DK.06.00/07/2024

Tanggal : 19 Juli 2024

Daftar Peserta Rapat

1. Nanang Subekti
2. Budi Hari Wibowo
3. Ardiansyah Salim
4. Bambang Sukmadi
5. Hadian Taofik Rochman
6. Santhy Kustrihardiani
7. Nanda Adytiansyah
8. Andy Fahri
9. Angga Putri Gardina
10. Chafid Sugianto
11. Edwin Aditya Irawan
12. Edwin Rivano
13. Muhlis Nova
14. Suhardi
15. Yahya Amarullah Taufik



Lampiran II

Nomor : 998/DK.06.00/07/2024

Tanggal : 19 Juli 2024

Jadwal Rapat Koordinasi Bimtek PHP Kepala Daerah dengan Target Grup

No	Hari/Tanggal	Waktu	Kegiatan	Peserta Rapat Eksternal
1	Senin, 22 Juli 2024	09.00 - 11.00 WIB	Rapat Koordinasi Kegiatan Bimtek PHP Kada Bagi KPU dan Bawaslu	1. KPU 2. Bawaslu
2		13.30 - 15.30 WIB	Rapat Koordinasi Kegiatan Bimtek PHP Kada Bagi Wartawan dan Akademisi	1. Achmad Dodi Haryadi (Kasubbag Humas) 2. FH IKA UNAND
3	Selasa, 23 Juli 2024	09.00 - 11.00 WIB	Rapat Koordinasi Kegiatan Bimtek PHP Kada Bagi Partai Politik Angkatan I	1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 2. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) 3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 4. Partai Golongan Karya (Golkar) 5. Partai Nanggroe Aceh (PNA) 6. Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa (Gabthat)
4		13.30 - 15.30 WIB	Rapat Koordinasi Kegiatan Bimtek PHP Kada Bagi Partai Politik Angkatan II	1. Partai Nasdem 2. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 3. Partai Amanat Nasional (PAN) 4. Partai Demokrat 5. Partai Darul Aceh 6. Partai Aceh



No	Hari/Tanggal	Waktu	Kegiatan	Peserta Rapat Eksternal
5	Rabu, 24 Juli 2024	09.00 - 11.00 WIB	Rapat Koordinasi Kegiatan Bimtek PHP Kada Bagi Partai Politik Angkatan III	<ol style="list-style-type: none"> 1. Partai Buruh 2. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) 3. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) 4. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) 5. Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda) 6. Partai Bulan Bintang (PBB) 7. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 8. Partai Persatuan Indonesia (Perindo) 9. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 10. Partai Adil Sejahtera Aceh 11. Partai Soliditas Independen Rakyat Indonesia 12. Partai Ummat
6		13.30 - 15.30 WIB	Rapat Koordinasi Kegiatan Bimtek PHP Kada Bagi Advokat Angkatan I	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peradi Otto 2. Perhakhi 3. Peradin 4. DPN Ind
7	Senin, 29 Juli 2024	09.00 - 11.00 WIB	Rapat Koordinasi Kegiatan Bimtek PHP Kada Bagi Advokat Angkatan II	<ol style="list-style-type: none"> 1. KAI SJL 2. Ferari 3. Peradan 4. Peradi Luhut
8		13.30 - 15.30 WIB	Rapat Koordinasi Kegiatan Bimtek PHP Kada Bagi Advokat Angkatan III	<ol style="list-style-type: none"> 1. KAI TSH 2. Peradi Juniver 3. IKADIN 4. DPP ABI
9	Selasa, 30 Juli 2024	09.00 - 11.00 WIB	Rapat Koordinasi Kegiatan Bimtek PHP Kada Bagi Advokat Angkatan IV	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengacara MK 2. FPK 3. IPHI 4. Serikat Pengacara Indonesia 5. BPP PAI 6. KAI Erman
10		13.30 - 15.30 WIB	Rapat Koordinasi Kegiatan Bimtek PHP Kada Bagi Bawaslu Jawa Tengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bawaslu Jawa Tengah





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

**SURAT TUGAS
NOMOR 612/ST.SPD/2000/10/2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Mahkamah Konstitusi menugaskan kepada yang tersebut di bawah ini untuk melaksanakan Perjalanan Dinas sebagai berikut:

Daftar Nama Terlampir

Dari : Gedung Mahkamah Konstitusi

Tempat, Kota Tujuan : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor.

Dalam rangka : Melaksanakan tugas sebagai Narasumber Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 bagi Partai Politik Angkatan II di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tanggal 30 September s.d. 3 Oktober 2024.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 30 September 2024
an. Ketua Mahkamah Konstitusi,
Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan:
Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi



Sekretaris Jenderal
Heru Setiawan - NIP:196906091993031001

Digital Signature
[mk1667663764241002114953](#)

Jln. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23329000 Fax: 021-3520177

Email: Office@mkri.id

Lampiran Surat Tugas

Nomor : 612/ST.SPD/2000/10/2024

Tanggal : 30 September 2024

**NARASUMBER KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA
TAHUN 2024 BAGI PARTAI POLITIK ANGKATAN II**

NO	NAMA	PENUGASAN	TANGGAL
1.	Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Narasumber	30 September 2024
2.	Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H.	Narasumber	30 September 2024
3.	Muhidin	Narasumber	1 Oktober 2024
4.	Wiryanto	Narasumber	3 Oktober 2024
5.	Fajar Laksono	Narasumber	1 Oktober 2024
6.	Saiful Anwar	Narasumber	2 Oktober 2024
7.	Hani Adhani	Narasumber	2 dan 3 Oktober 2024
8.	Luthfi Widagdo Eddyono	Narasumber	2 dan 3 Oktober 2024
9.	Oly Viana Agustine	Narasumber	2 dan 3 Oktober 2024
10.	Syamsudin Noer	Narasumber	2 dan 3 Oktober 2024
11.	Nanda Adytiansyah	Narasumber	1 Oktober 2024
12.	Hafidz Ikhsan Baihaki	Narasumber	1 Oktober 2024





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

SURAT TUGAS NOMOR 35/ST.SPD/2600/09/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menugaskan kepada yang tersebut di bawah ini untuk melaksanakan Perjalanan Dinas sebagai berikut:

Daftar Nama Terlampir

- Dari** : 1. Gedung DPP Partai Nasdem, Jakarta dan DPD Partai Nasdem se-Indonesia;
2. Gedung DPP Partai Keadilan Sejahtera, Jakarta dan DPD Partai Keadilan Sejahtera se-Indonesia;
3. Gedung DPP Partai Amanat Nasional, Jakarta dan DPD Partai Amanat Nasional se-Indonesia;
4. Gedung DPP Partai Demokrat, Jakarta dan DPD Partai Demokrat se-Indonesia;
5. Gedung DPP dan/atau DPD Partai Darul Aceh, Aceh;
6. Gedung DPP dan/atau DPD Partai Aceh, Aceh.
- Tempat, Kota Tujuan** : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Desa Tugu Selatan, Kec. Cisarua,
Kab. Bogor
- Dalam rangka** : Melaksanakan Tugas sebagai Peserta pada Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Partai Politik Angkatan II pada tanggal 30 September s.d. 3 Oktober 2024.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Bogor, 25 September 2024

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Nanang Subekti



Lampiran Surat Tugas

Nomor : 35/ST.SPD/2600/09/2024

Tanggal : 25 September 2024

**DAFTAR PESERTA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA
TAHUN 2024 BAGI PARTAI POLITIK ANGKATAN II**

No	Nama	Tanggal Perjalanan Dinas	Rute Perjalanan		
1.	Yandri Sudarso, SH.,MH	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Jakarta	Bogor	Jakarta
2.	Nurhidayat Umacina, SE	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Jakarta	Bogor	Jakarta
3.	Cepi Hendrayani, SH., MH	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Jakarta	Bogor	Jakarta
4.	Jimmy Himawan, S.H.	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Jakarta	Bogor	Jakarta
5.	Muhammad Mualimin, S.H., M.H.	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Jakarta	Bogor	Jakarta
6.	M.Khoiri, SH.,MH	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Jakarta	Bogor	Jakarta
7.	Reinhard R.Silaban, S.H.	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Jakarta	Bogor	Jakarta
8.	Novianto Rahmanty, SH.,MH	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Jakarta	Bogor	Jakarta
9.	Agatha A.Lidyawati Rafli BSc, SH.,MH	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Jakarta	Bogor	Jakarta
10.	Dr. Nadya Prita Gemala D, SH. M.Hum	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Jakarta	Bogor	Jakarta
11.	Teuku Irmansyah Akbar, SH. MH	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Jakarta	Bogor	Jakarta
12.	Andhika Yudha Perwira, S.H.	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Jakarta	Bogor	Jakarta
13.	Afrianto, S.H.	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Jakarta	Bogor	Jakarta
14.	Sharon S. Simamora	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Jakarta	Bogor	Jakarta
15.	Tomi Yohana, S.H.	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Jakarta	Bogor	Jakarta
16.	Nathaniel Eliazar M Hutagaol, SH.,MH	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Jakarta	Bogor	Jakarta
17.	Gregorius Retas Daeng, S.H.	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Jakarta	Bogor	Jakarta



No	Nama	Tanggal Perjalanan Dinas	Rute Perjalanan		
18.	Turedo Sitindaon, S.H.	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Jakarta	Bogor	Jakarta
19.	Yunus Adhi Prabowo, S.H., M.H., ADV., M.Kn	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Jakarta	Bogor	Jakarta
20.	Ronald Antony Sirait, S.H.	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Jakarta	Bogor	Jakarta
21.	Fathurosi, S.H.	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Jakarta	Bogor	Jakarta
22.	Zaenal Fandi, S.H., M.H.	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Surabaya	Bogor	Surabaya
23.	Zainuddin, S.HI	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Surabaya	Bogor	Surabaya
24.	Leksadharma Kengiswoyo, S.H., M.H	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Bandung	Bogor	Bandung
25.	Indra Permana, S.H.	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Bandung	Bogor	Bandung
26.	Anik Lestiyorini,A.Md, S.H., M.H.	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Semarang	Bogor	Semarang
27.	Andrian Ari Wibowo, S.H.	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Semarang	Bogor	Semarang
28.	Hendri Rachmadani, S.H.	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Aceh	Bogor	Aceh
29.	Naufal Fauzan, S.H.	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Aceh	Bogor	Aceh
30.	MHD. Fadhli, S.H., M.H., CML., CPAdj., CPM	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Batam	Bogor	Batam
31.	Dikky Zulkarnain Hutagalung, S.E., S.H., C.MSP	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Batam	Bogor	Batam
32.	Dicky patadjenu, S.H., M.H., C.Md.	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Palu	Bogor	Palu
33.	Rahmawati Sukri, S.H., M.H	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Palu	Bogor	Palu
34.	Drs. Lahaya, SH.,MH	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Makassar	Bogor	Makassar
35.	Muh. Dirfan Akbar, S.H.	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Makassar	Bogor	Makassar
36.	Ali Akbar, S.H., M.H.	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Bandar Lampung	Bogor	Bandar Lampung
37.	Akbar F.A Salampessy, S.H.	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Ambon	Bogor	Ambon



No	Nama	Tanggal Perjalanan Dinas	Rute Perjalanan		
38.	Afriyandi CH.Samallo, S.H.	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Ambon	Bogor	Ambon
39.	Fadjri, S.H.	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Aceh	Bogor	Aceh
40.	Dr. Anhar Nasution, S.H., M.H.	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Aceh	Bogor	Aceh
41.	Muhammad Iqbal Rozi, S.H., M.H.	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Aceh	Bogor	Aceh
42.	Murtadha, S.H.	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Aceh	Bogor	Aceh
43.	Muhajir, S.Pd	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Aceh	Bogor	Aceh
44.	Yulizar, S.H, M.H.	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Aceh	Bogor	Aceh
45.	Muhammad Irfan, S.H.	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Aceh	Bogor	Aceh
46.	Riki Asbi, S.H.	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Aceh	Bogor	Aceh
47.	Muhammad Saddam, M.Pd	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Aceh	Bogor	Aceh
48.	Mundaris, S.Pd	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Aceh	Bogor	Aceh
49.	EMANUEL PASSAR, SH	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Kupang	Bogor	Kupang
50.	AGUS SOFYAN, S.H	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Jakarta	Bogor	Jakarta
51.	Farid Galitam, SH., MH	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Ternate	Bogor	Ternate
52.	Budi Santoso, S.H.,M.H.	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Jakarta	Bogor	Jakarta
53.	Mulki, S.Ud	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Serang	Bogor	Serang
54.	Mustandar, SH, MH.	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Makassar	Bogor	Makassar
55.	Brian Mehue, S.HI	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Jayawijaya	Bogor	Jayawijaya
56.	Aryono Putra, S.H., M.H.	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Tarakan	Bogor	Tarakan
57.	Rambo Elias Demonggren, SE	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Nabire	Bogor	Nabire
58.	Zainal Rachman, SH MH	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Bandar Lampung	Bogor	Bandar Lampung



No	Nama	Tanggal Perjalanan Dinas	Rute Perjalanan		
59.	Ghufron, SH,MH, C.C.D.	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Surabaya	Bogor	Surabaya
60.	DARUSSALAM, SH	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Palembang	Bogor	Palembang
61.	R.A. SHANTI DEWI MULYARAHARJANI, SH., MH	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Jakarta	Bogor	Jakarta
62.	INA MAULINA, SH.	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Mataram	Bogor	Mataram
63.	Muhammad Adamsyah Nasution	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Jakarta	Bogor	Jakarta
64.	NOPRIYANSYAH, S.H	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Bengkulu	Bogor	Bengkulu
65.	Beatrix Kawaitouw, S.H	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Jayapura	Bogor	Jayapura
66.	Jakobis Siahaya, S.H	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Ambon	Bogor	Ambon
67.	AGUNG PURNOMO JATI, S.H	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Yogyakarta	Bogor	Yogyakarta
68.	KHAIDIR,, S.H	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Jakarta	Bogor	Jakarta
69.	DELVI, S.H., M.H.	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Jakarta	Bogor	Jakarta
70.	NORRIF'AT, S.H	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Banjarmasin	Bogor	Banjarmasin
71.	Mustandar, SH., MH.	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Makassar	Bogor	Makassar
72.	Ismail Alim, S.H	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Jakarta	Bogor	Jakarta
73.	ZULFAZLI,, SE	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Aceh	Bogor	Aceh
74.	Lalu Edi Rahadianto	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Jakarta	Bogor	Jakarta
75.	Febriani,, S.Pd	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Jakarta	Bogor	Jakarta
76.	Putri Oktaviani, S.T	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Jakarta	Bogor	Jakarta
77.	RANU WIJAYA	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Palangkaraya	Bogor	Palangkaraya
78.	TEDI KURNIAWAN	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Jakarta	Bogor	Jakarta
79.	Rizka Kartini, A.Md.Ak, S.H., M.Kn	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Aceh	Bogor	Aceh



No	Nama	Tanggal Perjalanan Dinas	Rute Perjalanan		
80.	Santriano	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Serang	Bogor	Serang
81.	Ibnu M. Bilalludin	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Jakarta	Bogor	Jakarta
82.	Agus Sudarto	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Jakarta	Bogor	Jakarta
83.	Dr. H. Jayus, M.M	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Semarang	Bogor	Semarang
84.	Akbar Brillianto, S.H	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Surabaya	Bogor	Surabaya
85.	Surya Iman Wahyudi, S.H., MH	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Banjarmasin	Bogor	Banjarmasin
86.	RAMIDI, SE, M.Si	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Serang	Bogor	Serang
87.	Ahmar Ihsan Rangkuti, S.H	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Serang	Bogor	Serang
88.	Ali Wiji Edhy, S.H	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Jakarta	Bogor	Jakarta
89.	Anggi Aribowo, S.H., M.H.	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Jakarta	Bogor	Jakarta
90.	Evi Risna Yanti, S.H., M.Kn.	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Surabaya	Bogor	Surabaya
91.	Helmi Al Djufri, S.Sy., M.Si.	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Jakarta	Bogor	Jakarta
92.	Heru Julianto, S.H	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Jakarta	Bogor	Jakarta
93.	Ismail Nganggon, S.H	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Jakarta	Bogor	Jakarta
94.	Seta Mahardika Caesar Wahyuono, S.H., M.H.	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Jakarta	Bogor	Jakarta
95.	Suminarso, S.H	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Jakarta	Bogor	Jakarta
96.	Muhammad Arnif, S.H	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Aceh	Bogor	Aceh
97.	Khairul Anwar Hasibuan, S.H MH	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Medan	Bogor	Medan
98.	Almetrizon, S.H	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Padang	Bogor	Padang
99.	Dr. Azzuhri Al Bajuri, S.H MHI	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Pekanbaru	Bogor	Pekanbaru
100.	Mohammad Indra Kelana, S.H	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Pekanbaru	Bogor	Pekanbaru



No	Nama	Tanggal Perjalanan Dinas	Rute Perjalanan		
101.	Hadi Pratama, S.H.,CPM	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Bengkulu	Bogor	Bengkulu
102.	Martadinata, S.Pd., S.H	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Palembang	Bogor	Palembang
103.	Sultan, S.H., M.H.	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Bandar Lampung	Bogor	Bandar Lampung
104.	Fahmi Ali Ramdhani, S.H., M.H.	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Jakarta	Bogor	Jakarta
105.	Muhammad Edi, S.H	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Semarang	Bogor	Semarang
106.	Kurniya Safitri, S.H	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Mataram	Bogor	Mataram
107.	Bayu Mega Malela, S.H.i, S.Pd	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Samarinda	Bogor	Samarinda
108.	Dudi Usman Sahupala, S.H.,M.H., CPM	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Ambon	Bogor	Ambon
109.	Jurait Lidawa, S.H	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Ternate	Bogor	Ternate
110.	Moh. Ridwan, S.H	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Palu	Bogor	Palu
111.	Rahman Pulani, S.H	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Kendari	Bogor	Kendari
112.	Muslim Haq, M., S.H., M.H	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Makassar	Bogor	Makassar
113.	Riki Sambora, S.H	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Sorong	Bogor	Sorong
114.	Ruli Margianto, S. H., M. H.	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Serang	Bogor	Serang
115.	Riki Martim, S.H, CLA	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Serang	Bogor	Serang
116.	Nur Fahmi, S.H.,M.H	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Jakarta	Bogor	Jakarta
117.	Mansur Naga, S.H	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Jakarta	Bogor	Jakarta
118.	Joko Fitrian Prabowo, SH. MKn	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Jakarta	Bogor	Jakarta
119.	Ismu Harkamil, SH., MH	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Jakarta	Bogor	Jakarta
120.	H.M. Tulus Wahjuono	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Surabaya	Bogor	Surabaya
121.	Edius Pratama, S.H	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Jakarta	Bogor	Jakarta



No	Nama	Tanggal Perjalanan Dinas	Rute Perjalanan		
122.	Deviyanti Dwiningsih, S.H., M.H.	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Jakarta	Bogor	Jakarta
123.	Aristya Kusuma Dewi, S.H	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Jakarta	Bogor	Jakarta
124.	Arif Bayu Praminto, S.H	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Jakarta	Bogor	Jakarta
125.	Ari Hadi Basuki wibowo, S.H	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Jakarta	Bogor	Jakarta
126.	Arah Madani, S.H	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Jakarta	Bogor	Jakarta
127.	Ahmar Ihsan Rangkuti, S.H	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Jakarta	Bogor	Jakarta
128.	Bayu Aditya Putra, S.H.	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Jakarta	Bogor	Jakarta
129.	Aida Mardatillah, S.H., M.H.	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Jakarta	Bogor	Jakarta
130.	Hafizh Nur Rahman, S.H.	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Jakarta	Bogor	Jakarta
131.	Erwinsyah, S.H., LL.M.	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Jakarta	Bogor	Jakarta
132.	T. Jessica Novia Hermanto, S.H.	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Jakarta	Bogor	Jakarta
133.	Annisa Diva Picaesa, S.H.	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Jakarta	Bogor	Jakarta
134.	Bansawan, S.H.	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Jakarta	Bogor	Jakarta
135.	Dicky Armand Syach	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Jakarta	Bogor	Jakarta
136.	Boyke Luthfiana Syahrir, S.H., M.H.	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Jakarta	Bogor	Jakarta
137.	Dr. Syaiful Ma'arif, SH., CN., MH., CLA.	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Jakarta	Bogor	Jakarta
138.	Aksin, S.H.	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Jakarta	Bogor	Jakarta
139.	Hanna Maria Manurung, S.H., M.H.	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Jakarta	Bogor	Jakarta
140.	Lalu Rusdi, S.H., M.H.	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Mataram	Bogor	Mataram
141.	Rizal Hakiki, S.H.	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Jakarta	Bogor	Jakarta
142.	Arfi Bambani Amri, S.H., M.P.A.	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Jakarta	Bogor	Jakarta



No	Nama	Tanggal Perjalanan Dinas	Rute Perjalanan		
143.	GS Anton Armya, S.H.	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Jakarta	Bogor	Jakarta
144.	Hutur Irvan V Pandiangan, S.H., M.H.	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Jakarta	Bogor	Jakarta
145.	Fahrudin Maloko, S.H.	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Ternate	Bogor	Ternate
146.	Revin Eldad Danny Rompas	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Manado	Bogor	Manado
147.	Ifrianto S. Rahman, S.H., M.H.,CPLC	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Gorontalo	Bogor	Gorontalo
148.	Albert Atly Modouw, S.H.	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Jayapura	Bogor	Jayapura
149.	Zudy Fardy, S.H.	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Batam	Bogor	Batam
150.	Teguh Indarmaji, S.H.	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Pekanbaru	Bogor	Pekanbaru
151.	Patix Barumbun Tandirerung, S.H.	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Manokwari	Bogor	Manokwari
152.	John Wakerkwa	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Jayawijaya	Bogor	Jayawijaya
153.	Muhammad Rizal, S.H., M.H.	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Sorong	Bogor	Sorong
154.	Teuku Fauzi Al Fansuri, S.H.I.	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Aceh	Bogor	Aceh
155.	Rachmat Setyawan, S.H.	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Makassar	Bogor	Makassar
156.	Norasya Verdiana, S.H., M.Kn.	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Banjarmasin	Bogor	Banjarmasin
157.	Tamzil, S.H., M.Kn.	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Polewali Mandar	Bogor	Polewali Mandar
158.	Vizerd Yovan, S.H.	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Palu	Bogor	Palu
159.	Sergiud Wabiser, S.H.	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Nabire	Bogor	Nabire
160.	Samidu, S.H.	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Kendari	Bogor	Kendari
161.	Hanky Mustav Sabarata, S.H., M.H.	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Padang	Bogor	Padang
162.	Yohanes Kornelius Talan, S.H.	30 September s.d. 3 Oktober 2024	Kupang	Bogor	Kupang



Penjelasan Teknis Kegiatan

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	RANU WIJAYA	30-09-2024 14:08:42 WIB
	Novianto Rahmantlyo	30-09-2024 14:14:08 WIB
	Akbar Fuad Ali Salampessy	30-09-2024 14:17:59 WIB
	Andhika Yudha Perwira	30-09-2024 14:18:29 WIB
	KRESNA MAHESA ALKIRANA	30-09-2024 14:20:56 WIB
	Agatha A.Lidyawati Rafli	30-09-2024 14:22:54 WIB
	NORRIF'AT	30-09-2024 14:23:27 WIB
	Ali Akbar	30-09-2024 14:23:37 WIB
	Nadya Prita Gemala D	30-09-2024 14:25:46 WIB
0	Dormauli Silalahi	30-09-2024 14:26:37 WIB
1	Teuku Irmansyah Akbar	30-09-2024 14:26:49 WIB

IO	NAME	TTD
2	Nurhidayat Umacina	30-09-2024 14:27:23 WIB
3	Jimmy Himawan	30-09-2024 14:29:48 WIB
4	Azzuhri Al Bajuri	30-09-2024 14:31:14 WIB
5	Martadinata	30-09-2024 14:31:40 WIB
6	Afrianto	30-09-2024 14:31:56 WIB
7	Khairul Anwar Hasibuan	30-09-2024 14:35:59 WIB
8	Hendry Rachmadhani	30-09-2024 14:37:32 WIB
9	Yandri Sudarso	30-09-2024 14:37:40 WIB
0	Helmi Al Djufri	30-09-2024 14:38:04 WIB
1	Dudi Usman Sahupala	30-09-2024 14:38:25 WIB
2	ZULFAZLI	30-09-2024 14:39:37 WIB
3	H.M. Tulus Wahjuono	30-09-2024 14:39:51 WIB
4	Teuku Irmansyah Akbar	30-09-2024 14:42:01 WIB

ID	NAME	TTD
5	Naufal Fauzan	30-09-2024 14:42:01 WIB
6	MHD. Fadhli	30-09-2024 14:43:05 WIB
7	Muslim Haq. M.	30-09-2024 14:43:15 WIB
8	EMANUEL PASSAR	30-09-2024 14:43:22 WIB
9	Yulizar	30-09-2024 14:43:32 WIB
0	Ronald Antony Sirait	30-09-2024 14:43:43 WIB
1	Zaenal Fandi	30-09-2024 14:44:03 WIB
2	Riki Martim	30-09-2024 14:44:26 WIB
3	Dr. Anhar Nasution	30-09-2024 14:45:46 WIB
4	Ramidi	30-09-2024 14:50:15 WIB
5	Wildan	30-09-2024 14:50:54 WIB
6	Riki Asbi	30-09-2024 14:53:59 WIB
7	Rahman Pulani	30-09-2024 14:54:07 WIB

ID	NAME	TTD
8	Jayus	30-09-2024 14:54:14 WIB
9	Riki Sambora	30-09-2024 14:58:39 WIB
0	Andrian Ari Wibowo	30-09-2024 14:58:55 WIB
1	Muhammad Saddam	30-09-2024 14:59:01 WIB
2	Dikky Zulkarnain Hutagalung	30-09-2024 14:59:20 WIB
3	Anik Lestyorini	30-09-2024 14:59:21 WIB
4	Moh. Ridwan Limonu	30-09-2024 14:59:31 WIB
5	Hadi Pratama	30-09-2024 14:59:56 WIB
6	Cepi Hendrayani	30-09-2024 15:00:02 WIB
7	Sufiandi Ramadhan Dachi	30-09-2024 15:00:29 WIB
8	Mohammad Indra Kelana	30-09-2024 15:00:54 WIB
9	Suminarso	30-09-2024 15:03:01 WIB
0	Muh. Dirfan Akbar	30-09-2024 15:04:00 WIB

IO	NAME	TTD
1	Mundaris	30-09-2024 15:04:31 WIB
2	Muhammad Arnif	30-09-2024 15:04:38 WIB
3	Ismail Nganggon	30-09-2024 15:04:40 WIB
4	Muhammad Kualimin	30-09-2024 15:06:35 WIB
5	Arah Madani	30-09-2024 15:08:03 WIB
6	Ahmar Ihsan Rangkuti	30-09-2024 15:08:58 WIB
7	Gregorius Retas Daeng	30-09-2024 15:10:08 WIB
8	M. Khoiri	30-09-2024 15:11:09 WIB
9	Patric Barumbun Tandirerung	30-09-2024 15:11:53 WIB
0	Teguh Indarmaji	30-09-2024 15:14:38 WIB
1	Zainuddin	30-09-2024 15:17:26 WIB
2	Aristya Kusuma Dewi	30-09-2024 15:17:44 WIB
3	Anggi Aribowo	30-09-2024 15:18:08 WIB

ID	NAME	TTD
4	Sultan	30-09-2024 15:19:01 WIB
5	John Wakerkwa	30-09-2024 15:20:40 WIB
6	Kurniya Safitri	30-09-2024 15:21:14 WIB
7	Afriyandi Chair Samallo	30-09-2024 15:21:37 WIB
8	Revin Eldad Danny Rompas	30-09-2024 15:21:38 WIB
9	Heru Julianto	30-09-2024 15:24:28 WIB
0	Ismu Harkamil	30-09-2024 15:24:58 WIB
1	Ruli Margianto	30-09-2024 15:26:04 WIB
2	Arif Bayu Praminto	30-09-2024 15:26:54 WIB
3	Mansur Naga	30-09-2024 15:28:25 WIB
4	Nur Fahmi	30-09-2024 15:28:35 WIB
5	Jurait Lidawa	30-09-2024 15:29:09 WIB
6	Fahmi Ali Ramdhani	30-09-2024 15:29:17 WIB

IO	NAME	TTD
7	Seta Mahardika Caesar Wahyuono	30-09-2024 15:34:11 WIB
8	Deviyanti Dwiningsih	30-09-2024 15:37:16 WIB
9	Murtadha	30-09-2024 15:37:34 WIB
0	Budi Santoso	30-09-2024 15:38:13 WIB
1	Qodirun	30-09-2024 15:39:34 WIB
2	Rachmat Setyawan	30-09-2024 15:41:41 WIB
3	Bayu Mega Malela	30-09-2024 15:42:44 WIB
4	Muhajir	30-09-2024 15:45:13 WIB
5	Indra Permana	30-09-2024 15:48:42 WIB
6	Mustandar	30-09-2024 15:49:00 WIB
7	Muhammad Rizal	30-09-2024 15:49:34 WIB
8	Fathor Rosi	30-09-2024 15:49:40 WIB
9	Leksadharma Kengsiswoyo	30-09-2024 15:51:02 WIB

IO	NAME	TTD
0	Ifrianto S. Rahman	30-09-2024 15:54:09 WIB
1	Edius Pratama	30-09-2024 15:57:59 WIB
2	Vizerd Yovan	30-09-2024 16:10:03 WIB
3	Raisera Maulani Rahmadinda Wahyuono	30-09-2024 16:26:56 WIB
4	GS Anton Armya	30-09-2024 16:26:56 WIB
5	Aida Mardatillah	30-09-2024 16:30:23 WIB
6	Zainal Rachman	30-09-2024 16:31:04 WIB
7	Almetrizon	30-09-2024 16:31:36 WIB

BELUM ABSEN

IO	NAME	JABATAN / BAGIAN
	Yunus Adhi Prabowo	Kepala BHPPda
	Rahmawati Sukri	Anggota BHPP
	Turedo Sitindaon	Anggota BHPP
	Dicky patadjenu	Ketua BHPPda
	Tomi Yohana	Anggota BHPP
	Lahaya	Ketua BHPPda
	Ghufron	Wakil Sekretaris

Pembukaan Kegiatan

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Aida Mardatillah	30-09-2024 16:30:25 WIB
	Khairul Anwar Hasibuan	30-09-2024 16:30:37 WIB
	Jayus	30-09-2024 16:30:53 WIB
	Andrian Ari Wibowo	30-09-2024 16:30:55 WIB
	Ali Akbar	30-09-2024 16:30:56 WIB
	Ramidi	30-09-2024 16:30:56 WIB
	Afrianto	30-09-2024 16:30:59 WIB
	GS Anton Armya	30-09-2024 16:31:02 WIB
	Vizerd Yovan	30-09-2024 16:31:03 WIB
0	RANU WIJAYA	30-09-2024 16:31:08 WIB
1	Muhammad Rizal	30-09-2024 16:31:08 WIB

IO	NAME	TTD
2	Zainal Rachman	30-09-2024 16:31:08 WIB
3	KRESNA MAHESA ALKIRANA	30-09-2024 16:31:09 WIB
4	Evi Risna Yanti	30-09-2024 16:31:10 WIB
5	Helmi Al Djufri	30-09-2024 16:31:16 WIB
6	Riki Asbi	30-09-2024 16:31:17 WIB
7	Sergius Wabiser	30-09-2024 16:31:19 WIB
8	Mundaris	30-09-2024 16:31:24 WIB
9	Nadya Prita Gemala D	30-09-2024 16:31:26 WIB
0	Arah Madani	30-09-2024 16:31:29 WIB
1	Fadjri	30-09-2024 16:31:30 WIB
2	Tetin Fitri	30-09-2024 16:31:31 WIB
3	Muh. Dirfan Akbar	30-09-2024 16:31:33 WIB
4	Dormauli Silalahi	30-09-2024 16:31:33 WIB

IO	NAME	TTD
5	Sharon S. Simamora	30-09-2024 16:31:34 WIB
6	Nur Fahmi	30-09-2024 16:31:36 WIB
7	Ronald Antony Sirait	30-09-2024 16:31:38 WIB
8	Tamzil	30-09-2024 16:31:40 WIB
9	Andhika Yudha Perwira	30-09-2024 16:31:48 WIB
0	Muhajir	30-09-2024 16:31:48 WIB
1	H.M. Tulus Wahjuono	30-09-2024 16:31:48 WIB
2	Hendry Rachmadhani	30-09-2024 16:31:48 WIB
3	Lalu Rusdi	30-09-2024 16:31:56 WIB
4	Norasya Verdiana	30-09-2024 16:31:56 WIB
5	Wildan	30-09-2024 16:31:59 WIB
6	Muhammad Edi	30-09-2024 16:31:59 WIB
7	Qodirun	30-09-2024 16:31:59 WIB

IO	NAME	TTD
8	M. Khoiri	30-09-2024 16:32:01 WIB
9	Muhammad Iqbal Rozi	30-09-2024 16:32:06 WIB
0	Muhammad Saddam	30-09-2024 16:32:11 WIB
1	Muslim Haq. M.	30-09-2024 16:32:12 WIB
2	Sufiandi Ramadhan Dachi	30-09-2024 16:32:21 WIB
3	Rachmat Setyawan	30-09-2024 16:32:29 WIB
4	Teuku Irmansyah Akbar	30-09-2024 16:32:52 WIB
5	Nurhidayat Umacina	30-09-2024 16:32:55 WIB
6	Ismail Nganggon	30-09-2024 16:32:59 WIB
7	Moh. Ridwan Limonu	30-09-2024 16:33:05 WIB
8	Boyke Luthfiana Syahrir	30-09-2024 16:33:14 WIB
9	Seta Mahardika Caesar Wahyuono	30-09-2024 16:33:15 WIB
0	PUTRI SABRINA	30-09-2024 16:33:26 WIB

IO	NAME	TTD
1	Fathor Rosi	30-09-2024 16:33:31 WIB
2	Turedo Sitindaon	30-09-2024 16:33:45 WIB
3	Indra Permana	30-09-2024 16:33:47 WIB
4	Putri Oktaviani	30-09-2024 16:33:49 WIB
5	Annisa Diva Picaesa	30-09-2024 16:33:49 WIB
6	Mohammad Indra Kelana	30-09-2024 16:33:50 WIB
7	Fahmi Ali Ramdhani	30-09-2024 16:34:15 WIB
8	Martadinata	30-09-2024 16:34:31 WIB
9	EMANUEL PASSAR	30-09-2024 16:34:33 WIB
0	Ifrianto S. Rahman	30-09-2024 16:34:48 WIB
1	Leksadharna Kengsiswoyo	30-09-2024 16:34:49 WIB
2	Hanna Maria Manurung	30-09-2024 16:35:19 WIB
3	MHD. Fadhli	30-09-2024 16:35:43 WIB

IO	NAME	TTD
4	Muhammad Kualimin	30-09-2024 16:35:49 WIB
5	Ahmar Ihsan Rangkuti	30-09-2024 16:35:55 WIB
6	Dikky Zulkarnain Hutagalung	30-09-2024 16:35:58 WIB
7	Fahrudin Maloko	30-09-2024 16:36:01 WIB
8	Yunus Adhi Prabowo	30-09-2024 16:36:08 WIB
9	Dr. Anhar Nasution	30-09-2024 16:36:34 WIB
0	Murtadha	30-09-2024 16:36:39 WIB
1	Febriani	30-09-2024 16:38:25 WIB
2	Raisera Maulani Rahmadinda Wahyuono	30-09-2024 16:39:16 WIB
3	KHAIDIR,	30-09-2024 16:40:17 WIB
4	Ali Wiji Edhy	30-09-2024 16:40:46 WIB
5	Ismu Harkamil	30-09-2024 16:40:57 WIB
6	Surya Iman Wahyudi	30-09-2024 16:41:11 WIB

ID	NAME	TTD
7	Novianto Rahmantyo	30-09-2024 16:41:26 WIB
8	Teuku Irmansyah Akbar	30-09-2024 16:42:05 WIB
9	Fahrid Galitan	30-09-2024 16:42:22 WIB
0	Jimmy Himawan	30-09-2024 16:42:49 WIB
1	Muhammad Arnif	30-09-2024 16:43:10 WIB
2	Yohanes Kornelius Talan	30-09-2024 16:43:22 WIB
3	Joko Fitriani Prabowo	30-09-2024 16:44:13 WIB
4	AGUS SOFYAN	30-09-2024 16:44:14 WIB
5	Aksin	30-09-2024 16:44:15 WIB
6	John Wakerkwa	30-09-2024 16:44:39 WIB
7	Jakobis Siahaya	30-09-2024 16:45:07 WIB
8	Tomi Yohana	30-09-2024 16:45:38 WIB
9	Agus Sudarto	30-09-2024 16:45:40 WIB

IO	NAME	TTD
0	Revin Eldad Danny Rompas	30-09-2024 16:45:47 WIB
1	Teguh Indarmaji	30-09-2024 16:46:22 WIB
2	Gregorius Retas Daeng	30-09-2024 16:46:34 WIB
3	Agatha A.Lidyawati Rafli	30-09-2024 16:46:50 WIB
4	Muhammad Adamsyah Nasution	30-09-2024 16:46:58 WIB
5	Ismail Alim	30-09-2024 16:47:08 WIB
6	Zaenal Fandi	30-09-2024 16:49:15 WIB
7	Zainuddin	30-09-2024 16:50:35 WIB
8	Cepi Hendrayani	30-09-2024 16:51:53 WIB
9	Aristya Kusuma Dewi	30-09-2024 16:52:13 WIB
00	Muhammad Habibi	30-09-2024 16:52:17 WIB
01	Mulki	30-09-2024 16:53:38 WIB
02	Lahaya	30-09-2024 16:53:50 WIB

IO	NAME	TTD
03	Suminarso	30-09-2024 16:54:20 WIB
04	Anggi Aribowo	30-09-2024 16:58:41 WIB
05	Ruli Margianto	30-09-2024 16:59:13 WIB
06	Heru Julianto	30-09-2024 16:59:43 WIB
07	Sultan	30-09-2024 17:00:08 WIB
08	Deviyanti Dwiningsih	30-09-2024 17:00:08 WIB
09	Ricky Meliaky	30-09-2024 17:05:47 WIB
10	Afriyandi Chair Samallo	30-09-2024 17:08:58 WIB
11	Edius Pratama	30-09-2024 17:09:41 WIB
12	Riki Martim	30-09-2024 17:11:29 WIB
13	Dudi Usman Sahupala	30-09-2024 17:14:39 WIB
14	Mustandar	30-09-2024 17:14:42 WIB
15	AGUNG PURNOMO JATI	30-09-2024 17:21:57 WIB

IO	NAME	TTD
16	Ardyan	30-09-2024 17:36:37 WIB
17	Rahmawati Sukri	30-09-2024 17:40:27 WIB
18	Dicky patadjenu	30-09-2024 17:42:03 WIB
19	Anik Lestyorini	30-09-2024 17:49:13 WIB
20	Bansawan	30-09-2024 17:52:50 WIB
21	Riki Sambora	30-09-2024 17:52:52 WIB
22	Enry Ristanto	30-09-2024 17:55:52 WIB
23	Ghufron	30-09-2024 17:55:53 WIB
24	Andika Suci Rahmat	30-09-2024 17:56:50 WIB
25	Patrx Barumbun Tandirerung	30-09-2024 17:57:29 WIB
26	Priyono	30-09-2024 18:08:38 WIB

BELUM ABSEN

IO	NAME	JABATAN / BAGIAN
	Yandri Sudarso	Sekretaris 1 BHPP

Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	KHAIDIR,	30-09-2024 19:00:25 WIB
	RANU WIJAYA	30-09-2024 19:00:39 WIB
	Jakobis Siahaya	30-09-2024 19:02:17 WIB
	PUTRI SABRINA	30-09-2024 19:03:42 WIB
	Ronald Antony Sirait	30-09-2024 19:04:53 WIB
	Khairul Anwar Hasibuan	30-09-2024 19:05:47 WIB
	Vizerd Yovan	30-09-2024 19:07:01 WIB
	Arif Bayu Praminto	30-09-2024 19:07:15 WIB
	Ruli Margianto	30-09-2024 19:07:50 WIB
0	Ali Wiji Edhy	30-09-2024 19:08:23 WIB

IO	NAME	TTD
1	Tomi Yohana	30-09-2024 19:08:37 WIB
2	Martadinata	30-09-2024 19:08:40 WIB
3	Andhika Yudha Perwira	30-09-2024 19:08:45 WIB
4	Fahrudin Maloko	30-09-2024 19:08:50 WIB
5	Kurniya Safitri	30-09-2024 19:08:59 WIB
6	Fathor Rosi	30-09-2024 19:09:04 WIB
7	Revin Eldad Danny Rompas	30-09-2024 19:09:05 WIB
8	Raisera Maulani Rahmadinda Wahyuono	30-09-2024 19:09:11 WIB
9	M. Khoiri	30-09-2024 19:09:17 WIB
0	Budi Santoso	30-09-2024 19:09:18 WIB
1	Anik Lestyorini	30-09-2024 19:09:19 WIB
2	KRESNA MAHESA ALKIRANA	30-09-2024 19:09:23 WIB
3	Gregorius Retas Daeng	30-09-2024 19:09:25 WIB

IO	NAME	TTD
4	Bayu Mega Malela	30-09-2024 19:09:25 WIB
5	Andrian Ari Wibowo	30-09-2024 19:09:55 WIB
6	GS Anton Armya	30-09-2024 19:10:13 WIB
7	Mustandar	30-09-2024 19:10:15 WIB
8	Evi Risna Yanti	30-09-2024 19:10:20 WIB
9	Rachmat Setyawan	30-09-2024 19:10:26 WIB
0	Suartono	30-09-2024 19:10:41 WIB
1	Qodirun	30-09-2024 19:10:53 WIB
2	Teuku Irmansyah Akbar	30-09-2024 19:11:01 WIB
3	Ali Akbar	30-09-2024 19:11:05 WIB
4	Dormauli Silalahi	30-09-2024 19:11:21 WIB
5	Sharon S. Simamora	30-09-2024 19:11:24 WIB
6	AGUNG PURNOMO JATI	30-09-2024 19:11:28 WIB

IO	NAME	TTD
7	Muhammad Rizal	30-09-2024 19:11:34 WIB
8	Turedo Sitindaon	30-09-2024 19:11:34 WIB
9	Norasya Verdiana	30-09-2024 19:11:36 WIB
0	Cepi Hendrayani	30-09-2024 19:11:38 WIB
1	Hanky Mustav Sabarta	30-09-2024 19:11:40 WIB
2	Lalu Rusdi	30-09-2024 19:11:42 WIB
3	Jimmy Himawan	30-09-2024 19:11:49 WIB
4	Muhammad Iqbal Rozi	30-09-2024 19:12:02 WIB
5	Dikky Zulkarnain Hutagalung	30-09-2024 19:12:02 WIB
6	Dudi Usman Sahupala	30-09-2024 19:12:08 WIB
7	H.M. Tulus Wahjuono	30-09-2024 19:12:09 WIB
8	Indra Permana	30-09-2024 19:12:13 WIB
9	Annisa Diva Picaesa	30-09-2024 19:12:13 WIB

IO	NAME	TTD
0	Aida Mardatillah	30-09-2024 19:12:15 WIB
1	Hanna Maria Manurung	30-09-2024 19:12:17 WIB
2	Afrianto	30-09-2024 19:12:20 WIB
3	Agatha A.Lidyawati Rafli	30-09-2024 19:12:29 WIB
4	Syaiful Maarif	30-09-2024 19:12:42 WIB
5	Nadya Prita Gemala D	30-09-2024 19:12:56 WIB
6	Nurhidayat Umacina	30-09-2024 19:12:57 WIB
7	Zainal Rachman	30-09-2024 19:13:11 WIB
8	John Wakerkwa	30-09-2024 19:13:12 WIB
9	Murtadha	30-09-2024 19:13:16 WIB
0	Zaenal Fandi	30-09-2024 19:13:37 WIB
1	Ismu Harkamil	30-09-2024 19:13:45 WIB
2	Samidu	30-09-2024 19:13:53 WIB

IO	NAME	TTD
3	Arfi Bambani Amri	30-09-2024 19:13:57 WIB
4	Aksin	30-09-2024 19:15:10 WIB
5	EMANUEL PASSAR	30-09-2024 19:15:12 WIB
6	Patrx Barumbun Tandirerung	30-09-2024 19:15:12 WIB
7	Novianto Rahmantlyo	30-09-2024 19:16:06 WIB
8	Ricky Meliaky	30-09-2024 19:16:34 WIB
9	Moh. Ridwan Limonu	30-09-2024 19:16:35 WIB
0	Fadjri	30-09-2024 19:16:44 WIB
1	Almetrizon	30-09-2024 19:16:44 WIB
2	Aryono Putra	30-09-2024 19:16:45 WIB
3	DARUSSALAM	30-09-2024 19:16:45 WIB
4	Muhammad Habibi	30-09-2024 19:16:49 WIB
5	Riki Martim	30-09-2024 19:16:56 WIB

IO	NAME	TTD
6	MHD. Fadhli	30-09-2024 19:16:56 WIB
7	AGUS SOFYAN	30-09-2024 19:16:59 WIB
8	Leksadharna Kengsiswoyo	30-09-2024 19:17:17 WIB
9	Leksadharna Kengsiswoyo	30-09-2024 19:17:17 WIB
0	Aristya Kusuma Dewi	30-09-2024 19:17:21 WIB
1	Tamzil	30-09-2024 19:17:27 WIB
2	Akbar Brillianto	30-09-2024 19:17:38 WIB
3	Jurait Lidawa	30-09-2024 19:17:39 WIB
4	Yohanes Kornelius Talan	30-09-2024 19:17:39 WIB
5	Sultan	30-09-2024 19:17:42 WIB
6	Muh. Dirfan Akbar	30-09-2024 19:18:09 WIB
7	Agus Sudarto	30-09-2024 19:18:27 WIB
8	Muhammad Edi	30-09-2024 19:18:34 WIB

IO	NAME	TTD
9	Deviyanti Dwiningsih	30-09-2024 19:18:40 WIB
0	Wildan	30-09-2024 19:18:49 WIB
1	Ramidi	30-09-2024 19:18:56 WIB
2	Rahmawati Sukri	30-09-2024 19:19:01 WIB
3	Muslim Haq. M.	30-09-2024 19:19:03 WIB
4	Suminarso	30-09-2024 19:19:05 WIB
5	Hendry Rachmadhani	30-09-2024 19:19:14 WIB
6	Muhajir	30-09-2024 19:19:18 WIB
7	Zainuddin	30-09-2024 19:19:29 WIB
8	Ismail Alim	30-09-2024 19:19:32 WIB
9	Naufal Fauzan	30-09-2024 19:19:38 WIB
00	Ghufron	30-09-2024 19:19:39 WIB
01	Muhammad Muallimin	30-09-2024 19:20:01 WIB

IO	NAME	TTD
02	Boyke Luthfiana Syahrir	30-09-2024 19:20:15 WIB
03	Teguh Indarmaji	30-09-2024 19:20:30 WIB
04	Yandri Sudarso	30-09-2024 19:20:39 WIB
05	Rahman Pulani	30-09-2024 19:21:11 WIB
06	Rizal Hakiki	30-09-2024 19:21:19 WIB
07	Erwinsyah	30-09-2024 19:21:25 WIB
08	Fahrid Galitan	30-09-2024 19:21:26 WIB
09	Bansawan	30-09-2024 19:22:35 WIB
10	Surya Iman Wahyudi	30-09-2024 19:23:08 WIB
11	Ifrianto S. Rahman	30-09-2024 19:24:07 WIB
12	Riki Asbi	30-09-2024 19:24:17 WIB
13	Mohammad Indra Kelana	30-09-2024 19:24:26 WIB
14	Afriyandi Chair Samallo	30-09-2024 19:24:29 WIB

IO	NAME	TTD
15	Mundaris	30-09-2024 19:24:42 WIB
16	Muhammad Saddam	30-09-2024 19:24:53 WIB
17	Yulizar	30-09-2024 19:25:17 WIB
18	Dr. Anhar Nasution	30-09-2024 19:25:48 WIB
19	Dicky patadjenu	30-09-2024 19:25:51 WIB
20	Sufiandi Ramadhan Dachi	30-09-2024 19:26:00 WIB
21	Lahaya	30-09-2024 19:26:11 WIB
22	Febriani	30-09-2024 19:26:22 WIB
23	Tetin Fitri	30-09-2024 19:26:38 WIB
24	Dicky Armand Syach	30-09-2024 19:26:42 WIB
25	Putri Oktaviani	30-09-2024 19:27:06 WIB
26	Ahmar Ihsan Rangkuti	30-09-2024 19:27:28 WIB
27	Enry Ristanto	30-09-2024 19:27:49 WIB

IO	NAME	TTD
28	Ardyan	30-09-2024 19:28:21 WIB
29	Andika Suci Rahmat	30-09-2024 19:28:36 WIB
30	ZULFAZLI	30-09-2024 19:28:42 WIB
31	Mulki	30-09-2024 19:28:43 WIB
32	Rio Windarmoko	30-09-2024 19:29:04 WIB
33	Helmi Al Djufri	30-09-2024 19:29:29 WIB
34	Muhammad Arnif	30-09-2024 19:29:58 WIB
35	Riki Sambora	30-09-2024 19:31:54 WIB
36	Muhammad Adamsyah Nasution	30-09-2024 19:34:02 WIB
37	Azzuhri Al Bajuri	30-09-2024 19:35:43 WIB
38	Heru Julianto	30-09-2024 19:40:13 WIB
39	Priyono	30-09-2024 19:42:07 WIB
40	Anggi Aribowo	30-09-2024 19:42:08 WIB

IO	NAME	TTD
41	Joko Fitriani Prabowo	30-09-2024 19:42:12 WIB
42	Ismail Nganggon	30-09-2024 19:42:18 WIB
43	Hafizh Nur Rahman	30-09-2024 19:43:06 WIB
44	Arah Madani	30-09-2024 19:43:20 WIB
45	Fahmi Ali Ramdhani	30-09-2024 19:44:39 WIB
46	Seta Mahardika Caesar Wahyuono	30-09-2024 19:46:26 WIB
47	Jayus	30-09-2024 20:09:24 WIB
48	Nur Fahmi	30-09-2024 20:12:59 WIB
49	Hadi Pratama	30-09-2024 20:17:11 WIB
50	Yunus Adhi Prabowo	30-09-2024 20:56:19 WIB
51	Bayu Aditya Putra	30-09-2024 20:57:47 WIB
52	Agis Gamalutvianda	30-09-2024 21:01:56 WIB

BELUM ABSEN

Dinamika Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Martadinata	01-10-2024 07:30:09 WIB
	Nurhidayat Umacina	01-10-2024 07:31:38 WIB
	KHAIDIR,	01-10-2024 07:32:08 WIB
	Muhammad Saddam	01-10-2024 07:32:57 WIB
	Akbar Brillianto	01-10-2024 07:33:31 WIB
	Jakobis Siahaya	01-10-2024 07:33:36 WIB
	Andrian Ari Wibowo	01-10-2024 07:33:56 WIB
	Boyke Luthfiana Syahrir	01-10-2024 07:34:19 WIB
	John Wakerkwa	01-10-2024 07:36:01 WIB
0	KRESNA MAHESA ALKIRANA	01-10-2024 07:37:12 WIB
1	Ardyan	01-10-2024 07:37:15 WIB

IO	NAME	TTD
2	Rachmat Setyawan	01-10-2024 07:38:17 WIB
3	Samidu	01-10-2024 07:38:19 WIB
4	Tomi Yohana	01-10-2024 07:38:23 WIB
5	Ali Akbar	01-10-2024 07:38:40 WIB
6	Jimmy Himawan	01-10-2024 07:39:19 WIB
7	Surya Iman Wahyudi	01-10-2024 07:39:44 WIB
8	Evi Risna Yanti	01-10-2024 07:39:49 WIB
9	Agatha A.Lidyawati Rafli	01-10-2024 07:40:12 WIB
0	Afrianto	01-10-2024 07:40:39 WIB
1	Indra Permana	01-10-2024 07:40:53 WIB
2	Kurniya Safitri	01-10-2024 07:41:04 WIB
3	Revin Eldad Danny Rompas	01-10-2024 07:41:27 WIB
4	Nur Fahmi	01-10-2024 07:41:32 WIB

IO	NAME	TTD
5	Cepi Hendrayani	01-10-2024 07:41:53 WIB
6	Ismu Harkamil	01-10-2024 07:42:04 WIB
7	RANU WIJAYA	01-10-2024 07:42:08 WIB
8	Dormauli Silalahi	01-10-2024 07:42:08 WIB
9	Hadi Pratama	01-10-2024 07:42:09 WIB
0	Putri Oktaviani	01-10-2024 07:42:13 WIB
1	Almetrizon	01-10-2024 07:42:24 WIB
2	Gregorius Retas Daeng	01-10-2024 07:43:11 WIB
3	Norasya Verdiana	01-10-2024 07:43:17 WIB
4	Jurait Lidawa	01-10-2024 07:43:21 WIB
5	Zainuddin	01-10-2024 07:43:40 WIB
6	Muhammad Rizal	01-10-2024 07:43:44 WIB
7	GS Anton Armya	01-10-2024 07:43:44 WIB

IO	NAME	TTD
8	Muhammad Habibi	01-10-2024 07:44:29 WIB
9	Sharon S. Simamora	01-10-2024 07:44:40 WIB
0	Muhajir	01-10-2024 07:44:41 WIB
1	Agis Gamalutvianda	01-10-2024 07:44:42 WIB
2	Muhammad Edi	01-10-2024 07:44:47 WIB
3	MHD. Fadhli	01-10-2024 07:44:47 WIB
4	H.M. Tulus Wahjuono	01-10-2024 07:44:48 WIB
5	Khairul Anwar Hasibuan	01-10-2024 07:44:53 WIB
6	Anik Lestyorini	01-10-2024 07:45:27 WIB
7	Dikky Zulkarnain Hutagalung	01-10-2024 07:45:34 WIB
8	Riki Sambora	01-10-2024 07:46:07 WIB
9	Turedo Sitindaon	01-10-2024 07:46:07 WIB
0	Murtadha	01-10-2024 07:46:24 WIB

IO	NAME	TTD
1	Joko Fitriani Prabowo	01-10-2024 07:46:30 WIB
2	Aksin	01-10-2024 07:46:34 WIB
3	Raisera Maulani Rahmadinda Wahyuono	01-10-2024 07:47:13 WIB
4	M. Khoiri	01-10-2024 07:47:37 WIB
5	Yohanes Kornelius Talan	01-10-2024 07:47:38 WIB
6	Muslim Haq. M.	01-10-2024 07:48:02 WIB
7	Anggi Aribowo	01-10-2024 07:48:20 WIB
8	Nadya Prita Gemala D	01-10-2024 07:48:21 WIB
9	Arif Bayu Praminto	01-10-2024 07:48:28 WIB
0	Patric Barumbun Tandirerung	01-10-2024 07:48:29 WIB
1	Riki Martim	01-10-2024 07:48:50 WIB
2	Yulizar	01-10-2024 07:49:04 WIB
3	Ronald Antony Sirait	01-10-2024 07:49:22 WIB

IO	NAME	TTD
4	Heru Julianto	01-10-2024 07:49:26 WIB
5	Suminarso	01-10-2024 07:49:51 WIB
6	Mundaris	01-10-2024 07:49:53 WIB
7	Muhammad Kualimin	01-10-2024 07:49:55 WIB
8	Teguh Indarmaji	01-10-2024 07:49:56 WIB
9	Fahrudin Maloko	01-10-2024 07:50:04 WIB
0	Aida Mardatillah	01-10-2024 07:50:46 WIB
1	Ramidi	01-10-2024 07:50:58 WIB
2	Annisa Diva Picaesa	01-10-2024 07:51:14 WIB
3	Ahmar Ihsan Rangkuti	01-10-2024 07:51:17 WIB
4	Muhammad Arnif	01-10-2024 07:51:36 WIB
5	Fadjri	01-10-2024 07:52:16 WIB
6	Dudi Usman Sahupala	01-10-2024 07:52:21 WIB

ID	NAME	TTD
7	Hanna Maria Manurung	01-10-2024 07:52:23 WIB
8	Helmi Al Djufri	01-10-2024 07:52:38 WIB
9	Vizerd Yovan	01-10-2024 07:52:42 WIB
0	Aryono Putra	01-10-2024 07:52:47 WIB
1	Seta Mahardika Caesar Wahyuono	01-10-2024 07:52:56 WIB
2	AGUS SOFYAN	01-10-2024 07:53:06 WIB
3	Andhika Yudha Perwira	01-10-2024 07:53:07 WIB
4	AGUNG PURNOMO JATI	01-10-2024 07:53:20 WIB
5	Ismail Alim	01-10-2024 07:53:25 WIB
6	Teuku Irmansyah Akbar	01-10-2024 07:53:28 WIB
7	Ali Wiji Edhy	01-10-2024 07:53:41 WIB
8	Novianto Rahmantlyo	01-10-2024 07:54:57 WIB
9	Zaenal Fandi	01-10-2024 07:55:04 WIB

ID	NAME	TTD
0	Lalu Rusdi	01-10-2024 07:55:07 WIB
1	EMANUEL PASSAR	01-10-2024 07:55:15 WIB
2	Aristya Kusuma Dewi	01-10-2024 07:55:21 WIB
3	Mansur Naga	01-10-2024 07:55:45 WIB
4	Mohammad Indra Kelana	01-10-2024 07:55:51 WIB
5	Teuku Irmansyah Akbar	01-10-2024 07:56:19 WIB
6	Hanky Mustav Sabarta	01-10-2024 07:56:48 WIB
7	Suartono	01-10-2024 07:56:53 WIB
8	Suartono	01-10-2024 07:56:53 WIB
9	Ruli Margianto	01-10-2024 07:57:11 WIB
00	Moh. Ridwan Limonu	01-10-2024 07:57:30 WIB
01	Wildan	01-10-2024 07:58:24 WIB
02	Yandri Sudarso	01-10-2024 07:58:33 WIB

IO	NAME	TTD
03	Fahrid Galitan	01-10-2024 07:58:39 WIB
04	Ifrianto S. Rahman	01-10-2024 07:58:42 WIB
05	Arfi Bambani Amri	01-10-2024 07:59:34 WIB
06	Qodirun	01-10-2024 07:59:43 WIB
07	ZULFAZLI	01-10-2024 08:00:14 WIB
08	Muhammad Iqbal Rozi	01-10-2024 08:01:13 WIB
09	Muh. Dirfan Akbar	01-10-2024 08:01:16 WIB
10	Yunus Adhi Prabowo	01-10-2024 08:01:27 WIB
11	Dr. Anhar Nasution	01-10-2024 08:03:24 WIB
12	Afriyandi Chair Samallo	01-10-2024 08:03:37 WIB
13	Agus Sudarto	01-10-2024 08:03:53 WIB
14	Akbar Fuad Ali Salampessy	01-10-2024 08:04:13 WIB
15	Azzuhri Al Bajuri	01-10-2024 08:04:25 WIB

IO	NAME	TTD
16	Bayu Aditya Putra	01-10-2024 08:04:42 WIB
17	Rahmawati Sukri	01-10-2024 08:04:53 WIB
18	Ricky Meliaky	01-10-2024 08:05:48 WIB
19	Priyono	01-10-2024 08:05:57 WIB
20	Rio Windarmoko	01-10-2024 08:05:58 WIB
21	Mustandar	01-10-2024 08:06:03 WIB
22	Sergius Wabiser	01-10-2024 08:08:48 WIB
23	DARUSSALAM	01-10-2024 08:10:38 WIB
24	T. Jessica Novia Hermanto	01-10-2024 08:10:44 WIB
25	Tamzil	01-10-2024 08:11:24 WIB
26	Hafizh Nur Rahman	01-10-2024 08:13:38 WIB
27	Ismail Nganggon	01-10-2024 08:13:54 WIB
28	Hendry Rachmadhani	01-10-2024 08:14:04 WIB

IO	NAME	TTD
29	Ghufron	01-10-2024 08:14:46 WIB
30	Bayu Mega Malela	01-10-2024 08:14:52 WIB
31	Rizal Hakiki	01-10-2024 08:14:59 WIB
32	Dicky patadjenu	01-10-2024 08:15:10 WIB
33	Bansawan	01-10-2024 08:15:18 WIB
34	Dicky Armand Syach	01-10-2024 08:16:02 WIB
35	Tetin Fitri	01-10-2024 08:17:51 WIB
36	Riki Asbi	01-10-2024 08:19:50 WIB
37	Naufal Fauzan	01-10-2024 08:20:49 WIB
38	Muhammad Adamsyah Nasution	01-10-2024 08:20:54 WIB
39	Febriani	01-10-2024 08:24:02 WIB
40	PUTRI SABRINA	01-10-2024 08:24:50 WIB
41	Erwinsyah	01-10-2024 08:25:27 WIB

IO	NAME	TTD
42	Edius Pratama	01-10-2024 08:28:21 WIB
43	Arah Madani	01-10-2024 08:29:32 WIB
44	Zainal Rachman	01-10-2024 08:31:33 WIB
45	Lahaya	01-10-2024 08:32:24 WIB
46	Jayus	01-10-2024 08:42:08 WIB
47	Jayus	01-10-2024 08:42:09 WIB
48	Sufiandi Ramadhan Dachi	01-10-2024 08:49:10 WIB
49	Sufiandi Ramadhan Dachi	01-10-2024 08:49:17 WIB
50	Deviyanti Dwiningsih	01-10-2024 09:00:13 WIB
51	Fahmi Ali Ramdhani	01-10-2024 09:04:45 WIB
52	Rahman Pulani	01-10-2024 09:08:32 WIB
53	Sultan	01-10-2024 09:09:58 WIB
54	Teuku Fauzi Al Fansuri	01-10-2024 09:28:33 WIB

ID	NAME	TTD
55	Fathor Rosi	01-10-2024 09:37:49 WIB
56	Fathor Rosi	01-10-2024 09:37:51 WIB
57	Andika Suci Rahmat	01-10-2024 09:47:07 WIB
58	Leksadharna Kengsiswoyo	01-10-2024 09:47:17 WIB
59	Leksadharna Kengsiswoyo	01-10-2024 09:47:18 WIB

BELUM ABSEN

ID	NAME	JABATAN / BAGIAN
	NORRIF'AT	Wakil Ketua
	Budi Santoso	Bidang Bantuan Hukum & Advokasi
	Efrem Fangohoy	
	Mulki	Kesekretariatan
	RD Susanti Komalasari	
	Syaiful Maarif	Anggota BAHU DPP
	Suhendi	DPP PAN
	Enry Ristanto	Staff DPP

Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Martadinata	01-10-2024 10:00:14 WIB
	Ramidi	01-10-2024 10:04:38 WIB
	Agatha A.Lidyawati Rafli	01-10-2024 10:04:42 WIB
	Muslim Haq. M.	01-10-2024 10:04:55 WIB
	Muhammad Edi	01-10-2024 10:05:30 WIB
	Norasya Verdiana	01-10-2024 10:08:47 WIB
	KHAIDIR,	01-10-2024 10:09:10 WIB
	Andhika Yudha Perwira	01-10-2024 10:10:21 WIB
	Jakobis Siahaya	01-10-2024 10:11:55 WIB
0	Nurhidayat Umacina	01-10-2024 10:12:52 WIB
1	Jayus	01-10-2024 10:12:58 WIB

IO	NAME	TTD
2	Rachmat Setyawan	01-10-2024 10:14:07 WIB
3	Muhammad Kualimin	01-10-2024 10:14:19 WIB
4	Ifrianto S. Rahman	01-10-2024 10:16:08 WIB
5	Febriani	01-10-2024 10:16:25 WIB
6	Dormauli Silalahi	01-10-2024 10:16:45 WIB
7	Aristya Kusuma Dewi	01-10-2024 10:17:03 WIB
8	Putri Oktaviani	01-10-2024 10:17:26 WIB
9	Enry Ristanto	01-10-2024 10:17:49 WIB
0	EMANUEL PASSAR	01-10-2024 10:18:05 WIB
1	Yohanes Kornelius Talan	01-10-2024 10:19:08 WIB
2	Dicky patadjenu	01-10-2024 10:19:44 WIB
3	Ismu Harkamil	01-10-2024 10:20:53 WIB
4	Anggi Aribowo	01-10-2024 10:21:15 WIB

IO	NAME	TTD
5	Ismail Alim	01-10-2024 10:21:48 WIB
6	Hafizh Nur Rahman	01-10-2024 10:22:28 WIB
7	Turedo Sitindaon	01-10-2024 10:23:28 WIB
8	Sharon S. Simamora	01-10-2024 10:23:37 WIB
9	Andrian Ari Wibowo	01-10-2024 10:23:55 WIB
0	AGUS SOFYAN	01-10-2024 10:24:14 WIB
1	Moh. Ridwan Limonu	01-10-2024 10:24:30 WIB
2	Anik Lestyorini	01-10-2024 10:24:41 WIB
3	Hanky Mustav Sabarta	01-10-2024 10:25:53 WIB
4	Tomi Yohana	01-10-2024 10:25:59 WIB
5	Muh. Dirfan Akbar	01-10-2024 10:26:22 WIB
6	Lalu Rusdi	01-10-2024 10:26:34 WIB
7	Aksin	01-10-2024 10:26:39 WIB

ID	NAME	TTD
8	Hendry Rachmadhani	01-10-2024 10:27:00 WIB
9	RANU WIJAYA	01-10-2024 10:27:02 WIB
0	Cepi Hendrayani	01-10-2024 10:27:10 WIB
1	Fathor Rosi	01-10-2024 10:27:15 WIB
2	Zainal Rachman	01-10-2024 10:27:16 WIB
3	Jimmy Himawan	01-10-2024 10:27:34 WIB
4	Indra Permana	01-10-2024 10:27:49 WIB
5	Surya Iman Wahyudi	01-10-2024 10:27:52 WIB
6	MHD. Fadhli	01-10-2024 10:28:05 WIB
7	Raisera Maulani Rahmadinda Wahyuono	01-10-2024 10:28:43 WIB
8	Zaenal Fandi	01-10-2024 10:28:48 WIB
9	Boyke Luthfiana Syahrir	01-10-2024 10:29:00 WIB
0	Dikky Zulkarnain Hutagalung	01-10-2024 10:29:27 WIB

IO	NAME	TTD
1	Seta Mahardika Caesar Wahyuono	01-10-2024 10:29:27 WIB
2	M. Khoiri	01-10-2024 10:29:35 WIB
3	Kurniya Safitri	01-10-2024 10:29:37 WIB
4	Annisa Diva Picaesa	01-10-2024 10:29:43 WIB
5	Yunus Adhi Prabowo	01-10-2024 10:29:59 WIB
6	Evi Risna Yanti	01-10-2024 10:30:09 WIB
7	Aida Mardatillah	01-10-2024 10:30:15 WIB
8	Jurait Lidawa	01-10-2024 10:30:26 WIB
9	Riki Martim	01-10-2024 10:30:49 WIB
0	T. Jessica Novia Hermanto	01-10-2024 10:30:50 WIB
1	Aryono Putra	01-10-2024 10:30:52 WIB
2	Hanna Maria Manurung	01-10-2024 10:31:01 WIB
3	Novianto Rahmantlyo	01-10-2024 10:31:35 WIB

IO	NAME	TTD
4	Naufal Fauzan	01-10-2024 10:31:37 WIB
5	Akbar Fuad Ali Salampessy	01-10-2024 10:31:38 WIB
6	Qodirun	01-10-2024 10:31:40 WIB
7	Muhammad Iqbal Rozi	01-10-2024 10:31:50 WIB
8	Akbar Brillianto	01-10-2024 10:31:55 WIB
9	Suminarso	01-10-2024 10:32:01 WIB
0	Nur Fahmi	01-10-2024 10:32:10 WIB
1	Nadya Prita Gemala D	01-10-2024 10:32:13 WIB
2	Vizerd Yovan	01-10-2024 10:32:14 WIB
3	Afrianto	01-10-2024 10:32:21 WIB
4	Rizal Hakiki	01-10-2024 10:32:45 WIB
5	Yulizar	01-10-2024 10:32:49 WIB
6	Teuku Irmansyah Akbar	01-10-2024 10:32:49 WIB

IO	NAME	TTD
7	Riki Sambora	01-10-2024 10:32:53 WIB
8	Gregorius Retas Daeng	01-10-2024 10:32:54 WIB
9	Samidu	01-10-2024 10:33:04 WIB
0	Rahmawati Sukri	01-10-2024 10:33:04 WIB
1	Ronald Antony Sirait	01-10-2024 10:33:10 WIB
2	Revin Eldad Danny Rompas	01-10-2024 10:33:17 WIB
3	Patrx Barumbun Tandirerung	01-10-2024 10:33:24 WIB
4	DARUSSALAM	01-10-2024 10:33:35 WIB
5	Teguh Indarmaji	01-10-2024 10:34:27 WIB
6	Dr. Anhar Nasution	01-10-2024 10:34:29 WIB
7	Almetrizon	01-10-2024 10:34:44 WIB
8	KRESNA MAHESA ALKIRANA	01-10-2024 10:34:59 WIB
9	Ghufron	01-10-2024 10:35:28 WIB

IO	NAME	TTD
0	Sultan	01-10-2024 10:35:52 WIB
1	Khairul Anwar Hasibuan	01-10-2024 10:36:08 WIB
2	Afriyandi Chair Samallo	01-10-2024 10:36:17 WIB
3	Erwinsyah	01-10-2024 10:36:50 WIB
4	GS Anton Armya	01-10-2024 10:36:51 WIB
5	Mulki	01-10-2024 10:37:34 WIB
6	Arfi Bambani Amri	01-10-2024 10:37:34 WIB
7	Fahrudin Maloko	01-10-2024 10:37:35 WIB
8	Wildan	01-10-2024 10:38:09 WIB
9	Bansawan	01-10-2024 10:38:11 WIB
00	Zainuddin	01-10-2024 10:39:26 WIB
01	Riki Asbi	01-10-2024 10:39:38 WIB
02	AGUNG PURNOMO JATI	01-10-2024 10:39:40 WIB

ID	NAME	TTD
03	Teuku Irmansyah Akbar	01-10-2024 10:39:54 WIB
04	Ali Wiji Edhy	01-10-2024 10:40:37 WIB
05	Deviyanti Dwiningsih	01-10-2024 10:40:41 WIB
06	John Wakerkwa	01-10-2024 10:41:11 WIB
07	Agus Sudarto	01-10-2024 10:41:29 WIB
08	Muhammad Saddam	01-10-2024 10:41:39 WIB
09	Mundaris	01-10-2024 10:42:00 WIB
10	Muhammad Habibi	01-10-2024 10:42:13 WIB
11	Mustandar	01-10-2024 10:43:18 WIB
12	Andika Suci Rahmat	01-10-2024 10:44:16 WIB
13	Suartono	01-10-2024 10:44:24 WIB
14	Murtadha	01-10-2024 10:45:03 WIB
15	Tamzil	01-10-2024 10:45:36 WIB

IO	NAME	TTD
16	Priyono	01-10-2024 10:47:04 WIB
17	ZULFAZLI	01-10-2024 10:47:22 WIB
18	Syaiful Maarif	01-10-2024 10:50:50 WIB
19	Ismail Nganggon	01-10-2024 10:51:02 WIB
20	Heru Julianto	01-10-2024 10:53:20 WIB
21	PUTRI SABRINA	01-10-2024 10:55:00 WIB
22	Rio Windarmoko	01-10-2024 10:55:20 WIB
23	Muhammad Adamsyah Nasution	01-10-2024 10:59:38 WIB
24	Muhammad Rizal	01-10-2024 11:03:38 WIB
25	Sufiandi Ramadhan Dachi	01-10-2024 11:04:42 WIB
26	Joko Fitriani Prabowo	01-10-2024 11:08:02 WIB
27	Arah Madani	01-10-2024 11:09:43 WIB
28	Dicky Armand Syach	01-10-2024 11:11:48 WIB

IO	NAME	TTD
29	Ali Akbar	01-10-2024 11:11:49 WIB
30	Fahrid Galitan	01-10-2024 11:18:55 WIB
31	Fahmi Ali Ramdhani	01-10-2024 11:19:10 WIB
32	Azzuhri Al Bajuri	01-10-2024 11:20:54 WIB
33	Rahman Pulani	01-10-2024 11:21:59 WIB
34	Ardyan	01-10-2024 11:23:09 WIB
35	Lahaya	01-10-2024 11:24:37 WIB
36	Teuku Fauzi Al Fansuri	01-10-2024 11:25:52 WIB
37	Bayu Mega Malela	01-10-2024 11:28:07 WIB
38	Bayu Aditya Putra	01-10-2024 11:38:11 WIB
39	Dudi Usman Sahupala	01-10-2024 11:39:18 WIB
40	Arif Bayu Praminto	01-10-2024 11:39:51 WIB
41	Fadjri	01-10-2024 11:43:33 WIB

IO	NAME	TTD
42	RD Susanti Komalasari	01-10-2024 11:48:59 WIB
43	Muhajir	01-10-2024 11:50:21 WIB
44	Tetin Fitri	01-10-2024 11:58:53 WIB
45	Agis Gamalutvianda	01-10-2024 12:05:09 WIB
46	Muhammad Arnif	01-10-2024 12:07:25 WIB
47	H.M. Tulus Wahjuono	01-10-2024 12:07:58 WIB
48	Sergius Wabiser	01-10-2024 12:13:36 WIB

BELUM ABSEN

IO	NAME	JABATAN / BAGIAN
	Yandri Sudarso	Sekretaris 1 BHPP
	NORRIF'AT	Wakil Ketua
	Mansur Naga	Biro Hukum
	Helmi Al Djufri	THAP Pusat
	Hadi Pratama	Sekretaris Bidang Polhukam DPW PKS Bengkulu
	Ruli Margianto	Biro Advokasi DPP PKS
	Edius Pratama	THAP Pusat
	Ricky Meliaky	Anggota BAHU DPP
	Mohammad Indra Kelana	Koordinator THAP Wilayah Kepulauan Riau

Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	KHAIDIR,	01-10-2024 13:30:04 WIB
	Norasya Verdiana	01-10-2024 13:30:05 WIB
	Afrianto	01-10-2024 13:30:08 WIB
	Martadinata	01-10-2024 13:30:09 WIB
	Andrian Ari Wibowo	01-10-2024 13:30:29 WIB
	Jakobis Siahaya	01-10-2024 13:30:36 WIB
	RANU WIJAYA	01-10-2024 13:30:45 WIB
	Agatha A.Lidyawati Rafli	01-10-2024 13:30:54 WIB
	Ronald Antony Sirait	01-10-2024 13:31:06 WIB
0	Nurhidayat Umacina	01-10-2024 13:31:11 WIB

IO	NAME	TTD
1	Anik Lestyorini	01-10-2024 13:31:20 WIB
2	Dormauli Silalahi	01-10-2024 13:31:21 WIB
3	Rachmat Setyawan	01-10-2024 13:31:35 WIB
4	M. Khoiri	01-10-2024 13:31:39 WIB
5	Yunus Adhi Prabowo	01-10-2024 13:31:45 WIB
6	Aksin	01-10-2024 13:31:59 WIB
7	Tomi Yohana	01-10-2024 13:32:00 WIB
8	Surya Iman Wahyudi	01-10-2024 13:32:16 WIB
9	KRESNA MAHESA ALKIRANA	01-10-2024 13:32:21 WIB
0	Muhammad Rizal	01-10-2024 13:32:22 WIB
1	Muhammad Edi	01-10-2024 13:32:29 WIB
2	Akbar Brillianto	01-10-2024 13:32:36 WIB
3	Ali Akbar	01-10-2024 13:32:45 WIB

ID	NAME	TTD
4	Cepi Hendrayani	01-10-2024 13:32:52 WIB
5	Muslim Haq. M.	01-10-2024 13:33:03 WIB
6	Turedo Sitindaon	01-10-2024 13:33:30 WIB
7	John Wakerkwa	01-10-2024 13:33:50 WIB
8	GS Anton Armya	01-10-2024 13:33:53 WIB
9	Bayu Mega Malela	01-10-2024 13:34:00 WIB
0	Riki Asbi	01-10-2024 13:34:02 WIB
1	Qodirun	01-10-2024 13:34:03 WIB
2	Revin Eldad Danny Rompas	01-10-2024 13:34:27 WIB
3	Fahrudin Maloko	01-10-2024 13:34:27 WIB
4	Novianto Rahmantyo	01-10-2024 13:34:32 WIB
5	EMANUEL PASSAR	01-10-2024 13:34:41 WIB
6	H.M. Tulus Wahjuono	01-10-2024 13:34:45 WIB

IO	NAME	TTD
7	Zainuddin	01-10-2024 13:35:05 WIB
8	Kurniya Safitri	01-10-2024 13:35:08 WIB
9	Teuku Fauzi Al Fansuri	01-10-2024 13:35:29 WIB
0	Fahrid Galitan	01-10-2024 13:36:02 WIB
1	Fathor Rosi	01-10-2024 13:36:25 WIB
2	Muhammad Kualimin	01-10-2024 13:36:42 WIB
3	Murtadha	01-10-2024 13:36:57 WIB
4	DARUSSALAM	01-10-2024 13:37:01 WIB
5	Ismail Alim	01-10-2024 13:37:17 WIB
6	MHD. Fadhli	01-10-2024 13:37:23 WIB
7	Vizerd Yovan	01-10-2024 13:37:24 WIB
8	Dikky Zulkarnain Hutagalung	01-10-2024 13:37:37 WIB
9	Jurait Lidawa	01-10-2024 13:37:46 WIB

IO	NAME	TTD
0	Patric Barumbun Tandirerung	01-10-2024 13:37:46 WIB
1	Andhika Yudha Perwira	01-10-2024 13:38:08 WIB
2	Joko Fitriani Prabowo	01-10-2024 13:38:08 WIB
3	Rizal Hakiki	01-10-2024 13:38:11 WIB
4	Boyke Luthfiana Syahrir	01-10-2024 13:38:13 WIB
5	Suminarso	01-10-2024 13:38:20 WIB
6	Yulizar	01-10-2024 13:38:22 WIB
7	Jayus	01-10-2024 13:38:34 WIB
8	Jayus	01-10-2024 13:38:34 WIB
9	Muhammad Habibi	01-10-2024 13:38:43 WIB
0	Samidu	01-10-2024 13:38:51 WIB
1	Mundaris	01-10-2024 13:39:01 WIB
2	Lalu Rusdi	01-10-2024 13:39:03 WIB

IO	NAME	TTD
3	Muhammad Saddam	01-10-2024 13:39:12 WIB
4	T. Jessica Novia Hermanto	01-10-2024 13:39:34 WIB
5	Ismu Harkamil	01-10-2024 13:39:46 WIB
6	Sharon S. Simamora	01-10-2024 13:39:50 WIB
7	Teguh Indarmaji	01-10-2024 13:40:03 WIB
8	Nur Fahmi	01-10-2024 13:40:03 WIB
9	Agis Gamalutvianda	01-10-2024 13:40:20 WIB
0	Muhammad Arnif	01-10-2024 13:40:25 WIB
1	Muh. Dirfan Akbar	01-10-2024 13:40:37 WIB
2	Gregorius Retas Daeng	01-10-2024 13:40:50 WIB
3	AGUS SOFYAN	01-10-2024 13:40:57 WIB
4	Sergius Wabiser	01-10-2024 13:40:58 WIB
5	Raisera Maulani Rahmadinda Wahyuono	01-10-2024 13:41:05 WIB

IO	NAME	TTD
6	Zaenal Fandi	01-10-2024 13:41:21 WIB
7	Almetrizon	01-10-2024 13:41:30 WIB
8	Hadi Pratama	01-10-2024 13:41:31 WIB
9	Muhajir	01-10-2024 13:41:37 WIB
0	Riki Sambora	01-10-2024 13:41:44 WIB
1	Ramidi	01-10-2024 13:41:47 WIB
2	Annisa Diva Picaesa	01-10-2024 13:42:08 WIB
3	Khairul Anwar Hasibuan	01-10-2024 13:42:26 WIB
4	Bayu Aditya Putra	01-10-2024 13:42:36 WIB
5	Heru Julianto	01-10-2024 13:43:03 WIB
6	Aida Mardatillah	01-10-2024 13:43:25 WIB
7	Dudi Usman Sahupala	01-10-2024 13:43:41 WIB
8	Riki Martim	01-10-2024 13:43:54 WIB

IO	NAME	TTD
9	Evi Risna Yanti	01-10-2024 13:44:01 WIB
0	Indra Permana	01-10-2024 13:44:06 WIB
1	Suartono	01-10-2024 13:44:11 WIB
2	Hanna Maria Manurung	01-10-2024 13:44:12 WIB
3	Afriyandi Chair Samallo	01-10-2024 13:44:19 WIB
4	Aryono Putra	01-10-2024 13:44:26 WIB
5	Wildan	01-10-2024 13:44:46 WIB
6	Yohanes Kornelius Talan	01-10-2024 13:44:49 WIB
7	Teuku Irmansyah Akbar	01-10-2024 13:45:30 WIB
8	Muhammad Iqbal Rozi	01-10-2024 13:45:39 WIB
9	Naufal Fauzan	01-10-2024 13:45:47 WIB
00	Yandri Sudarso	01-10-2024 13:46:03 WIB
01	Aristya Kusuma Dewi	01-10-2024 13:46:19 WIB

ID	NAME	TTD
02	Sultan	01-10-2024 13:47:02 WIB
03	Lahaya	01-10-2024 13:47:06 WIB
04	Lahaya	01-10-2024 13:47:07 WIB
05	Ghufron	01-10-2024 13:47:17 WIB
06	Fadjri	01-10-2024 13:47:34 WIB
07	Lahaya	01-10-2024 13:47:35 WIB
08	Tamzil	01-10-2024 13:47:47 WIB
09	Lahaya	01-10-2024 13:48:07 WIB
10	Nadya Prita Gemala D	01-10-2024 13:48:19 WIB
11	ZULFAZLI	01-10-2024 13:49:36 WIB
12	PUTRI SABRINA	01-10-2024 13:49:40 WIB
13	Hafizh Nur Rahman	01-10-2024 13:50:04 WIB
14	Rahman Pulani	01-10-2024 13:50:10 WIB

IO	NAME	TTD
15	Bansawan	01-10-2024 13:51:09 WIB
16	Azzuhri Al Bajuri	01-10-2024 13:51:27 WIB
17	Ardyan	01-10-2024 13:51:29 WIB
18	Agus Sudarto	01-10-2024 13:51:52 WIB
19	Erwinsyah	01-10-2024 13:52:04 WIB
20	Ifrianto S. Rahman	01-10-2024 13:52:28 WIB
21	Mulki	01-10-2024 13:54:49 WIB
22	Edius Pratama	01-10-2024 13:55:19 WIB
23	Dr. Anhar Nasution	01-10-2024 13:55:22 WIB
24	Muhammad Adamsyah Nasution	01-10-2024 13:55:50 WIB
25	Priyono	01-10-2024 13:57:26 WIB
26	Sufiandi Ramadhan Dachi	01-10-2024 13:57:53 WIB
27	Arah Madani	01-10-2024 14:01:03 WIB

IO	NAME	TTD
28	Dicky patadjenu	01-10-2024 14:02:01 WIB
29	Anggi Aribowo	01-10-2024 14:03:17 WIB
30	Dicky Armand Syach	01-10-2024 14:03:26 WIB
31	Ismail Nganggon	01-10-2024 14:03:31 WIB
32	Rahmawati Sukri	01-10-2024 14:03:42 WIB
33	Deviyanti Dwiningsih	01-10-2024 14:04:10 WIB
34	Mansur Naga	01-10-2024 14:04:15 WIB
35	RD Susanti Komalasari	01-10-2024 14:06:38 WIB
36	Helmi Al Djufri	01-10-2024 14:09:18 WIB
37	Ruli Margianto	01-10-2024 14:09:55 WIB
38	Mohammad Indra Kelana	01-10-2024 14:12:11 WIB
39	Fahmi Ali Ramdhani	01-10-2024 14:13:12 WIB
40	Zainal Rachman	01-10-2024 14:13:32 WIB

IO	NAME	TTD
41	Rio Windarmoko	01-10-2024 14:16:52 WIB
42	Hendry Rachmadhani	01-10-2024 14:19:43 WIB
43	Putri Oktaviani	01-10-2024 14:20:17 WIB
44	Enry Ristanto	01-10-2024 14:20:41 WIB
45	Akbar Fuad Ali Salampessy	01-10-2024 14:21:54 WIB
46	Arfi Bambani Amri	01-10-2024 14:27:19 WIB
47	Moh. Ridwan Limonu	01-10-2024 14:28:29 WIB
48	AGUNG PURNOMO JATI	01-10-2024 14:32:54 WIB
49	Febriani	01-10-2024 14:37:31 WIB
50	Ahmar Ihsan Rangkuti	01-10-2024 14:48:20 WIB
51	Seta Mahardika Caesar Wahyuono	01-10-2024 14:57:57 WIB
52	Jimmy Himawan	01-10-2024 14:57:59 WIB
53	Arif Bayu Praminto	01-10-2024 15:00:11 WIB

IO	NAME	TTD
54	Ali Wiji Edhy	01-10-2024 15:08:03 WIB
55	Hanky Mustav Sabarta	01-10-2024 15:26:34 WIB
56	Budi Santoso	01-10-2024 15:33:14 WIB
57	Mustandar	01-10-2024 15:38:43 WIB

BELUM ABSEN

IO	NAME	JABATAN / BAGIAN
	NORRIF'AT	Wakil Ketua
	Andika Suci Rahmat	STAFF DPP
	Tetin Fitri	Bendum
	Ricky Meliaky	Anggota BAHU DPP
	Efrem Fangohoy	
	Leksadharma Kengsiswoyo	Kepala BHPPda
	Syaiful Maarif	Anggota BAHU DPP
	Suhendi	DPP PAN

Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
	Martadinata	02-10-2024 08:30:06 WIB
	Agatha A.Lidyawati Rafli	02-10-2024 08:30:42 WIB
	Evi Risna Yanti	02-10-2024 08:30:45 WIB
	Dormauli Silalahi	02-10-2024 08:31:01 WIB
	KHAIDIR,	02-10-2024 08:32:21 WIB
	Nurhidayat Umacina	02-10-2024 08:33:04 WIB
	Jimmy Himawan	02-10-2024 08:34:07 WIB
	Zainuddin	02-10-2024 08:34:20 WIB
	Ali Akbar	02-10-2024 08:34:40 WIB
0	Nur Fahmi	02-10-2024 08:34:45 WIB

IO	NAME	TTD
1	Norasya Verdiana	02-10-2024 08:34:47 WIB
2	Muhammad Rizal	02-10-2024 08:35:23 WIB
3	Muhammad Kualimin	02-10-2024 08:35:28 WIB
4	Cepi Hendrayani	02-10-2024 08:35:33 WIB
5	Muslim Haq. M.	02-10-2024 08:35:39 WIB
6	Tomi Yohana	02-10-2024 08:35:51 WIB
7	Afianto	02-10-2024 08:36:19 WIB
8	Teguh Indarmaji	02-10-2024 08:36:48 WIB
9	KRESNA MAHESA ALKIRANA	02-10-2024 08:36:51 WIB
0	Andrian Ari Wibowo	02-10-2024 08:37:30 WIB
1	Ronald Antony Sirait	02-10-2024 08:38:17 WIB
2	Aksin	02-10-2024 08:38:18 WIB
3	Muhammad Edi	02-10-2024 08:38:45 WIB

IO	NAME	TTD
4	Qodirun	02-10-2024 08:38:57 WIB
5	Kurniya Safitri	02-10-2024 08:39:15 WIB
6	Agis Gamalutvianda	02-10-2024 08:39:24 WIB
7	Teuku Irmansyah Akbar	02-10-2024 08:39:33 WIB
8	M. Khoiri	02-10-2024 08:39:36 WIB
9	Riki Martim	02-10-2024 08:39:40 WIB
0	Rachmat Setyawan	02-10-2024 08:39:44 WIB
1	Hanky Mustav Sabarta	02-10-2024 08:39:45 WIB
2	Turedo Sitindaon	02-10-2024 08:39:57 WIB
3	Anik Lestyorini	02-10-2024 08:40:31 WIB
4	Arfi Bambani Amri	02-10-2024 08:40:32 WIB
5	John Wakerkwa	02-10-2024 08:40:37 WIB
6	Riki Asbi	02-10-2024 08:40:56 WIB

IO	NAME	TTD
7	Vizerd Yovan	02-10-2024 08:41:10 WIB
8	RANU WIJAYA	02-10-2024 08:41:13 WIB
9	Novianto Rahmantyo	02-10-2024 08:41:18 WIB
0	Lalu Rusdi	02-10-2024 08:41:19 WIB
1	Zaenal Fandi	02-10-2024 08:41:21 WIB
2	Moh. Ridwan Limonu	02-10-2024 08:41:27 WIB
3	Moh. Ridwan Limonu	02-10-2024 08:41:28 WIB
4	Dudi Usman Sahupala	02-10-2024 08:41:58 WIB
5	Sharon S. Simamora	02-10-2024 08:42:21 WIB
6	Mansur Naga	02-10-2024 08:42:28 WIB
7	Raisera Maulani Rahmadinda Wahyuono	02-10-2024 08:42:29 WIB
8	Almetrizon	02-10-2024 08:42:38 WIB
9	Priyono	02-10-2024 08:42:52 WIB

IO	NAME	TTD
0	DARUSSALAM	02-10-2024 08:43:22 WIB
1	Muhajir	02-10-2024 08:43:34 WIB
2	Fahrudin Maloko	02-10-2024 08:43:35 WIB
3	EMANUEL PASSAR	02-10-2024 08:44:08 WIB
4	Rahmawati Sukri	02-10-2024 08:44:09 WIB
5	Sergius Wabiser	02-10-2024 08:44:14 WIB
6	Muhammad Saddam	02-10-2024 08:44:31 WIB
7	Jayus	02-10-2024 08:44:32 WIB
8	Jayus	02-10-2024 08:44:32 WIB
9	Gregorius Retas Daeng	02-10-2024 08:44:32 WIB
0	Muhammad Iqbal Rozi	02-10-2024 08:44:39 WIB
1	Fahrid Galitan	02-10-2024 08:44:56 WIB
2	Mundaris	02-10-2024 08:44:57 WIB

IO	NAME	TTD
3	Suartono	02-10-2024 08:45:21 WIB
4	Samidu	02-10-2024 08:45:26 WIB
5	Indra Permana	02-10-2024 08:45:40 WIB
6	Wildan	02-10-2024 08:46:17 WIB
7	Dicky patadjenu	02-10-2024 08:46:20 WIB
8	Sultan	02-10-2024 08:46:30 WIB
9	Ramidi	02-10-2024 08:46:30 WIB
0	ZULFAZLI	02-10-2024 08:46:31 WIB
1	Andhika Yudha Perwira	02-10-2024 08:46:56 WIB
2	Aristya Kusuma Dewi	02-10-2024 08:47:00 WIB
3	Ruli Margianto	02-10-2024 08:47:26 WIB
4	Deviyanti Dwiningsih	02-10-2024 08:47:47 WIB
5	Bansawan	02-10-2024 08:47:48 WIB

IO	NAME	TTD
6	Aryono Putra	02-10-2024 08:48:11 WIB
7	Surya Iman Wahyudi	02-10-2024 08:48:21 WIB
8	Murtadha	02-10-2024 08:48:40 WIB
9	Suminarso	02-10-2024 08:49:15 WIB
0	Jakobis Siahaya	02-10-2024 08:49:16 WIB
1	Nadya Prita Gemala D	02-10-2024 08:49:16 WIB
2	Muhammad Habibi	02-10-2024 08:49:24 WIB
3	Azzuhri Al Bajuri	02-10-2024 08:49:30 WIB
4	Dikky Zulkarnain Hutagalung	02-10-2024 08:49:36 WIB
5	Muhammad Arnif	02-10-2024 08:49:38 WIB
6	Arah Madani	02-10-2024 08:49:49 WIB
7	Fathor Rosi	02-10-2024 08:49:59 WIB
8	Akbar Brillianto	02-10-2024 08:50:39 WIB

IO	NAME	TTD
9	MHD. Fadhli	02-10-2024 08:50:41 WIB
0	Aida Mardatillah	02-10-2024 08:52:38 WIB
1	Joko Fitriani Prabowo	02-10-2024 08:53:00 WIB
2	Heru Julianto	02-10-2024 08:53:45 WIB
3	T. Jessica Novia Hermanto	02-10-2024 08:54:05 WIB
4	Hanna Maria Manurung	02-10-2024 08:54:08 WIB
5	Agus Sudarto	02-10-2024 08:54:20 WIB
6	Muhammad Adamsyah Nasution	02-10-2024 08:54:23 WIB
7	Ismail Alim	02-10-2024 08:54:50 WIB
8	Boyke Luthfiana Syahrir	02-10-2024 08:54:52 WIB
9	AGUS SOFYAN	02-10-2024 08:55:04 WIB
00	Hendry Rachmadhani	02-10-2024 08:55:16 WIB
01	Jurait Lidawa	02-10-2024 08:55:28 WIB

IO	NAME	TTD
02	Ali Wiji Edhy	02-10-2024 08:55:34 WIB
03	Afriyandi Chair Samallo	02-10-2024 08:55:43 WIB
04	Annisa Diva Picaesa	02-10-2024 08:55:44 WIB
05	Mulki	02-10-2024 08:55:54 WIB
06	Naufal Fauzan	02-10-2024 08:56:04 WIB
07	Yandri Sudarso	02-10-2024 08:56:08 WIB
08	Mohammad Indra Kelana	02-10-2024 08:56:49 WIB
09	Hadi Pratama	02-10-2024 08:57:11 WIB
10	RD Susanti Komalasari	02-10-2024 08:57:33 WIB
11	Muh. Dirfan Akbar	02-10-2024 08:57:41 WIB
12	Ismail Nganggon	02-10-2024 08:58:42 WIB
13	Riki Sambora	02-10-2024 08:59:04 WIB
14	Yunus Adhi Prabowo	02-10-2024 08:59:09 WIB

IO	NAME	TTD
15	Ismu Harkamil	02-10-2024 08:59:10 WIB
16	H.M. Tulus Wahjuono	02-10-2024 08:59:19 WIB
17	Arif Bayu Praminto	02-10-2024 08:59:57 WIB
18	Yohanes Kornelius Talan	02-10-2024 09:00:04 WIB
19	Patric Barumbun Tandirerung	02-10-2024 09:00:16 WIB
20	Yulizar	02-10-2024 09:00:31 WIB
21	Dr. Anhar Nasution	02-10-2024 09:01:02 WIB
22	Ahmar Ihsan Rangkuti	02-10-2024 09:01:11 WIB
23	Khairul Anwar Hasibuan	02-10-2024 09:01:14 WIB
24	Ifrianto S. Rahman	02-10-2024 09:01:56 WIB
25	Tamzil	02-10-2024 09:02:21 WIB
26	Tamzil	02-10-2024 09:02:21 WIB
27	Rahman Pulani	02-10-2024 09:04:29 WIB

IO	NAME	TTD
28	Teuku Fauzi Al Fansuri	02-10-2024 09:05:07 WIB
29	Rizal Hakiki	02-10-2024 09:05:10 WIB
30	Rio Windarmoko	02-10-2024 09:06:02 WIB
31	Revin Eldad Danny Rompas	02-10-2024 09:08:03 WIB
32	Ricky Meliaky	02-10-2024 09:09:05 WIB
33	Bayu Aditya Putra	02-10-2024 09:09:51 WIB
34	Ghufron	02-10-2024 09:11:00 WIB
35	Erwinsyah	02-10-2024 09:11:16 WIB
36	Dicky Armand Syach	02-10-2024 09:12:23 WIB
37	Akbar Fuad Ali Salampessy	02-10-2024 09:14:04 WIB
38	Bayu Mega Malela	02-10-2024 09:15:48 WIB
39	Seta Mahardika Caesar Wahyuono	02-10-2024 09:16:20 WIB
40	Sufiandi Ramadhan Dachi	02-10-2024 09:16:44 WIB

ID	NAME	TTD
41	Zainal Rachman	02-10-2024 09:19:36 WIB
42	Fahmi Ali Ramdhani	02-10-2024 09:22:31 WIB
43	Budi Santoso	02-10-2024 09:23:08 WIB
44	Mustandar	02-10-2024 09:25:03 WIB
45	Hafizh Nur Rahman	02-10-2024 09:25:20 WIB
46	Suhendi	02-10-2024 09:26:42 WIB
47	Tetin Fitri	02-10-2024 09:33:23 WIB
48	Edius Pratama	02-10-2024 09:34:30 WIB
49	Lahaya	02-10-2024 09:38:31 WIB
50	Anggi Aribowo	02-10-2024 09:39:59 WIB
51	Helmi Al Djufri	02-10-2024 09:41:17 WIB
52	GS Anton Armya	02-10-2024 09:53:39 WIB
53	AGUNG PURNOMO JATI	02-10-2024 09:59:27 WIB

IO	NAME	TTD
54	Ardyan	02-10-2024 10:05:22 WIB
55	PUTRI SABRINA	02-10-2024 10:13:44 WIB
56	Febriani	02-10-2024 10:14:08 WIB
57	Putri Oktaviani	02-10-2024 10:14:34 WIB
58	Enry Ristanto	02-10-2024 10:15:29 WIB
59	Andika Suci Rahmat	02-10-2024 10:16:32 WIB
60	Andika Suci Rahmat	02-10-2024 10:16:33 WIB

BELUM ABSEN

IO	NAME	JABATAN / BAGIAN
	NORRIF'AT	Wakil Ketua
	Efrem Fangohoy	
	Leksadharna Kengsiswoyo	Kepala BHPPda
	Syaiful Maarif	Anggota BAHU DPP
	Fadjri	Ketua Departemen Hukum

Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
	Boyke Luthfiana Syahrir	02-10-2024 10:00:19 WIB
	Teuku Fauzi Al Fansuri	02-10-2024 10:00:28 WIB
	Nurhidayat Umacina	02-10-2024 10:01:11 WIB
	Agatha A.Lidyawati Rafli	02-10-2024 10:01:20 WIB
	Hanna Maria Manurung	02-10-2024 10:02:00 WIB
	Dormauli Silalahi	02-10-2024 10:02:22 WIB
	Mundaris	02-10-2024 10:02:31 WIB
	Aida Mardatillah	02-10-2024 10:02:45 WIB
	Norasya Verdiana	02-10-2024 10:02:53 WIB
0	ZULFAZLI	02-10-2024 10:03:02 WIB

IO	NAME	TTD
1	Riki Asbi	02-10-2024 10:03:04 WIB
2	Muhammad Rizal	02-10-2024 10:03:17 WIB
3	KHAIDIR,	02-10-2024 10:04:34 WIB
4	Martadinata	02-10-2024 10:04:35 WIB
5	Qodirun	02-10-2024 10:04:45 WIB
6	Dikky Zulkarnain Hutagalung	02-10-2024 10:04:46 WIB
7	Dicky patadjenu	02-10-2024 10:04:46 WIB
8	Zainuddin	02-10-2024 10:04:54 WIB
9	Wildan	02-10-2024 10:04:58 WIB
0	RANU WIJAYA	02-10-2024 10:04:59 WIB
1	Aristya Kusuma Dewi	02-10-2024 10:05:03 WIB
2	Ruli Margianto	02-10-2024 10:05:18 WIB
3	Helmi Al Djufri	02-10-2024 10:05:20 WIB

IO	NAME	TTD
4	DARUSSALAM	02-10-2024 10:05:21 WIB
5	Raisera Maulani Rahmadinda Wahyuono	02-10-2024 10:05:23 WIB
6	Ardyan	02-10-2024 10:05:26 WIB
7	Afrianto	02-10-2024 10:05:52 WIB
8	Muhammad Edi	02-10-2024 10:05:55 WIB
9	Evi Risna Yanti	02-10-2024 10:06:56 WIB
0	Evi Risna Yanti	02-10-2024 10:07:02 WIB
1	Evi Risna Yanti	02-10-2024 10:07:03 WIB
2	Evi Risna Yanti	02-10-2024 10:07:04 WIB
3	Evi Risna Yanti	02-10-2024 10:07:06 WIB
4	Evi Risna Yanti	02-10-2024 10:07:06 WIB
5	Evi Risna Yanti	02-10-2024 10:07:06 WIB
6	Andhika Yudha Perwira	02-10-2024 10:08:01 WIB

IO	NAME	TTD
7	Akbar Brillianto	02-10-2024 10:08:09 WIB
8	Gregorius Retas Daeng	02-10-2024 10:08:23 WIB
9	Zaenal Fandi	02-10-2024 10:08:29 WIB
0	Muhammad Kualimin	02-10-2024 10:08:35 WIB
1	Aryono Putra	02-10-2024 10:08:47 WIB
2	Teuku Irmansyah Akbar	02-10-2024 10:08:48 WIB
3	Murtadha	02-10-2024 10:09:10 WIB
4	Yunus Adhi Prabowo	02-10-2024 10:09:36 WIB
5	Jakobis Siahaya	02-10-2024 10:09:39 WIB
6	Aksin	02-10-2024 10:10:40 WIB
7	Kurniya Safitri	02-10-2024 10:10:42 WIB
8	Muhammad Adamsyah Nasution	02-10-2024 10:11:06 WIB
9	Teuku Irmansyah Akbar	02-10-2024 10:11:41 WIB

IO	NAME	TTD
0	Dudi Usman Sahupala	02-10-2024 10:12:28 WIB
1	Sergius Wabiser	02-10-2024 10:12:31 WIB
2	Fathor Rosi	02-10-2024 10:12:56 WIB
3	Jimmy Himawan	02-10-2024 10:13:08 WIB
4	Muhammad Saddam	02-10-2024 10:13:44 WIB
5	PUTRI SABRINA	02-10-2024 10:13:48 WIB
6	Febriani	02-10-2024 10:14:14 WIB
7	Putri Oktaviani	02-10-2024 10:14:54 WIB
8	Andrian Ari Wibowo	02-10-2024 10:14:56 WIB
9	Ismail Alim	02-10-2024 10:14:59 WIB
0	Priyono	02-10-2024 10:14:59 WIB
1	Muhammad Habibi	02-10-2024 10:15:19 WIB
2	Enry Ristanto	02-10-2024 10:15:38 WIB

IO	NAME	TTD
3	Nur Fahmi	02-10-2024 10:15:55 WIB
4	Muh. Dirfan Akbar	02-10-2024 10:15:59 WIB
5	Mohammad Indra Kelana	02-10-2024 10:15:59 WIB
6	AGUNG PURNOMO JATI	02-10-2024 10:16:06 WIB
7	Tetin Fitri	02-10-2024 10:16:22 WIB
8	Andika Suci Rahmat	02-10-2024 10:16:36 WIB
9	Fahrid Galitan	02-10-2024 10:16:46 WIB
0	Bayu Mega Malela	02-10-2024 10:16:46 WIB
1	Joko Fitriyan Prabowo	02-10-2024 10:16:51 WIB
2	Novianto Rahmantlyo	02-10-2024 10:16:51 WIB
3	Indra Permana	02-10-2024 10:17:15 WIB
4	Ronald Antony Sirait	02-10-2024 10:17:15 WIB
5	Rio Windarmoko	02-10-2024 10:17:34 WIB

IO	NAME	TTD
6	Dr. Anhar Nasution	02-10-2024 10:17:40 WIB
7	Nadya Prita Gemala D	02-10-2024 10:18:10 WIB
8	Muhammad Arnif	02-10-2024 10:18:27 WIB
9	Revin Eldad Danny Rompas	02-10-2024 10:19:28 WIB
0	Samidu	02-10-2024 10:19:51 WIB
1	Turedo Sitindaon	02-10-2024 10:23:28 WIB
2	Suartono	02-10-2024 10:25:33 WIB
3	Rahmawati Sukri	02-10-2024 10:32:03 WIB
4	Mustandar	02-10-2024 10:32:07 WIB
5	Sultan	02-10-2024 10:32:20 WIB
6	Heru Julianto	02-10-2024 10:36:27 WIB
7	Ahmar Ihsan Rangkuti	02-10-2024 10:45:15 WIB
8	Hendry Rachmadhani	02-10-2024 10:58:09 WIB

IO	NAME	TTD
9	AGUS SOFYAN	02-10-2024 11:36:05 WIB
0	Hafizh Nur Rahman	02-10-2024 12:00:53 WIB
1	Cepi Hendrayani	02-10-2024 12:01:12 WIB
2	Surya Iman Wahyudi	02-10-2024 12:02:12 WIB
3	RD Susanti Komalasari	02-10-2024 12:04:07 WIB
4	Deviyanti Dwiningsih	02-10-2024 12:10:01 WIB
5	Edius Pratama	02-10-2024 12:41:24 WIB
6	Almetrizon	02-10-2024 12:43:14 WIB
7	Azzuhri Al Bajuri	02-10-2024 12:45:16 WIB
8	Khairul Anwar Hasibuan	02-10-2024 12:45:43 WIB
9	Arah Madani	02-10-2024 12:45:57 WIB
00	GS Anton Armya	02-10-2024 12:52:17 WIB
01	Ali Wiji Edhy	02-10-2024 12:52:22 WIB

IO	NAME	TTD
02	Hadi Pratama	02-10-2024 12:53:45 WIB
03	Suminarso	02-10-2024 12:54:44 WIB
04	Seta Mahardika Caesar Wahyuono	02-10-2024 12:58:21 WIB
05	Seta Mahardika Caesar Wahyuono	02-10-2024 12:58:22 WIB
06	Seta Mahardika Caesar Wahyuono	02-10-2024 12:58:23 WIB
07	Mansur Naga	02-10-2024 12:58:43 WIB
08	Arif Bayu Praminto	02-10-2024 13:02:07 WIB
09	Budi Santoso	02-10-2024 13:03:55 WIB
10	Agus Sudarto	02-10-2024 13:06:15 WIB
11	KRESNA MAHESA ALKIRANA	02-10-2024 13:15:29 WIB
12	Sufiandi Ramadhan Dachi	02-10-2024 13:18:00 WIB
13	Riki Sambora	02-10-2024 13:19:44 WIB
14	Ismu Harkamil	02-10-2024 13:21:46 WIB

IO	NAME	TTD
15	John Wakerkwa	02-10-2024 13:35:12 WIB
16	Anggi Aribowo	02-10-2024 13:36:35 WIB
17	Rizal Hakiki	02-10-2024 13:43:18 WIB
18	Ifrianto S. Rahman	02-10-2024 13:53:03 WIB
19	T. Jessica Novia Hermanto	02-10-2024 13:59:26 WIB
20	Ali Akbar	02-10-2024 14:02:24 WIB
21	M. Khoiri	02-10-2024 14:03:01 WIB
22	MHD. Fadhli	02-10-2024 14:09:24 WIB
23	Ramidi	02-10-2024 14:14:30 WIB
24	Annisa Diva Picaesa	02-10-2024 14:14:33 WIB
25	Teguh Indarmaji	02-10-2024 14:18:24 WIB
26	Anik Lestyorini	02-10-2024 14:26:01 WIB
27	Arfi Bambani Amri	02-10-2024 14:29:45 WIB

ID	NAME	TTD
28	H.M. Tulus Wahjuono	02-10-2024 14:29:57 WIB
29	Dicky Armand Syach	02-10-2024 14:51:21 WIB
30	Mulki	02-10-2024 14:53:14 WIB
31	Muslim Haq. M.	02-10-2024 15:00:27 WIB
32	Sharon S. Simamora	02-10-2024 15:00:53 WIB
33	Fahmi Ali Ramdhani	02-10-2024 15:25:21 WIB
34	Fahrudin Maloko	02-10-2024 15:29:53 WIB

BELUM ABSEN

ID	NAME	JABATAN / BAGIAN
	Yandri Sudarso	Sekretaris 1 BHPP
	Naufal Fauzan	Anggota BHPP
	Tomi Yohana	Anggota BHPP
	Lahaya	Ketua BHPPda
	Afryandi Chair Samallo	DE DPD
	Muhajir	Kepala Staf
	Yulizar	Ketua Hukum DPP
	Akbar Fuad Ali Salampessy	Anggota BHPPda
	Ghufron	Wakil Sekretaris

Penutupan Kegiatan

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Martadinata	03-10-2024 10:00:08 WIB
	Agatha A.Lidyawati Rafli	03-10-2024 10:00:14 WIB
	Jakobis Siahaya	03-10-2024 10:00:21 WIB
	Aida Mardatillah	03-10-2024 10:00:53 WIB
	GS Anton Armya	03-10-2024 10:01:03 WIB
	RD Susanti Komalasari	03-10-2024 10:01:52 WIB
	Rizal Hakiki	03-10-2024 10:01:58 WIB
	RANU WIJAYA	03-10-2024 10:01:59 WIB
	Ramidi	03-10-2024 10:02:02 WIB
0	Teguh Indarmaji	03-10-2024 10:02:28 WIB
1	Nadya Prita Gemala D	03-10-2024 10:03:26 WIB

IO	NAME	TTD
2	Nadya Prita Gemala D	03-10-2024 10:03:27 WIB
3	Dormauli Silalahi	03-10-2024 10:03:48 WIB
4	Nurhidayat Umacina	03-10-2024 10:04:01 WIB
5	Norasya Verdiana	03-10-2024 10:04:14 WIB
6	Fathor Rosi	03-10-2024 10:04:27 WIB
7	Ahmar Ihsan Rangkuti	03-10-2024 10:04:52 WIB
8	Yohanes Kornelius Talan	03-10-2024 10:05:14 WIB
9	Dudi Usman Sahupala	03-10-2024 10:05:35 WIB
0	Surya Iman Wahyudi	03-10-2024 10:05:40 WIB
1	Teuku Irmansyah Akbar	03-10-2024 10:07:20 WIB
2	Zaenal Fandi	03-10-2024 10:07:25 WIB
3	Aksin	03-10-2024 10:07:36 WIB
4	Jurait Lidawa	03-10-2024 10:07:49 WIB

IO	NAME	TTD
5	Muhammad Arnif	03-10-2024 10:08:31 WIB
6	Ali Akbar	03-10-2024 10:09:13 WIB
7	Mustandar	03-10-2024 10:09:14 WIB
8	Zainuddin	03-10-2024 10:10:06 WIB
9	Khairul Anwar Hasibuan	03-10-2024 10:10:36 WIB
0	Muhammad Kualimin	03-10-2024 10:10:47 WIB
1	Ali Wiji Edhy	03-10-2024 10:10:55 WIB
2	Budi Santoso	03-10-2024 10:11:01 WIB
3	Ronald Antony Sirait	03-10-2024 10:11:19 WIB
4	Andrian Ari Wibowo	03-10-2024 10:12:31 WIB
5	Afriyandi Chair Samallo	03-10-2024 10:12:48 WIB
6	Sergius Wabiser	03-10-2024 10:12:53 WIB
7	EMANUEL PASSAR	03-10-2024 10:13:08 WIB

IO	NAME	TTD
8	Moh. Ridwan Limonu	03-10-2024 10:15:11 WIB
9	KHAIDIR,	03-10-2024 10:15:17 WIB
0	Annisa Diva Picaesa	03-10-2024 10:17:14 WIB
1	John Wakerkwa	03-10-2024 10:17:18 WIB
2	Anik Lestyorini	03-10-2024 10:18:01 WIB
3	Turedo Sitindaon	03-10-2024 10:19:21 WIB
4	Novianto Rahmantlyo	03-10-2024 10:20:30 WIB
5	Rachmat Setyawan	03-10-2024 10:21:01 WIB
6	Qodirun	03-10-2024 10:23:36 WIB
7	Akbar Brillianto	03-10-2024 10:28:07 WIB
8	Muhammad Rizal	03-10-2024 10:29:43 WIB
9	Ruli Margianto	03-10-2024 10:30:19 WIB
0	Ifrianto S. Rahman	03-10-2024 10:31:33 WIB

IO	NAME	TTD
1	Lalu Rusdi	03-10-2024 10:32:24 WIB
2	Almetrizon	03-10-2024 10:34:04 WIB
3	Akbar Fuad Ali Salampessy	03-10-2024 10:35:27 WIB
4	Joko Fitrihan Prabowo	03-10-2024 10:36:21 WIB
5	Suartono	03-10-2024 10:37:32 WIB
6	Zainal Rachman	03-10-2024 10:38:47 WIB
7	Gregorius Retas Daeng	03-10-2024 10:40:16 WIB
8	ZULFAZLI	03-10-2024 10:41:51 WIB
9	Azzuhri Al Bajuri	03-10-2024 10:43:21 WIB
0	Muhammad Edi	03-10-2024 10:45:13 WIB
1	Jimmy Himawan	03-10-2024 10:47:15 WIB
2	Afrianto	03-10-2024 10:47:34 WIB
3	Cepi Hendrayani	03-10-2024 10:49:28 WIB

IO	NAME	TTD
4	Evi Risna Yanti	03-10-2024 10:49:45 WIB
5	Hanna Maria Manurung	03-10-2024 10:51:51 WIB
6	T. Jessica Novia Hermanto	03-10-2024 10:51:59 WIB
7	Revin Eldad Danny Rompas	03-10-2024 10:54:48 WIB
8	AGUNG PURNOMO JATI	03-10-2024 10:55:49 WIB
9	Bayu Mega Malela	03-10-2024 10:56:07 WIB
0	Helmi Al Djufri	03-10-2024 10:56:09 WIB
1	Riki Martim	03-10-2024 10:57:14 WIB
2	Jayus	03-10-2024 10:57:49 WIB
3	Jayus	03-10-2024 10:57:50 WIB
4	Deviyanti Dwiningsih	03-10-2024 10:58:29 WIB
5	Suminarso	03-10-2024 10:59:51 WIB
6	Arif Bayu Praminto	03-10-2024 11:00:05 WIB

IO	NAME	TTD
7	Tomi Yohana	03-10-2024 11:00:08 WIB
8	Heru Julianto	03-10-2024 11:00:34 WIB
9	Vizerd Yovan	03-10-2024 11:01:02 WIB
0	Ardyan	03-10-2024 11:01:09 WIB
1	Arah Madani	03-10-2024 11:01:10 WIB
2	Kurniya Safitri	03-10-2024 11:01:20 WIB
3	Erwinsyah	03-10-2024 11:01:58 WIB
4	Leksadharna Kengsiswoyo	03-10-2024 11:02:46 WIB
5	Sharon S. Simamora	03-10-2024 11:02:55 WIB
6	Tamzil	03-10-2024 11:02:58 WIB
7	Ricky Meliaky	03-10-2024 11:03:12 WIB
8	AGUS SOFYAN	03-10-2024 11:03:16 WIB
9	Fahrudin Maloko	03-10-2024 11:03:43 WIB

IO	NAME	TTD
0	Fahrid Galitan	03-10-2024 11:04:03 WIB
1	Mundaris	03-10-2024 11:04:09 WIB
2	Andhika Yudha Perwira	03-10-2024 11:04:12 WIB
3	Anggi Aribowo	03-10-2024 11:04:38 WIB
4	Priyono	03-10-2024 11:04:47 WIB
5	Nur Fahmi	03-10-2024 11:05:17 WIB
6	Sultan	03-10-2024 11:06:54 WIB
7	Dikky Zulkarnain Hutagalung	03-10-2024 11:07:33 WIB
8	Aristya Kusuma Dewi	03-10-2024 11:08:59 WIB
9	Indra Permana	03-10-2024 11:10:06 WIB
00	Murtadha	03-10-2024 11:10:44 WIB
01	Muh. Dirfan Akbar	03-10-2024 11:11:38 WIB
02	MHD. Fadhli	03-10-2024 11:11:43 WIB

IO	NAME	TTD
03	Rio Windarmoko	03-10-2024 11:12:16 WIB
04	Dr. Anhar Nasution	03-10-2024 11:16:23 WIB
05	Boyke Luthfiana Syahrir	03-10-2024 11:16:27 WIB
06	Ismu Harkamil	03-10-2024 11:17:08 WIB
07	Muhammad Adamsyah Nasution	03-10-2024 11:20:24 WIB
08	PUTRI SABRINA	03-10-2024 11:23:45 WIB
09	Edius Pratama	03-10-2024 11:27:34 WIB
10	Agis Gamalutvianda	03-10-2024 11:37:18 WIB
11	Ghufron	03-10-2024 11:39:48 WIB

BELUM ABSEN

IO	NAME	JABATAN / BAGIAN
	Yandri Sudarso	Sekretaris 1 BHPP
	Yunus Adhi Prabowo	Kepala BHPPda
	Rahmawati Sukri	Anggota BHPP
	Naufal Fauzan	Anggota BHPP
	Dicky patadjenu	Ketua BHPPda

IO	NAME	JABATAN / BAGIAN
	Lahaya	Ketua BHPPda
	Muhajir	Kepala Staf
	Sufiandi Ramadhan Dachi	
	Muhammad Saddam	Ketua OKK DPP PARTAI DARUL ACEH
0	Yulizar	Ketua Hukum DPP
1	Febriani	Bagian Hukum
2	NORRIF'AT	Wakil Ketua
3	Andika Suci Rahmat	STAFF DPP
4	DARUSSALAM	Wakil Ketua
5	Putri Oktaviani	Bagian Hukum
6	Mansur Naga	Biro Hukum
7	Tetin Fitri	Bendum
8	Hadi Pratama	Sekretaris Bidang Polhukam DPW PKS Bengkulu
9	Seta Mahardika Caesar Wahyuono	THAP Pusat
0	Riki Sambora	THAP Wilayah Papua Barat Daya
1	Ismail Nganggon	THAP Pusat
2	Agus Sudarto	Bendahara
3	H.M. Tulus Wahjuono	THAP Pusat
4	Dicky Armand Syach	Anggota BAHU DPP
5	Teuku Fauzi Al Fansuri	Ketua BAHU Aceh
6	Hanky Mustav Sabarta	Wa Ketua Bid. Huk dan HAM DPW Sumatera Barat
7	KRESNA MAHESA ALKIRANA	Anggota
8	Arfi Bambani Amri	Anggota BAHU DPP
9	Bayu Aditya Putra	Anggota BAHU DPP
0	Mohammad Indra Kelana	Koordinator THAP Wilayah Kepulauan Riau
1	Bansawan	Anggota BAHU DPP
2	Efrem Fangohoy	

IO	NAME	JABATAN / BAGIAN
3	Aryono Putra	Bagian Hukum (Advokat)
4	Muhammad Iqbal Rozi	Anggota
5	Ismail Alim	Bagian Hukum
6	Rahman Pulani	Koordinator THAP Wilayah Sulawesi Tenggara
7	Muhammad Habibi	
8	Patric Barumbun Tandirerung	Ketua Badan Advokasi Hukum (BAHU) NasDem Papua Barat
9	Muslim Haq. M.	THAP Wilayah Sulawesi Selatan
0	Mulki	Kesekretariatan
1	Riki Asbi	Wasekjend
2	Syaiful Maarif	Anggota BAHU DPP
3	Suhendi	DPP PAN
4	Fadjri	Ketua Departemen Hukum
5	Enry Ristanto	Staff DPP
6	Wildan	
7	M. Khoiri	Anggota BHPP
8	Fahmi Ali Ramdhani	Ketua Deputi Hukum DPW PKS Jawa Barat
9	Samidu	Wakil Ketua Bid Huk dan HAM DPW Sultra
0	Raisera Maulani Rahmadinda Wahyuono	-
1	Hafizh Nur Rahman	Anggota BAHU DPP
2	Hendry Rachmadhani	Ketua BHPPda

Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahu 2024

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
	Martadinata	03-10-2024 08:00:10 WIB
	Ismu Harkamil	03-10-2024 08:00:48 WIB
	Aristya Kusuma Dewi	03-10-2024 08:00:59 WIB
	Dormauli Silalahi	03-10-2024 08:01:12 WIB
	Dormauli Silalahi	03-10-2024 08:01:12 WIB
	Anik Lestyorini	03-10-2024 08:01:31 WIB
	Agatha A.Lidyawati Rafli	03-10-2024 08:01:42 WIB
	Revin Eldad Danny Rompas	03-10-2024 08:02:06 WIB
	Jayus	03-10-2024 08:03:38 WIB
0	ZULFAZLI	03-10-2024 08:04:13 WIB

IO	NAME	TTD
1	Tomi Yohana	03-10-2024 08:04:40 WIB
2	KRESNA MAHESA ALKIRANA	03-10-2024 08:04:43 WIB
3	Nurhidayat Umacina	03-10-2024 08:05:11 WIB
4	M. Khoiri	03-10-2024 08:05:15 WIB
5	RANU WIJAYA	03-10-2024 08:05:26 WIB
6	Rachmat Setyawan	03-10-2024 08:05:40 WIB
7	Andrian Ari Wibowo	03-10-2024 08:05:52 WIB
8	Qodirun	03-10-2024 08:06:36 WIB
9	Ramidi	03-10-2024 08:07:45 WIB
0	Ali Wiji Edhy	03-10-2024 08:08:35 WIB
1	Teguh Indarmaji	03-10-2024 08:08:54 WIB
2	Almetrizon	03-10-2024 08:09:23 WIB
3	Hanky Mustav Sabarta	03-10-2024 08:09:40 WIB

IO	NAME	TTD
4	Norasya Verdiana	03-10-2024 08:10:41 WIB
5	Ruli Margianto	03-10-2024 08:11:09 WIB
6	Muhammad Edi	03-10-2024 08:11:17 WIB
7	Cepi Hendrayani	03-10-2024 08:11:18 WIB
8	John Wakerkwa	03-10-2024 08:12:42 WIB
9	Afrianto	03-10-2024 08:13:38 WIB
0	Muhammad Adamsyah Nasution	03-10-2024 08:14:03 WIB
1	Jakobis Siahaya	03-10-2024 08:14:27 WIB
2	Lalu Rusdi	03-10-2024 08:14:40 WIB
3	AGUS SOFYAN	03-10-2024 08:15:18 WIB
4	Muhammad Rizal	03-10-2024 08:16:31 WIB
5	Yohanes Kornelius Talan	03-10-2024 08:16:34 WIB
6	Moh. Ridwan Limonu	03-10-2024 08:16:35 WIB

IO	NAME	TTD
7	Fathor Rosi	03-10-2024 08:17:46 WIB
8	Dicky patadjenu	03-10-2024 08:17:46 WIB
9	Priyono	03-10-2024 08:17:51 WIB
0	Turedo Sitindaon	03-10-2024 08:18:00 WIB
1	Kurniya Safitri	03-10-2024 08:18:27 WIB
2	Muhammad Kualimin	03-10-2024 08:19:36 WIB
3	Novianto Rahmantyo	03-10-2024 08:19:36 WIB
4	Dikky Zulkarnain Hutagalung	03-10-2024 08:19:37 WIB
5	Ronald Antony Sirait	03-10-2024 08:19:52 WIB
6	Ali Akbar	03-10-2024 08:19:53 WIB
7	Mundaris	03-10-2024 08:21:27 WIB
8	Riki Asbi	03-10-2024 08:21:28 WIB
9	Suminarso	03-10-2024 08:21:47 WIB

ID	NAME	TTD
0	Gregorius Retas Daeng	03-10-2024 08:21:54 WIB
1	Samidu	03-10-2024 08:22:04 WIB
2	Annisa Diva Picaesa	03-10-2024 08:22:05 WIB
3	Raisera Maulani Rahmadinda Wahyuono	03-10-2024 08:22:05 WIB
4	Mustandar	03-10-2024 08:22:37 WIB
5	Jimmy Himawan	03-10-2024 08:22:43 WIB
6	Riki Martim	03-10-2024 08:23:07 WIB
7	Khairul Anwar Hasibuan	03-10-2024 08:23:12 WIB
8	Rahmawati Sukri	03-10-2024 08:23:13 WIB
9	Agis Gamalutvianda	03-10-2024 08:23:26 WIB
0	Mohammad Indra Kelana	03-10-2024 08:23:33 WIB
1	Aida Mardatillah	03-10-2024 08:23:46 WIB
2	Mansur Naga	03-10-2024 08:24:03 WIB

IO	NAME	TTD
3	Edius Pratama	03-10-2024 08:24:09 WIB
4	Nur Fahmi	03-10-2024 08:24:25 WIB
5	Fahrid Galitan	03-10-2024 08:24:28 WIB
6	Seta Mahardika Caesar Wahyuono	03-10-2024 08:24:29 WIB
7	Aksin	03-10-2024 08:24:34 WIB
8	Hadi Pratama	03-10-2024 08:24:35 WIB
9	DARUSSALAM	03-10-2024 08:24:39 WIB
0	Vizerd Yovan	03-10-2024 08:24:52 WIB
1	Yulizar	03-10-2024 08:25:02 WIB
2	Indra Permana	03-10-2024 08:25:09 WIB
3	Yandri Sudarso	03-10-2024 08:25:34 WIB
4	Jurait Lidawa	03-10-2024 08:25:36 WIB
5	Leksadharna Kengsiswoyo	03-10-2024 08:25:38 WIB

IO	NAME	TTD
6	Mulki	03-10-2024 08:25:43 WIB
7	EMANUEL PASSAR	03-10-2024 08:25:49 WIB
8	Muhammad Arnif	03-10-2024 08:25:50 WIB
9	Joko Fitriani Prabowo	03-10-2024 08:26:35 WIB
0	GS Anton Armya	03-10-2024 08:28:30 WIB
1	Muslim Haq. M.	03-10-2024 08:31:19 WIB
2	Fahrudin Maloko	03-10-2024 08:31:33 WIB
3	Muhajir	03-10-2024 08:31:44 WIB
4	Ahmar Ihsan Rangkuti	03-10-2024 08:31:48 WIB
5	Andhika Yudha Perwira	03-10-2024 08:32:01 WIB
6	Wildan	03-10-2024 08:32:12 WIB
7	Nadya Prita Gemala D	03-10-2024 08:32:39 WIB
8	Ghufron	03-10-2024 08:32:40 WIB

ID	NAME	TTD
9	Suhendi	03-10-2024 08:32:59 WIB
0	Afriyandi Chair Samallo	03-10-2024 08:33:35 WIB
1	Zaenal Fandi	03-10-2024 08:33:46 WIB
2	Bansawan	03-10-2024 08:33:59 WIB
3	Heru Julianto	03-10-2024 08:34:39 WIB
4	Ismail Alim	03-10-2024 08:34:40 WIB
5	Teuku Irmansyah Akbar	03-10-2024 08:34:58 WIB
6	Ifrianto S. Rahman	03-10-2024 08:35:18 WIB
7	Sharon S. Simamora	03-10-2024 08:36:10 WIB
8	Suartono	03-10-2024 08:38:18 WIB
9	Dr. Anhar Nasution	03-10-2024 08:38:42 WIB
00	Arah Madani	03-10-2024 08:39:16 WIB
01	Dicky Armand Syach	03-10-2024 08:39:53 WIB

IO	NAME	TTD
02	Helmi Al Djufri	03-10-2024 08:40:12 WIB
03	Rizal Hakiki	03-10-2024 08:40:53 WIB
04	Evi Risna Yanti	03-10-2024 08:40:54 WIB
05	Yunus Adhi Prabowo	03-10-2024 08:41:14 WIB
06	Fahmi Ali Ramdhani	03-10-2024 08:41:19 WIB
07	Sultan	03-10-2024 08:41:20 WIB
08	Dudi Usman Sahupala	03-10-2024 08:42:31 WIB
09	Arfi Bambani Amri	03-10-2024 08:43:47 WIB
10	Muhammad Habibi	03-10-2024 08:44:01 WIB
11	Rahman Pulani	03-10-2024 08:44:26 WIB
12	Tetin Fitri	03-10-2024 08:44:32 WIB
13	Rio Windarmoko	03-10-2024 08:45:01 WIB
14	KHAIDIR,	03-10-2024 08:45:28 WIB

IO	NAME	TTD
15	Arif Bayu Praminto	03-10-2024 08:45:30 WIB
16	Hendry Rachmadhani	03-10-2024 08:46:01 WIB
17	T. Jessica Novia Hermanto	03-10-2024 08:46:23 WIB
18	Muhammad Iqbal Rozi	03-10-2024 08:46:48 WIB
19	Hanna Maria Manurung	03-10-2024 08:47:03 WIB
20	Zainal Rachman	03-10-2024 08:47:53 WIB
21	Deviyanti Dwiningsih	03-10-2024 08:48:28 WIB
22	MHD. Fadhli	03-10-2024 08:48:32 WIB
23	Muhammad Saddam	03-10-2024 08:48:37 WIB
24	RD Susanti Komalasari	03-10-2024 08:48:50 WIB
25	Zainuddin	03-10-2024 08:49:21 WIB
26	Teuku Fauzi Al Fansuri	03-10-2024 08:54:03 WIB
27	Sufiandi Ramadhan Dachi	03-10-2024 08:55:11 WIB

IO	NAME	TTD
28	Aryono Putra	03-10-2024 08:57:56 WIB
29	Bayu Mega Malela	03-10-2024 08:58:00 WIB
30	Muh. Dirfan Akbar	03-10-2024 08:58:31 WIB
31	Boyke Luthfiana Syahrir	03-10-2024 08:59:16 WIB
32	Agus Sudarto	03-10-2024 09:00:06 WIB
33	H.M. Tulus Wahjuono	03-10-2024 09:00:15 WIB
34	Patric Barumbun Tandirerung	03-10-2024 09:00:50 WIB
35	Budi Santoso	03-10-2024 09:01:00 WIB
36	Murtadha	03-10-2024 09:03:03 WIB
37	Anggi Aribowo	03-10-2024 09:03:15 WIB
38	PUTRI SABRINA	03-10-2024 09:05:30 WIB
39	Fadjri	03-10-2024 09:07:07 WIB
40	Lahaya	03-10-2024 09:10:04 WIB

IO	NAME	TTD
41	Febriani	03-10-2024 09:11:52 WIB
42	Azzuhri Al Bajuri	03-10-2024 09:12:23 WIB
43	Ardyan	03-10-2024 09:12:58 WIB
44	Riki Sambora	03-10-2024 09:14:19 WIB
45	Putri Oktaviani	03-10-2024 09:16:40 WIB
46	AGUNG PURNOMO JATI	03-10-2024 09:16:59 WIB
47	Enry Ristanto	03-10-2024 09:17:11 WIB
48	Andika Suci Rahmat	03-10-2024 09:18:00 WIB
49	Bayu Aditya Putra	03-10-2024 09:19:29 WIB
50	Hafizh Nur Rahman	03-10-2024 09:23:39 WIB
51	Ismail Nganggon	03-10-2024 09:26:57 WIB
52	Surya Iman Wahyudi	03-10-2024 10:05:29 WIB
53	Sergius Wabiser	03-10-2024 10:12:36 WIB

IO	NAME	TTD
54	Tamzil	03-10-2024 10:26:19 WIB
55	Akbar Brillianto	03-10-2024 10:27:58 WIB

BELUM ABSEN

IO	NAME	JABATAN / BAGIAN
	Naufal Fauzan	Anggota BHPP
	Akbar Fuad Ali Salampessy	Anggota BHPPda
	NORRIF'AT	Wakil Ketua
	Erwinsyah	Anggota BAHU DPP
	Ricky Meliaky	Anggota BAHU DPP
	Efrem Fangohoy	
	Syaiful Maarif	Anggota BAHU DPP

SOAL DAN TEMPLATE PENYUSUNAN
PERMOHONAN PEMOHON DAPAT DIUNDUH
MELALUI AKUN SIMULTAN PESERTA
DENGAN *LOGIN* DI LAMAN:

pusdik.mkri.id



Username: Puskik_MK
password: puskikmk9

Username :
GK3_PUSDIKLAT
password : puskikmkri

Ketentuan Tugas Praktek

- Sesi Praktek dimulai pukul 10.00 – 12.00 WIB dan 13.00 – 15.00 WIB
- Tugas Individu
- Peserta Menyusun Permohonan Pemohon berdasarkan Soal yang telah ditentukan
- Mengunduh Template Permohonan Pemohon dimana Peserta Mengerjakan pada Template tersebut
- Pengerjaan dan Pengumpulan Tugas Praktik merupakan salah satu syarat peserta mendapatkan sertifikat



Tugas Praktik dikirim ke e-mail:

tugasbimtek1@gmail.com

Subject e-mail:

<No. Registrasi> _ <Nama Peserta> _ <Jenis Tugas>

Contoh: 10_Rafael Nadal_Permohonan Pemohon

Nama File Ms. Word:

<No. Registrasi> _ <Nama Peserta> _ <Jenis Tugas>

Contoh: 10_Rafael Nadal _ Permohonan Pemohon





MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI



Username:

Password:



ABDULKADIR

PESERTA

**NO
REGISTRASI
PESERTA**

KETENTUAN KHUSUS : e-SERTIFIKAT



**Batas Waktu
Pengumpulan Tugas
Praktik Pukul 17.00
WIB Hari Rabu,
2 Oktober 2024**

***Apabila melewati
batas waktu, kami
anggap peserta tidak
mengumpulkan**



**Tugas Praktik yg
Dikumpulkan Wajib
Orisinal
(dibuat asli oleh
Masing-Masing
Peserta) serta sesuai
dengan Soal yang
Ditentukan**



*** Nilai Tugas Praktik Minimal
adalah 60, Nilai di Bawah 60
Tidak Mendapatkan Sertifikat**

***Peserta yg Tugas Praktiknya
sama (*Copy Paste*), Baik yg
Mencontek maupun yg
Dicontek, Otomatis Nilainya di
Bawah 60**

***Template Tugas Praktik
harus diisi secara lengkap,
dari Identitas sampai ke Daftar
Alat Bukti**

Aspek yang Dinilai

- Substansi (60%)
- Sistematika Penulisan (20%)
- Teknis Penulisan: Kerapian & Typo (20%)





FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA
TAHUN 2024 BAGI PARTAI POLITIK ANGGKATAN II

Narasumber : HANI ADHANI

NO REG	NAMA	PENILAIAN			TOTAL
		SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	Muhammad Adamsyah Nasution	60	60	60	60
2	Dr. H. Jayus, M.M.	60	60	60	60
3	Aryono Putra, S.H., M.H.	60	60	60	60
4	Nurhidayat Umacina, SE	60	60	60	60
5	Agatha A.Lidyawati Rafil BSC, SH, MH	60	60	60	60
6	Dormauli Silalahi, S.H., M.H.	60	60	60	60
22	Yunus Adhi Prabowo, S.H., M.H., ADV., M.Kn.	60	60	60	60
23	Fathor Rosi, S.H.	60	60	60	60
24	NORRIFAT, S.H	60	60	60	60
34	Bayu Aditya Putra, S.H.	60	60	60	60
35	EMANUEL PASSAR, SH	60	60	60	60
36	Yulizar, S.H, M.H.	60	60	60	60
49	Suminarso, S.H.	60	60	60	60
50	Moh. Ridwan Limonu, S.H.	60	60	60	60
51	Hadi Pratama, S.H., CPM.	60	60	60	60
52	Jurat Lidawa, S.H.	60	60	60	60
59	MHD, Fathil, S.H., M.H., CML., CPAJ., CPM.	60	60	60	60
60	Mu. Difan Akbar, S.H.	60	60	60	60
69	Ismail Nganggon, S.H	60	60	60	60
70	Albar Fuad Al Salampessy, S.H.CPM,CML	60	60	60	60
71	Fadri, S.H.	61	61	61	61
72	Atiyandi Chair Samallo, S.H.	61	61	61	61
73	Muhammad Iqbal Rozi, S.H., M.H.	60	60	60	60
89	Rachmat Setyawan, S.H.	60	60	60	60
90	Devyanil Dwingsih, S.H., M.H.	60	60	60	60
91	Vizeri Yovan, S.H.	61	61	61	61
92	Patix Barumbun Tandirerung, S.H.	62	62	62	62
93	Lalu Rusdi, S.H., M.H.	60	60	60	60
114	Raisera Maulani Rahmadinda, S.T.	60	60	60	60
115	Sergius Wabiser, S.H.	60	60	60	60
116	Andika Suci Rahmat, S.Ikom.	60	60	60	60
117	Mansur Naga, S.H.	60	60	60	60
118	Aksin, S.H.	61	61	61	61
139	Seta Mahardika Caesar Wahyuono, S.H., M.H.	60	60	60	60
140	Ricky Meliaky, S.H., CPM.	60	60	60	60
141	Mustandar, SH., MH.	60	60	60	60
142	Budi Santoso, S.H.,M.H., CCL, CTL	60	60	60	60
143	Sharon S. Simamora	60	60	60	60
158	T. Jessica Novia Hermanto, S.H.	61	61	61	61
160	Suhendi	60	60	60	60



FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA
TAHUN 2024 BAGI PARTAI POLITIK ANGGATAN II

Narasumber : Oly Viana Agustine

NO REG	NAMA	PENILAIAN			TOTAL
		SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYP0 (BOBOT 20%)	
7	Jimmy Himawan, S.H.	70	71	71	70,8
8	Cepi Hendrayani, S.H., M.H.	76	73	74	73,8
9	RANU WIJAYA, S.H.	75	75	73	74,6
17	Wildan, BSE	65	63	67	64,2
18	Alfianto, S.H.	72	72	71	71,8
25	Drs. H. Lahaya, S.H., M.H.	65	64	64	64,2
26	KRESNA MAHESA ALKIRANA, S.H.	71	70	70	70,2
27	Jakobis Siahaaya, S.H	68	68	70	68,4
37	KHAIDIR, S.H	70	69	71	69,6
38	Helmi Al Djufri, S.Sy., M.Si.	87	84	86	85
39	Muhammad Edi, S.H	65	66	67	66
40	Dudi Usman Sahupala, S.H., M.H., CPM.	80	84	86	83,6
53	Kurniya Saffri, S.H.	71	72	72	71,8
54	Evi Risna Yanti, S.H., M.Kn.	70	72	70	71,2
55	Bayu Mega Malela, S.H.I, S.Pd.	74	78	79	77,4
61	Dicky Zulkamain Hutagalung, S.E., S.H., C.MSP.	76	70	72	71,6
62	Zainuddin, S.HI	65	65	65	65
63	Sultan, S.H., M.H.	70	72	71	71,4
74	Muhajir, S.Pd.	70	70	70	70
85	Sufiandi Ramadhan Dachi	60	60	60	60
86	Drs Suartono	70	70	70	70
87	John Wakerkwa	62	63	62	62,6
88	Irfanio S. Rahman, S.H., M.H., CPLC	75	73	74	73,6
94	Muhammad Rizal, S.H., M.H.	80	84	83	83
95	Hanna Maria Manurung, S.H., M.H.	70	71	72	71
96	Dr. Syaiful Maarif, SH., CN., MH., CLA.	72	72	71	71,8
97	Qodirun, S.H., M.H.	81	83	82	82,4
98	Dr. Norasya Verdiana, S.H., M.Kn., M.M.	70	71	71	70,8
123	Ahmar Ihaan Rangkuil, S.H.	72	70	73	71
124	Fahmi Ali Ramdhani, S.H., M.H.	64	62	65	63
125	Ghulron, S.H., M.H., C.C.D.	86	87	85	86,4
126	Dicky Armand Syach	82	83	85	83,2
127	Boyke Luthiana Syahrir, S.H., M.H.	73	71	70	71,2
144	Turedo Sitindaon, S.H.	78	80	79	79,4
145	Surya Iman Wahyudi, S.H., MH	70	73	74	72,6
146	DARUSSALAM, SH	73	72	72	72,2
147	Dicky patadjenu, S.H., M.H., C.Md.	80	79	80	79,4
152	Ardyan, S.H., M.H.	70	71	70	70,6
153	Halizh Nur Rahman, S.H.	73	74	75	74
154	Mulki	60	60	60	60



FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA
TAHUN 2024 BAGI PARTAI POLITIK ANGGKATAN II

Narasumber : Luthfi Widagdo Eddyono

NO REG	NAMA	PENILAIAN			TOTAL
		SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKMS PENULISAN, KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
10	Indra Permana, S.H.	80	77	80	78,2
11	Ali Akbar, S.H., M.H.	80	77	80	78,2
12	Andrian Ari Wibowo, S.H.	80	80	80	80
19	M. Khoir, S.H., M.H.	80	82	80	81,2
20	Ramidi, S.E., M.Si	80	77	80	78,2
21	AGUS SOFYAN, S.H	80	80	80	80
28	Yandri Sudarso, S.H., M.H.	80	81	80	80,6
29	Naufal Fauzan, S.H.	80	80	80	80
30	Dr. Nadya Prita Gemala D, SH, M.Hum	80	80	80	80
41	ZULFAZLI, S.E.	80	76	80	77,6
42	Riki Sambora, S.H.	80	79	80	79,4
43	Rahman Pulani, S.H	80	77	80	78,2
44	Almetrizon, S.H.	80	77	80	78,2
56	Ismu Harkamil, SH., MH	80	84	80	82,4
57	Khairul Anwar Hasibuan, S.H.,M.H.	80	84	80	82,4
58	Dr. Azzuhri Al Bajuri, SHI., MHL	80	80	80	80
75	Dr. Anhar Nasution, S.H., M.H.	80	81	80	80,6
77	H.M. Tulus Wahjuono	80	85	80	83
78	Novianto Rahmanto, S.H., M.H.	80	80	80	80
79	Ronald Antony Sirat, S.H.	80	78	80	78,8
80	Muhammad Saddam, M.Pd.	80	76	80	77,6
99	Hanki Mustav Sabarta, S.H., M.H.	890	77	80	240,2
100	Teguh Indamaji, S.H.	80	84	80	82,4
101	Enry Ristanto, A.Md.	0	0	0	0
102	Annisa Diva Picaesa, S.H.	80	77	80	78,2
103	Aida Mardatillah, S.H., M.H.	80	84	80	82,4
104	GS Anton Armya, S.H.	89	78	80	80,6
119	Rizal Hakki, S.H.	80	85	80	83
120	Anggi Aribowo, S.H., M.H.	80	84	80	82,4
121	Heru Julianto, S.H	80	83	80	81,8
122	Akbar Brillianto, S.H	0	0	0	0
131	Arif Bayu Praminto, S.H.	80	80	80	80
132	Agus Sudarto	80	77	80	78,2
133	Zainal Rachman, SH MH	80	77	80	78,2
134	Edius Pratama, S.H.	80	77	80	78,2
148	Rahmawati Sukri, S.H., M.H	80	76	80	77,6
149	Ali Wiji Edny, S.H	80	75	80	77
150	Ari Bambang Amit, S.H., M.P.A.	80	84	80	82,4
151	Erwinsyah, S.H., LL.M.	80	84	80	82,4
159	RD Susanti Komalasari, S.H.	80	81	80	80,6



FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA
TAHUN 2024 BAGI PARTAI POLITIK ANGKATAN II

Narasumber : Syamsudin Noer

NO	NO REG	NAMA	PENILAIAN			TOTAL
			SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIK PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	13	Anik Lestiyorini, A.Md.,S.H.,M.H.,	70	70	75	71
2	14	Tomi Yohana, S.H.	75	75	75	75
3	15	Leksadharma Kengsiswoyo, S.H., M.H	70	70	70	70
4	16	Muhammad Mualimin, S.H., M.H.	70	75	70	73
5	31	Teuku Imansyah Akbar, SH, MH	65	75	70	72
6	32	Hendry Rachmadhani, S.H.	70	75	65	72
7	33	Andhika Yudha Perwira, S.H.	75	80	80	79
8	45	Muslim Haq, M., S.H., M.H.	70	75	70	73
9	46	Martadinata, S.Pd., S.H.	75	75	75	75
10	47	Riki Martin, S.H, CLA.	75	75	75	75
11	48	Muhammad Amit, S.H	75	75	70	74
12	64	AGUNG PURNOMO JATI, S.H.	75	75	75	75
13	65	Mohammad Indra Kelana, S.H.	70	75	70	73
14	66	Riki Asbi, S.H.	70	70	70	70
15	67	Arah Madani, S.H.	70	70	70	70
16	68	Mundaris, S.Pd	70	70	70	70
17	76	Murtadha, S.H.	80	80	75	79
18	81	Zaenal Fandi, S.H., M.H.	70	75	70	73
19	82	- Fahrid Galitan, S.H., M.H.	70	75	70	73
20	83	Yohanes Komelius Talan, S.H.	70	70	70	70
21	84	Nur Fahmi, S.H.,M.H	80	80	80	80
22	105	Samidu, S.H.	60	65	60	63
23	106	Febriani, S.Pd.	65	65	65	65
24	107	Tetin Fitri, S.H., M.Kn.	70	70	70	70
25	108	Putri Oktaviani, S.T	65	65	65	65
26	109	Aristya Kusuma Dewi, S.H	75	75	70	74
27	110	Gregorius Retas Daeng, S.H.	70	70	65	69
28	111	Revin Eldad Danny Rompas, SH	80	80	75	79
29	112	PUTRI SABRINA, S.T.	65	65	65	65
30	113	Rio Windamoko, S.Sos.	70	70	70	70
31	128	Tamzil, S.H., M.H.	70	70	70	70
32	129	Fahruddin Maliko, S.H.	75	75	75	75
33	130	Muhammad Habibi	70	75	75	74
34	135	Ruli Margianto, S. H., M. H.	70	70	70	70
35	136	Priyono	70	70	70	70
36	137	Ismail Alim, S.H	70	75	70	73
37	138	Bansawan, S.H.	75	75	75	75
38	155	Joko Fitriani Prabowo, S.H, M.Kn.	70	75	70	73
39	156	Agis Gamalutvianda, S.H.	75	75	75	75
40	157	Teuku Fauzi Al Fansuri, S.H.I.	70	75	70	73

LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA TAHUN 2024 BAGI PARTAI POLITIK ANGKATAN II

NAMA NARASUMBER : HANI ADHANI

KELAS : 1 PERMOHONAN PEMOHON

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	Secara garis besar peserta sudah memahami bagaimana membuat permohonan sesuai dengan template yang ada dalam PMK
	Beberapa peserta masih terjebak dengan template yang sebenarnya beberapa bagian dalam template harusnya disesuaikan dengan kasus yang ada seperti terkait dengan penerapan pasal 158 dalam LS.
	Terkait kewenangan MK pun para peserta masih terjebak dengan template padahal point penting dalam kewenangan adalah objek sengketyanya yakni SK KPU.
	Terkait tenggat waktu, meski sudah tahu tiga hari kerja adalah batas pengajuan ke MK namun narasinya belum secara jelas menguraikan terkait batas waktu tersebut.
2	Untuk pokok permohonan masih sebagiab besar peserta hanya copy paste dari soal yang ada tanpa ada tambahan argumentasi yang mendukung dan malah beberapa peserta tidak mencantumkan alat bukti yang mendukung
	Begitupun dalam petitum masih banyak yang tidak tepat terkait alternatif petitum yang seharusnya dicantumkan dan harus nyambung dengan posita.
	Rekomendasi: template permohonan agar di perbaiki dan ditambahkan ada uraian narasi penjelasan apa yang harus diuraikan untuk mengurangi kesalahan dalam membuat permohonan.
3	

LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA TAHUN 2024 BAGI PARTAI POLITIK ANGGARAN II

NAMA NARASUMBER : OLY VIANA AGUSTINE

KELAS : 2

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	<p>Peserta cukup aktif dan antusias dalam pelaksanaan tugas dan diskusi materi. Meskipun terdapat beberapa peserta yang tidak mengikuti kelas dengan tertib namun mengumpulkan tugas.</p>
2	<p>Masih terdapat peserta yang tidak membawa perangkat laptop, sehingga cukup terbatas dalam penyusunan permohonan. Oleh karena itu, menjadi catatan yang perlu ditekankan dalam setiap bimtek untuk membawa perangkat laptop agar dapat maksimal dalam penyusunan permohonan.</p>
3	<p>Peserta mampu memahami soal dan materi dengan baik. Selain itu, peserta juga cukup baik mengerjakan penyusunan permohonan meski dengan waktu yang terbatas.</p>

LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA TAHUN 2024
BAGI PARTAI POLITIK ANGGARAN II

NAMA NARASUMBER : Luthfi Widagdo Eddyono

KELAS : 3

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	Peserta antusias mengikuti kegiatan.
2	Peserta butuh pengayaan lebih lanjut tentang bagaimana menarasikan bantahan terhadap dalil permohonan.
3	Dalam soal disebutkan nama Partai Hanura, sebaiknya untuk sesi berikutnya jangan menyebutkan nama partai asli.
4	

LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA TAHUN 2024 BAGI PARTAI POLITIK ANGKATAN II

NAMA NARASUMBER : Syamsudin Noer

KELAS : 4

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	Secara garis besar, para peserta memahami peran dan sistematika menjadi Pihak Terkait sehingga outputnya luarannya sudah memberikan respons yang baik walaupun masih kurang mengeksplorasi dan mengelaborasi keterangan-keterangannya.
2	Perlunya membangun keseriusan kolektif peserta (bukan berarti peserta di ruang kelas a quo tidak serius), walaupun ini acara bimbingan teknis yang cenderung simulasi, tetapi seolah-olah atmosfernya seperti ada hari-H
3	
4	



Tata Tertib Peserta

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024



Selalu memakai kartu tanda peserta (**ID Card**) selama berada di lingkungan Pusdik



Tepat waktu dalam mengikuti setiap kegiatan/ sesi materi



Mengisi **Presensi** pada akun **SIMULTAN**



Peserta menyiapkan perangkat (HP/*Laptop*) yang terhubung dengan **koneksi internet**



Tidak mengaktifkan nada dering selama mengikuti pembelajaran dalam aula/kelas



Tidak merokok dalam kamar



Tidak menerima tamu dalam kamar, dipersilakan menerima tamu di lobby max pukul 21.00 WIB



Tidak diperkenankan keluar area pusdik di atas pukul 22.00 WIB



Jika ada keperluan mendesak harus meninggalkan Pusdik sebelum penutupan, harus mendapatkan izin panitia yang bertugas di Pusdik



Dalam mengikuti kegiatan, peserta diharapkan memiliki prinsip **Positif dan Kolaboratif**



Data Peserta Registrasi
Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024
Bagi Partai Politik Angkatan II

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN	INSTANSI	KAB/KOT	ASAL
1	Muhammad Adamsyah Nasution	Laki-laki	S1	DPW PAN JAWA BARAT	KOTA BANDUNG	JAWA BARAT
2	Dr. A.P.Drs, Jayus, M.M.	Laki-laki	S3	DPP PAN	KAB. KUDUS	JAWA TENGAH
3	Aryono Putra, S.H., M.H.	Laki-laki	S2	DPW PAN Kalimantan Utara	KAB. BULUNGAN	KALIMANTAN UTARA
4	Nurhidayat Umacina, SE	Laki-laki	S1	DPP Partai Demokrat	KOTA JAKARTA TIMUR	D.K.I. JAKARTA
5	Agatha A.Lidyawati Rafli, BSC, SH.,MH	Perempuan	S2	DPP Partai Demokrat	KOTA JAKARTA UTARA	D.K.I. JAKARTA
6	Dormauli Silalahi, S.H., M.H.	Perempuan	S2	PPP Partai Demokrat	KOTA JAKARTA BARAT	D.K.I. JAKARTA
7	Jimmy Himawan, S.H.	Laki-laki	S1	DPP Demokrat	KOTA JAKARTA SELATAN	D.K.I. JAKARTA
8	Cepi Hendrayani, S.H., M.H.	Laki-laki	S2	DPP DEMOKRAT DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA PUSAT	D.K.I. JAKARTA
9	RANU WIJAYA, S.H.	Laki-laki	S1	DPW PAN Kalimantan Tengah	KAB. KOTAWARINGIN TIMUR	KALIMANTAN TENGAH
10	Indra Permana, S.H.	Laki-laki	S1	DPD Jawa Barat Demokrat	KAB. CIANJUR	JAWA BARAT
11	Ali Akbar, S.H., M.H.	Laki-laki	S2	DPD Lampung Demokrat	KOTA BANDAR LAMPUNG	LAMPUNG
12	Andrian Ari Wibowo, S.H.	Laki-laki	S1	DPD Jawa Tengah Partai Demokrat	KOTA SEMARANG	JAWA TENGAH
13	Anik Lestiyorini, A.Md.,S.H.,M.H.,	Perempuan	S2	DPD Jawa Tengah Partai Demokrat	KOTA SEMARANG	JAWA TENGAH
14	Tommi Yohana, S.H.	Laki-laki	S1	DPP Demokrat	KAB. MUSI BANYU ASIN	SUMATERA SELATAN
15	Leksadharna Kengsiswoyo, SH, MH	Laki-laki	S2	DPD Jawa Barat Partai Demokrat	KOTA BANDUNG	JAWA BARAT
16	Muhammad Muallimin, S.H., M.H.	Laki-laki	S2	BHPP DPP DEMOKRAT	KAB. SUBANG	JAWA BARAT
17	Wildan, S.E.	Laki-laki	S1	DPP PAN	KOTA TANGERANG SELATAN	BANTEN
18	Afrianto, S.H.	Laki-laki	S1	DPP Partai Demokrat	KOTA JAKARTA PUSAT	D.K.I. JAKARTA
19	M. Khoiri, S.H., M.H.	Laki-laki	S2	DPP DEMOKRAT DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA PUSAT	D.K.I. JAKARTA
20	Ramidi, S.E., M.Si	Laki-laki	S2	DPP PAN	KAB. TANGERANG	BANTEN
21	AGUS SOFYAN, S.H	Laki-laki	S1	DPP PAN	KOTA SERANG	BANTEN
22	Yunus Adhi Prabowo, S.H., M.H., ADV., M.Kn.	Laki-laki	S2	DPP DEMOKRAT DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA PUSAT	D.K.I. JAKARTA
23	Fathor Rosi, S.H.	Laki-laki	S1	DPP Demokrat	KOTA JAKARTA UTARA	D.K.I. JAKARTA
24	NORRIFAT, S.H	Laki-laki	S1	DPW PAN Kalimantan Selatan	KOTA BANJARMASIN	KALIMANTAN SELATAN
25	Drs. H. Lahaya, S.H., M.H.	Laki-laki	S2	DPD Sulawesi Selatan Partai Demokrat	KOTA MAKASSAR	SULAWESI SELATAN
26	KRESNA MAHESA ALKIRANA, S.H.	Laki-laki	S1	DPD Demokrat Lampung	KOTA BANDAR LAMPUNG	LAMPUNG
27	Jakobis Siahaya, S.H	Laki-laki	S1	DPW PAN Maluku	KOTA AMBON	MALUKU
28	Yandri Sudarso, S.H., M.H.	Laki-laki	S2	DPP Partai Demokrat	KOTA JAKARTA BARAT	D.K.I. JAKARTA
29	Naufal Fauzan, S.H.	Laki-laki	S1	DPD DEMOKRAT Aceh	KOTA BANDA ACEH	ACEH
30	Dr. Nadya Prita Gemala D, SH. M.Hum	Perempuan	S3	DPP Demokrat	KOTA DEPOK	JAWA BARAT
31	Teuku Irmansyah Akbar, SH. MH	Laki-laki	S2	DPP Demokrat	KOTA JAKARTA SELATAN	D.K.I. JAKARTA
32	Hendry Rachmadhani, S.H.	Laki-laki	S1	DPD Aceh Partai Demokrat	KOTA BANDA ACEH	ACEH
33	Andhika Yudha Perwira, S.H.	Laki-laki	S1	DPP Demokrat	KOTA DEPOK	JAWA BARAT
34	Bayu Aditya Putra, S.H.	Laki-laki	S1	DPP Partai Nasdem	KOTA JAKARTA PUSAT	D.K.I. JAKARTA
35	EMANUEL PASSAR, SH	Laki-laki	S1	DPW PAN NTT	KOTA KUPANG	NUSA TENGGARA TIMUR
36	Yulizar, S.H, M.H.	Laki-laki	S2	DPP Partai Darul Aceh	KOTA BANDA ACEH	ACEH
37	KHAIDIR,, S.H	Laki-laki	S1	DPP PAN DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA SELATAN	D.K.I. JAKARTA
38	Helmi Al Djufri, S.Sy., M.Si.	Laki-laki	S2	DPP PKS	KOTA JAKARTA SELATAN	D.K.I. JAKARTA
39	Muhammad Edi, S.H	Laki-laki	S1	DPW Jateng PKS	KOTA SALATIGA	JAWA TENGAH
40	Dudi Usman Sahupala, S.H., M.H., CPM.	Laki-laki	S2	DPW PKS Maluku	KOTA AMBON	MALUKU
41	ZULFAZLI, S.E.	Laki-laki	S1	DPW PAN Aceh	KOTA BANDA ACEH	ACEH

42	Riki Sambora, S.H.	Laki-laki	S1	DPW Papua Barat Daya PKS	Kota Sorong	PAPUA BARAT DAYA
43	Rahman Pulani, S.H	Laki-laki	S1	DPW Sulawesi Tenggara PKS	KAB. BOMBANA	SULAWESI TENGGARA
44	Almetrizon, S.H.	Laki-laki	S1	DPW Sumatera Barat PKS	KAB. S O L O K	SUMATERA BARAT
45	Muslim Haq. M., S.H., M.H.	Laki-laki	S2	DPW Sulawesi Selatan PKS	KOTA MAKASSAR	SULAWESI SELATAN
46	Martadinata, S.Pd., S.H.	Laki-laki	S1	DPW Sumatera Selatan PKS	KOTA PALEMBANG	SUMATERA SELATAN
47	Riki Martim, S.H. CL.A.	Laki-laki	S1	DPW PKS Banten	KOTA TANGERANG	BANTEN
48	Muhammad Arnif, S.H	Laki-laki	S1	DPW Aceh PKS	KOTA BANDA ACEH	ACEH
49	Suminarso, S.H.	Laki-laki	S1	DPP PKS	KOTA TANGERANG SELATAN	BANTEN
50	Moh. Ridwan Limonu, S.H.	Laki-laki	S1	DPW Sulawesi Tengah PKS	KOTA PALU	SULAWESI TENGAH
51	Hadi Pratama, S.H., CPM.	Laki-laki	S1	DPW PKS Bengkulu	KOTA BENGKULU	BENGKULU
52	Jurait Lidawa, S.H.	Laki-laki	S1	DPW PKS Maluku Utara	KOTA TERNATE	MALUKU UTARA
53	Kurniya Safitri, S.H.	Perempuan	S1	DPW NTB PKS	KOTA MATARAM	NUSA TENGGARA BARAT
54	Evi Risna Yanti, S.H., M.Kn.	Perempuan	S2	DPP PKS	KAB. MALANG	JAWA TIMUR
55	Bayu Mega Malela, S.H.I, S.Pd.	Laki-laki	S1	DPW PKS Kalimantan Timur	KOTA SAMARINDA	KALIMANTAN TIMUR
56	Ismu Harkamil, SH., MH	Laki-laki	S2	DPP PKS	KOTA JAKARTA PUSAT	D.K.I. JAKARTA
57	Khairul Anwar Hasibuan, S.H.,M.H.	Laki-laki	S2	DPW Sumatera Utara PKS	KOTA MEDAN	SUMATERA UTARA
58	Dr. Azzuhri Al Bajuri, SHI., MHI.	Laki-laki	S3	DPW Riau PKS	KOTA PEKANBARU	RIAU
59	MHD. Fadhli, S.H., M.H., CML., CPAdj., CPM.	Laki-laki	S2	DPD Kepri Partai Demokrat	KOTA BATAM	KEPULAUAN RIAU
60	Muh. Dirfan Akbar, S.H.	Laki-laki	S1	DPD DEMOKRAT Sulawesi Selatan	KOTA MAKASSAR	SULAWESI SELATAN
61	Dikky Zulkarnain Hutagalung, S.E., S.H., C.MSP.	Laki-laki	S2	DPD Kepri Partai Demokrat	KOTA BATAM	KEPULAUAN RIAU
62	Zainuddin, S.HI	Laki-laki	S1	DPD Jawa Timur Demokrat	KOTA SURABAYA	JAWA TIMUR
63	Sultan, S.H., M.H.	Laki-laki	S2	DPW Lampung PKS	KOTA BANDAR LAMPUNG	LAMPUNG
64	AGUNG PURNOMO JATI, S.H.	Laki-laki	S1	DPP PAN DIY	KOTA YOGYAKARTA	D.I. YOGYAKARTA
65	Mohammad Indra Kelana, S.H.	Laki-laki	S2	DPW PKS Kepulauan Riau	KOTA TANJUNG PINANG	KEPULAUAN RIAU
66	Riki Asbi, S.H.	Laki-laki	S1	DPP Partai Darul Aceh	KOTA BANDA ACEH	ACEH
67	Arah Madani, S.H.	Laki-laki	S1	THAP DPP PKS	KOTA JAKARTA TIMUR	D.K.I. JAKARTA
68	Mundaris	Laki-laki	SMA	DPW Kab. Aceh Timur Partai Darul Aceh	KAB. ACEH TIMUR	ACEH
69	Ismail Nganggon, S.H	Laki-laki	S1	DPP PKS	KOTA JAKARTA SELATAN	D.K.I. JAKARTA
70	Akbar Fuad Ali Salampessy, S.H.CPM.,CML	Laki-laki	S1	DPD Maluku Partai Demokrat	KAB. MALUKU TENGAH	MALUKU
71	Fadjri, S.H.	Laki-laki	S1	DPP Partai Aceh	KAB. ACEH BESAR	ACEH
72	Afriyandi Chair Samallo, S.H.	Laki-laki	S1	DPD DEMOKRAT Maluku	KOTA AMBON	MALUKU
73	Muhammad Iqbal Rozi, S.H., M.H.	Laki-laki	S2	DPP Partai Aceh	KOTA BANDA ACEH	ACEH
74	Muhajir, S.Pd.	Laki-laki	S1	DPP Partai Aceh	KOTA BANDA ACEH	ACEH
75	Dr. Anhar Nasution, S.H., M.H.	Laki-laki	S3	DPP Partai Aceh	KOTA BANDA ACEH	ACEH
76	Murtadha, S.H.	Laki-laki	S1	DPP Partai Aceh	KAB. ACEH BESAR	ACEH
77	H.M. Tulus Wahjuono	Laki-laki	S2	DPP PKS	KOTA MALANG	JAWA TIMUR
78	Novianto Rahmantyo, S.H., M.H.	Laki-laki	S2	DPP Partai Demokrat	KOTA JAKARTA PUSAT	D.K.I. JAKARTA
79	Ronald Antony Sirait, S.H.	Laki-laki	S1	DPP DEMOKRAT DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA PUSAT	D.K.I. JAKARTA
80	Muhammad Saddam, M.Pd.	Laki-laki	S2	DPP	KOTA BANDA ACEH	ACEH
81	Zaenal Fandi, S.H., M.H.	Laki-laki	S2	DPD Jawa Timur Demokrat	KOTA SURABAYA	JAWA TIMUR
82	Fahrid Galitan, S.H., M.H.	Laki-laki	S2	DPW PAN Maluku Utara	KOTA TERNATE	MALUKU UTARA
83	Yohanes Kornelius Talan, S.H.	Laki-laki	S1	DPW NTT Nasdem	KAB. A L O R	NUSA TENGGARA TIMUR
84	Nur Fahmi, S.H.,M.H	Laki-laki	S2	DPW PKS DKI Jakarta	KOTA JAKARTA SELATAN	D.K.I. JAKARTA
85	Sufiandi Ramadhan Dachi	Laki-laki	S1	DPP PDA	KOTA BANDA ACEH	ACEH
86	Drs Suartono	Laki-laki	S1	DPW PAN SUMATRA UTARA	KOTA MEDAN	SUMATERA UTARA
87	John Wakerkwa	Laki-laki	S1	DPW NASDEM Papua Pegunungan	KAB. JAYAWIJAYA	PAPUA PEGUNUNGAN
88	Ifrianto S. Rahman, S.H., M.H.,CPLC	Laki-laki	S2	DPW Gorontalo Nasdem	KOTA GORONTALO	GORONTALO

89	Rachmat Setyawan, S.H.	Laki-laki	S1	DPW sulawesi selatan	KOTA MAKASSAR	SULAWESI SELATAN
90	Deviyanti Dwiningsih, S.H., M.H.	Perempuan	S2	DPP PKS	KOTA DEPOK	JAWA BARAT
91	Vizerd Yovan, S.H.	Laki-laki	S1	DPW NASDEM SULAWESI TENGAH	KOTA PALU	SULAWESI TENGAH
92	Patriz Barumbun Tandirerung, S.H.	Laki-laki	S1	DPW Papua Barat Nasdem	KAB. MANOKWARI	PAPUA BARAT
93	Lalu Rusdi, S.H., M.H.	Laki-laki	S2	DPW NTB NASDEM	KOTA MATARAM	NUSA TENGGARA BARAT
94	Muhammad Rizal, S.H., M.H.	Laki-laki	S2	DPW PAPUA BARAT DAYA	Kabupaten Sorong	PAPUA BARAT DAYA
95	Hanna Maria Manurung, S.H., M.H.	Perempuan	S2	DPP Nasdem	KOTA JAKARTA PUSAT	D.K.I. JAKARTA
96	Dr. Syaiful Maarif, SH., CN., MH., CLA.	Laki-laki	S3	DPP NASDEM JAWA TIMUR	KOTA SURABAYA	JAWA TIMUR
97	Qodirun, S.H., M.H.	Laki-laki	S2	DPP Partai Nasdem	KOTA JAKARTA PUSAT	D.K.I. JAKARTA
98	Dr. Norasya Verdiana, S.H., M.Kn., M.M.	Perempuan	S3	DPW Kalimantan Selatan Nasdem	KOTA BANJARMASIN	KALIMANTAN SELATAN
99	Hanky Mustav Sabarta, S.H., M.H.	Laki-laki	S2	DPW NASDEM SUMATERA BARAT	KOTA PADANG	SUMATERA BARAT
100	Teguh Indarmaji, S.H.	Laki-laki	S1	DPW RIAU	KOTA PEKANBARU	RIAU
101	Enry Ristanto, A.Md.	Laki-laki	DIII	DPP PAN	KOTA DEPOK	JAWA BARAT
102	Annisa Diva Picaesa, S.H.	Perempuan	S2	DPP Nasdem	KOTA JAKARTA PUSAT	D.K.I. JAKARTA
103	Aida Mardatillah, S.H., M.H.	Perempuan	S2	DPP Nasdem	KOTA JAKARTA PUSAT	D.K.I. JAKARTA
104	GS Anton Armya, S.H.	Laki-laki	S1	DPP Nasdem	KOTA JAKARTA PUSAT	D.K.I. JAKARTA
105	Samidu, S.H., M.H.	Laki-laki	S2	DPW SULAWESI TENGGARA	KOTA KENDARI	SULAWESI TENGGARA
106	Febriani, S.Pd.	Perempuan	S1	DPP PAN JAWA BARAT	KAB. BEKASI	JAWA BARAT
107	Tetin Fitri, S.H., M.Kn.	Perempuan	S2	DPP PAN DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA PUSAT	D.K.I. JAKARTA
108	Putri Oktaviani, S.T	Perempuan	S1	DPP PAN	KOTA JAKARTA PUSAT	D.K.I. JAKARTA
109	Aristya Kusuma Dewi, S.H	Perempuan	S1	DPP PKS	KOTA JAKARTA UTARA	D.K.I. JAKARTA
110	Gregorius Retas Daeng, S.H.	Laki-laki	S1	DPP DEMOKRAT DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA PUSAT	D.K.I. JAKARTA
111	Revin Eldad Danny Rompas, SH	Laki-laki	S1	DPW	KOTA MANADO	SULAWESI UTARA
112	PUTRI SABRINA, S.T.	Perempuan	S1	DPP PAN	KOTA JAKARTA TIMUR	D.K.I. JAKARTA
113	Rio Windarmoko, S.Sos.	Laki-laki	S1	DPP PAN DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA PUSAT	D.K.I. JAKARTA
114	Raisera Maulani Rahmadinda Wahyuono, S.T.	Perempuan	S1	DPP PKS	KOTA MALANG	JAWA TIMUR
115	Sergius Wabiser, S.H.	Laki-laki	S1	DPW	DOGIYAI	PAPUA TENGAH
116	Andika Suci Rahmat, S.Ikom.	Laki-laki	S1	DPP PAN DKI Jakarta	KOTA JAKARTA TIMUR	D.K.I. JAKARTA
117	Mansur Naga, S.H.	Laki-laki	S1	DPP PKS DKI Jakarta	KOTA JAKARTA SELATAN	D.K.I. JAKARTA
118	Aksin, S.H.	Laki-laki	S1	DPP Nasdem	KOTA JAKARTA PUSAT	D.K.I. JAKARTA
119	Rizal Hakiki, S.H.	Laki-laki	S1	DPP	KOTA JAKARTA PUSAT	D.K.I. JAKARTA
120	Anggi Aribowo, S.H., M.H.	Laki-laki	S2	DPP PKS DKI Jakarta	KOTA JAKARTA SELATAN	D.K.I. JAKARTA
121	Heru Julianto, S.H	Laki-laki	S1	DPP PKS	KOTA JAKARTA UTARA	D.K.I. JAKARTA
122	Akbar Brillianto, S.H	Laki-laki	S1	DPP PAN	KOTA SURABAYA	JAWA TIMUR
123	Ahmar Ihsan Rangkuti, S.H.	Laki-laki	S1	DPP PKS DKI Jakarta	KOTA DEPOK	JAWA BARAT
124	Fahmi Ali Ramdhani, S.H., M.H.	Laki-laki	S2	DPW Jawa Barat PKS	KAB. BANDUNG	JAWA BARAT
125	Ghufron, S.H., M.H., C.C.D.	Laki-laki	S2	DPW PAN Jawa Timur	KOTA SURABAYA	JAWA TIMUR
126	Dicky Armand Syach	Laki-laki	S1	DPP Nasdem	KOTA JAKARTA PUSAT	D.K.I. JAKARTA
127	Boyke Luthfiana Syahrir, S.H., M.H.	Laki-laki	S2	DPP	KOTA JAKARTA PUSAT	D.K.I. JAKARTA
128	Tamzil, S.H., M.H.	Laki-laki	S2	DPW Sulawesi Barat Nasdem	KAB. MAMUJU	SULAWESI BARAT
129	Fahrudin Maloko, S.H.	Laki-laki	S1	DPW NASDEM MALUKU UTARA	KOTA TERNATE	MALUKU UTARA
130	Muhammad Habibi	Laki-laki	S1	DPW Kepulauan Riau Partai Nasdem	KOTA BATAM	KEPULAUAN RIAU
131	Arif Bayu Praminto, S.H.	Laki-laki	S1	DPP PKS	KAB. BEKASI	JAWA BARAT
132	Agus Sudarto	Laki-laki	S1	DPP PAN	KAB. BEKASI	JAWA BARAT
133	Zainal Rachman, SH MH	Laki-laki	S2	DPW PAN Lampung	-	-
134	Edius Pratama, S.H.	Laki-laki	S1	DPP PKS	KAB. BOGOR	JAWA BARAT
135	Ruli Margianto, S. H., M. H.	Laki-laki	S2	DPP PKS	KOTA TANGERANG SELATAN	BANTEN

136	Priyono	Laki-laki	S1	DPP PAN	KOTA JAKARTA SELATAN	D.K.I. JAKARTA
137	Ismail Alim, S.H	Laki-laki	S1	DPP PAN	KOTA BEKASI	JAWA BARAT
138	Bansawan, S.H.	Laki-laki	S1	DPP	KAB.LAHAT	SUMATERA SELATAN
139	Seta Mahardika Caesar Wahyuono, S.H., M.H.	Laki-laki	S2	DPP PKS	-	-
140	Ricky Meliak, S.H., CPM.	Laki-laki	S1	DPP Partai Nasdem	KOTA JAKARTA PUSAT	D.K.I. JAKARTA
141	Mustandar, SH., MH.	Laki-laki	S2	DPW Sulawesi Selatan PAN	KOTA MAKASSAR	SULAWESI SELATAN
142	Budi Santoso, S.H.,M.H., CCL, CTL	Laki-laki	S2	DPP PAN	KOTA JAKARTA UTARA	D.K.I. JAKARTA
143	Sharon S. Simamora	Laki-laki	S1	DPP	KOTA BANDUNG	JAWA BARAT
144	Turedo Sitindaon, S.H.	Laki-laki	S1	DPP DEMOKRAT DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA PUSAT	D.K.I. JAKARTA
145	Surya Iman Wahyudi, S.H., MH	Laki-laki	S2	Wasekjen PAN	-	-
146	DARUSSALAM, SH	Laki-laki	S1	DPW PAN Sumatera Selatan	KOTA PALEMBANG	SUMATERA SELATAN
147	Dicky patadjenu, S.H., M.H., C.Md.	Laki-laki	S3	DPD Sulawesi Tengah Demokrat	-	-
148	Rahmawati Sukri, S.H., M.H	Perempuan	S2	DPD Sulawesi Tengah	-	-
149	Ali Wiji Edhy, S.H	Laki-laki	S1	DPP PKS	KOTA JAKARTA SELATAN	D.K.I. JAKARTA
150	Arfi Bambani Amri, S.H., M.P.A.	Laki-laki	S2	DPP Partai Nasdem	KOTA JAKARTA PUSAT	D.K.I. JAKARTA
151	Erwinsyah, S.H., LL.M.	Laki-laki	S2	DPP	KOTA JAKARTA PUSAT	D.K.I. JAKARTA
152	Ardyan, S.H., M.H.	Laki-laki	S2	DPP Partai Nasdem	KOTA JAKARTA PUSAT	D.K.I. JAKARTA
153	Hafizh Nur Rahman, S.H.	Laki-laki	S1	DPP NASDEM	KOTA JAKARTA PUSAT	D.K.I. JAKARTA
154	Mulki	Laki-laki	S1	DPP PAN	KOTA JAKARTA PUSAT	D.K.I. JAKARTA
155	Joko Fitriyan Prabowo, S.H. M.Kn.	Laki-laki	S2	DPP PKS	KOTA DEPOK	JAWA BARAT
156	Agis Gamalutvianda, S.H.	Perempuan	S1	Nasdem	KAB. SUMEDANG	JAWA BARAT
157	Teuku Fauzi Al Fansuri, S.H.I.	Laki-laki	S1	DPW	KOTA BANDA ACEH	ACEH
158	T. Jessica Novia Hermanto, S.H.	Perempuan	S1	DPP	KOTA JAKARTA PUSAT	D.K.I. JAKARTA
159	RD Susanti Komalasari, S.H.	Perempuan	S1	PAN	KAB. BANDUNG BARAT	JAWA BARAT
160	Suhendi, S.H., M.H.	Laki-laki	S2	PAN	KOTA JAKARTA PUSAT	D.K.I. JAKARTA
161	Efrem Fangohoy	Laki-laki	S1	Nasdem	KAB. MERAUKE	PAPUA SELATAN